Tahun 2016 Kinerja operasional perusahaan dalam kondisi di bawah standar terutama produktivitas dan pencapaian mutu produk, Untuk memperbaiki kondisi tersebut perusahaan mencanangkan program kerja yang didasarkan atas baku teknis dan juga pengawalan implementasi yang kuat dan Program kerja tersebut harus dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang besar dengan upaya perbaikan peningkatan produktivitas, pendapatan, efisiensi, inovasi dan optimalisasi asset.

Dengan kondisi finansial lemah, perusahaan membutuhkan dukungan dana eksternal. Oleh karena itu disusun program kerja akselerasi dengan dana pinjaman eksternal dan memiliki sasaran target waktu yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara operasional, kepatuhan maupun finansial.

Komitmen disemua unsur perusahaan harus diterapkan dalam menjalankan program-program perbaikan serta Akselerasi Kinerja dan Setiap pimpinan berkewajiban untuk meneruskan pesan ini kepada seluruh unsur pimpinan dan karyawan di lingkungannya.

Year 2016 Operational performance of the company under substandard conditions primarily productivity and product quality achievement, To improve the condition of the company launched a work program based on technical standards and also a strong implementation escort and the work program must be able to cause huge financial consequences with improvement efforts Increased productivity, revenue, efficiency, innovation and asset optimization.

With weak financial conditions, companies need external funding support. Therefore, a program of accelerated work with external borrowing funds has a clear target time target, so it can be accounted for operatively, complianceally and financially.

Commitment in all elements of the company should be implemented in running improvement programs and Acceleration Performance and Each leader is obliged to forward this message to all elements of leadership and employees in the environment.

Accelerate Started

Memulai Akselerasi Kinerja dan Merealisasikan Visi
(Start a Performance Acceleration and Realized a Vision)

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

DAFTAR ISI
Table Of Content

LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
2016

Tema Laporan Tahunan PTPN VIII 2016	i	Theme Of PTPN VIII Annual Report 2016
Sekilas PTPN VIII		PTPN VIII Highlight
Nilai luhur		Noble value
Sertifikat Tahun 2016		2016 Certification
Peta Pemasaran Internasional		International of Marketing Map
Produk PTPN VIII		PTPN VIII Products
Peristiwa penting Tahun 2016		Events Highlight
Ikhtisar Tahun 2016		Year 2016 Highlight
Ikhtisar Keuangan dan Operasional 3 tahun terakhir		Financial and Operational Highlights for the last 3 years
Rasio Keuangan		Financial Ratio
Laporan Managemen		Management Report
Laporan Pemegang Saham		Board of Commissioners Report
Laporan Direksi		Board of Director Report
Profil Perusahaan Company Profile		**Profil Perusahaan Company Profile**
Sejarah PTPN VIII		PTPN VIII History
Data Perusahaan (Nilai Luhur, Bidang Usaha,Peta Daerah Operasi, Struktur Organisasi, alamat perusahaan, Tenaga Kerja)		Data Perusahaan (Nilai Luhur, Bidang Usaha, Peta Daerah Operasi, Struktur Organisasi, alamat, Tenaga Kerja)
Profil Dewan Komisaris dan Direksi		Board of Commissioners & Director Profile

Anak Perusahaan	Subsidiary
Analisis Manajemen Perusahaan	**Analisis Manajemen Perusahaan**
Tinjaun Operasioanl	Operational Review
Tinjauan Hasil Usaha	Business Review
Kinerja Keuangan	Financial Performance
Kemampuan membayar hutang	Ability to Pay Debt and Collectabilities
Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Kebijakan Deviden	Management Policy Over Capital Structure and Deviden
Investasi Barang Modal pada tahun buku terakhir	Investasi Barang Modal pada tahun buku terakhir
Investasi, ekspansi divestasi Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang	Investasi, ekspansi divestasi Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang
Perubahan Kebijakan Akuntansi	Perubahan Kebijakan Akuntansi
Aspek Pemasaran	Marketing Aspects
Strategy Bisnis	Business Strategy
Tata Kelola Perusahaan	**Corporate Governance**
Struktur Tata Kelola Perusahaan	Corporate Governance Structure
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	Basic Implementation of Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	**Corporate Social Responsibility**
Program CSR PTPN VIII	CSR PTPN VII Programs
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	Partnerships and Community Development Program
Informasi Tambahan	**Additional Information**
a.	a.
Laporan Keuangan Konsolidasian PTPN VIII	PTPN VIII Consolidated Financial Staement

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Sekilas PTPN VIII
PTPN VIII Highlight

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII merupakan perkebunan milik negara yang bergerak di sektor Agribisnis dan Agroindustri dengan kegiatan usaha meliputi budidaya, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan penjualan komoditas perkebunan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan luas Areal 113.958 ha, terdiri dari :

Provinsi : 2 (Jawa Barat& Banten)
Kota/Kabupaten : 14 Kota/Kabupaten
Luas Areal : 113.958 Ha
Komoditi : Teh, Karet, Kelapa Sawit, Aneka Tanaman
Kebun : 41 Unit

Areal Konsesi :
- Teh : 24.399 Ha
- Karet : 24.405 Ha
- Kelapa Sawit : 20.449 Ha
- Hortikultura : 9.327 Ha
- Kina : 691 Ha
- Areal Lainnya : 34.687Ha

Unit Industri Hilir
- Industri Hilir Teh (IHT)
- Agrowisata
- Hortikultura

Tenaga Kerja
- Karyawan Tetap : 15,503
- Karyawan Tidak Tetap : 19,805

Sebagai anak perusahaan Holding Perkebunan PT Perkebunan Nusantara VIII menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan kepemilikan pemegang saham 90% PTPN III (Persero) dan 10% Negara Republik Indonesia

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII is a state-owned plantation engaged in Agribusiness and Agro-industry sector with business activities covering cultivation, land preparation, nursery, planting, maintenance, processing and sale of plantation commodities, and optimizing the utilization of the Company's resources with an area of 113,958 ha , consists of :

Province : 2 (West Java & Banten)
City / District : 14 Cities / Regencies
Area : 113.958 Ha
Commodity : Tea, Rubber, Coconut Palm, Various Plants
Plantation : 41 Units

Concession area:
- Tea : 24,399 Ha
- Rubber : 24,405 Ha
- Palm Oil : 20,449 Ha
- Horticulture : 9,327 Ha
- Quinine : 691 Ha
- Other Area : 34.687Ha

Downstream Industry Unit
- Downstream Tea Industry (IHT)
- Agrotourism
- Horticulture

Labor
- Permanent Employee: 15,503
- Non Permanent Employee: 19,805

As a subsidiary of Holding Perkebunan PT Perkebunan Nusantara VIII is a Limited Liability Company fully subject to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, with 90% ownership of PTPN III (Persero) and 10% of the Republic of Indonesia

Nilai Luhur
PT Perkebunan Nusantara VIII

Nilai-nilai luhur merupakan landasan insan PTPN VIII dalam melakukan interaksi dengan pihak-pihak didalam maupun di luar perusahaan sebagai inspirasi pendorong dan acuan bagi setiap insan PTPN VIII dalam berpola pikir dan berpola tindak untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan.

Nilai-nilai luhur itu tertanam dalam budaya perusahaan yaitu WALAGRI JATI UTAMA yang berarti :

WALAGRI berasal dari bahasa Sunda yang mengandung arti sehat lahir bathin, penuh kesempurnaan, dan penuh semangat.

JATI, memiliki makna jati diri atau kepribadian yang unggul.

UTAMA, mengandung makna nomor satu, fokus dan pusat perhatian.

Serta Menanamkan Sikap JUJUR, TULUS dan IKHLAS sebagai nilai-nilai yang menyatukan hati setiap insan PTPN VIII untuk berkomitmen menumbuhkembangkan budaya kerja yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kepentingan perusahaan sebagai Corporate Culture yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan agar tanaman tegak berseri-seri dan berproduksi optimal

Noble Value
PT Perkebunan Nusantara VIII

The noble values are the foundation of the human being of PTPN VIII in interaction with the parties inside and outside the company as inspiration of the drivers and references for every human being PTPN VIII in patterned mind and patterned acts to realize the management of the company.

These noble values are embedded in the corporate culture of WALAGRI JATI UTAMA which means:

WALAGRI comes from the Sundanese language which means healthy born in spirit, full of perfection, and full of spirit.

JATI , has a sense of identity or a superior personality.

UTAMA (Main), contains the number one meaning, focus and center of attention.

As well as inculcate JUJUR (honest), TULUS (sincre) and IKHLAS (attitudes as the values that unite the hearts of every human PTPN VIII to commit to develop a work culture that is more dignified and oriented to corporate interests as Corporate Culture implemented by all employees to plant upright and optimum productionerta menanamkan sikap Jujur

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Sertifikasi dan Penghargaan
Certificate and Awards

The Rainforest Alliance adalah sebuah lembaga sertifikasi dunia yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menjamin penghidupan yang berkelan jutan dengan mengubah praktek pemanfaatan lahan, praktek bisnis dan perilaku konsumen.

The Rainforest Alliance adalah sebuah lembaga sertifikasi dunia yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menjamin penghidupan yang berkelan jutan dengan mengubah praktek pemanfaatan lahan, praktek bisnis dan perilaku konsumen.

UTZ Certified adalah lembaga standarisasi dunia untuk kopi, kakao dan teh serta pertanian dan sumber rooibos. UTZ CERTIFIED yang merupakan kumpulan Code of Conduct dapat diadopsi oleh pemohon sertifikasi dengan memenuhi kriteria major dan minor. Kategori major harus terpenuhi 100% sementara kategori minor harus terpenuhi 95%. Setelah dilakukan sertifikasi UTZ CERTIFIED, produsen akan mendapatkan beberapa manfaat

UTZ Certified adalah lembaga standarisasi dunia untuk kopi, kakao dan teh serta pertanian dan sumber rooibos. UTZ CERTIFIED yang merupakan kumpulan Code of Conduct dapat diadopsi oleh pemohon sertifikasi dengan memenuhi kriteria major dan minor. Kategori major harus terpenuhi 100% sementara kategori minor harus terpenuhi 95%. Setelah dilakukan sertifikasi UTZ CERTIFIED, produsen akan mendapatkan beberapa manfaat

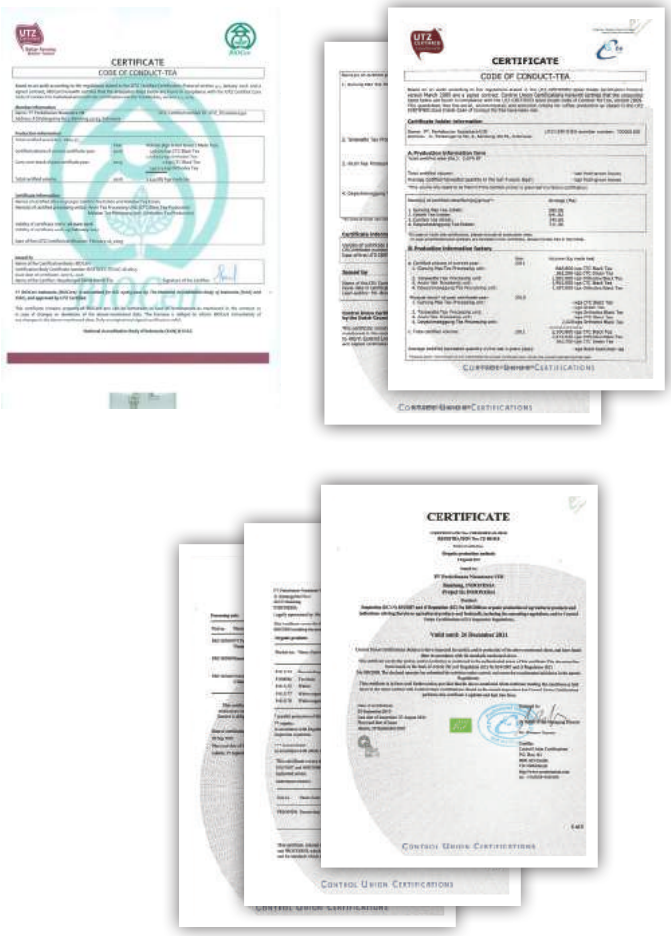

Ethical Tea Partnership

The Ethical Tea Partnership adalah keanggotaan organisasi nirlaba yang telah bekerja sama dengan produsen teh dan perusahaan teh untuk meningkatkan keberlanjutan industri teh.

The Ethical Tea Partnership adalah keanggotaan organisasi nirlaba yang telah bekerja sama dengan produsen teh dan perusahaan teh untuk meningkatkan keberlanjutan industri teh.

ISO 22000:2005

Organisasi Internasional untuk Standardisasi adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai organisasi standar nasional.

Organisasi Internasional untuk Standardisasi adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai organisasi standar nasional.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.

Performance Rating Program (PROPER) one of the Ministry of Environment's efforts to encourage compliance of companies in environmental management through information instrumens.

Teh Wafini
Pengajian Bersama MT AzZahra & Shafira
BANDUNG MARKETERS
CHAMPION 2013

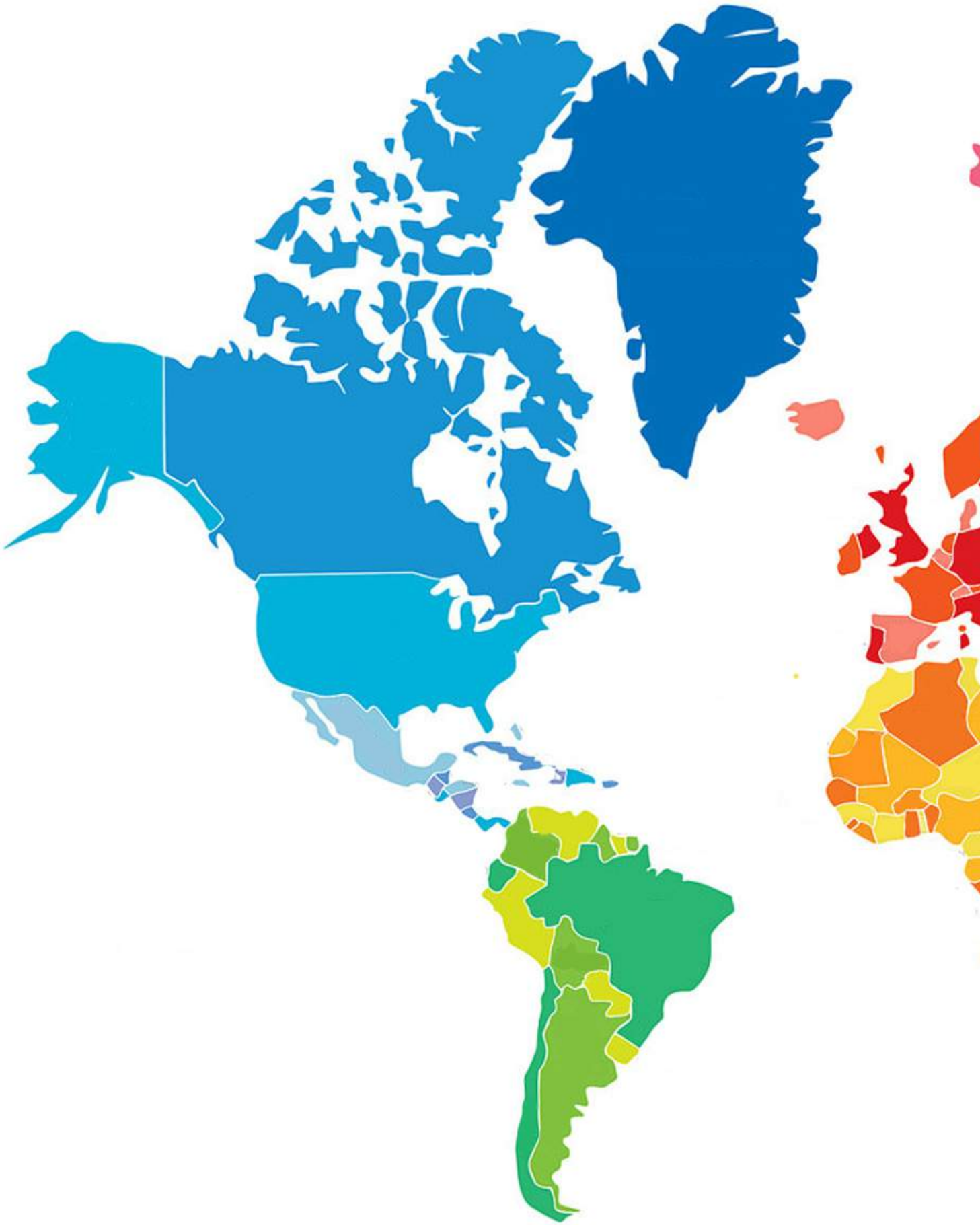

Peta Pemasaran PTPN VIII

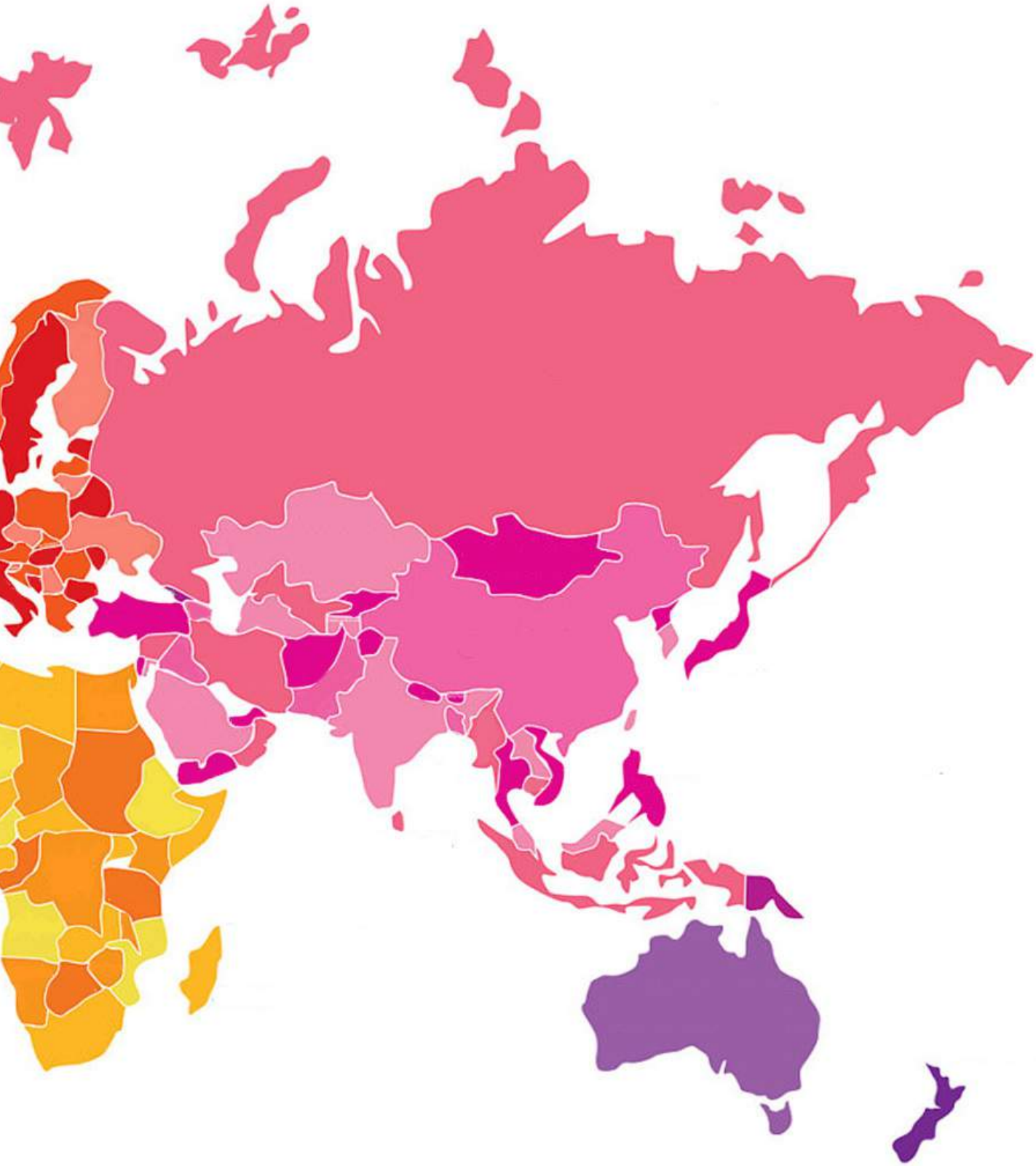

PRODUCE OF INDONESIA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
Gross: 60.7 Kg
Nett: 60 Kg
No:12
teh walini
Saran Penya

Produk PTPN VIII

PTPN VIII Product

1 Teh

A. Teh Hitam
   I. Orthodox (New Tea, Main Grade)
   II. CTC (Curling Tearing Cutting) Main Grade (BP, PF 1, PD, D1, FANN, D 2, FNGS-2).
   III. Blending Tea / STD
B. Teh Hijau
C. Teh Putih

2 Karet

Produksi karet yang dipasarkan dalam negeri adalah 80% sedangkan sisanya sebesar 20% di ekspor ke Asia, Eropa dan Amerika, dengan Jenis karet yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ribbed Smoked Sheets (RSS)
- Crumb Rubber (CR/SIR)
- Thin Pale Crepe (TPC)

3 Kelapa Sawit

Produk Kelapa Sawit PTPN VIII dalam bentuk CPO (Minyak Sawit) dan Kernel (Inti Sawit) dipasarkan untuk dalam negeri. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Perkebunan Nusantara VIII mempunyai 2 unit yaitu PKS Kertajaya dan PKS II Cikasungka, yang menampung 6 Kebun Kelapa Sawit .

4 Hortikultura

Pengembangkan Buah-buahan dimulai sejak sejak tahun 2012, budidaya buah yang dikembangkan sebanyak 12 jenis dengan 6 jenis buah unggulan (yaitu, jeruk, pisang, alpukat, nanas pepaya dan durian). Selain itu dikembangkan pula adalah komoditi kopi dan kekayuan.

5 Industri Hilir Teh

Industri Hilir Teh PTPN VIII memproduksi teh kemasan dalam bentuk teh diseduh teh dan teh kantong. Dengan jangkauan pasar di seluruh Indonesia dengan merek Walini dan Goalpara. PTPN VIII juga memiliki kemasan teh ritel seperti teh dengan merek Gunung Mas, sebagai penunjang untuk memenuhi pasar domestik

6 Agrowisata

PTPN VIII yang berada diwilayah pegunungan Jawa Barat memiliki pemandangan eksotis. kebun teh di Kabupaten Bandung, Bogor (Puncak), dan Kabupaten Bandung Barat, menjadi destinasi pariwisata andalan Jawa Barat, selain itu Perkebunan Karet dan sawit sekarang ini mulai dilirik untuk pariwisata petualangan.

1 Tea

A. Black Tea
   I. Orthodox (New Tea, Main Grade)
   II. CTC (Curling Tearing Cutting) Main Grade (BP, PF 1, PD, D1, FANN, D 2, FNGS-2).
   III. Blending Tea / STD
B. Green Tea
C. White Tea.

2 Rubber

Domestic rubber production is 80% while the remaining 20% is exported to Asia, Europe and America, with rubber types produced as follows:

- Ribbed Smoked Sheets (RSS)
- Crumb Rubber (CR/SIR)
- Thin Pale Crepe (TPC).

3 Palm Oil

PTPN VIII Palm Oil Products in the form of CPO (Palm Oil) and Kernel (Inti Sawit) are marketed domestically. Palm Oil Factory (PKS) PT Perkebunan Nusantara VIII has 2 units of PKS Kertajaya and PKS II Cikasungka, which holds 6 Palm Oil Plantation.

4 Horticulture

The development of fruit plants started since 2012, fruit cultivation developed as many as 12 species with 6 types of fruit seed (ie, oranges, bananas, avocado, pineapple, papaya and durian). PTPN VIII Also developed coffee and timber commodities.

5 Downstream Industry Unit

Downstream Industry Tea PTPN VIII manufactures packaged tea in the form of tea brewed tea and tea bags. With market reach across Indonesia with brands Walini and Goalpara. PTPN VIII also has retail tea packaging such as tea under the brand name of Gunung Mas, as supporting to fulfill domestic market.

6 Agro tourism

PTPN VIII located in the mountainous region of West Java has exotic scenery. Tea garden in Bandung, Bogor (Puncak), and Bandung Barat Regency, become the mainstay of tourism destinations of West Java, besides Rubber and Palm oil Plantation is now starting ogled for adventure tourism.

Peristiwa Penting Tahun 2016

Peristiwa Penting Tahun 2016

Acara Halal Bi Halal lingkup Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara VIII tanggal 10 Juli 2016 yang dihadiri oleh seluruh Direksi, Pinisepuh dan seluruh Karyawan kantor pusat ini berlangsung sederhana namun Khidmat.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holdin
around di PTPN VIII, di Kantor Pusat PTPN VIII Jalan Sindar
dan Jajaran Direksi PTPN VIII beserta para pemengku Jabata

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN VIII, kembali menyalurkan Dana Pinjaman bagi UMKM, kali ini Program kerjasama dengan kelomok tani Budidaya Paprika di Gunung Haju, Kab. Bandung Barat

Apel Siaga Satuan Petugas Serikat Pekerja Perkebunan (SATGAS SP-BUN) Wilayah Sukabumi, kegiatan ini merupakan salah satu kesiapan dan dukungan SATGAS BUN dalam menghadapi Situasi keamanan di kebun.

Kunjungan kerja Pembeli OTSUKA Jepang ke Kebun Cisaruni

Benchmark Pengelolaan Tanaman Sawit dengan PT Perkebunan Nusantara IV Jambi

PT Perke
besar tu
Nampa
VIII.

g Perkebunan, memberikan materi Sharing Session tentang *Corporate Turn-*
gsirna Bandung. Hadir dalam Sharing Session tersebut seluruh Dewan Komisaris
Puncak PTPN VIII.

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Kebun Parakan salak tanggal 20 April 2016 dalam rangka pengembangan Buah Nusantara

ain Storming & Sharing Session Manajemen
Perkebunan Nusantara VIII dengan para
kar perkebunan dan Pensiunan PTPN VIII,
nggal 28 juli 2016 sebagai upaya per-
ikan kinerja PTPN VIII dengan berbagi ilmu
n pengalaman serta silaturahmi

Sharing Knowlaedge Sadap Karet oleh General Manajer QC

Sharing Knowledge Panen Sawit & Norma kastrasi di Kebun Kertajaya

Sharing Direksi, Manajer dan Balai Penelitian Teh tentang Pengelo-laan Hama dan Panen

Sharing knowledge Bididaya Buah-buahan dengan Konsultan Buah

Sharing Knowledge Bidang Admin-istrasi PT Perkebun Nusantara VIII Oleh Direktur Komersil dan Kepala Bagian Keuangan

Inhouse Workshop Manajemen Pemeli-haraan, Panen dan Pengolahan kelapa saw-it dikebun Cikasungka tanggal 17 oktober 2016 dengan Narasumber Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Holding Perkebu-nan, Elia Massa Manik dan Direktur Utama PTPN VIII, Bambang Murtioso dengan peserta para Manajer, Kepala Tanaman, Maskep, kepala Afdeling, staff dan Mandor Seluruh Kebun PTPN VIII komoditas Sawit.

Penandatanganan Kerjasama (MoU) antara PTPN VIII dengan beberapa Perusahaan lokal dan luar negeri dalam rangka Optimalisasi Aset dan pemanfaatan Sumber Daya Potensi-al di Wilayah PTPN VIII.

bunan Nusantara VIII sebagai perkebunan Buah skala
ut serta dalam Festival Fruits Indonesia tahun 2016.
President Joko Widodo Mengunjungi Stand buah PTPN

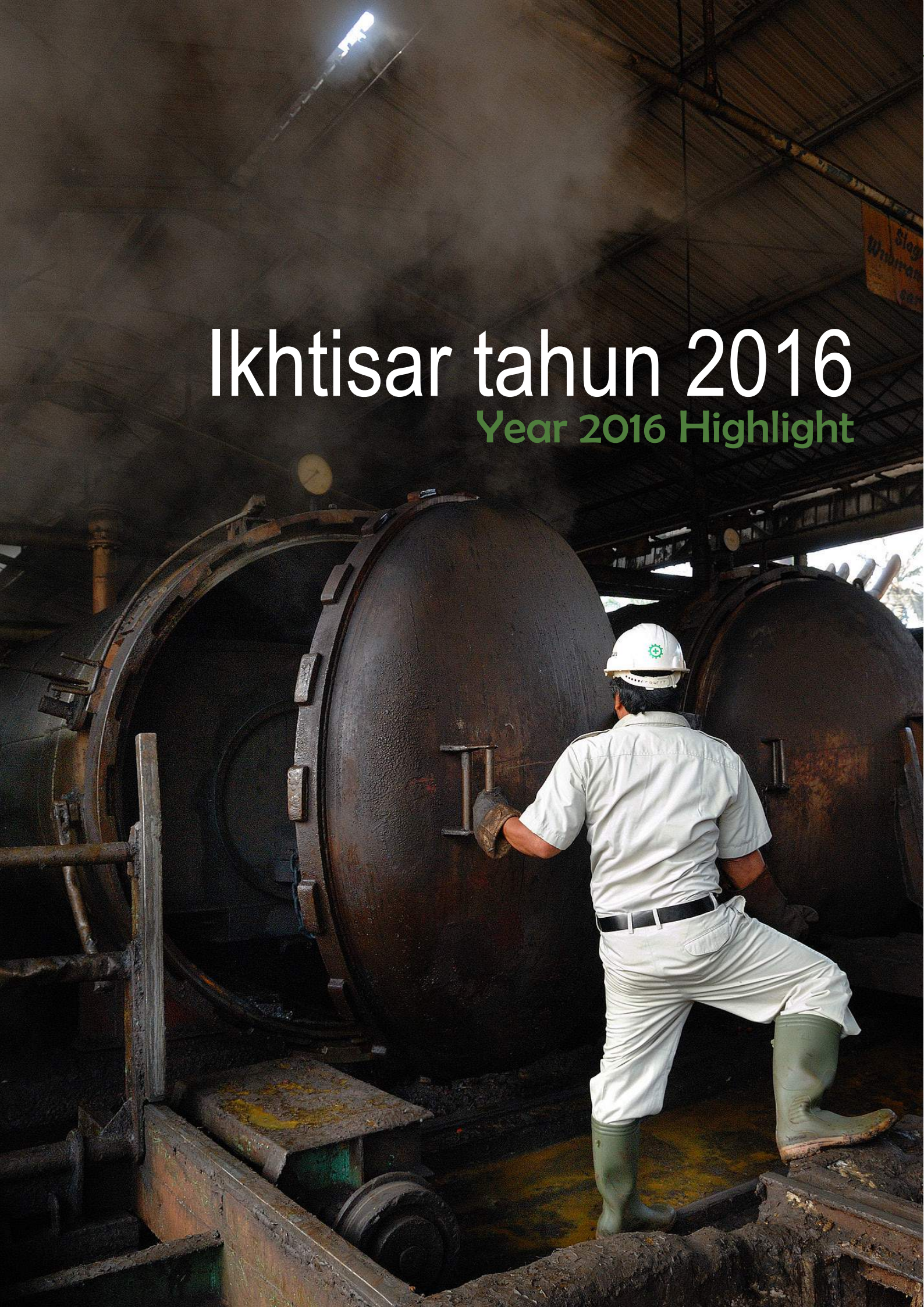

Ikhtisar tahun 2016

Year 2016 Highlight

Ikhtisar Kinerja Keuangan
Finance Highlight

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	Tahun yang berakhir 31 Desember Year Ended December 31,			*Consolidate Statement of Comprehensive Income*
	2016	2015	2014	
Pendapatan	1.320.413	1.515.497	1.784.448	Income
Beban Pokok Penjualan	1.070.663	1.140.405	1.163.228	Cost of Good Sold
Laba Kotor	249.749	375.092	621.221	Gross Profit
Laba Usaha	(180.075)	(168.428)	22.029	Operating Profit
Laba Sebelum Pajak	(404.652)	(257.794)	28.121	Income Before Tax
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(376.811)	(292.023)	6.960	Income (Loss) for the years
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				income (Loss) for the year attribute to :
• Pemilik Entitas Induk	(376.860)	(292.111)	6.909	• Owner of Parent Entity
• Kepentingan Non Pengendali	(49)	(88)	(52)	• Non controlling Interest
Laba (Rugi) Komprehensif	(472.979)	5.016.898	6.960	Comprehensif Income (Loss)
Laba (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				Comprehensif Income (Loss) attribute to :
• Pemilik Entitas Induk	(473.029)	5.016.200	6.909	• Owner of Parent Entity
• Kepentingan Non Pengendali	(49)	(698)	(52)	• Non controlling Interest
Laba Bersih Per Saham				Earning per Share

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember Year Ended December 31,			Consolidated Statement of Financial Position (in Million Rupiah)
	2016	2015	2014	
Aset	9.353.452	9.219.588	3.699.117	• Assets
Liabilitas	4.221.017	3.451.138	2.947.561	Liabilities
Ekuitas	5.132.434	5.768.450	751.557	Equity
Modal Kerja Bersih (Aset Lancar - Kewajiban Lancar)	(490.490)	-186.271	-206.688	• Net Capital (Current Assets - Current Liabilities)
Investasi Pada Entitas Asosiasi	53.453	49.290	48.775	Investmen on Association Entities

Rasio Keuangan Konsolidasian	Tahun yang berakhir 31 Desember Year Ended December 31,			Consolidated Financial Ratio
	2016	2015	2014	
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset (ROA) (%)	(4,03)	-3,17	0,19	Income Ratio to Total Asssets (ROA) (%)
Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) (%)	(7,89)	-5,78	17,93	Income Ratio to Equities (ROE) (%)
Rasio Laba terhadap Pendapatan (Marjin Usaha) (%)	(28,54)	-19,27	0,39	Income Ratio to Profit (Operating Margin) (%)
Rasio Lancar (%)	61,76	76,45	68,55	Current Ratio (%)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	82,24	59,83	392,19	Liabilities Ratio to Equities (%)
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%)	45,13	37,43	79,68	Liabilities Ratio to Total Assets (%)

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Pendapatan (Rp Miliar)
Income (Million Rp)

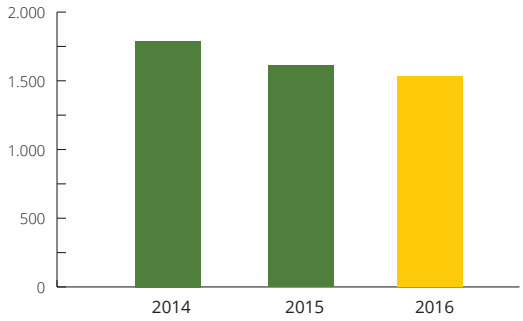

Beban Pokok Penjualan (Rp Miliar)
Cost Of Goods Sold (Million Rp)

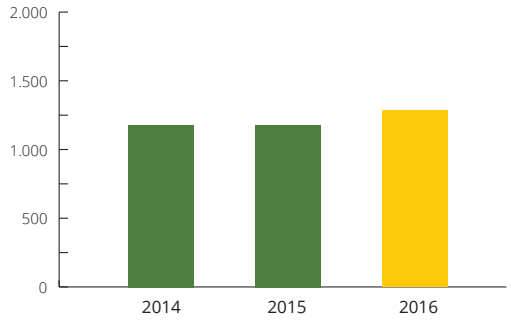

Laba Kotor (Rp Miliar)
Gross Profit (Million Rp)

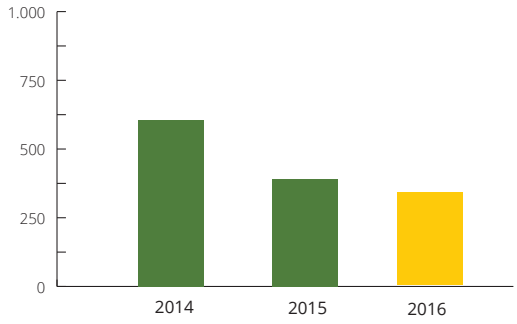

Laba Sebelum Pajak (Rp Miliar)
Income Before Income Tax (Million Rp)

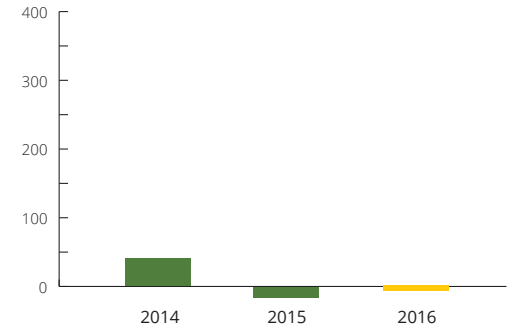

Laba Tahun Berjalan (Rp Miliar)
Income For the Years (Million Rp)

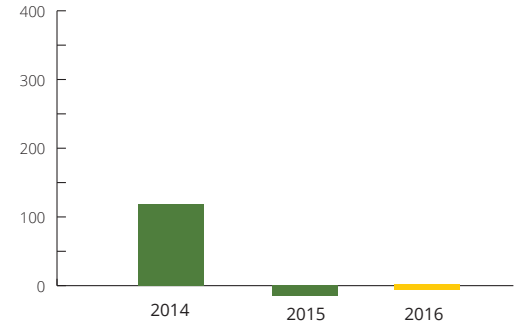

Aset (Rp Miliar)
Assets (Million Rp)

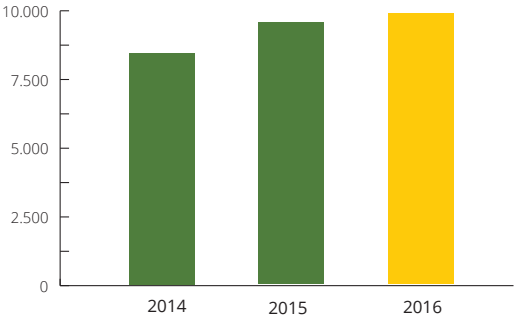

Liabilitas (Rp Miliar)
Liabilities (Million Rp)

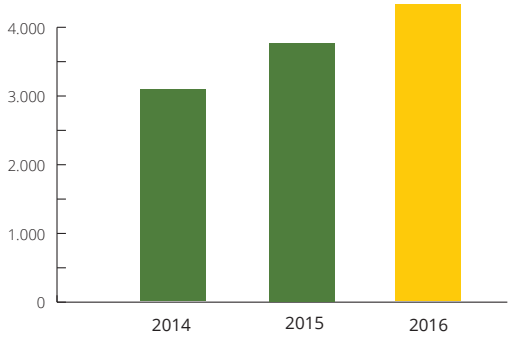

Ekuitas (Rp Miliar)
Equity (Million Rp)

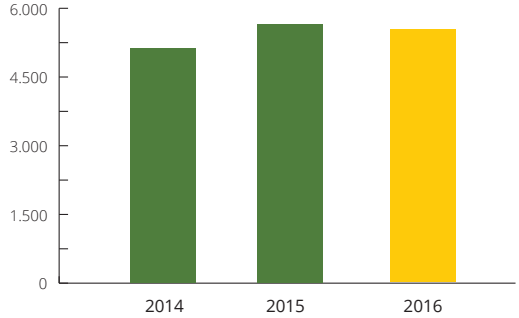

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Highlight

Volume Produksi (Ton)	Tahun yang berakhir 31 Desember Year Ended December 31			Production Volume (Ton)
	2016	2015	2014	
Teh				Tea
Bulk	30.173	25.595	37.624	Bulk
Hilir	1.251	1.010	2.320	Downstream
Karet	17.345	15.794	17.777	Rubber
Kelapa Sawit				Palm Oil
Minyak	53.406	65.222	58.609	Oil
Inti	6.789	10.486	9.093	Kernel
Kina	-	184	115	Quinine
Buah-buahan				Fruit
Pisang	3.819	4.295	1.669	Banana
Pepaya	0	243	470	Papaya
Nanas	0	23	34	Pineaple

Produktivitas (Kg/Ha)	Tahun yang berakhir 31 Desember Year Ended December 31			Productivity (Kg/Ha)
	2016	2015	2014	
Teh	1.261	1.938	1.662	Tea
Karet	756	911	1.124	Bulk
Kelapa Sawit				Downstream
Tandah Buah Segar (TBS)	14.026	13.612	12.919	Rubber
Minyak	3.124	3.045	2.721	Palm Oil
Inti	476	471	483	Oil

Volume Penjualan (Ton)	Tahun yang berakhir 31 Desember			Volume Penjualan (Ton)
	2016	2015	2014	
Teh				Tea
Bulk	24.846	27.819	35.726	Bulk
Hilir	1.208	1.235	2.017	Downstream
Karet	16.081	15.688	18.205	Rubber
Kelapa Sawit				Palm Oil
Minyak	49.750	63.875	58.825	Oil
Inti	6.830	10.100	8.883	Kernel
Kina		188	135	Quinine
Buah-buahan				Fruit
Pisang	2.810	3.483	1.245	Banana
Pepaya	0	94	453	Papaya
Nanas	0	9	25	Pineaple

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Volume Produksi Teh Bulk (Ton)

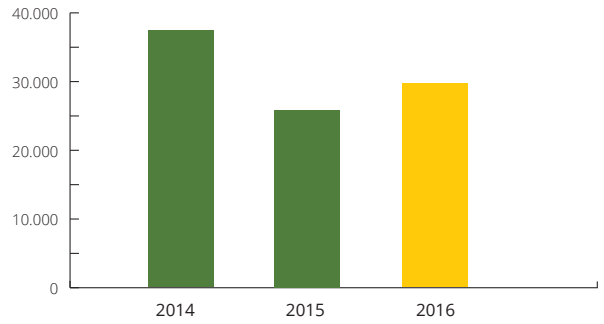

Volume Produksi Teh Hilir (Ton)

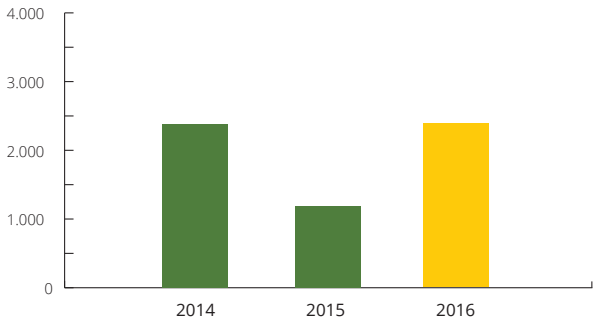

Volume Produksi Karet (Ton)

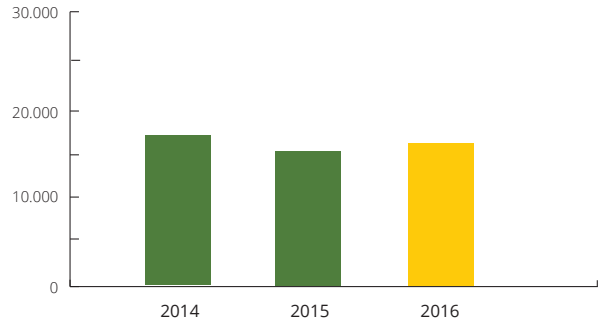

Volume Produksi Minyak Sawit (Ton)

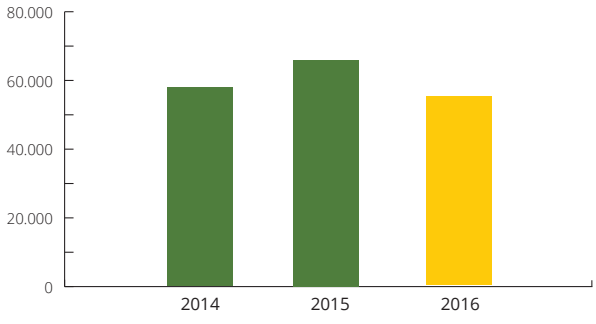

Volume Produksi Inti Sawit (Ton)

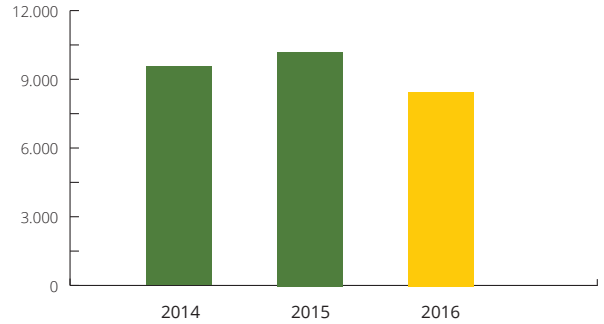

Volume Produksi Kina (Ton)

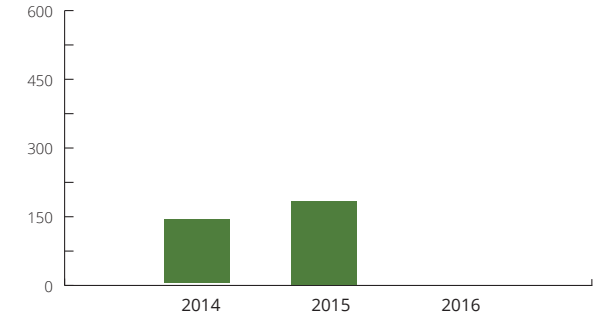

Produktivitas Teh (Kg/Ha)

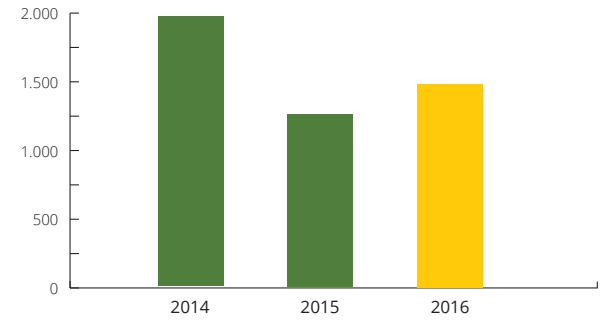

Produktivitas Karet (Kg/Ha)

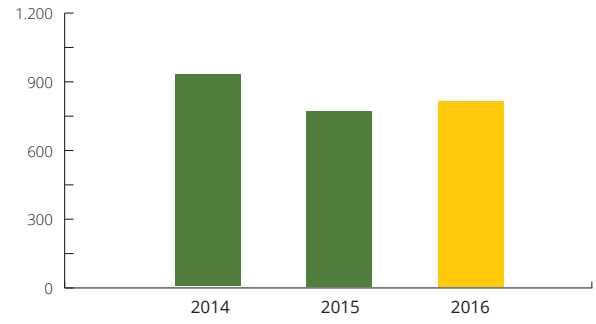

Produktivitas TBS (Kg/Ha)

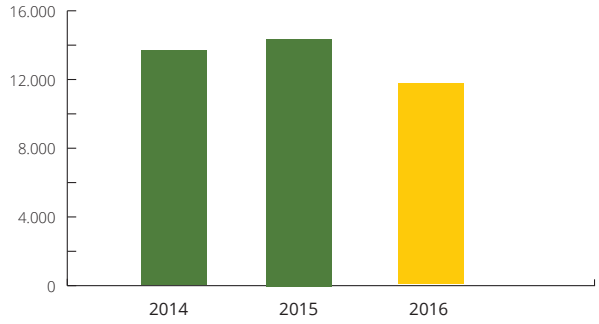

Produktivitas Kina (Kg/Ha)

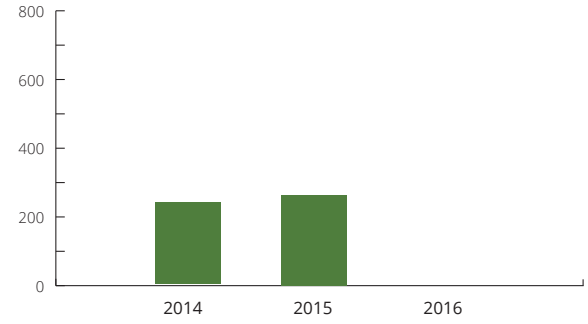

Volume Penjualan Teh Bulk (Ton)

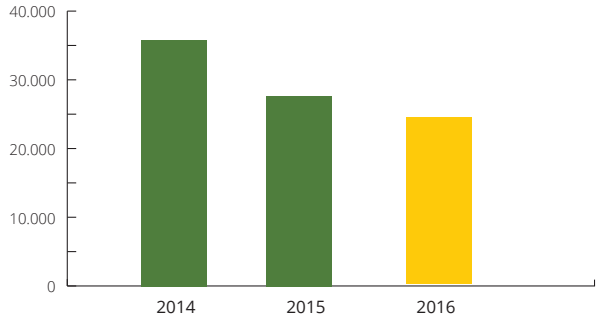

Volume Penjualan Teh Hilir (Ton)

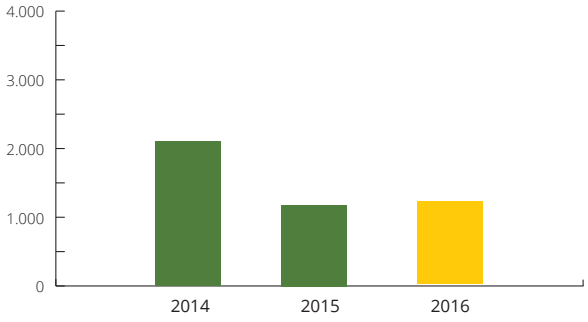

Volume Penjualan Karet (Ton)

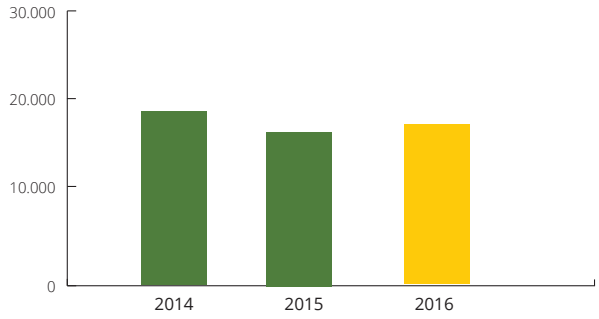

Volume Penjualan Minyak Sawit (Ton)

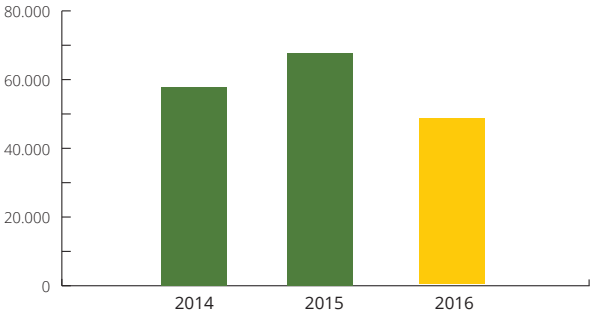

Volume Penjualan Inti Sawit (Ton)

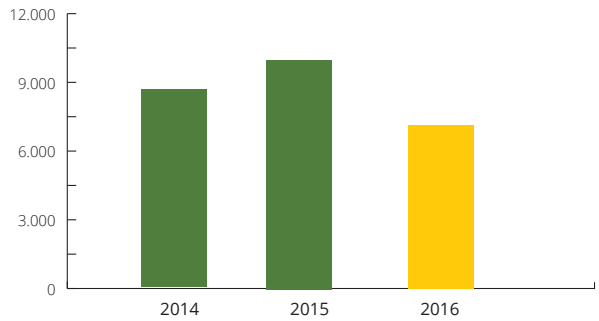

Volume Penjualan Kina (Ton)

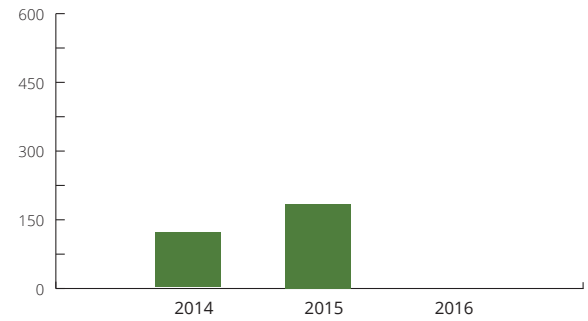

teh
walini

Laporan Manajemen

Management Report

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner Report

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan aktivitas pengawasan sepanjang tahun 2016. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kekuatan dan rahmat yang diberikan Nya, Keluarga Besar PTPN VIII telah mengarungi kegiatan selama tahun 2016 yang penuh dengan tantangan.

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Dalam tahun 2016, kinerja perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.376,86 miliar yang dalam RKAP 2016 dianggarkan rugi sebesar Rp.495,06 milyar. Hal ini karena adanya kebijakan pembenahan internal dan nilai penjualan yang dibawah target, serta akibat tidak tercapainya volume penjualan komoditi teh dan sawit. Hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan di tahun 2016 adalah adanya penurunan harga jual terutama pada komoditi teh. Terhadap penurunan kinerja tersebut, maka upaya langkah perbaikan kondisi internal perusahaan yang diikuti dengan upaya menciptakan sumber pertumbuhan baru terus diupayakan oleh Direksi.

Dengan memperhatikan kondisi pasar komoditi khususnya untuk komoditi teh, maka Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya melakukan langkah perbaikan kinerja perusahaan di tahun 2016. Dalam upaya perbaikan kondisi keuangan perusahaan, maka perusahaan telah melakukan serangkaian strategi keuangan dengan bantuan dari induk perusahaan.

Pandangan atas prospek usaha perusahaan

PTPN VIII memiliki peran yang penting dalam produksi teh nasional. Hal ini dengan memperhatikan bahwa produksi teh PTPN VIII merupakan 20% dari total produksi teh nasional di tahun 2016. PTPN VIII yang merupakan perusahaan perkebunan dengan wilayah kerjanya tersebar di Propinsi Jawa Barat dan di Propinsi Banten yang mengemban misi khusus untuk perkembangan ekonomi dan sosial-budaya di wilayah ini. Selain hal tersebut, PTPN VIII juga ditunjuk sebagai salah satu konsorsium BUMN yang mendapatkan penugasan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sesuai Peraturan Presiden No 107 tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Responsible shareholders and stakeholders,

In this good opportunity, please allow us as the Board of Commissioners to submit a report of supervisory activities throughout the year 2016. Praise the presence of God Almighty, because of the power and grace given by Him, the Family of PTPN VIII has been through the activities during 2016 which is full of challenges .

Assessment of the Board of Commissioners on the Performance of the Board of Directors

In 2016, the company's performance suffered a loss of Rp376.86 billion, which in the 2016 RKAP budgeted loss of Rp.495.06 billion. This is because of the internal revamping policy and the value of sales that are below target, as well as the non-achievement of sales volume of tea and palm commodities. Another thing that affects the company's performance in 2016 is the decline in selling prices, especially in tea commodities. Against such performance decline, efforts to improve the company's internal condition followed by efforts to create new sources of growth continue to be pursued by the Board of Directors.

Considering the condition of commodity market especially for tea commodity, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has made efforts to improve the performance of the company in 2016. In an effort to improve the company's financial condition, the company has conducted a series of financial strategies with assistance from the parent company.

A view of the business prospects of the company

PTPN VIII has an important role in national tea production. It is noticed that the production of tea PTPN VIII represents 20% of total national tea production in 2016. PTPN VIII which is a plantation company with its work area spread in West Java Province and in Banten Province which carry a special mission for economic development and socio-cultural In this region. In addition to this, PTPN VIII is also appointed as one of the SOE consortium which gets the assignment of rapid train infrastructure and facilities between Jakarta and Bandung according to Presidential Regulation No. 107 year 2015 dated October 6, 2015 on Acceleration of Infrastructure Implementation and Fast Train Facilities between Jakarta and Bandung.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Dengan berlandaskan pada nilai luhur perusahaan dalam membangun dan memajukan perusahaan, maka perusahaan akan terus berupaya memberikan nilai manfaat atas keberadaannya kepada masyarakat Jawa Barat dan Banten dan Indonesia pada umumnya.

Memperhatikan peran strategis perusahaan bagi pengembangan komoditi khususnya teh dan pengembangan wilayah operasional perusahaan, maka Dewan Komisaris memandang bahwa perusahaan akan mampu dan terus melanjutkan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Langkah-langkah yang akan dilakukan Direksi dengan dukungan seluruh insan perusahaan diharapkan membawa perubahan pada kinerja perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance

Perusahaan secara konsisten berupaya memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Implementasi GCG di perusahaan secara berkala dilakukan penilaian baik oleh penilai independen maupun secara mandiri. Dewan Komisaris memperkuat tata kelola diantaranya dengan melengkapi organ melalui pembentukan komite.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komite pendukung Dewan Komisaris meliputi Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Dewan Komisaris memandang bahwa komite yang ada telah memberikan dukungan yang baik bagi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Hasil kerja keras Komite ini diharapkan dapat membantu Dewan Komisaris yang pada gilirannya memberikan nilai manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2016, terjadi pergantian Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direksi PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016 tanggal 1 September 2016 dan No. 3.00/SKPTS/R/34/2016 tanggal 1 September 2016. Dengan surat keputusan tersebut telah diberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Pakpahan sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Sutriono Edi serta Sdr. Made Putrawan sebagai Komisaris yang selanjutnya mengangkat Sdri. Karen Tambayong sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Elen Setiadi sebagai Komisaris serta Sdr. Antonius HW Witono sebagai Komisaris Independen.

Atas nama Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan, kami mengucapkan terimakasih atas seluruh jasa dan usaha Sdr. Agus Pakpahan, Sdr. Sutiono Edi, dan Sdr. Made Putrawan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan

Based on the company's noble value in building and advancing the company, the company will continue to provide value for its existence to the people of West Java and Banten and Indonesia in general.

Taking into account the strategic role of the company for the development of commodities, especially tea and the development of the company's operational areas, the Board of Commissioners considers that the company will be able to and continue to improve its performance in the future. The steps to be undertaken by the Board of Directors with the support of all employees are expected to bring changes to the company's performance.

Implementation of Good Corporate Governance

The Company consistently strives to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG). The implementation of GCG in the company is regularly assessed by independent and independent appraisers. The Board of Commissioners strengthens governance among others by completing the organs through the establishment of committees.

Committees under the Board of Commissioners shall be responsible and collectively responsible for assisting the Board of Commissioners in exercising supervisory and advisory functions to the Board of Directors. The BoC support committee includes the Audit Committee and Risk Management Monitoring Committee. The Board of Commissioners considers that the existing committees have provided good support for the implementation of supervisory duties undertaken by the Board of Commissioners. The hard work of the Committee is expected to assist the Board of Commissioners, which in turn provides value to the company as a whole.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2016, there was a change of the Board of Commissioners in accordance with the Decree of the Minister of SOE and the Board of Directors of PTPN III (Persero) no. SK-205 / MBU / 09/2016 dated September 1, 2016 and no. 3.00 / SKPTS / R / 34/2016 dated September 1, 2016. The decree has been dismissed with respect. Agus Pakpahan as President Commissioner and Br. Sutriono Edi and Br. Made Putrawan as Commissioner who subsequently appointed Karen Tambayong as President Commissioner and Elen Setiadi as Commissioner and Antonius HW Witono as Independent Commissioner.

On behalf of the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees, we would like to express our gratitude to all of our services and efforts. Agus Pakpahan, Br. Sutiono Edi, and Br. Made Putrawan while serving as a

Nusantara VIII dan selamat bergabung serta selamat bekerja dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris yang baru.

Penutup

Sebagai penutup, kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada seluruh Direksi dan jajarannya atas upaya maksimal yang dilakukan dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Terimakasih juga kami haturkan kepada pemegang saham atas petunjuk/ arahan/ bimbingan serta dukungannya kepada manajemen PTPN VIII dalam melakukan kegiatan usaha selama tahun 2016.

Demikian pula kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), kami sampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya disertai harapan hal tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kekuatan dan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas/ pekerjaan yang diamanahkan kepada kita semua. Amin

Komisaris Utama
PT. Perkebunan Nusantara VIII

Karen Tambayong

member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VIII and welcome to join and work well in an effort to improve the company's performance to the new Board of Commissioners.

Closing

In closing, we on behalf of the Board of Commissioners would like to thank the entire Board of Directors and staff for the maximum efforts made to improve the performance of the company. We also thank the shareholders for their guidance / guidance and support to the management of PTPN VIII in conducting business activities during 2016.

Similarly, to all stakeholders, we would like to thank you for your support and cooperation along with the hope that it will continue in the future. May God Almighty always bestow His power and grace and provide ease in carrying out the task / work that is mandated to us all. Amen

President Commissioner
PT. Perkebunan Nusantara VIII

Karen Tambayong

Laporan Direksi
Director Report

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat bimbingan, ridho dan lindungannya, PT Perkebunan Nusantara VIII telah menyelesaikan kegiatan usahanya untuk periode tahun 2016.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sejak 2012 sampai dengan 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII telah melakukan berbagai hal untuk mengembangkan sumber daya dan bisnis Perusahaan. Perusahaan juga mulai merambah komoditi/ bisnis baru yaitu Aneka Buah (Hortikultura), Kopi Arabika, serta Pengembangan Industri Hilir Teh yaitu Produksi Teh Kemasan dengan Merk Walini dan Goalpara. Disamping itu, Investasi dan Pengembangan terhadap bisnis Agrowisata juga senantiasa dilakukan demi meningkatkan nilai Perusahaan serta sebagai Supporting Partner pengembangan daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Terlepas dari berbagai pengembangan dan optimalisasi tersebut, pencapaian kinerja perusahaan yang cukup menggembirakan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 belum disertai keberlanjutan yang positif di tahun-tahun berikutnya. Sejumlah faktor eksternal dan internal Perusahaan mengakibatkan kinerja Perusahaan kurang menggembirakan di tahun 2016. Meskipun manajemen telah berupaya secara maksimal dalam mengendalikan biaya dan memanfaatkan potensi di luar core bussiness, Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp 376 Miliar, menurun secara signifikan dari realisasi tahun sebelumnya yaitu laba sebesar Rp (292 Miliar.) Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesehatan perusahaan sesuai surat Keputusan (SK) Menteri BUMN RI No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dear Shareholder,

All the p praise of the presence of Allah SWT who has bestowed His mercy and grace on us all. Thanks to his guidance, ridho and protection, PT Perkebunan Nusantara VIII has completed its business activities for the period of 2016.

During the last five years, from 2012 to 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII has done various things to develop the Company's resources and business. The company also began to explore new commodities / business such as Aneka Buah (Hortikultura), Arabica Coffee, and Downstream Tea Industry Development ie Tea Packaging Production with Walini and Goalpara Brand. In addition, Investment and Development of Agro business is also always done to increase the value of the Company as well as Supporting Partner of development areas in West Java and Banten Province.

Despite these developments and optimizations, the company's exciting achievements in 2012, 2013 and 2014 have not been accompanied by positive sustainability in the following years. A number of external and internal factors caused the Company's performance to be less encouraging in 2016. Although management has put maximum effort in controlling costs and exploiting potential outside core business, the Company posted a net loss of Rp 376 billion, significantly decreasing from the previous year's realized earnings Amounting to Rp (292 Billion). Based on the above, the company's health level is based on Decree (SK) of the Minister of BUMN RI No. Kep-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 on the rating of State-Owned Enterprises Health Level in 2016 is "Less Healthy BB" 'with a score of 44.70 ..

penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2016 adalah "Kurang Sehat BB" dengan skor 44,70..

Pencapaian pendapatan Perusahaan di tahun 2016 sebesar Rp. 1.320 Miliar hanya sebesar 87% dari capaian pendapatan Perusahaan di tahun 2015 yaitu sebesar sebesar Rp. 1.515 Miliar. Dengan adanya penurunan omset selama tahun 2016, Perusahaan telah berupaya untuk mengantisipasi hal tersebut secara maksimal melalui efisiensi biaya baik pada sektor on farm maupun off farm, namun sayangnya upaya-upaya tersebut tidak dapat menutupi penurunan pencapaian pendapatan yang lebih signifikan jumlahnya.

Kondisi yang paling berdampak pada kinerja perusahaan adalah pencapaian produksi, dimana hampir seluruh komoditi tidak mencapai RKAP. Adapaun dari sisi harga jual pada umumnya terjadi tekanan harga sebagai dampak dari penurunan harga komoditi global dan adanya kualitas produk di bawah standar.

Untuk mendukung program pemasaran, diupayakan peningkatan dan konsistensi kualitas produk untuk memenuhi selera konsumen, yang dijalankan bersama dengan perbaikan internal pada bidang produksi seperti melalui penggalian produksi, pengendalian hama dan penyakit, aplikasi pemupukan sesuai standar, optimalisasi produksi baik melalui teknologi maupun inovasi, penggunaan tenaga panen sesuai potensi produksi.

Dalam upaya peningkatan kinerja korporasi, manajemen perusahaan konsisten dan berkelanjutan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan internal dan eksternal. Perbaikan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan peningkatan penjualan secara free sales, LTC dan penjualan lokal selain kepada PT KPBN, penerapan TOR penjualan secara efektif, penetrasi pasar dan pengembangan pasar baru untuk produk tertentu. Serta dilakukan upaya minimalisasi persediaan untuk membantu cash flow perusahaan.

Dari aspek pengendalian biaya telah diterbitkan kebijakan Direksi mengenai efisiensi biaya dan cutting cost disegala bidang serta dibentuk tim krisis (crisis centre) sebagai pengawal kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dilakukan antara lain dengan pembatasan aktivitas perjalanan dinas, pengurangan premi, pembatasan biaya pemeliharaan, selektifitas kegiatan lapangan serta upaya negosiasi harga yang intensif.

The achievement of the Company's revenue in 2016 is Rp. 1,320 Billion is only 87% of the Company's revenue achievement in 2015 amounting to Rp. 1.515 Billion. Given the decline in turnover during 2016, the Company has made efforts to anticipate this maximally through cost efficiency in both on farm and off farm sectors, but unfortunately these efforts can not cover the decrease in the achievement of more significant revenues.

The condition that most impacts on the performance of the company is the achievement of production, where almost all commodities do not reach RKAP. Adapaun in terms of selling price generally occurs price pressures as a result of the decline in global commodity prices and the existence of substandard product quality.

To support the marketing program, efforts are made to improve and consistency of product quality to meet consumer tastes, which are run in conjunction with internal improvements in production such as through production excavation, pest and disease control, standard application of fertilizer, production optimization through technology and innovation, Harvest according to production potential.

In an effort to improve corporate performance, corporate management is consistent and sustainable to carry out internal and external improvement measures. Improvements in marketing are accomplished by increased sales of free sales, LTC and local sales in addition to PT KPBN, effective implementation of TOR sales, market penetration and development of new markets for specific products. And done inventory minimization efforts to help the company's cash flow.

From the aspect of cost control, the Board of Directors has issued a policy on cost efficiency and cutting cost in all fields as well as established crisis team as the policy guard. Policies are carried out, among others, by restrictions on official travel activities, reduction of premiums, restrictions on maintenance costs, selectivity Field activities and intensive price negotiation efforts.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Dalam hal pengendalian cash flow, dilakukan upaya seletifitas pembiayaan dengan penetapan skala prioritas termasuk investasi, reprofilling pinjaman yang akan meringankan angsuran pada beberapa tahun awal dan restrukturisasi atas hutang kepada pemerintah.

Dalam penerapan PSAK 24 (revisi 2013) perusahaan sudah membukukan dampak baik pada kewajiban imbalan kerja maupun dampak pada cadangan umum dan pendapatan (beban) komprehensif lain. Adapun beban periode berjalan sudah di akrual pada laba rugi komprehensif.

Dalam bidang manajemen korporasi, peningkatan kinerja perusahaan dilakukan melalui upaya pengelolaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG), penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, sistem manajemen kinerja berbasis Kompetensi (CBHRM), penetapan Key Performance Indicator (KPI) Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Prospek Usaha

Untuk menghadapi persaingan global yang penuh tantangan, Peningkatan produksi, penjualan, modernisasi teknologi dan hilirisasi produk masih menjadi fokus utama Perusahaan. Sementara itu, kami juga terus fokus terhadap penurunan biaya produksi, efisiensi struktur perusahaan dan peningkatan kompetensi karyawan. Melalui penguatan pondasi Perusahaan yang kami canangkan, Kami optimis dapat meningkatkan kinerja yang semakin baik.

Direksi PTPN VIII percaya bahwa melalui kerjasama tim, lingkungan kerja yang kondusif, kepemimpinan yang baik disetiap level organisasi dan kerjasama yang senantiasa "Commited To Success" Insya Allah prestasi akan diraih.

Dalam upaya meningkatkan kinerja korporasi, manajemen telah melakukan langkah-langkah perbaikan internal diantaranya perbaikan kualitas produk sesuai selera pasar. Disamping itu untuk meningkatkan pemasaran, Perusahaan akan memperbanyak penjualan melalui Free Sales untuk mendapatkan harga yang relatif lebih tinggi selain kepada PT KPBN. Untuk Industri Hilir Teh, upaya Perusahaan adalah meningkatkan distribusi dengan menambah distributor yang lebih kompetitif dan mempunyai sasaran pasar yang tepat.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2016, komposisi Direksi mengalami perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN–RI Nomor: SK-148/MBU/07/2016 dan Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: 3.00/SKPTS/R/17/2016 tanggal 15 Juli 2016, terjadi pergantian di jajaran dan komposisi Direksi PTPN VIII.

In the case of cash flow control, financing selectivity is performed with priority scale including investment, loan reprofilling that will ease the installment in the early years and debt restructuring to the government.

In the application of PSAK 24 (revised 2013), the company has recorded both the impact on the employee benefits obligation and the impact on general reserves and other comprehensive (burden) income. The current period expense is accrued in comprehensive income.

In the field of corporate management, corporate performance improvement is done through good corporate governance (GCG) management, risk management implementation based on ISO 31000, Competence based performance management system (CBHRM), determination of Key Performance Indicator (KPI) Criteria Superior Performance Assessment (KPKU).

Business prospect

To face the challenging global competition, Increasing production, sales, technological modernization and downstream of products are still the main focus of the Company. Meanwhile, we also continue to focus on reducing production costs, efficiency of corporate structure and increasing employee competency. Through the strengthening of our Company's foundation, We are optimistic to improve our performance better.

The Board of Directors of PTPN VIII believes that through teamwork, a conducive working environment, good leadership at every level of the organization and the ever-committed "Commited to Success" partnership, God's achievement will be achieved.

In an effort to improve the performance of the corporation, management has undertaken internal improvement measures such as improvement of product quality according to market taste. In addition to improving the marketing, the Company will increase sales through Free Sales to obtain a relatively higher price other than PT KPBN. For Downstream Tea, the Company's effort is to improve distribution by adding more competitive distributors and targeting the right markets.

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2016, the composition of the Board of Directors changes according to the Decree of the Minister of SOE-RI Number: SK-148 / MBU / 07/2016 and President Director of PTPN III (Persero) Number: 3.00 / SKPTS / R / 17/2016 dated July 15, 2016 , There was a change in the ranks and composition of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII.

Jajaran dan komposisi direksi PT Perkebunan Nusantara VIII periode sebelumnya adalah Sdr. Dadi Sunardi yang menjabat sebagai Direktur Utama, Sdr. Bambang Murtioso yang menjabat sebagai Direktur Produksi, Sdr. Gunara yang menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, dan Sdr. IGN Suharta Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Keuangan. Susunan tersebut kemudian digantikan oleh jajaran dan komposisi Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII yang baru, yaitu adalah Sdr. Bambang Murtioso yang menjabat sebagai Direktur Utama, Sdr. Tatang Supriatna menjabat sebagai Direktur Operasional, Sdr. Gunara yang menjabat sebagai Direktur Manajemen Aset dan Sdr. IGN Suharta Wijaya yang menjabat sebagai Direktur Komersil.

Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII berterimakasih atas seluruh jasa dan usaha kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII periode sebelumnya dalam membangun PT Perkebunan Nusantara VIII.

Penerapan Good Corporate Governance

PT Perkebunan Nusantara VIII berkomitmen untuk melaksanakan, membangun, mengevaluasi, mengembangkan serta meningkatkan proses tata kelola perusahaan guna memastikan tercapainya tujuan perusahaan sesuai prinsip - prinsip GCG dan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan perusahaan yang tangguh, unggul dan bermartabat serta mampu menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, serta meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (Accountability), tanggung jawab (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan keadilan (Fairness) pada seluruh proses dan struktur dalam pengelolaan perusahaan.

Pada tahun 2016, telah dilakukan Assessment penerapan GCG pada PTPN VIII untuk periode tahun 2014 oleh BPKP Provinsi Jawa Barat, guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan GCG, mengacu pada SK Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Berita Acara hasil assessment terhadap penerapan GCG pada PTPN VIII (Persero) untuk periode tahun 2016 yang dilakukan sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan 17 April 2017, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PTPN VIII mencapai skor 84,96 dari skor maksimal 95. Dengan capaian skor ini dan dengan pertimbangan tidak ada aspek yang berskor di bawah atau sama dengan 60, maka predikat penerapan GCG pada PTPN VIII adalah 'BAIK'.

The ranks and composition of the directors of PT Perkebunan Nusantara VIII of the previous period are Br. Dadi Sunardi who served as President Director, Bro. Bambang Murtioso who serves as Director of Production, Br. Gunara who serves as Director of Human Resources and General Affairs, and Br. IGN Suharta Wijaya who is the Finance Director. The composition was then replaced by the ranks and composition of the new PT Perkebunan Nusantara VIII Board of Directors, which is Mr. Bambang Murtioso who served as President Director, Mr. Tatang Supriatna serves as Director of Operations, Br. Gunara who served as Director of Asset Management and Br. IGN Suharta Wijaya who served as Commercial Director.

The Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII is grateful for all services and efforts to the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII for the previous period in establishing PT Perkebunan Nusantara VIII.

Implementation of Good Corporate Governance

PT Perkebunan Nusantara VIII is committed to implementing, developing, evaluating, developing and improving the corporate governance process to ensure the achievement of corporate objectives in accordance with GCG principles and in accordance with Minister of SOE Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 on the implementation of Tata Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Good corporate governance provides a strong foundation for a strong, exciting and dignified company that can respond to changing business environment and increasingly competitive business competition, and increase company value for all corporate stakeholders through the application of transparency principles (Transparency) , Accountability, Responsibility, Independence and Fairness in all processes and structures in the management of the company.

In 2016, GCG implementation on PTPN VIII for the 2014 period by BPKP of West Java Province has been carried out to obtain an overview of the conditions of GCG implementation in relation to the applicable provisions and best practices of GCG implementation, referring to the Secretary's Decree Minister of BUMN No. SK-16 /S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN.

Based on the Minutes of the assessment results on the implementation of GCG at PTPN VIII (Persero) for the period of 2016 Conducted from April 3, 2017 to April 17, 2017, it can be concluded that the condition of GCG implementation in PTPN VIII reached the score of 84.96 from a maximum score of 95. With the achievement of this score and with the consideration that no aspect is scored below or equal to 60 , Then the predicate of GCG implementation on PTPN VIII is 'GOOD'.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Penutup

Akhir kata, dapat kami sampaikan bahwa seluruh jajaran Perusahaan bertekad dan secara konsisten melakukan perbaikan-perbaikan menuju kinerja excellent, serta senantiasa bekerja keras dengan penuh rasa optimis untuk menjadikan PT Perkebunan Nusantara VIII ke depan bangkit dan menjadi lebih baik lagi.
Atas nama jajaran Direksi, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai dan dukungan segenap jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kerjanya sepanjang tahun 2015.

Demikian juga kepada seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerjasama dan
kontribusinya sehingga Perusahaan mampu beraktifitas secara normal. Tidak lupa kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah menjalankan fungsi secara baik serta arahan dan dukungan yang luas demi lancarnya kegiatan operasional Perusahaan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang dan Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Mei 2017

Bambang Murtioso
Direktur Utama

Closing

Finally, we can convey that the whole range of the Company is determined and consistently make improvements to excellent performance, and always work hard with a sense of optimism to make PT Perkebunan Nusantara VIII forward rise and become better.
On behalf of the Board of Directors, we give the highest honors to our employees and the support of all the management personnel who have demonstrated their dedication and morale throughout 2015.

as Well to all stakeholders who have provided support, cooperation and
So that the Company is able to work normally. Not forget to the Board of Commissioners and Shareholders who have performed a good function and broad guidance and support for the smooth operation of the Company. Hopefully this good cooperation can continue in the future and Allah SWT always give ease to us all in carrying out the duties mandated to us.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, May 2017

Bambang Murtioso
President Director

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan nahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2016 berikut laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab manajemen PT Perkebunan Nusantara VIII dan dijamin kebenarannya oelh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Bandung, Juli 2017

Dewan Komisaris

Karen Tambayong
Komisaris Utama
President Commissioner

Herry Suhardiyanto
Komisaris
Commissioner

Antonius HW Witono
Komisaris
Commissioner

Elen Setiadi
Komisaris
Commissioner

Direksi

Bambang Murtioso
Direktur Utama
President Director

Jhoni H. Tarigan
Direktur Operasional
Operational Director

G u n a r a
Direktur Manajemen Aset
Asset Management Director

Ryanto Wisnuardhy
Direktur Komersil
Commercial Director

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Profil PTPN VIII

PTPN VIII Profile

Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1945, perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Lama.

Di tahun 1957, terjadi nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan perkebunan swasta milik Belanda dan Asing, lalu dibentuk PPN-Baru cabang Jawa Barat.

Selanjutnya pada tahun 1960, terjadi penggabungan perusahaan dalam lingkup PPN-Lama dan PPN-Baru menjadi PPN Kesatuan Jawa Barat I, PPN Kesatuan Jawa Barat II, PPN Kesatuan Jawa Barat III, PPN Kesatuan Jawa Barat IV dan PPN Kesatuan Jawa Barat V.

Reorganisasi perusahaan dilakukan pada tahun 1963 agar pengelolaan perkebunan lebih tepat guna dengan membentuk PPN Aneka Tanaman VII, PPN Aneka Tanaman VIII, PPN Aneka Tanaman IX dan PPN Aneka Tanaman X, yang mengelola perkebunan teh dan kina, serta PPN Aneka Tanaman XI dan PPN Aneka Tanaman XII yang mengelola perkebunan karet.

Pada tahun 1968, PPN di Jawa Barat diciutkan menjadi tiga Perusahaan Negara Perkebunan (PNP).

Selanjutnya pada tahun 1971, PNP XI, PNP XII dan PNP XIII berubah status menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (Persero).

Dalam rangka restrukturisasi BUMN Perkebunan mulai 1 April 1994 sampai dengan tanggal 10 Maret 1996, pengelolaan PT Perkebunan XI, PT Perkebunan XII, dan PT Perkebunan XIII digabungkan di bawah manajemen PTP Grup Jabar.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta Notaris Harun Kamil, S.H., No.41 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan C2-8336. HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996.

Pada tahun 2014, seiring dengan dibentuknya Holding BUMN Perkebunan, dilakukan perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-10133.40.20.2014 tanggal 27 Oktober 2014.

In 1945, the Dutch government-owned plantation company was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia, which became known as the Old State Plantation Company/Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) lama.

In 1957, there was a nationalization of private plantation companies owned by the Dutch and Foreigners, and then formed a VAT-New branch of West Java.

Subsequently in 1960, there was a merger of companies in the scope of VAT-Lama and VAT-New became Vat Unity West Java I, Vat Unity West Java II, Vat Unity West Java III, VAT Unity West Java IV and Vat Unity West Java V.

The reorganization of the company was conducted in 1963 to make it easier to build VAT Aneka Tanaman VII, Variable VAT Plants VIII, Various VAT Plants IX and Various VAT Plants X, consisting of tea and quinine, and Various VAT Plants XI and Various VAT Plants XII Manage rubber plantations.

In 1968, VAT in West Java collapsed into three State Plantation Companies (PNP).

Subsequently in 1971, PNP XI, PNP XII and PNP XIII changed their status to Limited Liability Company (Persero).

In order to restructure State-Owned Plantation from April 1, 1994 to March 10, 1996, the management of PT Perkebunan XI, PT Perkebunan XII, and PT Perkebunan XIII under the management of PTP Group Jabar.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) hereinafter referred to as "Company" established under Government Regulation No.13 of 1996, as in the notarial deed of Harun Kamil, SH, No.41 dated March 11, 1996 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Through Decree C2-8336. HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996.

In 2014, in line with the establishment of BUMN Plantation Holding, the Company Limited Legal Entity changed from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) to PT Perkebunan Nusantara VIII, based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number: AHU-10133.40.20.2014 dated 27 October 2014

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Informasi Umum
General Information

Nama Perusahaan
PT Perkebunan Nusantara VIII

Nama Panggilan
PTPN VIII

Bidang Usaha
Agribisnis

Tanggal Pendirian
11 Maret 1996

Dasar Hukum Pendirian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero);
- Akta Notaris Harun Kamil, SH No.41 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK Nomor C2-8336.HT.01.01.TH.96. tanggal 8 Agustus 1996;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
- Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN No. 28 Tanggal 23 Oktober 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-10133.40.20.2014.

Akta Perubahan Terakhir
Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Yuliana Idawati, SH, Sp.N Nomor 11 tanggal 19 November 2015;

Jumlah Karyawan Tetap
Tahun 2015 = 15.503 Orang

Jumlah Aset
Per 31 Desember 2015 = Rp 9.219.587.568.406,-
(Sembilan Triliun Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah)

Modal Dasar
Rp 3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)

Company Name
PT Perkebunan Nusantara VIII

Nick Name
PTPN VIII

Business Field
Agribusiness

Date Of Established
11 March 1996

Basic Law of established
- Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 13 of 1996 on the merger of the Company (Persero) PT Perkebunan XI, the Company (Persero) PT Perkebunan XII, and the Company (Persero) PT Perkebunan XIII, became PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero);
- ANotarial deed of Harun Kamil, SH No.41 dated March 11, 1996 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree Number C2-8336.HT.01.01.TH.96. Dated 8 August 1996;
- Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 72 Year 2014 dated September 17, 2014 Regarding the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia Into Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
- Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN. Number 28 On 23 October 2014 and has been ratified by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-10133.40.20.2014.

Final Amendment Deed
Notarial deed of Harun Kamil, SH Number 41 dated March 11, 1996 which has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 11 dated November 19, 2015 of Yuliana Idawati, SH, Sp.N;

Number of Permanent Employees
Years of 2016 = 15.503 People

Total Assets
As of December 31, 2015 = Rp 9,219,587,568,406, -
(Nine Trillion Two Hundred Nineteen Billion Five Hundred Eighty Seven Million Five Hundred Sixty Eighty Four Four Hundred Six Rupiah)

Capital
Rp 3.500.000.000.000,- (Three Trillion Five Hundred Billion Rupiah)

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VIII atau disingkat PTPN VIII awalnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH No.41 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK Nomor C2-8336. HT.01.01.TH.96. tanggal 8 Agustus 1996 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Seiring dengan dibentuknya Holding BUMN Perkebunan di Tahun 2014, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, mengakibatkan perubahan nama dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII, serta perubahan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan kepemilikan pemegang saham 90% PTPN III (Persero) dan 10% Negara Republik Indonesia, serta dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN No. 28 Tanggal 23 Oktober 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-10133.40.20.2014.

PTPN VIII bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penjualan komoditi perkebunan. Komoditi utama PTPN VIII adalah Teh, Karet dan Kelapa Sawit. Selain komoditi utama, terdapat komoditi pendukung seperti Kina serta Buah-buahan yang mulai dikembangkan sejak tahun 2012.

PTPN VIII mengelola Areal seluas 113.958 ha, terdiri dari areal tanaman 79.084 ha dan areal lainnya seperti lahan cadangan, emplasemen, jalan dan lain-lain seluas 40.728 ha. Areal tanaman terdiri dari Teh 20.984 ha, Karet 23.631 ha, Kelapa Sawit 19.447 ha, Kina 685 ha, Aneka Tanaman 14.339 ha.

Lokasi usaha PTPN VIII sebanyak 41 unit usaha kebun tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cianjur, kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis) dan 2 Kabupaten di Propinsi Banten (Lebak dan Pandeglang). Di samping unit usaha kebun, terdapat 3 (tiga) unit usaha non komoditi yang terdiri dari Industri Hilir Teh, Agrowisata dan Aneka Usaha. Pusat kegiatan usaha PTPN VIII berada di Jalan Sindangsirna No.4, Bandung.

Company Brief History

PT Perkebunan Nusantara VIII or abbreviated as PTPN VIII was originally State-Owned Enterprise (BUMN) which was established based on Notarial Deed of Harun Kamil, SH No.41 dated March 11, 1996 and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree Number C2-8336.HT.01.01 .TH.96. Dated August 8, 1996 as a follow up of the Government Regulation of the Republic of Indonesia no. 13 of 1996 on the merger of the Company (Persero) PT Perkebunan XI, the Company (Persero) PT Perkebunan XII, and the Company (Persero) PT Perkebunan XIII, became PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Along with the establishment of Plantation SOE Holding in the Year 2014, then pursuant to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 Year 2014 dated September 17, 2014 Regarding the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia Into Share Capital of Limited Liability Company PT Perkebunan Nusantara III, the change of name from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) to PT Perkebunan Nusantara VIII, as well as changes in the status of Limited Liability Company (Persero) of PT Perkebunan Nusantara VIII to the Limited Liability Company, with 90% ownership of PTPN III (Persero) and 10% of the State of the Republic of Indonesia, and amend the Company's articles of association based on Notarial Deed No. Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN. 28 On 23 October 2014 and has been ratified by the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-10133.40.20.2014.

PTPN VIII is engaged in the plantation sector with its business activities covering cultivation of crops, cultivation of land, nurseries, planting, maintenance and sale of plantation commodities. The main commodities of PTPN VIII are Tea, Rubber and Oil Palm. In addition to the main commodity, there are commodities such as Kina and Fruit which began to be developed since 2012.

PTPN VIII maintains an area of 113,958 ha, consisting of 79,084 ha of plantation area and other areas such as reserves, emplacements, roads and other areas of 40,728 ha. Plant area consists of Tea 20,984 ha, Rubber 23,631 ha, Oil Palm 19,447 ha, Kina 685 ha, Various Plants 14,339 ha.

Business location of PTPN VIII of 41 garden business units spread in 11 regencies / cities in West Java province (Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung regency, West Bandung regency, Bandung, Subang, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, and Ciamis) and 2 regencies In Banten Province (Lebak and Pandeglang). In addition to the plantation business unit, there are 3 (three) non-commodity business units consisting of Downstream Tea, Agro and Various Businesses. PTPN VIII business center is located at Jalan Sindangsirna No.4, Bandung.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan
Vision, Mission, and Company Objectives

Visi "Menjadi perusahaan agribisnis terkemuka dan terpercaya, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kepedulian lingkungan dengan didukung oleh SDM yang profesional."

Vision "Being a leading and trusted agribusiness company, giving priority to customer satisfaction and environmental awareness supported by professional human resources"

Misi

Untuk menghasilkan kualitas tinggi dan produk ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh pasar dan memiliki nilai yang sangat tambah

Mengelola perusahaan dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang kuat, posisi sumber daya manusia sebagai aset berharga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui kesehatan perusahaan

Mengoptimalkan semua sumber daya untuk mencapai peluang pengembangan usaha secara mandiri atau bersama-sama mitra strategis

Mempromosikan Corporate Social Responsibility (CSR) sejalan dengan kemajuan perusahaan

Mission

To produce high quality and environmentally friendly products required by the market and have a value added

Manage the company by implementing good governance and strong leadership, positioning human resources as a valuable asset and improving employee welfare through corporate health

Optimize all resources to achieve business development opportunities independently or jointly with strategic partners.

Promoting Corporate Social Responsibility (CSR) in line with the company's progress

Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan :

1. Maksud dan Tujuan PTPN VIII adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTPN VIII dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   - Pengusahaan Budidaya Tanaman
     Pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
   - Produksi
     Pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya.
   - Perdagangan
     Penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perusahaan lainnya.
   - Pengembangan Usaha Bidang Perkebunan, Agro Wisata, Pertanian, Agro Bisnis dan Agro Forestry.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTPN VIII dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, real estate, pusat perbelanjaan/ mall, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olah raga dan rekreasi, rest area, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, perikanan, peternakan, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan, jasa konsultasi bidang perkebunan, jasa pembangunan kebun, dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan.

In accordance with the Company's :

1. Purpose and Purpose of PTPN VIII is to conduct business in agro business and agro industry, and optimize the utilization of company's resources to produce high quality and strong competitive goods and / or services, and pursue profit to increase the value of the Company by applying the principles of the Company Limited.
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, PTPN VIII may carry out the following main business activities:
   - Cultivation of Crops
     Land clearing and processing, seeding, planting, cultivation and harvesting of crops and other activities related to the cultivation of the crops.
   - Production
     Processing of own crops or from other parties into intermediate and / or finished goods and derivative products.
   - Trading
     Implementation of marketing activities of various products and other trading activities related to the business of the Company and other companies.
   - Business Development in the field of Plantation, Agro Tourism, Agriculture, Agro Business and Agro Forestry.
3. In addition to the main business activities as referred to in paragraph (2), PTPN VIII may conduct business activities in order to optimize the utilization of its owned resources for trading house, industrial estate development, agro industrial complex, real estate, shopping mall, office, warehouse, Tourism, hospitality, resorts, sports and recreation, rest areas, hospitals, education and research, fisheries, animal husbandry, telecommunications and energy resources, rental services, plantation consulting services, garden development services and Owned company.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

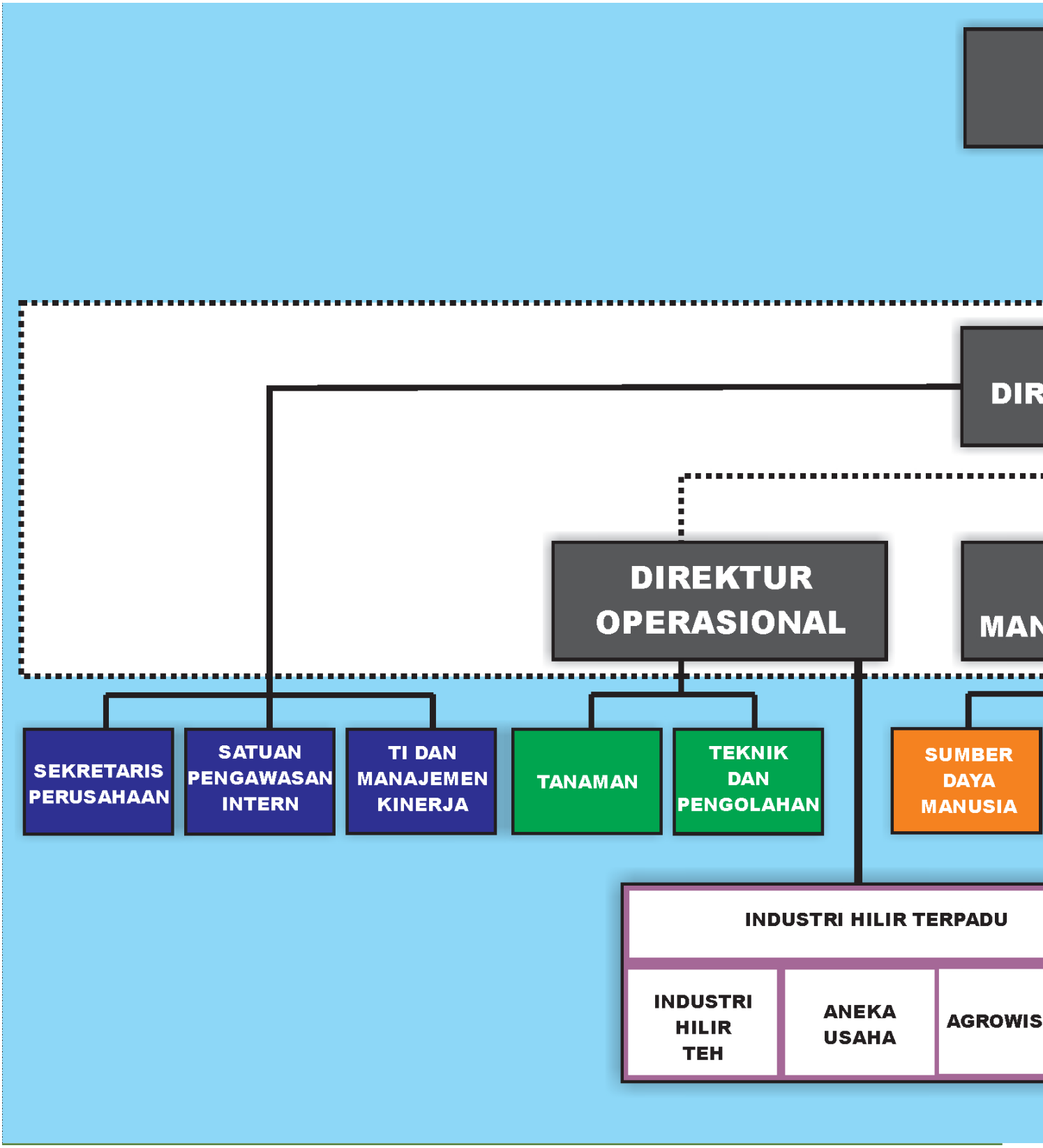

Struktur Organisasi

Organizational structure

Struktur Organisasi PTPN VIII disusun berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/III.1/448/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII.

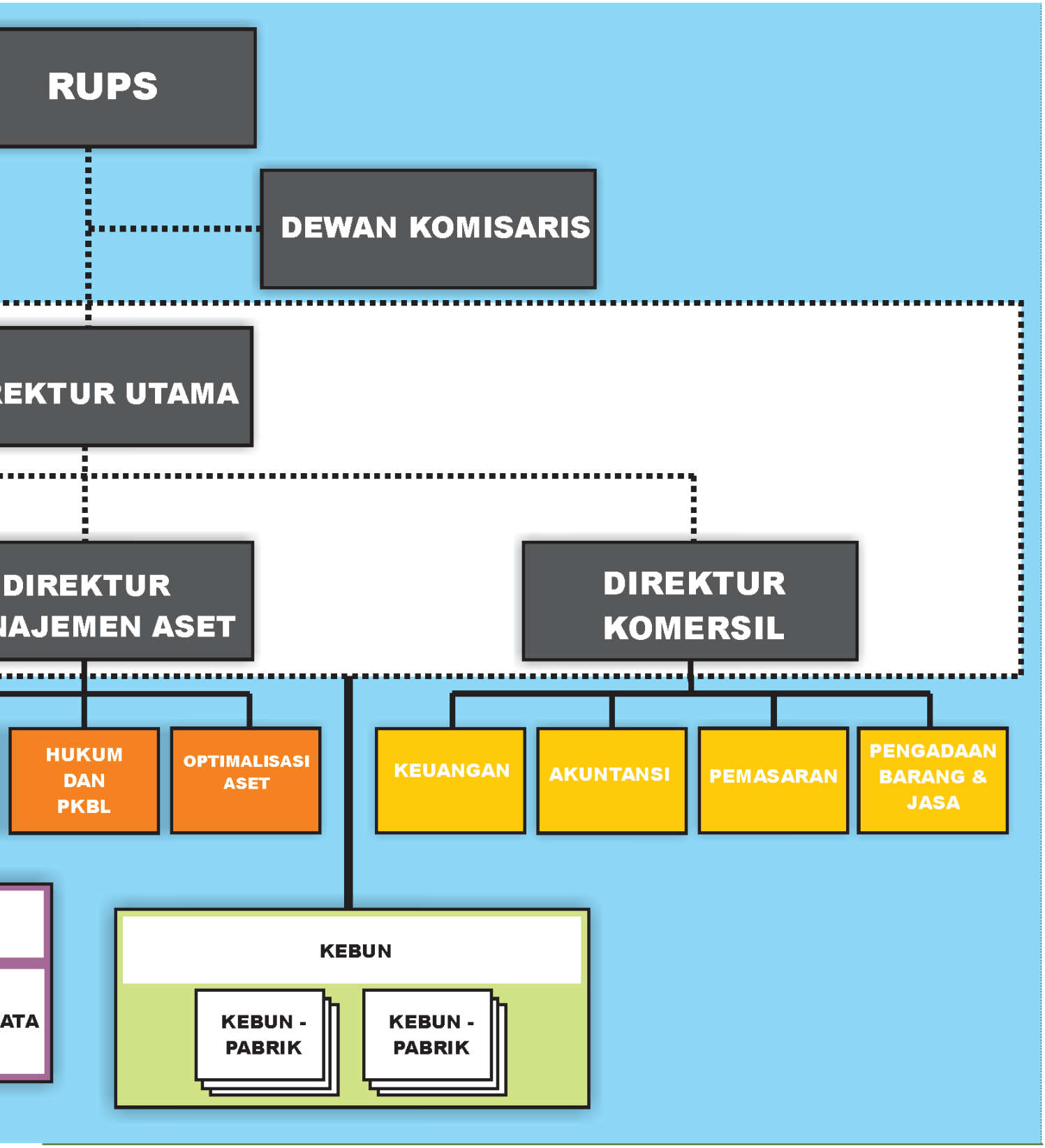

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Sumber Daya Manusia
Human Resourch

Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga kerja per 31 Desember 2016 sebanyak 35.308 orang yang terdiri dari 15.503 tenaga kerja tetap dan 19.805 tenaga kerja lepas. Tenaga kerja mengalami penurunan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja sebanyak 41.525 orang yang terdiri dari 16.884 tenaga kerja tetap dan 24.641 tenaga kerja lepas. Sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2014 sebanyak 49.210 orang yang terdiri dari 18.805 tenaga kerja tetap dan 30.405 orang tenaga kerja lepas. Adapun rincian berdasarkan pendidikan, usia dan jabatan dapat dilihat sebagai berikut:

Human Resource Profile

The number of workers as of 31 December 2016 was 35,308 persons consisting of 15,503 permanent workers and 19,805 casual workers. Manpower has decreased in number compared to previous years where in 2015 the number of workers as many as 41,525 people consisting of 16,884 permanent workers and 24,641 workers loose. While the number of workers in 2014 as many as 49,210 people consisting of 18,805 permanent workers and 30,405 people loose labor. The details based on education, age and position can be seen as follows:

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Pendidikan

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Pendidikan

Tingkat	2016	2015	2014	Level
Strata II	7	7	9	Strata II
Strata I	385	352	370	Strata I
Diploma	104	110	130	Diploma
SMA	2,587	2.805	2.936	Senior High School
SMP	1,521	1.6025	1.777	Junior High School
SD	10,899	11.985	13.583	Basic School
Jumlah	15,503	16.884	18.805	Equal

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Usia

Usia	2016	2015	2014	Age
55 tahun - 56 tahun	-	24	21	55 years - 56 years
50 tahun - 54 tahun	2,188	3.258	4.913	50 years - 54 years
45 tahun - 49 tahun	5,448	5.585	5.708	45 years - 49 years
40 tahun - 44 tahun	3,855	3.954	4.044	40 years - 44 years
35 tahun - 39 tahun	2,391	2.464	2.504	35 years - 39 years
30 tahun - 34 tahun	1,277	1.319	1.322	30 years - 34 years
25 tahun - 29 tahun	332	266	279	25 years - 29 years
20 tahun - 24 tahun	12	14	14	20 years - 24 years
Jumlah	15,503	16.884	18.805	Amount

Bila dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun 2015, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah karyawan sebesar 8.71 % atau sebesar 1.381 orang karyawan. Penurunan tersebut disebabkan adanya karyawan yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Penambahan dan/atau kenaikan jabatan karyawan (promosi dan mutasi) disesuaikan dengan kebutuhan yang didasari oleh pemetaan dan assessment dengan melihat kompetensi dan kinerja karyawan.

Bila dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun 2015, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah karyawan sebesar 8.71 % atau sebesar 1.381 orang karyawan. Penurunan tersebut disebabkan adanya karyawan yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri. Penambahan dan/atau kenaikan jabatan karyawan (promosi dan mutasi) disesuaikan dengan kebutuhan yang didasari oleh pemetaan dan assessment dengan melihat kompetensi dan kinerja karyawan.

Peta SDM Berdasarkan Kota Kabupaten

Provinsi Province	Kabupaten/Kota Distric/City	Karyawan Tetap Permanent Labour	Karyawan Tidak Tetap Outsourching	
Banten	Kab. Lebak & Pandeglang	955	1.503	Banten Amount
	Kab. Tangerang	39	-	
Jumlah	**Jumlah Banten**	**994**	**1.503**	**Amount of Banten**
Jawa Barat	Kab. Bogor	908	427	West Java
	Kab. Sukabumi	1.379	2.530	
	Kab. Cianjur	1.298	1.360	
	Kota Bandung	444	333	
	Kab. Bandung	4.842	4.742	
	Kab. Bandung Barat	1.107	1.584	
	Kab. Purwakarta	314	481	
	Kab. Subang	1.794	1.996	
	Kab. Garut	1.770	2.526	
	Kab. Tasikmalaya	202	760	
	Kab. Ciamis	451	1.536	
	Jumlah Jabar :	**14.509**	**18.275**	**Amount of West Java**
Total Karyawan		15.503	19.805	Total of Labour

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka pengembangan SDM, upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar perusahaan, bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) maupun lembaga pendidikan lainnya. Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam program pendidikan pada tahun 2016 sebanyak 1.815 orang atau 154% dari tahun 2015 dengan biaya pendidikan sebesar Rp 3,1 miliar atau 63% dari dari tahun 2013. Rincian jumlah karyawan dan biaya pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Education and Training

In the framework of developing human resources, efforts to improve knowledge, skills and competencies are continuously conducted through education and training conducted within and outside the company, in collaboration with the Institute of Plantation Education (LPP) and other educational institutions. The number of employees enrolled in the education program in 2016 is 1,815 people or 154% from 2015 with an education cost of Rp 3.1 billion or 63% from from 2013. The details of employee numbers and tuition fees can be seen in the following table :

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan / Total of Educational Participants and Training

	2016	2015	2014
Pengembangan Sistem dan Organisasi	-	81	10
Kursus Jabatan	-	2	22
Kursus Penyegar Manajerial	983	386	413
Pelatihan Teknis	832	713	2.135
Jumlah	1.815	1.182	2.580

Hierarki Jenjang Karir

Perencanaan karier (Career Planning) disusun berdasarkan kepada hasil prestasi kerja, senioritas, dan kompetensinya. Selain itu, dipertimbangkan pula aspek kejujuran, disiplin, loyalitas, kepemimpinan, dan komunikasi sebagai kriteria dalam perencanaan karir.

Rencana peningkatan karir dilakukan dengan melakukan pengangkatan karyawan Golongan IA sampai Golongan IID, melakukan assessment dan pelatihan manajerial bagi karyawan sesuai Kamus Kompetensi Jabatan (KKJ).

Kesejahteraan

perbaikan sistem kompensasi dan remunerasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kinerja karyawan juga turut mempertimbangkan kesepakatan terkait dengan pengaturan upah minimum agar tercipta sinergitas antara sistem pengupahan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan.

PTPN VIII juga memberikan Jaminan sosial untuk pemenuhan kesejahteraan karyawan, meliputi fasilitas pengobatan & perawatan kesehatan bagi karyawan beserta batih, penyediaan fasilitas perumahan lengkap dengan listrik dan air bagi karyawan, program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sarana ibadah dan olahraga.

Career Level Hierarchy

Career planning (Career Planning) is structured based on the results of work performance, seniority, and competence. In addition, also considered aspects of honesty, discipline, loyalty, leadership, and communication as a criteria in career planning.

Career improvement plan is carried out by appointing employees of Group IA to Group IID, conducting assessment and managerial training for employees according to the Dictionary of Position Competency (KKJ).

Welfare

Improvement of compensation and remuneration system by considering employee competency and performance also consider the agreement related to minimum wage arrangement in order to create synergy between wage system with capacity building and employee capability.

PTPN VIII also provides Social Security for the fulfillment of employee welfare, covering health care & treatment facilities for employees along with batih, providing complete housing facilities with electricity and water for employees, Old Age Guarantee program, Work Accident Insurance and Death Insurance, Pension Fund Plantation (Dapenbun) And Financial Institution Pension Fund (DPLK), means of worship and sports.

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

Pemerintah Republik Indonesia
Goverment Republic Of Indonesia
10%

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
90%

PT Perkebunan Nusantara VIII

Entitas Anak

PT Agro Medika Nusantara
96,7 %

Entitas Asosiasi

PT Sinkona Indonesia Lestari
49 %

PT Bio Industri Nusantara
25 %

PT Riset Perkebunan Nusantara
6 %

PT Rolas Nusantara Mandiri
10 %

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
7,07 %

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Profil Komisaris
Profile of Commissionersner

Karen Tambayong

Lahir di Surabaya, 24 April 1956. Lulusan Kandidat Ingenieur Bouwkunde, Technische Hogeschool, Delft, Nederland pada tahun 1977.

Dasar Pengangkatan:
Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Pemegang Saham PTPN VIII Nomor: SK-168/MBU/09/2015 dan KPJAK/hold/SKPTS/R/11/2015 tanggal 8 September 2015.

Perjalanan Karir:
Anggota Tim Ahli Pembangunan, Kasteel van Keunkenhof Park (2015), The Netherlands; Tenaga Ahli Program Pengembangan Kota Hijau, Kementerian Pekerjaan Umum (2012 – sekarang); Tenaga Ahli, PT Trisigma Inti Solusi (2013 – sekarang); Direktur Utama, PT. Fajar Puspa Alam (2001 – sekarang); Pemilik, Kebun Pembibitan Floribunda (1996 – sekarang). Ketua Tim, Pembuatan Grand Design Kota Bunga Tomohon (2006 – 2010); Ketua Tim, Pembuatan Masterplan Kawasan Khusus Pertanian Tomohon (2008); Direktur Keuangan, New Line Floral Education Centre (2003 – 2010); Manager Keuangan, Kebun Pembibitan Floribunda (1994 – 1996); Manager Keuangan, PT. Survindo Perdana Satria (1994 – 1996); Manager Pemasaran, Kebun Pembibitan Floribunda (1988 – 1990).

Born in Surabaya, April 24, 1956. Graduates of Ingenieur Bouwkunde Candidate, Technische Hogeschool, Delft, Nederland in 1977.

Element of Appointment:
Decree of the Minister of State Owned Enterprises and the President Director of PTPN III Company as the Shareholder of PTPN VIII Number: SK-168 / MBU / 09/2015 and KPJAK / hold / SKPTS / R / 11/2015 dated September 8, 2015.

Career Travel:
Members of the Development Experts Team, Kasteel van Keunkenhof Park (2015), The Netherlands; Green City Program Development Experts, Ministry of Public Works (2012 - present); Expert, PT Trisigma Inti Solusi (2013 - present); President Director, PT. Fajar Puspa Alam (2001 - present); Owner, Floribunda Nursery (1996 - present). Team Leader, Flower Design Tomohon Flower Design (2006 - 2010); Team Leader, Making Masterplan of Agriculture Special Region Tomohon (2008); Director of Finance, New Line Floral Education Center (2003 - 2010); Finance Manager, Floribunda Nursery (1994 - 1996); Finance Manager, PT. Survindo Perdana Satria (1994 - 1996); Marketing Manager, Floribunda Nursery (1988 - 1990).

Herry Suhardiyanto

Lahir di Banjarnegara pada 10 September 1959. Meraih gelar sarjana dalam bidang mekanisasi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1981), Master of Science (M.Sc.) dalam bidang Agricultural Engineering dari Kochi University Jepang (1991), dan Ph.D. bidang Agricultural Engineering dari Ehime University (1994).

Dasar Pengangkatan:
Keputusan Meneg BUMN No: SK-388/MBU/2013 tanggal 21 November 2013.

Perjalanan Karir:
Dosen Institut Pertanian Bogor sejak 1985 dan menjabat sebagai Rektor sejak Desember 2007. Guru besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB sejak Mei 2009. Wakil Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN) sejak Mei 2010. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) tahun 2012-2014 dan sejak Maret 2014 menjabat sebagai Ketua. Menjabat sebagai Komisaris di PTPN VIII sejak Oktober 2008.

Born in Banjarnegara on 10 September 1959. He earned a bachelor's degree in agricultural mechanization from the Bogor Agricultural University (1981), Master of Science (M.Sc.) in Agricultural Engineering from Kochi University Japan (1991), and Ph.D. Field of Agricultural Engineering from Ehime University (1994).

Element of Appointment:
Decree of State Enterprises Minister No: SK-388 / MBU / 2013 dated 21 November 2013.

Career Travel:
Lecturer of the Bogor Institute of Agriculture since 1985 and has served as Rector since December 2007. Professor of the Faculty of Agricultural Technology IPB since May 2009. Vice Chairman of the National Innovation Committee (KIN) since May 2010. Appointed as Secretary General in the Rector of Indonesian State University (MRPTNI) Year 2012-2014 and since March 2014 has served as Chairman. Appointed as Commissioner of PTPN VIII since October 2008.

Lahir di Cerenti, 1 September 1971. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Andalas Padang pada tahun 1995. Memperoleh gelar Magister Ilmu ekonomi dari Universitas Indonesia, tahun 1993.

Dasar Pengangkatan :
Keputusan Meneg BUMN No: SK-205/MBU/09/2016 tanggal 1 September 2016 dan SK Direktur Utama PTPN III Nomor : 3.00/SKPTS/R/34/2016.

Perjalanan Karir :
Kepala Subseksi Teknis dan Fungsional, Balai Diktat Keuangan VII Jakarta, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Kementerian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perundangundangan, Bagian Hukum dan Perundangundangan Biro Data dan Informasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Bagian Persidangan, Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Bagian Hukum, Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Born in Cerenti, September 1, 1971. Obtained his Bachelor degree in Law from Andalas University Padang in 1995. Obtained his Magister of Economics from University of Indonesia, 1993.

Element of Appointment:
Decree of State Minister of State-Owned Enterprises No: SK-205 / MBU / 09/2016 dated September 1, 2016 and Decree of the President Director of PTPN III Number: 3.00 / SKPTS / R / 34/2016.

Career Travel:
Head of Technical and Functional Subdivision, Balai Diktat Keuangan VII Jakarta, Financial Training and Training Agency, Ministry of Finance, Head of Legislation Sub Division, Legal and Legal Division Data and Information Bureau, Secretariat of Coordinating Ministry of Economic Affairs, Head of Trial Section, Bureau of Trial and Public Relations , Secretariat of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Head of Legal Affairs, Bureau of Public Relations and Public Relations, Secretariat of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Head of Legal, Trial and Public Affairs Bureau, Secretariat of the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Head of Legal Bureau, Trial and Public Affairs Bureau, Head of Legal, Trial and Public Affairs Bureau, Secretariat of Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Elen Setiadi

Antonius HW

Dengan nama kecil Ipong Witono Lahir di Jakarta, 14 Oktober 1962. Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Unika Atmajaya tahun 1987,

Dasar Pengangkatan:
Keputusan Meneg BUMN No: SK-205/MBU/09/2016 tanggal 1 September 2016 dan SK Direktur Utama PTPN III Nomor : 3.00/SKPTS/R/34/2016..

Perjalanan Karir:
Ketua Umum BPD HIPMI Bandung Raya, Ketua Umum BPD HIPMI Jabar, Wakil Ketua Umum IV BPP HIPMI, Wakil Ketua DPD REI Jabar, Sekretaris DPD REI Jabar, Wakil Ketua Komtap Organisasi Kadin Indonesia. Kepala Seksi Pemasaran Cetak Gramedia, Komisaris PT. Puteraco Indah, Direktur Pengembangan Usaha PT. Puteraco Indah, Direktur Utama PT. Gapura Multi Mandiri, Komisaris PT. Dwi Wastika Maju, Komisaris Independent PTPN VIII.

With a small name Ipong Witono Born in Jakarta, October 14, 1962. He earned a Bachelor degree in Atmajaya Unika State Administration in 1987,

Element of Appointment:
Decree of State Enterprises Minister No: SK-205 / MBU / 09/2016 dated September 1, 2016 and President Director of PTPN III Decree Number: 3.00 / SKPTS / R / 34/2016 ..

Career Travel:
Chairman of BPD HIPMI Bandung Raya, Chairman of BPD HIPMI Jabar, Vice Chairman IV BPP HIPMI, Vice Chairman of DPD REI Jabar, Secretary of DPD REI Jabar, Vice Chairman Komtap Organization Kadin Indonesia. Head of Marketing Section Print Gramedia, Commissioner of PT. Puteraco Indah, Business Development Director of PT. Puteraco Indah, President Director of PT. Gapura Multi Mandiri, Commissioner of PT. Dwi Wastika Maju, Independent Commissioner of PTPN VIII.

Profil Direksi
Profile of Director

Tatang Supriatna

Lahir di Bogor, 28 Juni 1964. Sarjana Bidang Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 1989

Perjalanan Karir:
Masuk ke Perkebunan tahun 1992, pernah menjabat sebagai Administratur, Kepala Bagian Teknik Pengolahan dan Manager Wilayah, sampai kemudian 2016 menjabat sebagai Direktur Produksi/operasional PTPN VIII.

I.G.N Suharta Wijaya

Lahir di Singaraja, 16 Agustus 1967. Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1990 dan Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011.

Perjalanan Karir:
pada tahun 2014 s.d. 2015 menjabat sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Wilayah Jakarta Kota. tahun 2015 menjabat sebagai Pemimpin Divisi di Divisi LMC-1 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan tahun 2016 menjadi Direktur Keuangan PTPN VIII.

Bambang Murtioso

lahir pada 24 Desember 1963 di Kuningan. Menyelesaikan Pendidikan Teknologi Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor tahun 1987.

erjalanan Karir :
enjabat sebagai Direktur Utama PTPN VIII tahun 2016 yang sebelumnya bagai Direktur Produksi, dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala agian TI dari tahun 2014. Pernah Menjadi Manajer Wilayah dan Manajer roup selama kurang lebih 2 tahun. Berkarir sebagai Administratur juga ernah ditempuh selama kurang lebih 3 tahun, mulai dari Kebun Cimulang mpai ke Kebun Talunsantosa.

Gunara

Lahir di Cirebon pada 4 Februari 1963. Meraih gelar Sarjana di bidang Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987.

Perjalanan Karir:
Bergabung dengan PTPN dimulai pada tahun 1989 di PTPN XII sebagai kepala afdeling Hingga pada tahun 2002 sampai dengan 2012 menjabat sebagai administratur dan Tahun 2012 beralih ke kantor pusat sebagai Kepala Bagian SDM dan Sekretaris Perusahaan sampai pada tahun 2015 yang kemudian diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum/Manajemen Aset PTPN VIII.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Informasi Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Information of the Subsidiary and Associated Entities

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

No	Nama	Bidang Usaha	Persentasi	Status Operasi
1.	PT Agro Medika Nusantara	Rumah Sakit	96,7	Beroperasi
2.	PT Sinkona Indonesia Lestari	Ekspor Kulit Kina Olahan	49	Beroperasi
3.	PT Bio Industri Nusantara	Produksi pupuk berbasis biologi, industri perdagangan pupuk dan obat obatan tanaman serta pelayanan jasa konsultasi.	25	Beroperasi
4.	PT Riset Perkebunan Nusantara	Riset dan Pengembangan	6	Beroperasi
5.	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Perdagangan Komoditi Perkebunan	7,07	Beroperasi
6.	PT Rolas Nusantara Mandiri	Perdagangan Komoditi Perkebunan	10	Beroperasi

PT Agro Medika Nusantara (AMN)

PT AMN adalah perusahaan yang merupakan transformasi dari Unit rumah Sakit PT Perkebunan Nusantara VIII yang menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. PTPN VIII memiliki penyertaan saham sebesar 96,7% dengan nilai penyertaan saham yang dimiliki Rp. 25,1 miliar.

Jl. Ottoiskandardinata No. 1, Subang
Telepon : (0260) 411632, (0260) 420206
Fax : (0260) 420391
e-mail : rspn8subang@gmail.com
rspnviii@yahoo.com

PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

PT SIL bergerak dalam industri hilir kina, dengan mengolah lebih lanjut kulit kina yang dihasilkan PTPN VIII menjadi kinine dan kinidine. Produk dijual ekspor dengan kualitas bersertifikat ISO 9001, ISO 14001, Good Manufacturing Practice (GMP) serta Food and Drug Administration (FDA) Approval tahun 1998. PTPN VIII memiliki penyertaan saham sebesar 49% dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp. 26 miliar.

Jl. Raya Ciater Km. 171, Subang 41281
Telp: (022) 470918. Fax (022) 470917

PT Agro Medika Nusantara (AMN)

PT AMN is a company that is a transformation from PT Perkebunan Nusantara VIII Hospital Unit which is a legal entity in the form of Limited Liability Company. PTPN VIII has equity participation of 96.7% with share value of shares owned by Rp. 25.1 billion.

Jl. Ottoiskandardinata No. 1, Subang
Phone : (0260) 411632, (0260) 420206
Fax : (0260) 420391
E-mail : rspn8subang@gmail.com
rspnviii@yahoo.com

PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)

PT SIL is engaged in the downstream industry of quinine, by further processing the quinine skin produced by PTPN VIII into kinine and kinidine. The products are exported with ISO 9001 quality certificates, ISO 14001, Good Manufacturing Practice (GMP) and Food and Drug Administration (FDA) Approval in 1998. PTPN VIII has a 49% equity interest with a share value of Rp. 26 billion.

Jl. Raya Ciater Km. 171, Subang 41281
Tel: (022) 470918. Fax (022) 470917

PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA)

Bio Industri Nusantara (Bionusa) merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, PTPN VII, dan PTPN VIII (Persero). PT Bionusa bergerak dibidang usaha pupuk hayati dengan merek "EMAS", yang memulai kegiatan usaha komersial sejak tahun 2003. PTPN VIII memiliki penyertaan saham sebesar 25% dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp. 6,6 miliar.

Jl. Ir. H. Juanda No.107, Bandung
Telepon Phone : (022) 2530580
Fax : (022) 2530591
Email : bionusa@ptbionusa.com
Website : www.ptbionusa.com

PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)

PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) adalah bentuk transformasi dari Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). merupakan Perusahaan bersama dengan PTPN I sampai dengan XIV dan PT RNI (Persero) yang bergerak di bidang penelitian komoditas perkebunan. PTPN VIII memiliki penyertaan sebesar 6% dan nilai saham yang dimiliki sebesar Rp. 6,3 miliar.

Jl Salak No.1A Bogor 16151 - Jawa Barat
Telepon Phone : (0251) 333382
Fax : (0251) 315985, 357949
Emai : ipardboo@indo.net.id
Website : www.ipard.com

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)

KPBN Merupakan Perusahaan bersama dengan PTPN I sampai dengan XIV (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) yang bergerak di bidang Sales produk perkebunan yang menjadi komoditi PTPN I sd XIV dan RNI. PTPN VIII memiliki penyertaan sebesar 7,07% dengan nilai penyertaan saham yang dimiliki sebesar Rp. 6,9 miliar.

Jl. Taman Cut Mutiah No. 11, Jakarta 10330
Telepon : (021) 3907554, 3106685 (hunting)
Fax : (021) 31935091
Email : kanpus@kpbn.co.id

PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)

Didirikan pada tahun 2012, PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI (RNM) yang merupakan perusahaan negara milik PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), salah satu perusahaan milik pemerintah yang berdomisili di Agroindustri berkembang untuk menghasilkan produk berkualitas baik dari perkebunan, dikemas dengan kemasan yang lebih baik dan distribusi yang sangat laku ke masyarakat.

Nilai dasar atau filosofi PT. Rolas Nusantara Mandiri adalah visi dan misi yang baik yang dirangkum dan mewakili eksistensinya, yaitu:
Jalan Indrapura 33a ,Surabaya
Telepon : 031-3551896
Email : hilir_n12@ymail.com

PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA)

Bio Industri Nusantara (Bionusa) is a joint venture between the Company, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, PTPN VII, and PTPN VIII (Persero). PT Bionusa is engaged in biodegradable fertilizer business under the brand "GOLD", which started commercial operations since 2003. PTPN VIII owns a 25% equity interest with a share value of Rp. 6.6 billion.

Jl. Ir. H. Juanda No.107, Bandung
Phone Phone: (022) 2530580
Fax: (022) 2530591
Email: bionusa@ptbionusa.com
Website: www.ptbionusa.com

PT Perketunan Perkebunan Nusantara (RPN)

PT Perketunan Nusantara (PT RPN) is a transformation from the Indonesian Plantation Research Institute (LRPI). Is a Company together with PTPN I to XIV and PT RNI (Persero) engaged in the field of plantation commodity research. PTPN VIII has an investment of 6% and share value of Rp. 6.3 billion.

Jl Salak No.1A Bogor 16151 - Jawa Barat
Phone Phone: (0251) 333382
Fax: (0251) 315985, 357949
Emai: ipardboo@indo.net.id
Website: www.ipard.com

PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara (KPBN)

KPBN is a Company together with PTPN I to XIV (Persero) and PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) engaged in the sale of plantation products that become commodities PTPN I sd XIV and RNI. PTPN VIII owns an investment of 7.07% with share value of shares owned by Rp. 6.9 billion.

Jl. Taman Cut Mutiah no. 11, Jakarta 10330
Phone: (021) 3907554, 3106685 (hunting)
Fax: (021) 31935091
Email: kanpus@kpbn.co.id

PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)

Established in 2012, PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI (RNM) which is a state owned company of PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), one of the government-owned companies domiciled in developing Agroindustry to produce good quality products from plantations, packaged with better packaging and distribution that sells to the public.

The basic value or philosophy of PT. Rolas Nusantara Mandiri is a good vision and mission that is summarized and represents its existence, namely:
Jalan Indrapura 33a, Surabaya
Phone: 031-3551896
Email: hilir_n12@ymail.com

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Analysis and Discussion of Management

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Tinjauan Operasional
Operational Review

Pembahasan tinjauan operasional dibuat berdasarkan setiap segmen usaha yang menjadi fokus bisnis dari PT Perkebunan Nusantara VIII di tahun 201 yang terdiri dari segmen usaha komoditas Teh, Karet, Kelapa Sawit, dan Kina. Selain itu, PTPN VIII juga memiliki unit usaha berupa Industri Hilir Teh, Aneka Usaha (Buah-buahan) dan Agrowisata.

Komoditi Teh

Areal

Dari total Areal Konsesi PTPN VIII, Areal Tanaman Teh mencapai 20.168 hektar, yang terdiri dari:

- Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 20.158 hektar; dan
- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 461 hektar.

Luas areal tanaman Teh di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2%. Penurunan luas area TM dikarenakan adanya pengalihan areal menjadi areal aneka tanaman, serta pelaksanaan Tea Profit Strategy (TPS) untuk meningkatkan efektivitas lahan pada komoditi Teh.

Discussion of operational review is made based on each business segment becoming the business focus of PT Perkebunan Nusantara VIII in 201 consisting of business segments of Tea, Rubber, Palm, and Kina commodities. In addition, PTPN VIII also has a business unit in the form of Downstream Tea, Assorted Enterprises (Fruits) and Agro Tourism.

Tea Commodity

Area

Of the total concession area of PTPN VIII, the Tea Plantation Area reaches 20,168 hectares, consisting of:

Plant Produce (TM) covering an area of 20,158 hectares; and Plants Not Produced (TBM) and Plants of the Year (TTI) covering 461 hectares.

The area of tea plant in 2016 decreased compared to 2015 by 2%. The decrease of area of TM is due to the diversion of the area into various crop areas, as well as the implementation of Tea Profit Strategy (TPS) to increase the effectiveness of the land on tea commodities.

Perkembangan Areal Tanaman Teh / The Development of Tea Plantation Area

		2016	2015	2014	
Teh (Total)	Ha	20.168	20.168	20.984	Tea (Total)
Tanaman Menghasilkan (TM)	Ha	20.158	19.259	18.826	Plant Produce (TM)
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI)	Ha	461	1.360	2.158	Plants Do not Produce (TBM) and Plants This Years

Produksi dan Produktivitas

Pencapaian produksi Teh tahun 2016 sebesar 30.173 ton atau 122 % dari realisasi tahun 2015. Hal ini karena kondisi kecukupan nutrisi untuk tanaman yang kurang dan defisit air yang disebabkan tidak adanya hujan selama kurun waktu bulan Juni-Oktober. Kondisi serangan hama dan penyakit rata-rata di setiap kebun masih terkendali atau masih di bawah ambang batas ekonomi.

Penjualan

Realisasi volume penjualan komoditi Teh tahun 2016 sebesar 30.173 ton atau sebesar 122% dari realisasi tahun 2015. Nilai Penjualan tahun 2016 tercapai sebesar Rp 477,96 Miliar atau 88% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh ketidaktercapaian volume penjualan serta rendahnya harga jual, karena penurunan permintaan. Namun, volume penjualan tersebut sudah di atas capaian volume produksi pada periode yang sama (89 %).

Production and Productivity

The achievement of tea production in 2016 amounted to 30,173 tons or 122% of the realization in 2015. This is due to the nutritional adequacy condition for the less plants and water deficit caused by the absence of rain during the period of June-October. The condition of pest and disease attacks on average in every garden is still under control or still below the economic threshold.

Sales

The actual sales volume of tea commodity in 2016 amounted to 30,173 tons or 122% of the realization in 2015. Sales value in 2016 reached Rp 477.96 Billion or 88% of the realization in 2015. This is caused by the lack of sales volume and low selling price, Due to the decrease in demand. However, the sales volume is already above the achievement of production volume in the same period (89%).

Produksi, Produktivitas dan Volume Penjualan — Production, Productivity and Sales Volume

	Satuan	2016	2015	2014
Teh (Bulk)				
Produksi Teh (Basah)	Ton	134.627	107.488	163.761
Produksi Teh (Kering)	Ton	30.173	24.665	35.371
Produktivitas	Kg/Ha	1.487	1.261	1.938
Volume Penjualan	Ton	24.846	27.819	35.726

Produksi Teh Kering (Ton)
Dry Tea Production (Ton)

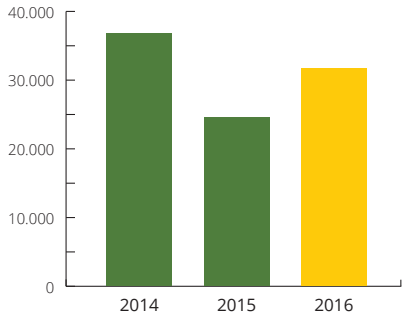

Produktivitas Teh (Kg/Ha)
Tea Productivity (Kg/Ha)

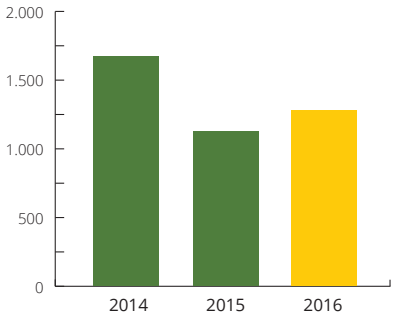

Penjualan Teh (Ton)
Tea Sales (Kg/Ha)

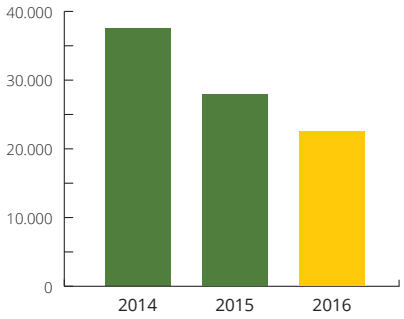

Profitabilitas

Pada tahun 2016, Komoditi Teh mengalami kerugian yang terlihat dari laba sebelum pajak sebesar Rp (94.1) miliar, turun sebesar Rp 32.1 miliar dari tahun 2015.

Profitability

In 2016, the Tea Commodity suffered a visible loss from profit before tax of Rp (94.1) billion, down by Rp 32.1 billion from 2015.

Laba (Rugi) Komoditi Teh — Profit (Loss) Tea Commodity

	Satuan	2016	2015	2014	
Teh (Bulk)					Tea (Bulk)
Penjualan	Rp Juta	477.963	541.992	687.577	Sales
Beban Pokok Penjualan	Rp Juta	397.430	448.449	485.553	Cost of goods sold
Laba Kotor	Rp Juta	80.532	93.543	202.024	Gross profit
Biaya Usaha	Rp Juta	177.451	222.588	256.626	Business costs
Laba Usaha	Rp Juta	(96.918)	(129.045)	(54.602)	Operating profit
Pendapatan (Biaya) Non Usaha	Rp Juta	2.809	(31.634)	5.368	Non-Business Revenue (Cost)
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	(94.109)	(160.679)	(49.234)	Profit before tax

Penjualan Teh (Rp Juta)
Tea Sales (Million Rupiah)

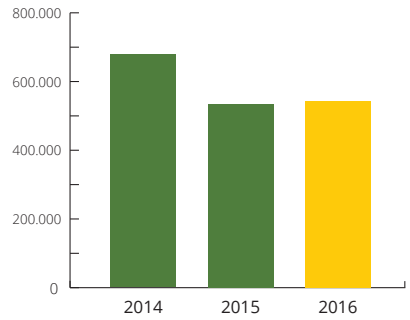

Beban Pokok Penjualan Teh (Rp Juta)
Cost of Goods Sold (Million Rupiah)

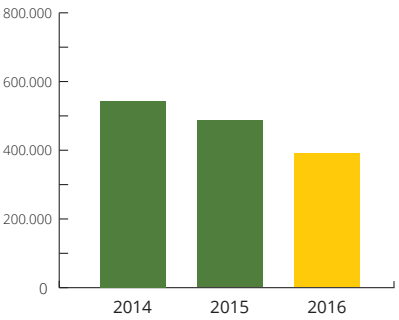

Laba Kotor Teh (Rp Juta)
Gross Profit (Million Rupiah)

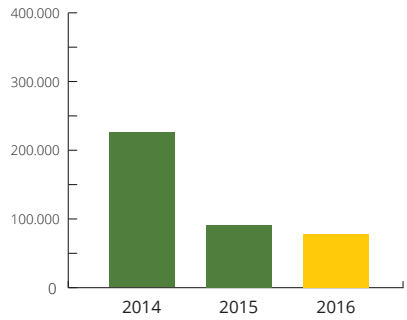

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Managen
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Komoditi Karet

Areal

Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman Karet merupakan area terluas, yaitu mencapai 24.405 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari:

- Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 17.880 hektar; dan
- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 5.079 hektar.

Rubber Commodity

Area

Of the total plantation concession area of PTPN VIII, Rubber plant area is the largest area, reaching 24,405 hectares. The land area consists of:

Plant Produce (TM) of 17,880 hectares; and

Plants Not Produce (TBM) and Plants of the Year (TTI) of 5,079 hectares.

Perkembangan Areal Tanaman Karet

	Satuan	2016	2015	2014	
Karet (Total)	Ha	22.959	23.629	23.631	Rubber (Total)
Tanaman Menghasilkan (TM)	Ha	17.880	17.605	16.564	Plant Produce (TM)
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI)	Ha	5.079	6.024	7.067	Plants Do not Produce (TBM) and Plants of the Year (TTI)

Produksi dan Produktivitas

Pencapaian produksi komoditi Karet tahun 2016 sebesar 17.345 ton atau sebesar 110% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya kapasitas panen pada sadap reguler akibat gangguan cuaca yaitu kemarau panjang sehingga terjadi gugur daun lebih awal pada bulan Juli, Agustus dan September. Adapun faktor lain adalah terjadinya persaingan serapan tenaga kerja di beberapa kebun Karet dengan industri lain yang berkembang di daerah sekitar perkebunan.

Production and Productivity

The achievement of Rubber commodity production in 2016 amounted to 17,345 tons or 110% of the realization in 2015. This is caused by the unavailability of harvest capacity on regular tapping due to weather disturbance that is long drought so that leaves fall early in July, August and September. The other factor is the occurrence of competition of labor absorption in some Rubber gardens with other industries growing in the area around the plantation.

Produksi, Produktivitas dan Volume Penjualan

	Satuan	2016	2015	2014	
Karet					Rubber
Produksi Karet (Basah)	Ton	134.627	58.345	68.730	Rubber Production (Wet)
Produksi Karet (Kering)	Ton	30.173	15.794	17.777	Rubber Production (Dry)
Produktivitas	Kg/Ha	1.487	756	911	Productivity
Volume Penjualan	Ton	24.846	15.688	18.205	Sales Volume

Penjualan

Realisasi volume penjualan komoditi Karet tahun 2016 sebesar 16.081 ton atau sebesar 103% dari realisasi tahun 2015. Hal ini merupakan akibat dari masih minim permintaan pasar dunia yang terkena krisis serta tidak tercapainya target produksi. Nilai Penjualan tahun 2016 tercapai sebesar Rp 316,9 Miliar atau 99% dari realisasi tahun 2015.

Sales

The realization of Rubber commodity sales volume in 2016 amounted to 16,081 tons or 103% of the realization in 2015. This is a result of the still low demand of world markets hit by the crisis and not achieving the production target. Sales Value of 2016 reached Rp 316.9 Billion or 99% of realization in 2015

Produksi Karet Kering (Ton)
Dry Rubber Production (Ton)

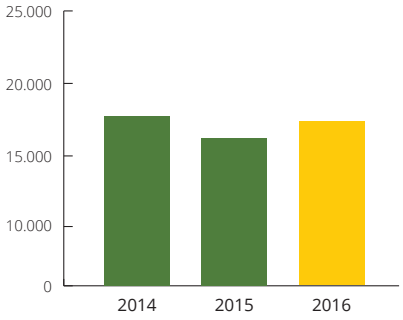

Produktivitas Karet (Kg/Ha)
Rubber Productivity (Kg/Ha)

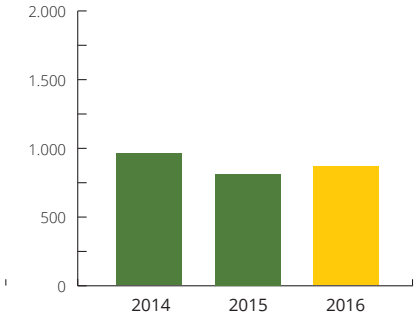

Penjualan Karet (Ton)
Rubber Sales (Ton)

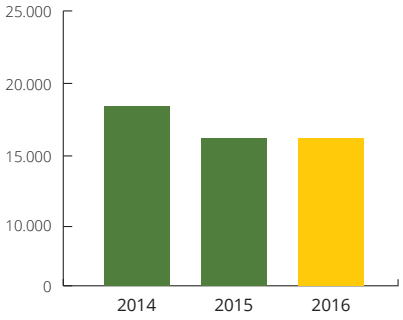

Profitabilitas

Pada tahun 2016, Komoditi Karet mengalami kerugian yang terlihat dari laba sebelum pajak sebesar Rp (155,1) miliar, turun sebesar Rp 32,4 miliar dari tahun 2015. Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh menurunnya produksi dan penjualan serta turunnya harga jual.

Profitability

In 2016, the Rubber Commodity experienced a visible loss from profit before tax of Rp 155.1 billion, down Rp 32.4 billion from 2015. The decrease was mainly due to lower production and sales and lower selling prices.

Laba Rugi Komoditi Karet

	Satuan	2016	2015	2014	
Karet					Rubber
Penjualan	Rp Juta	316.991	320.656	421.751	Sales
Beban Pokok Penjualan	Rp Juta	261.910	259.668	268.190	Cost of goods sold
Laba Kotor	Rp Juta	55.081	60.987	153.561	Gross profit
Biaya Usaha	Rp Juta	104.666	153.416	183.672	Business costs
Laba Usaha	Rp Juta	(49.585)	(92.429)	(30.111)	Operating profit
Pendapatan (Biaya) Non Usaha	Rp Juta	(105.536)	(30.285)	3.166	Non-Business Revenue (Cost)
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	(155.121)	(122.714)	(26.944)	Profit before tax

Penjualan Karet (Rp Juta)
Rubber Sales (Million Rupiah)

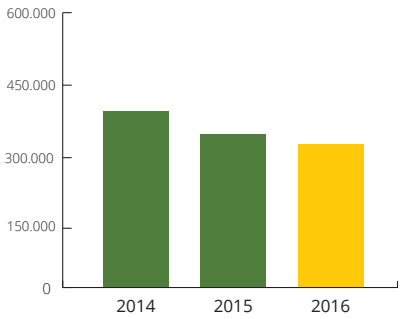

Beban Pokok Penjualan Karet (Rp Juta)
Cost of Goods Sold Rubber (Million Rupiah)

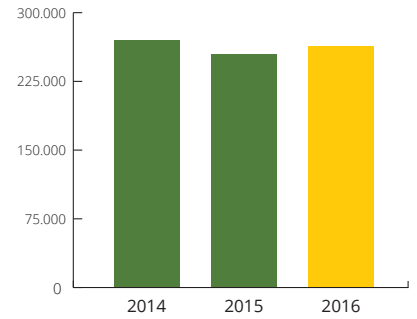

Laba Kotor Karet (Rp Juta)
Gross Profit Rubber (Million Rupiah)

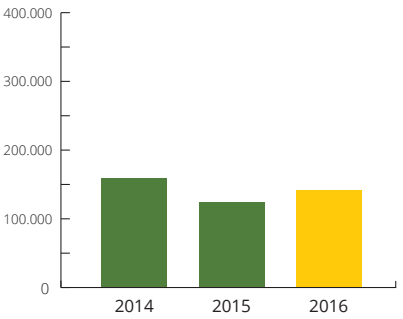

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Komoditi Kelapa Sawit

Areal

Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman Kelapa Sawit mencapai 20.449 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari:

- Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 17.432 hektar; dan
- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 1.857 hektar.

Komoditi Kelapa Sawit

Areal

Dari total area konsesi perkebunan PTPN VIII, area tanaman Kelapa Sawit mencapai 20.449 hektar. Luas lahan tersebut terdiri dari:

- Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 17.432 hektar; dan
- Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI) seluas 1.857 hektar.

Perkembangan Areal Tanaman Kelapa Sawit — Development of Oil Palm Plantation Area

		2016	2015	2014	
Kelapa Sawit (Total)	Ha	20.449	19.447	19.447	Oil Palm (Total)
Tanaman Menghasilkan (TM)	Ha	17.432	16.964	15.900	Plant Produce (TM)
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Tahun Ini (TTI)	Ha	1.857	2.484	3.548	Plants Do not Produce (TBM) and

Produksi dan Produktivitas

Pencapaian produksi komoditi Kelapa Sawit (Minyak dan Inti) tahun 2016 adalah sebesar 60.195 ton atau 80% dari realisasi 2015. Meskipun lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya, namun capaian produksi tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh stagnasi buah akibat kecenderungan munculnya bunga jantan.

Produksi dan Produktivitas

Pencapaian produksi komoditi Kelapa Sawit (Minyak dan Inti) tahun 2016 adalah sebesar 60.195 ton atau 80% dari rrealisasi 2015. Meskipun lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya, namun capaian produksi tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2016. Hal tersebut disebabkan oleh stagnasi buah akibat kecenderungan munculnya bunga jantan.

Produksi, Produktivitas dan Volume Penjualan — Production, Productivity and Sales Volume

	Satuan	2016	2015	2014	
Kelapa Sawit					
Produksi Tandan Buah Segar (TBS)	Ton	271.588	307.818	273.358	
Produksi Minyak Sawit	Ton	53.406	65.222	58.609	
Produksi Inti Sawit	Ton	6.789	10.486	9.093	
Produktivitas	Kg TBS/Ha	11.539	14.026	13.612	
Volume Penjualan Minyak Sawit	Ton	49.750	63.875	58.825	
Volume Penjualan Inti Sawit	Ton	6.830	10.100	8.883	

Penjualan

Realisasi volume penjualan komoditi Kelapa Sawit tahun 2016 sebesar 56.580 ton atau sebesar 76% dari realisasi tahun 2015. Namun, Nilai Penjualan tahun 2016 hanya tercaapai sebesar Rp 400.358 Miliar atau 83% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan penurunan harga komoditi global terkait turunnya harga minyak mentah.

Penjualan

Realisasi volume penjualan komoditi Kelapa Sawit tahun 2016 sebesar 56.580 ton atau sebesar 76% dari realisasi tahun 2015. Namun, Nilai Penjualan tahun 2016 hanya tercapai sebesar Rp 400.358 Miliar atau 83% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan penurunan harga komoditi global terkait turunnya harga minyak mentah.

Produksi Minyak Sawit (Ton)
Palm Oil Production (Ton)

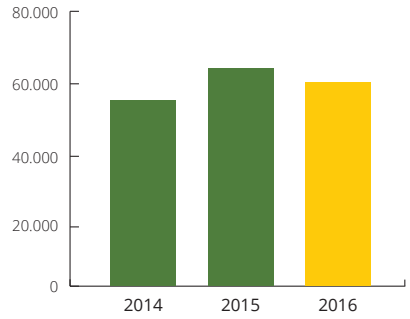

Produksi Inti Sawit (Ton)
Production of Palm Core (Ton)

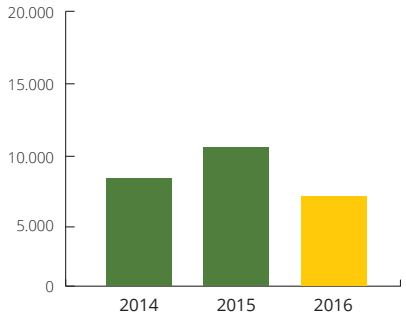

Produktivitas Sawit (Kg TBS/Ha)
Palm Productivity (Kg TBS / Ha)

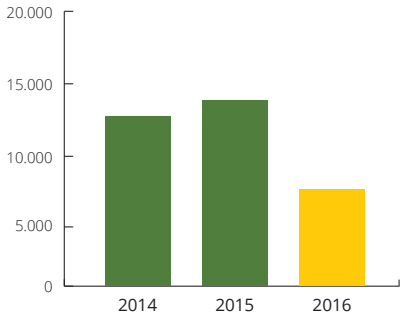

Profitabilitas

Pada tahun 2016, Komoditi Kelapa Sawit membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 10,2 miliar, turun sebesar Rp 29 miliar dari tahun 2015. Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh menurunnya produksi dan penjualan serta turunnya harga jual.

Profitability

In 2016, Palm Oil Commodities posted pre-tax profit of Rp 10.2 billion, down by Rp 29 billion from 2015. The decline in performance was mainly due to lower production and sales and lower selling prices.

Laba Rugi Komoditi Kelapa Sawit — Profit Loss of Palm Oil Commodity

	Satuan	2016	2015	2014	
Kelapa Sawit					Palm Oil
Penjualan	Rp Juta	400.358	479.721	534.459	Sales
Beban Pokok Penjualan	Rp Juta	298.876	298.273	301.708	Cost of goods sold
Laba Kotor	Rp Juta	101.482	181.449	232.751	Gross Profit
Biaya Usaha	Rp Juta	85.454	118.441	142.960	Business Cost
Laba Usaha	Rp Juta	16.028	63.007	89.791	Operating profit
Pendapatan (Biaya) Non Usaha	Rp Juta	23.117	(23.781)	(1.948)	Non-Business Revenue (Cost)
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	10.202	39.226	87.843	Profit before tax

Penjualan Kelapa Sawit (Rp Juta)
Palm Oil Sales (Million Rupiah)

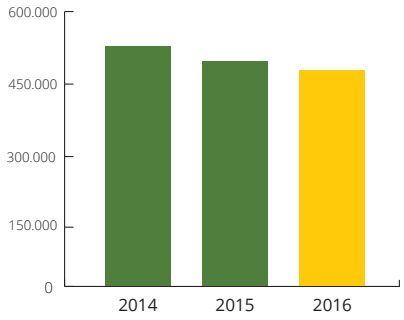

Beban Pokok Penjualan Sawit (Rp Juta)
Cost of Goods Sold Palm Oil (Million Rupiah)

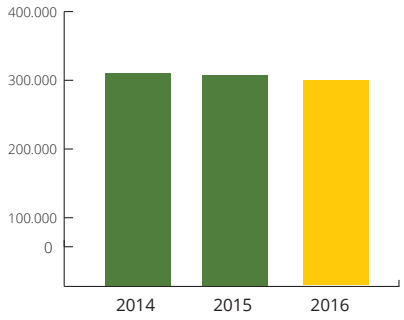

Laba Kotor Sawit(Rp Juta)
Gross Profit Palm Oil (Million Rupiah)

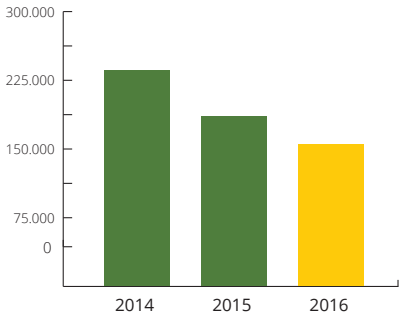

PTP NUSANTARA VIII (Persero)

Industri Hilir Teh

Pada tahun 2016, Industri Hilir Teh mengalami kerugian sebesar (Rp 24,2) miliar, turun dari capaian laba sebelum pajak tahun 2016 sebesar Rp 1,6 miliar. Realisasi nilai penjualan IHT tahun 2016 sebesar Rp. 24,4 miliar atau sebesar 46% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 52,7 Miliar. Saat ini IHT sedang melakukan penyusunan ulang strategi bisnis yang akan dikembangkan dan dalam proses investasi untuk penambahan kapasitas produksi.

Downstream Tea Industry

In 2016, Downstream Tea Industry suffered a loss of Rp 23.2 billion, down from 2016 pretax profit of Rp 1.6 billion. The realization of IHT sales value in 2016 is Rp. 24.4 billion or 46% of the realization in 2015 amounting to Rp. 52.7 bln. Currently IHT is conducting a rearrangement of business strategy that will be developed and in the process of investment for additional production capacity.

Laba Rugi Industri Hilir Teh — Profit Loss of Downstream Tea Industry

	Satuan	2016	2015	2014	
Penjualan	Rp Juta	24.415	52.777	42.819	Sales
Beban Pokok Penjualan	Rp Juta	24.023	26.398	29.272	Cost of goods sold
Laba Kotor	Rp Juta	392	26.379	13.547	Gross profit
Biaya Usaha	Rp Juta	23.645	23.752	9.985	Business costs
Laba Usaha	Rp Juta	(23.254)	2.627	3.562	Operating profit
Pendapatan (Biaya) Non Usaha	Rp Juta	(1.031)	(1.019)	129	Non-Business Revenue (Cost)
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	(24.285)	1.608	3.691	Profit before tax

Agrowisata

Pada tahun 2016, Unit Agrowisata membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 3,3 miliar, menurun sebesar 60% dari capaian laba sebelum pajak tahun 2015 sebesar Rp 5.5 Miliar. Pendapatan Agrowisata tahun 2016 relatif stagnan dari realisasi tahun 2015, dan biaya usaha naik sebesar 6% dari realisasi tahun 2015.

Agro tourism

In 2016, the Unit of Agro-tourism recorded a pre-tax profit of Rp 3.3 billion, a decrease of 60% from the profit before tax of 2015 of Rp 5.5 billion. Agro-tourism revenue in 2016 is relatively stagnant from the realization of 2015, and business costs rose by 6% from the realization in 2015.

Laba Rugi Agrowisata — Profit and Loss of Agrotourism

	Satuan	2016	2015	2014	
Pendapatan	Rp Juta	24.439	24.932	20.137	Income
Biaya Usaha	Rp Juta	21.068	19.429	15.903	Business costs
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	3.371	5.503	4.234	Profit before tax

Aneka Usaha (Aneka Buah)

Pada tahun 2016, Unit Aneka Usaha membukukan kerugian sebesar Rp (136,1) miliar dengan pendapatan sebesar Rp. 23,7 Miliar atau menurun Rp. 16,5 miliar dari capaian tahun sebelumnya, hal tersebut tidak cukup untuk menutupi kenaikan biaya usaha yang mencapai Rp. 598 Miliar atau 259 % dari tahun sebelumnya .

Assorted Enterprises (Aneka Buah)

In 2016, Aneka Usaha Unit booked a loss of Rp 136.1 billion with revenue of Rp. 23.7 Billion or decrease Rp. 16.5 billion from the previous year's achievement, it is not enough to cover the increase of business costs reaching Rp. 598 Billion or 259% from the previous year.

Laba Rugi Aneka Usaha — Profit Loss Business

	Satuan	2016	2015	2014	
Pendapatan	Rp Juta	23.715	40.231	35.924	Income
Biaya Usaha	Rp Juta	159.887	61.541	25.254	Business costs
Laba Sebelum Pajak	Rp Juta	(136.171)	(21.310)	10.670	Profit before tax

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Tinjauan Hasil Usaha
Business Review

Laba Rugi Komprehensif

Pada tahun 2016 Perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp (376) miliar, naik dari tahun sebelumnya yaitu laba sebesar Rp (292) miliar. Untuk laba komprehensif konsolidasian, Perusahaan membukukan laba sebesar Rp (473) miliar.

Perusahaan sebelumnya mengukur seluruh aset tetap dengan menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", di mana setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Pada tahun 2016, Perusahaan memilih untuk mengubah kebijakan akuntansi atas tanah karena Kelompok Usaha menyakini bahwa model revaluasi lebih mencerminkan nilai dari tanah tersebut.

Comprehensive Income

In 2016 the Company posted a loss for the year amounting to Rp (376) billion, up from the previous year's profit of Rp (292) billion. For consolidated comprehensive income, the Company posted a profit of Rp (473) billion.

The Company previously measured all of its property and equipment using the cost model in accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets", which, after initial recognition, property, plant and equipment are stated at cost less any accumulated depreciation and impairment losses. In 2016, the Company chose to change its accounting policy on land because the Business Group believed that the revaluation model reflected more of the value of the land.

Laba Rugi Komprehensif Kondolidasian — Consolidated Comprehensive Income

Uraian (Dalam juta Rupiah Kecuali Laba Bersih Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dalam Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		*Description (In million Rupiah Except Basic Earnings Per Share Attributable To Owners of a Master Subsidiary in Rupiah)*
	2016	2015	
Penjualan Bersih	1.320.413	1.515.497	Net sales
Beban Pokok Penjualan	1.070.663	1.140.405	Cost of goods sold
Laba (Rugi) Kotor	249.749	375.092	Gross Profit (Loss)
Biaya Usaha			Business costs
Beban Pemasaran dan Penjualan	(47.515)	(48.459)	Marketing and Sales Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(382.310)	(495.061)	General and Administrative Expenses
Penghasilan Operasi Lain---	90.024	44.777	Other Operating Income ---
Beban Operasi Lain	(262.103)	(102.589)	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	(352.154)	(226.240)	Profit (Loss) on Business
Penghasilan Keuangan	21.264	1.521	Financial Income
Pajak Final atas Penghasilan Keuangan	(497)	(298)	Final Tax on Financial Income
Beban Keuangan	(73.264)	(30.940)	Financial Expenses
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(404.652)	(255.957)	Profit (Loss) Before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(27.841)	(36.066)	Income Tax Expense
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(376.811)	(292.023)	Income for the year
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other Comprehensive Income:
Keuntungan dari Revaluasi Aset	(2.654)	5.488.511	Advantages of Asset Revaluation
Koreksi Penyajian Kembali PSAK 24 (R.2013) netto	(93.316)	(179.513)	Correction of Restatement of PSAK 24 (R.2013) net
Lainnya	(199)	(77)	Others
Penghasilan Komprehensif Lain netto	(96.169)	5.308.921	Other Comprehensive Income net
Total Laba Komprehensif Setelah Penyesuaian Laba Merging Entities	(472.979)	5.016.898	Total Profit Comprehensively After Adjustment of Profit Merging Entities
Laba Bersih Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(473.029)	(325.462)	Basic Earnings Per Share Attributable To Owners of the Parent Company

Laba Kotor

Realisasi dari laba kotor pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 125.343 juta atau 67% dari tahun 2015 sebesar Rp 375.049 juta menjadi Rp 249.749 juta pada tahun 2016. Marjin laba kotor pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 24,75% dibandingkan dengan marjin laba kotor saat tahun 2015 yang sebesar 34,81%.

Gross profit

Realization of gross profit in 2016 decreased by Rp 125,343 million or 67% from 2015 by Rp 375,049 million to Rp 249,749 million in 2016. Gross profit margin in 2016 decreased to 24.75% compared to gross profit margin When the year 2015 which amounted to 34.81%.

Pendapatan bersih

Pada tahun 2016, Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 1.320,4 miliar, turun sebesar 13% dari pendapatan di tahun 2015 yang mencapai Rp 1.515.497 miliar. Penurunan pendapatan terjadi pada komoditi Teh, Karet dan Kelapa Sawit dan Aneka Tanaman serta Pendapatan Lainnya seperti Agrowisata dan Pendapatan dari Anak Perusahaan. Penurunan pendapatan terjadi akibat dari adanya penurunan baik volume produksi maupun harga jual komoditi.

Net income

In 2016, the Company posted revenues of Rp 1,320.4 billion, a decrease of 13% from revenues in 2015 of Rp 1,515,497 billion. The decrease in income occurred in the commodities of Tea, Rubber and Oil Palm and Various Plants and Other Income such as Agro Tourism and Revenue from Subsidiaries. The decrease in income is due to a decrease in both production volume and commodity selling price.

Pendapatan Bersih

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Years end, December 31		*Description (In million Rupiah)*
	2016	2015	
Produk Teh	502.378	594.769	Tea Products
Produk Karet	316.991	320.656	Rubber Products
Produk Kelapa Sawit	400.358	479.721	Palm Oil Products
Produk Kina	0	7.037	Product Quinine
Produk Tanaman Lainnya	23.715	40.231	Other Plant Products
Pendapatan Lainnya	76.970	73.083	Other Revenue
Total Pendapatan Bersih	1.320.413	1.515.497	Total Net Revenue

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari biaya pemasaran dan penjualan, biaya administrasi dan umum, pendapatan operasi lain dan beban operasi lain. Beban usaha kami pada tahun 2016 naik sebesar 2% atau dari Rp 601.332 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 601.903 juta pada tahun 2016. Biaya pemasaran dan penjualan mengalami penurunan sebesar 2% atau dari Rp 48.459 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 47.515 juta pada tahun 2016 dan biaya administrasi dan umum turun sebesar 23% dari Rp 495.061 juta di tahun 2015 menjadi Rp 382.310 juta pada tahun 2016.

Operating expenses

Operating expenses consist of marketing and sales costs, administration and general costs, other operating income and other operating expenses. Our operating expenses in 2016 increased by 2% or from Rp 601,332 million in 2015 to Rp 601,903 million in 2016. Marketing and sales costs decreased by 2% or from Rp 48,459 million in 2015 to Rp 47,515 million in 2016 And administrative and general expenses decreased by 23% from Rp 495,061 million in 2015 to Rp 382,310 million in 2016.

Laba Usaha

Meskipun terjadi penurunan pada Beban Pokok Penjualan, hal tersebut juga diikuti dengan penurunan pada pendapatan bersih serta kenaikan pada beban usaha sehingga terjadi penurunan laba usaha Perusahaan pada tahun 2016. Laba usaha pada tahun 2016 turun sebesar Rp 125.914 juta yaitu dari sebesar Rp 226.240 juta di tahun 2015 menjadi Rp (352.154) juta pada tahun 2016.

Operating profit

Despite the decrease in Cost of Goods Sold, it is also followed by a decrease in net income and an increase in operating expenses resulting in a decrease in operating income in 2016. Operating profit in 2016 decreased by Rp 125,914 million from Rp 226,240 million 2015 to Rp (352,154) million in 2016.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan Perusahaan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6% dari Rp 1.140.405 juta di tahun 2015 menjadi Rp 1.070.663 juta di tahun 2016. Pos pembelian bahan baku, pemeliharaan, beban gaji dan tunjangan, beban penyusutan dan amortisasi serta beban lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 9%, 30%, 13%, 8% dan 25%.

Selain penurunan beban tersebut, terjadi kenaikan pada beban pemupukan, beban panen dan pengangkutan serta beban pengolahan masing-masing sebesar 77%, 7% dan 57% dari realisasi tahun sebelumnya.

Cost of goods sold

Cost of Sales of the Company in 2016 decreased by 6% from Rp 1,140,405 million in 2015 to Rp 1,070,663 million in 2016. The purchases of raw materials, maintenance, salaries and allowances, depreciation and amortization expenses and other expenses Decreased when compared to the year 2015 by 9%, 30%, 13%, 8% and 25%.

In addition to the decrease in expenses, there was an increase in fertilization, harvesting and transport expenses and processing expenses by 77%, 7% and 57% respectively from the previous year.

Beban Pokok Penjualan

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Uraian (Dalam juta Rupiah)
	2016	2015	
Beban Langsung			Direct Expenses
Pembelian Bahan Baku	105.257	115.494	Purchase of Raw Materials
Pemupukan	122.539	69.227	Fertilization
Pemeliharaan	109.616	156.314	Maintenance
Panen dan Pengangkutan	400.198	375.532	Harvesting and Freight
Gaji dan Tunjangan	18.175	20.921	Salaries and allowances
Lainnya	49.489	65.810	Others
Jumlah Beban Langsung	805.273	803.297	Amount of Direct Expenses
Biaya Pengolahan	268.611	170.622	Processing Fee
Penyusunan dan Amortisasi	127.725	138.253	Preparation and Amortization
Jumlah Biaya Produksi	1.201.609	1.112.172	Total Production Cost
Persediaan Barang Jadi			Inventory Items
Awal Tahun	105.783	134.016	The beginning of the year
Akhir Tahun	238.955	105.783	End of year

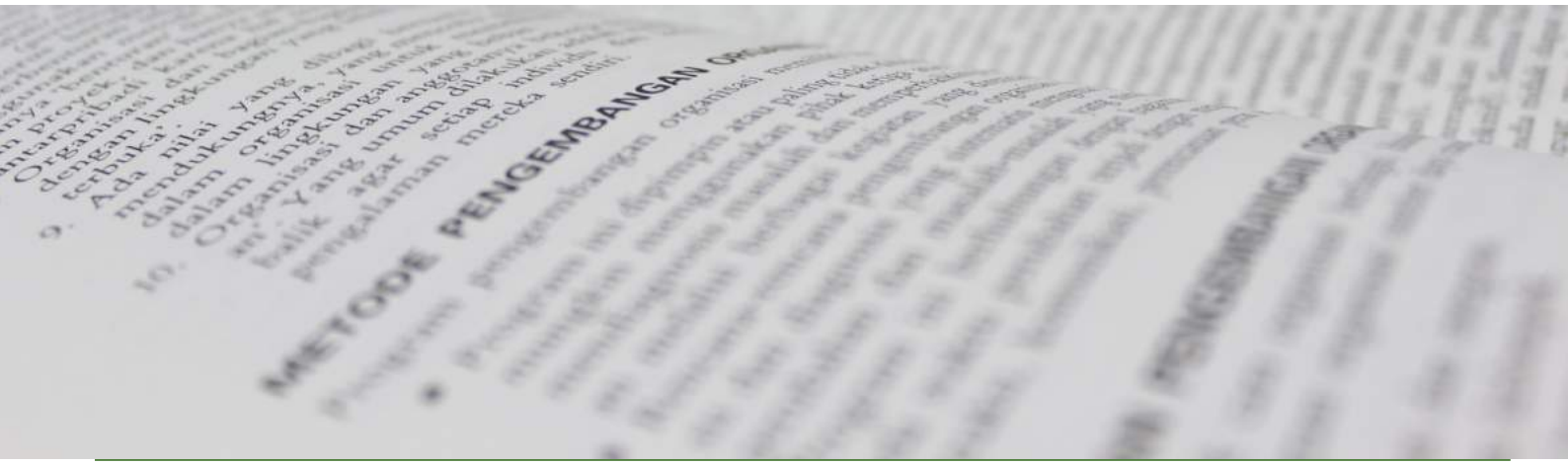

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Aset

Aset total Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp 133.864 juta atau 149% dari Rp 9.219.588 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 9.353.452 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini merupakan dampak dari adanya penilaian kembali kebijakan akuntansi perusahaan atas aset tetap berkaitan dengan pengukuran kelompok aset tetap tertentu setelah pengakuan awal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bab Tinjauan Hasil Usaha.

Assets

The Company's total assets increased by Rp 133,864 million or 149% from Rp 9,219,588 million as of December 31, 2015 to Rp 9,353,452 million as of December 31, 2016. This increase is the result of the revaluation of the Company's accounting policy over fixed assets related to Measurement of certain fixed asset groups after initial recognition, as described earlier in the Review of Results Results chapter.

Posisi Keuangan Konsolidasian — Consolidated Financial Position

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Description (In million Rupiah)
	2016	2015 (Disajikan Kembali)	
Aset Lancar	792.298	604.686	Current assets
Aset Tidak Lancar	8.561.154	8.614.902	Non-Current Assets
Jumlah Aset	9.353.452	9.219.588	Total assets
Liabilitas Jangka Pendek	1.282.788	790.957	Short-term liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	2.938.230	2.660.181	Long Term Liabilities
Ekuitas	5.132.434	5.768.450	Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.353.452	9.219.588	Amount of Liabilities and Equity

Aset Lancar

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp 792.298 juta, naik sebesar Rp 187,6 juta atau 31% yang terutama disebabkan oleh:
penurunan pada Kas dan setara kas sebesar 61% dari Rp 162.412 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 98.262 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Current assets

Current assets as of December 31, 2016 amounted to Rp 792,298 million, an increase of Rp 187.6 million or 31% mainly due to:
Decrease in Cash and cash equivalents by 61% from Rp 162,412 million as of December 31, 2015 to Rp 98,262 million as of December 31, 2016.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp 8.561.154 juta, turun sebesar Rp 53.748 juta atau 1%.

Non-Current Assets

Non-current assets as of December 31, 2016 amounted to Rp 8,561,154 million, a decrease of Rp 53,748 million or 1%.

Liabilitas

Saldo total Liabilitas Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp 503.577 juta atau 80% dari Rp 3.451.138 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4.221.017 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilities

Total balance of the Company's Liabilities increased by Rp 503,577 million or 80% from Rp 3,451,138 million as of December 31, 2015 to Rp 4,221,017 million as of December 31, 2016.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 berjumlah Rp 1.282.788 juta, naik sebesar Rp 491.831 juta atau 162 % dari Rp. 790.957 juta tanggal 31 Desember 2015.

Short-term liabilities

Short-term liabilities as of December 31, 2016 amounted to Rp 1,282,788 million, an increase of Rp 491,831 million or 162% from Rp. 790,957 million as of December 31, 2015.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Posisi Keuangan Konsolidasian — Consolidated Financial Position

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Description (In million Rupiah)
	2016	2015	
Jumlah Liabilitas (Rp Juta)	4.221.017	3.451.138	Current assets
Ekuitas	5.132.434	5.768.450	Non-Current Assets
Rasio Utang Terhadap Modal (%)	82,24	59,83	Total assets

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 berjumlah Rp 4.221.017 juta, naik sebesar Rp 679.879 juta atau 80% dari Rp. 3.451.138 juta tanggal 31 desember 2015

Amount of Liabilities

Total Liabilities as of December 31, 2015 amounted to Rp 4,221,017 million, an increase of Rp 679,879 million or 80% from Rp. 3,451,138 million on 31 December 2015

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 berjumlah Rp 5.132.434 juta, turun sebesar Rp 636.016 juta atau 11 % dari Rp. 5.768.450 per tanggal 31 Desember 2015

Equity

Equity as of December 31, 2016 amounted to Rp 5,132,434 million, decreased by Rp 636,016 million or 11% from Rp. 5,768,450 as of December 31, 2015

Arus Kas

Posisi Kas dan setara kas akhir tahun 2016 meningkat sebesar 16%, yakni dari Rp 139.977 juta di tahun 2015 menjadi Rp 162.412 juta di tahun 2016. peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 40.051 juta serta peningkatan pengeluaran kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 69.397 juta.

Cash flow

Cash and cash equivalents at the end of 2016 increased by 16% from Rp 139,977 million in 2015 to Rp 162,412 million in 2016. The increase was mainly due to a decrease in cash flows from operating activities amounting to Rp 40,051 million and increased cash expenditures for activities Investment amounting to Rp 69,397 million.

Arus Kas Konsolidasian — Consolidated Cash Flows

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Description (In million Rupiah)
	2016	2015	
Kas Neto yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	229.638,61	269.690,00	Net Cash Provided From Operating Activities
Kas neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(276.958,75)	(207.561,00)	Net Cash Used For Investment Activities
Kas neto yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	(17.986,00)	(45.551,00)	Net cash earned from financing activities
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(65.306,15)	16.578,00	Decrease in Net Cash and Cash Equivalents
Dampak Neto Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas	1.156,90	5.857,00	Net Impact of Exchange Rate Difference on Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	162.411,65	139.977,00	Cash and Cash Equivalents Early Years
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	98.262,41	162.412,00	Cash and Year End Cash Equivalents

Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Collectible Receivables

Likuiditas
Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Tingkat likuiditas Perseroan tahun 2016 adalah sebesar 61%, menurun dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 76%.

Liquidity
Liquidity is the ability of the Company to meet its current liabilities measured by comparison between current assets and current liabilities. The Company's liquidity level in 2016 is 61%, down from 76% in 2015.

Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang diukur dengan membandingkan seluruh liabilitas dengan seluruh aset. Perbandingan antara liabilitas dengan aset Perseroan tahun 2016 adalah sebesar 0,45 kali, menurun apabila dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2015 yang sebesar 0,37 kali. Perbandingan besaran rasio tersebut menyiratkan bahwa Perseroan masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Solvency
Solvency is the ability of the Company to fulfill all its liabilities, as measured by comparing all liabilities with all assets. The comparison between liabilities and assets of the Company in 2016 is 0.45 times, decreasing when compared to the same ratio in 2015 which is 0.37 times. The ratio comparison implies that the Company still has sufficient ability to fulfill all its obligations.

Tingkat Kolektibilitas
Pada tahun 2016, kolektibilitas perusahaan ditunjukkan dengan angka average collection period 29,88 hari, sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonvers piutang menjadi kas/ setara kas adalah 29 hari. Sementara, angka tahun 2015 adalah 20 hari. Hal ini menunjukkan kemampuan kolektibilitas perseroan dalam menagih piutang masih cukup baik.

Collectibility Level
In 2016, the company's collectibility is shown by the average collection period of 29.88 days, so the average time it takes to convert accounts into cash is equivalent to 29 days. Meanwhile, the number of 2015 is 20 days. This shows the company's collectibility ability to collect receivables is still quite good.

Kebijakan Struktur Modal

PTPN VIII menyadari bahwa struktur modal perusahaaan harus berada pada keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang memaksimumkan harga saham, oleh karena itu pihak manajemen sangat mempertimbangkan secara matang struktur modal perusaan. Pada tahun 2016 Aset Perusahaan dibiayai oleh 37% dari Liabilitas dan 63% dari Ekuitas.

Capital Structure Policy

PTPN VIII realizes that the capital structure of the company should be in the balance between risk and return maximizing stock prices, therefore the management is very carefully considering the capital structure of the company. In 2016 the Company's assets are financed by 37% of Liabilities and 63% of Equity.

Struktur Modal

Uraian (Dalam juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31				Description (In million Rupiah)
	2015	%	2014	%	
Aset	9.353.452	100	9.219.588	100	Asset
Liabilitas	4.221.017	45	3.451.138	37	Liabilities
Ekuitas	5.132.434	54	5.768.450	63	Equity

PTPN VIII bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat, pemeringkat pinjaman yang kuat, dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Perusahaan dan entitas anak memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio leverage maksimum. Selain itu pemeringkatan pinjaman

pTPN VIII aims to achieve optimal capital structure to meet business objectives, including by maintaining a healthy capital ratio, strong credit rating, and maximizing shareholder value. Some of the Company's and Subsidiaries' debt instruments have financial ratios that require a maximum leverage ratio. In addition, the company's rating

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

perusahaan yang dilakukan oleh badan pemeringkat pinjaman didasarkan pada kemampuan Perusahaan mempertahankan rasio leverage tertentu.

PTPN VIII dan entitas anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar. Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti Rasio Utang terhadap Modal. Pada tahun 2016, rasio utang terhadap modal adalah sebesar 59,83%, turun dari posisi tahun 2014 sebesar 392,19%.

of loans made by the credit rating agency is based on the Company's ability to maintain certain leverage ratios.

PTPN VIII and its subsidiaries have met all capital requirements stipulated by outsiders. Management monitors capital by using several measures of financial leverage such as Debt Ratio to Capital. In 2015, the ratio of debt to capital is 59.83%, down from the position in 2014 amounted to 392.19%.

Rasio Utang Terhadap Modal — Debt Ratio To Capital

Uraian	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Description
	2016	2015	
Jumlah Liabilitas (Rp Juta)	4.221.017	3.451.138	Total Liabilities (Rp Million)
Ekuitas	5.132.434	5.768.450	Equity
Rasio Utang Terhadap Modal (%)	82,24	59,83	Debt Ratio To Capital (%)

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
Employee Stock Ownership and / or Management Program

Sesuai dengan karakteristik PTPN VIII yang dimiliki oleh Pemerintah dan PTPN III (Persero), maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (esop/msop) di PTPN VIII. Dengan demikian, kami tidak menyajikan informasi yang terkait program tersebut, seperti jumlah saham esop/msop, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga exercise.

In accordance with the characteristics of PTPN VIII owned by the Government and PTPN III (Persero), there is no employee and / or management (esop / msop) ownership program in PTPN VIII. As such, we do not provide program-related information, such as the number of esop / msop shares, the timeframe, the terms of the employee and / or the eligible management, and the exercise price.

Investasi Barang Modal pada Tahun Buku Terakhir
Investment in Capital Goods in the Last Final Year

Pada tahun 2015, investasi barang modal PTPN VIII dalam bentuk aset tetap terealisasi sebesar Rp 176.486 juta, naik turun 63% dari investasi tahun 2014 yang sebesar Rp 481.987 juta. Jumlah investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha dengan nilai terbesar dialokasikan untuk Investasi Tanaman sebesar Rp 157.061 juta. Selama tahun 2015 Perusahaan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

In 2015, capital investment of PTPN VIII in the form of fixed assets was realized amounting to Rp 176,486 million, up 63% from investment in 2014 amounting to Rp 481,987 million. The amount of investment is intended for business development with the largest value allocated for Plant Investment amounting to Rp 157.061 million. During 2015, the Company did not engage in a material bonding of capital investment

Investasi / Investment

Uraian (Dalam Juta Rupiah)	Tahun yang berakhir 31 Desember, Year end december 31		Description
	2015	2014	
Tanaman			Plant
Teh	20.414	47.262	Tea
Karet	79.493	142.622	Rubber
Kelapa Sawit	35.492	82.525	Palm oil
Kina	3.148	4.415	Quinine
Aneka Tanaman	18.513	90.411	Various Plants
Jumlah Investasi Tanaman	157.061	367.234	Number of Plant Investment
Non Tanaman			Non Crops
Bangunan Perusahaan	765	4.772	Building Company
Mesin dan Instalasi	5.544	92.693	Machine and Installation
Jalan, Jembatan dan Saluran Air	2.278	2.589	Roads, Bridges and Waterways
Alat Pertanian dan Inventaris Kecil	10.698	12.369	Agricultural Equipment and Small Inventory
Aset Lainnya	139	2.329	Other Assets
Jumlah Investasi Non Tanaman	19.425	114.752	Total Non-Plant Investment
Jumlah Investasi	176.486	481.987	Amount of Investment

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang/ Modal
Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and Debt / Capital Restructuring

Investasi

PT PSBI

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M No. 21 tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015. PSBI merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan belum melakukan penyetoran atas investasi ini.

Investation

PT PSBI

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) was established based on Notarial Deed of Mala Mukti, S.H., LL.M. 21 dated October 2, 2015, in the framework of the operation of the Jakarta-Bandung speed train. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter no. AHU-2460435.AH.01.01 Year 2015 dated October 12, 2015. PSBI is a joint venture between the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Jasa Marga (Persero) Tbk. As of the date of completion of the financial statements, the Company has not made any deposits on these investments.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Akuisisi

PTPN VIII tidak melakukan aktivitas akuisisi pada tahun 2015 sehingga kami tidak menyajikan informasi terkait tujuan dan nilai transaksi akuisisi tersebut.

Acquisitions

PTPN VIII does not conduct acquisition activities in 2015 so we do not provide information regarding the purpose and value of such acquisition transactions.

Ekspansi

PTPN VIII tidak melakukan aktivitas ekspansi pada tahun 2015 sehingga kami tidak menyajikan informasi terkait tujuan dan nilai transaksi ekspansi tersebut.

Expansion

PTPN VIII does not conduct expansion activities in 2015 so we do not provide information regarding the purpose and value of such expansion transactions.

Divestasi

PTPN VIII tidak melakukan aktivitas divestasi pada tahun 2015 sehingga kami tidak menyajikan informasi terkait tujuan dan nilai transaksi divestasi tersebut.

Divestment

PTPN VIII does not conduct divestment activity in 2015 so we do not present information related to the purpose and value of the divestment transaction.

Restrukturisasi Hutang/ Modal

PTPN VIII tidak melakukan aktivitas restrukturisasi hutang dan/atau modal Perusahaan pada tahun 2015 sehingga kami tidak menyajikan informasi terkait tujuan dan nilai transaksi restrukturisasi hutang/ modal tersebut.

Debt / Capital Restructuring

PTPN VIII does not engage in debt restructuring activities and/ or capital of the Company in 2015 so that we do not provide information related to the purpose and value of the debt / capital restructuring transaction.

Transaksi Material Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material transactions Conflict of Interest and / or Transaction with Affiliated Parties

Pada tahun 2016, PTPN VIII tidak melakukan transaksi tertutup yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak manapun. Kami memiliki kebijakan untuk mengungkapkan dan menyajikan informasi transaksi dengan pihak berelasi sesuai pernyataan standar akuntansi Keuangan 7: pengungkapan pihak-pihak berelasi. Yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah pemegang saham, entitas yang berelasi dengan pemerintah baik instansi pemerintah maupun entitas yang dikendalikan pemerintah, manajemen kunci, perusahaan asosiasi, perusahaan joint venture.

Seluruh transaksi dan saldo material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Pengungkapan saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan untuk kas, piutang, investasi dan utang. Pengungkapan dalam catatan 6 menjelaskan secara khusus saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tersebut.

In 2016, PTPN VIII does not conduct closed transactions containing conflict of interest with any party. We have a policy to disclose and present transactional information with related parties in accordance with Statement of Financial Accounting Standard 7: Related Party Disclosures. Interrelated parties are shareholders, entities that are related to the government, both government agencies and government-controlled entities, key management, associated companies, joint venture companies.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. Disclosure of balances and transactions with related parties can be seen in the notes to the financial statements for cash, accounts receivable, investment and debt. Disclosure in note 6 describes specifically the balances and transactions with such related parties.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN VIII tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2016 Nomor: RIS./I/468/V/2014 tanggal 21 Mei 2016, serta Keputusan Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor: SK-07/D1.MBU/09/2015 dan Nomor: KPJAK/Hold/SK/410/2015 tanggal 28 September 2016, penggunaan laba bersih ditetapkan sebesar 0% untuk Dividen. Kebijakan pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2016 akan ditentukan pada RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Pursuant to the Minutes of the Shareholders General Meeting of PTPN VIII concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for fiscal year 2016 Number: RIS./I/468/V/2014 dated May 21, 2016, and Decision of Shareholders of PT Perkebunan Nusantara VIII Number: SK-07 / D1.MBU / 09/2015 and Number: KPJAK / Hold / SK / 410/2015 dated September 28, 2016, the use of net profit is set at 0% for Dividends. The dividend-sharing policy of net profit for fiscal year 2015 will be determined at the GMS held in 2016.

Pembayaran Dividen — Paymen of Dividen

Uraian	2016	2014	2013	Description
Laba Bersih (Rp Juta)	-	6.909	119.602	Net Profit
Jumlah Dividen (Rp Juta)	-	-	26.316	Amount of Dividen
Dividend Payout Ratio (%)	N.A	N.A	22	Dividen d Payout Ratio (%)

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Use of Public Offering Funds

PTPN VIII merupakan Perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki negara dan PTPN III (Persero) serta tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham. Oleh sebab itu, tentu saja PTPN VIII tidak mengumpulkan dana hasil penawaran umum penjualan saham. Terkait hal tersebut, laporan tahunan 2016 PTPN VIII tidak menyajikan informasi mengenai harga saham, volume saham, dan penggunaan dana hasil penawaran umum penjualan saham, seperti total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan rups atas perubahan penggunaan dana.

PTPN VIII is a State-Owned Company and PTPN III (Persero) and does not trade its shares in the stock market. Therefore, of course PTPN VIII did not collect the proceeds from the public offering of stock sales. Related to that, the 2016 annual report of PTPN VIII does not provide information on stock quotes, share volume, and use of proceeds from public offering, such as total fundraising, fund usage plan, fund usage details, fund balance, and the date of rups approval for changes Use of funds.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Revaluasi Tanah
Kelompok Usaha menilai kembali kebijakan akuntansinya atas aset tetap berkaitan dengan pengukuran kelompok aset tetap tertentu setelah pengakuan awal. Kelompok Usaha sebelumnya mengukur seluruh aset tetap dengan menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", dimana setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada tahun 2015, Kelompok Usaha memilih untuk mengubah kebijakan akuntansi atas tanah karena Kelompok Usaha menyakini bahwa model revaluasi lebih mencerminkan nilai dari tanah tersebut. Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha menggunakan model revaluasi dimana tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai berikutnya. Sesuai ketentuan PSAK No. 16 (Revisi 2011), perubahan kebijakan akuntansi tersebut berlaku secara prospektif.

Standar Baru dan Revisi Standar
Kelompok Usaha telah menerapkan seluruh standar akuntansi baru dan yang direvisi yang efektif tanggal 1 Januari 2015, termasuk standar akuntansi berikut yang dipertimbangkan relevan bagi Kelompok Usaha sehingga mempengaruhi baik posisi dan/atau kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dan/atau pengungkapan terkait dalam kebijakan akuntansi maupun Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Revisi terhadap PSAK 1 memperkenalkan pengelompokan pos-pos yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode mendatang, seperti laba atau rugi atas aset keuangan tersedia untuk dijual, harus disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi, seperti revaluasi aset tetap. Revisi tersebut hanya mempengaruhi penyajian namun tidak mempengaruhi posisi maupun kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

PSAK 24: Imbalan Kerja
Kelompok Usaha menerapkan PSAK 24 secara retrospektif dengan beberapa ketentuan transisi yang ditetapkan dalam standar yang direvisi. Laporan posisi keuangan konsolidasian awal dari periode komparatif terdahulu (1 Januari 2014) dan jumlah komparatif telah disajikan kembali. PSAK 24 revisi merubah, diantaranya, akuntansi untuk program imbalan pasti.

Untuk program imbalan pasti, penundaan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial (yaitu "Pendekatan Koridor") tidak diperbolehkan, dan biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada tahun yang lebih awal antara:

Land Revaluation
The Business Group reassessed its accounting policy on fixed assets in relation to certain fixed asset group measurement after initial recognition. The Group previously measured all of its property and equipment using the cost model in accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets", which, after initial recognition, property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

In 2015, the Group chose to change its accounting policy on land because the Business Group believed that the revaluation model reflected more of the value of the land. After initial recognition, the Group uses a revaluation model whereby the land is measured at fair value on the date of revaluation less any accumulated impairment loss. In accordance with the provisions of PSAK No. 16 (Revised 2011), the changes in the accounting policies are applicable prospectively.

New Standards and Standard Revisions
The Group has adopted all new and revised accounting standards effective January 1, 2015, including the following accounting standards considered relevant for the Group to affect both the consolidated financial position and / or financial performance of the Group and / or related disclosures in the accounting policies and the Notes Of the consolidated financial statements.

PSAK 1: Presentation of Financial Statements
Revisions to PSAK 1 introduce groupings of items presented at other comprehensive income. The items to be reclassified to profit or loss in future periods, such as gain or loss on available-for-sale financial assets, should be presented separately from items that will not be reclassified, such as fixed assets revaluation. The revision only affects the presentation but does not affect the position or the consolidated financial performance of the Business Group.

PSAK 24: Employee Benefits
The Business Group implements PSAK 24 retrospectively with some transitional provisions set out in the revised standard. The preliminary consolidated financial position report from the previous comparative period (January 1, 2014) and the comparative amount has been restated. PSAK 24 revisions amend, among other things, accounting for defined benefit plans.

For defined benefit plans, deferred recognition of actuarial gains and losses (ie "Corridor Approach") is not allowed, and past service costs should be recognized as an expense in an earlier year between: (i) when an amendment or curtailment

(i) ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan (ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Sebagaimana disajikan kembali sesuai revisi PSAK 24, jumlah yang dicatat pada laba rugi hanya mencakup biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan penghasilan (beban) bunga neto. Perubahan lainnya dalam liabilitas imbalan kerja neto, termasuk keuntungan dan kerugian aktuarial, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Pengembalian yang diharapkan telah digantikan dengan mencatat penghasilan bunga dalam laba rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja.

PSAK 46: Pajak Penghasilan
Revisi PSAK No. 46 ini menghapuskan pajak penghasilan final sebagai bagian dari beban pajak penghasilan Kelompok Usaha. Revisi tersebut hanya mempengaruhi penyajian namun tidak mempengaruhi posisi maupun kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK 65 menggantikan bagian dari PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri yang mengatur akuntansi bagi laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 menetapkan model kendali tunggal bagi semua entitas termasuk entitas terstruktur.

Perubahan yang diperkenalkan oleh PSAK 65 mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan signifikan dalam menentukan entitas yang dikendalikan dan karenanya harus dikonsolidasikan oleh entitas induk, dibandingkan dengan persyaratan yang sebelumnya ditetapkan dalam PSAK 4. Tidak ada pengaruh terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha sehubungan dengan penerapan awal PSAK 65 dan PSAK 4 tersebut, kecuali bagi pengungkapan kebijakan akuntansi terkait.

PSAK 66: Pengaturan Bersama dan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
PSAK 66 menggantikan PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama, dan memberikan definisi dari pengendalian bersama dan perubahan bagi akuntansi untuk pengaturan bersama dengan memindahkan dari tiga kategori dalam PSAK 12 menjadi dua kategori berikut: (A) operasi bersama, yang operator bersamanya harus mengakui seluruh aset, liabilitas, pendapatan dan biaya, termasuk bagian relatif atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dikendalikan bersama, dan (B) ventura bersama, yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Revisi tersebut tidak mempengaruhi posisi maupun kinerja keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
PSAK 67 menetapkan persyaratan bagi pengungkapan atas kepentingan suatu entitas dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi dan entitas terstruktur. Persyaratan dalam PSAK 67 jauh lebih luas daripada persyaratan pengungkapan atas entitas anak yang sebelumnya ditetapkan, seperti ketika entitas anak dikendalikan tanpa

of the program takes place; And (ii) when the entity recognizes the related restructuring fee or severance pay.

As restated in accordance with the revised PSAK 24, the amounts recognized in profit or loss shall include the current service cost and past service cost, gains or losses on the settlement and net interest income (expense). Other changes in net liability benefits, including actuarial gains and losses, are recognized as other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss in the subsequent period.

The expected return has been replaced by recording the interest income in the income statement, which is calculated using the discount rate used to calculate the employee benefits liability.

PSAK 46: Income Tax
Revised PSAK No. 46 this abolished the final income tax as part of the income tax of the Group. The revision only affects the presentation but does not affect the position or the consolidated financial performance of the Business Group.

PSAK 65: Consolidated Financial Statements and PSAK 4: Individual Financial Statements
PSAK 65 supersedes part of PSAK 4: Consolidated and Separate Financial Statements which govern the accounting for the consolidated financial statements. PSAK 65 establishes a single control model for all entities including structured entities.

The changes introduced by PSAK 65 require management to exercise significant consideration in determining the controlled entity and must therefore be consolidated by the parent, in comparison with the requirements previously set out in PSAK 4. No effect on the Group's consolidated financial position and financial performance in relation to the initial application PSAK 65 and PSAK 4, except for disclosure of related accounting policies.

PSAK 66: Shared Arrangements and PSAK 15: Investments in Joint Associations and Venture Associations
PSAK 66 supersedes PSAK 12: Participation in Joint Venture, and provides a definition of joint control and change for accounting for joint arrangement by moving from three categories in PSAK 12 into the following two categories: (A) joint operations, which the joint operator shall recognize throughout Assets, liabilities, revenues and expenses, including the relative share of assets, liabilities, revenues and jointly controlled expenses, and (b) joint venture, which are accounted for using the equity method. The revision does not affect position or performance

PSAK 67: Disclosure of Interest in Other Entities
PSAK 67 provides for disclosure of the interests of an entity in a subsidiary, joint arrangement, associate entity and structured entity. The requirements in PSAK 67 are much broader than the disclosure requirements of previously established subsidiaries, such as when a subsidiary is controlled without a majority of the voting rights. No effect on the Group's business consolidated financial position and performance in relation to the initial implementation of SFAS 67, except for the related disclosures in the Notes to the relevant consolidated financial statements.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
The Implementation Basis of Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
The Principles of Good Corporate Governance

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Commitment to Implementation of Corporate Governance

Road Map Penerapan dan Internalisasi GCG
Corporate Governance Implementation and Internalization Road map

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Practice

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Covernance Structure

Organ Utama Good Corporate Governance
The Main Organs of Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) yaitu reformasi budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara kronologis perjalanan penerapan GCG di PTPN VIII.

The implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance/ GCG) by PT Perkebunan Nusantara VIII which reforms work culture, business management to create professionalism based on GCG principles. The following exposure is intended to provide a chronological overview of GCG implementation in PTPN VIII.

Organ Pendukung Good Corporate Governance
The Supporting Organs of GCG

Pemeriksaan Eksternal
External Examination

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Manajemen Risiko
Risk Management

Program Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Program

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System

Penyelesaian Permasalahan Hukum
Settlement of Legal Issues

Akses Infromasi dan Data Perusahaan
Corprate Information and Data Access

Pedoman Perilaku Etika
Code of Conduct

Penilaian atas Penerapan GCG
Assessment of GCG Application

Penanganan Keluhan Pelanggan
Handling of Customers Complaints

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

THE IMPLEMENTATION BASIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN VIII tentang Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN (vide Risalah RUPS PTPN VIII No. RIS/I.1/1000/XII/2015 tentang Persetujuan Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016).

Regulation of The Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance (GCG) implementation in State-Owned Enterprises. Minister of SOE Regulation no. PER-09 / MBU / 2012 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.

PTPN VIII General Meeting of Shareholders Resolution (AGM) concerning Inauguration of Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-01 / MBU / 2011 dated 01 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises Jo. Minister of SOE Regulation no. PER-09 / MBU / 2012 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises (vide Minutes of PTPN VIII RUPS No. RIS / I.1 / 1000 / XII / 2015 on Work Agreement and Corporate Budget (RKAP) Year 2016) .

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh proses dan struktur dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud, meliputi:

a. Keterbukaan (Transparansi)
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d.Kemandirian (Independency)
Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Good corporate governance is carried out through the implementation of the principles of good corporate governance throughout all of the process and structure of company's management. GCG principles consist of:

a. Transparency
Transparency in the decision making process and transparency in disclosing material and relevant information about the company.

b. Accountability
The clarity of organ's function, implementation and responsibility so that the company's management can run effectively.

c. Responsibility
The compliance of company's to applied legislations and healthy corporate principles.

d. Independence
The circumstances in which the company is managed professionally without any conflict of interest and influence/ pressure from any party that does not comply with the legislation and healthy corporate principles.

e. Fairness
Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders (stakeholders) arising under treaties and applied

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

PTPN VIII berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan karyawan tingkat pelaksana.
Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara juga memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
Tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Struktural, Aspek Operasional dan Aspek Perawatan.

Apek Struktural
Aspek Struktural adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk membentuk kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Aspek Struktural memastikan arah penerapan, struktur organisasi penerapan dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola perusahaan, penyediaan sumber daya, dan sebagainya.

Aspek Struktural dari tata kelola perusahaan, terdiri dari:

1. Mandat dan Komitmen

   Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, yang memperoleh mandat untuk menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Sedangkan Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi.

   Dari uraian di atas jelas bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa maksud, tujuan dan kepentingan Perseroan dapat tercapai dan tidak terganggu oleh peristiwa apapun. Dengan demikian terkait dengan penerapan GCG, maka Direksi adalah penanggung jawab utama penerapan GCG pada Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris adalah pengawas dalam pelaksanaan pengawasan (monitoring dan review) pelaksanaan penerapan GCG pada Perseroan.

2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

   Kebijakan tata kelola perusahaan yang baik merupakan merupakan pernyataan komitmen secara tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerapkan GCG dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan GCG. Penerapan GCG di PTPN VIII telah dilengkapi dengan penyusunan GCG

PTPN VIII is committed to applying the principles of good corporate governance consistently and sustainably in all business activities and all levels of the organization, from Board of Commissioners and Board of Directors down to lower level employees.
In order to apply the five basic principles mentioned above, in addition to referring to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the State-Owned Enterprises, PTPN VIII also pay attention to the provisions, norms and the Articles Of Association of SOES.
Good Corporate Governance consists of three (3) aspects, namely Structural Aspects, Operational Aspects and Treatment Aspects.

Structural aspects
Structural aspects are a number of actions need to be taken to establish policies and structures to implement good corporate governance. Structural Aspects ensure the direction of implementation, implementation organizational structure and the accountability of corporate governance application, provision of resources, and so on.

Structural aspects of corporate governance consist of:

1. Mandate and Commitment

   In the Act of Limited Liability Company, the one which were mandated to carry out management tasks for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company, both inside and outside the court is the Board of Directors. While the Board of Commissioners have a duty to supervise the policy and the course of the Company's management as well as giving advice to the Board of Directors.

   From the description above it is clear that the Board of Directors and the Board of Commissioners shall ensure that the goals, objectives and interests of the Company can be achieved and not disturbed by any event. Thus related to the implementation of good corporate governance, the Board of Directors is primarily responsible for the implementation of GCG in the Company, while the BOC is the supervisor in monitoring and reviewing the implementation of GCG in the Company.

2. Good Corporate Governance Policy (GCG Code)

   Good corporate governance policy is a written statement of commitment made by the Board of Directors and Board of Commissioners to implement GCG and targets to be achieved by the implementation of GCG. Implementation of GCG at PTPN VIII has been equipped with the preparation

Manual yang diantaranya board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Hal penting yang perlu disampaikan dalam pernyataan kebijakan GCG adalah:

- Hubungan antara kebijakan GCG dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya.
- Alasan penerapan GCG.
- Kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan GCG, termasuk infrastruktur pelaksanaannya.
- Penyediaan sumber daya untuk menerapkan GCG.
- Penentuan standar GCG yang akan digunakan.
- Pengukuran dan pelaporan kinerja GCG;
- Komitmen untuk melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan dan kerangka kerja GCG serta perbaikannya secara berlanjut.

3. Akuntabilitas

Hal yang terpenting dalam penyusunan infrastruktur organisasi dalam pengelolaan GCG adalah kejelasan dari akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan GCG di perusahaan.

a. Melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi PTPN VIII. Pembentukan Sekretaris Perusahaan dengan salah satu Urusan Kepatuhan dan GCG Surat Keputusan Direksi PTPN VIII Nomor : SK/D.I/252/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

b. Penunjukan salah seorang anggota Direksi melalui keputusan Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di PTPN VIII melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/III.1/732/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012. Sesuai kebijakan tersebut ditetapkan Direktur Utama sebagai penanggung jawab tertinggi penerapan dan pemantauan GCG di PTPN VIII.

c. Penetapan akuntabilitas penerapan GCG di PTPN VIII melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/86/II/201227 Februari 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PTPN VIII.

Aspek Operasional

Aspek Operasional adalah sejumlah prosedur, teknik, dan metoda yang harus disusun dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Aspek Operasional menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan terarah, mulai dari penyusunan GCG Manual, proses tata kelola perusahaan dan penanganan manajemen perubahan. Proses manajemen perubahan ini meliputi peluncuran, sosialisasi dan pelatihan hingga penerapan GCG dan akhirnya tumbuh kesadaran budaya

of GCG Manual which include board manual, risk management manual, internal control systems, internal surveillance systems, reporting mechanisms over alleged irregularities, information technology governance, and code of conduct.

The important things that needs to be delivered in the GCG policy statement are as follow:

- The relationship between the GCG policy with the goals of the organization and other policies.
- The reason of GCG Implementation.
- The explication of GCG implementation's accountability and responsibility, including the infrastructure of its implementation.
- The provision of resources to implement the GCG.
- Determination of GCG standards that will be used.
- GCG performance measurement and reporting;
- Commitment to undertake periodic review and verification on the GCG policy and framework as well as its continued improvement.

3. Accountability

The most important thing in preparing the organization's infrastructure in the GCG management is the explication of accountability and responsibility to encourage the implementation of GCG.

a. Improving the Organizational Structure of PTPN VIII. Formation of Corporate Secretary with one of its division; Compliance and Corporate Governance based on Board of Directors Decree No. :SK/DI/252/III/2009 dated March 31, 2009.

b. Appointment of one member of the Board of Directors through the BOD meeting as the person in charge for the implementation and monitoring of GCG in PTPN VIII by the Board of Directors Decision No. KEP/III.1/732/X/2012 dated October 31, 2012. According to that policy, the followings are set President Director as the highest person in charge of the implementation and monitoring of GCG in PTPN VIII.

c. Establishment of GCG implementation accountability in PTPN VIII by the Board of Directors Decision No. KEP/I.1/86/II/2012 dated February 27, 2012 regarding the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PTPN VIII.

Operational Aspects

Operational aspects are a number of procedures, techniques, and methods should be developed to implement the risk management process. Operational aspects shows a systematic and purposeful stages of the implementation process, starts from the preparation of GCG Manual, the process of corporate governance and the handling of change management. This change management process includes the launch, socialization and training until the implementation of GCG and finally

untuk menerapkan GCG. Proses perubahan tersebut harus dimulai dari *Top Management* terlebih dahulu, sehingga mereka dapat berperan sebagai *Change Leader* yang akan diikuti oleh *Middle Management.* Kemudian *Middle Management* akan menjadi *Change Leader* yang akan diikuti oleh *Line Management* Proses yang sama akan dilakukan oleh *Line Management* yang akan berfungsi sebagai *Change Leader* bagi seluruh karyawan.

Aspek Perawatan

Aspek perawatan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan. Aspek perawatan dari tata kelola perusahaan yang baik antara lain terdiri dari: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, komunikasi dan publikasi, *review* dan penilaian atas penerapan GCG, serta *Benchmarking.*

grow the cultural awareness to implement GCG. The change management process should be started from the Top Management, so that they can act as a Change Leader who will be followed by the Middle Management. Middle Management in turn will be a Change Leader who will be followed by Line Management. The same process will be performed by Line Management which will serve as a Change Leader for all employees

Maintenance aspects

Maintenance aspects are a number of activities that must be implemented to support and improve the implementation of good corporate governance on an ongoing basis. The maintenance aspects of good corporate governance, among others, consist of: ongoing education and training, communication and publications, review and assessment of the implementation of GCG, and Benchmarking.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

ROAD MAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
ROAD MAP IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

2000

1. Penunjukan Tim Konsultan Price Waterhouse Coopers (PWC) -> Pilot Project GCG PTPN VIII, PT PLN, PT TImah Tbk, PT PELNI, PT Jasa Marga.
2. Penyusunan kebijakan penerapan GCG -> Pedoman Pelaksanaan GCG PTPN VIII.
3. Pembentukan Tim Penerapan Konsep GCG -> Konsep Panduan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Code for GCG).

1. **The Appointment of Price Waterhouse Coopers Consultant Team (PWC) -> GCG Pilot Project of PTPN VIII, PT PLN, PT Timah Tbk, PT Pelni, PT Jasa Marga.**
2. **Creating the GCG implementation policy -> PTPN VIII GCG Guidelines.**
3. **Foundation of GCG Concepts Implementation Team -> Good Corporate Management Guidelines Concept (Code for GCG).**

2001

Pembentukan Tim Penyusun Pedoman GCG -> Panduan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Code for GCG).

Foundation of GCG Manual Compiler Team -> Good Corporate Management Guidelines (Code for GCG).

2002

Pengukuran dan Pengujian Penerapan GCG oleh BPKP.

Measurement and Assessment of GCG Implementation by BPKP.

2009

1. Asistensi Inventarisasi dan Pemetaan Kebijakan Manajemen oleh BPKP Perwakilan Jabar.
2. Penyempurnaan Struktur Organisasi PTPN VIII.
3. Pengembangan Desain dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern.

1. Management Policies Inventarisation and Mapping Assistance by BPKP West Java.
2. Improvement of PTPN VIII Organizational Structure.
3. Design development and Implementation of Internal

2010 - 2011

1. Pengembangan Desain dan Implementasi Enterprise Risk Management.
2. Pengukuran & Pengujian Implementasi GCG PTPN VIII oleh BPKP.

1. **Design development and Implementation of Enterprise Risk Management.**
2. **Measurement & Assessment of PTPN VIII GCG Implementation by BPKP.**

2015 - 2016

1. Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan Festival Anti Korupsi.
3. Penyempurnaan Penyusunan Pedoman/Kebijakan:
   a. GCG
   b. Board Manual
4. Penyempurnaan Pedoman Audit
5. GCG Online System Application.
6. "PTPN VIII Bersih" movement.

2003

Pembentukan Komite Audit.

Audit Commitee Establishment.

2004

Reviu Penerapan GCG oleh BPKP.

GCG Implementation Review by BPKP.

2005 - 2008

Pelaksanaan Asistensi Implementasi GCG dan Manajemen Risiko kepada PTPN VIII oleh BPKP:

1. Pembentukan Satgas GCG;
2. Sosialisasi CoC dan CoCG;
3. Penjabaran CoCG dan CoC ke dalam kebijakan perusahaan;
4. Inventarisasi kebijakan perusahaan;
5. Penyusunan kebijakan governance;
6. Pemetaan Management Control System.

Implementation Assistance of PTPN VIII GCG and Risk Management by BPKP:

1. **Formation of GCG Task Force;**
2. **Sosialization of CoC dan CoCG;**
3. **Translation of CoCG and CoC into company policies;**
4. **Corporate Policies Inventarisation;**
5. **Compilation of Governance Policies;**
6. **Mapping of Management Control System.**

2012

1. Pengukuran & Pengujian Implementasi GCG PTPN VIII oleh BPKP.
2. Pemenuhan aspek struktural implementasi WBS.
3. Pemenuhan aspek struktural implementasi e-procurement -> (bidding room).

1. Measurement & Assessment of PTPN VIII GCG Implementation by BPKP.
2. Fulfilled the structural aspects of WBS Implementation.
3. Fulfilled the structural aspects of e-procurement implementation -> (bidding room).

2013 - 2014

1. Implementasi WBS.
2. Aplikasi GCG Online System.
3. Gerakan PTPN VIII Bersih.

1. Implementation of WBS.
2. GCG Online System Application.
3. "PTPN VIII Bersih" movement.

1. Signing an Integrated Corruption Prevention Commitment with KPK.
2. Participate in Anti Corruption Festival Activities.
3. Completion of The Development of Guidelines / Policies:
   a. GCG
   b. Board Manual
3. Refinement of Audite Guidelines
4. GCG Online System Application.
5. "PTPN VIII Clean" movement.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Struktur tata kelola PTPN VIII mengacu pada UUPT yang mana organ perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris ebagai pengawas jalannya pengelolaan Perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

Pada Perseroan, Organ Utama tata kelola perusahaan (corporate governance) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Organ Utama tersebut dapat dibantu oleh organ lainnya (disebut Organ Pendukung GCG) yang memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris seperti Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, sedangkan pada Direksi adalah Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal.

PT Perkebunan Nusantara VIII as a legal entity in the form of a Limited Liability Company, which isa legal entity that is a joint-venture, established under the agreement, conduct business with authorized capital divided into shares and fully meet the requirements set out in Act No. 40, 2007 concerning the Limited Liability Company and its implementing regulations.

The governance structure of PTPN VIII refers to the Company Law which consists of 3 (three) elements, namely Shareholders through General Meeting of Shareholders (RUPS) as the highest decision-making forum for Shareholders, Board of Commissioners as supervisor of the management of the Company and the Board of Directors As a manager of the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors have clear authority and responsibility according to their respective functions in accordance with the articles of association and the law.

In the Company, the main organ of corporate governance is the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors. In the performance of its duties, the Main Organs may be assisted by other organs (called GCG supporting organs), which provide support to the Boards such as Secretary and Committee of the Board of Commissioners, while for the Board of Directors, the organs are Corporate Secretary and The Internal Audit Unit.

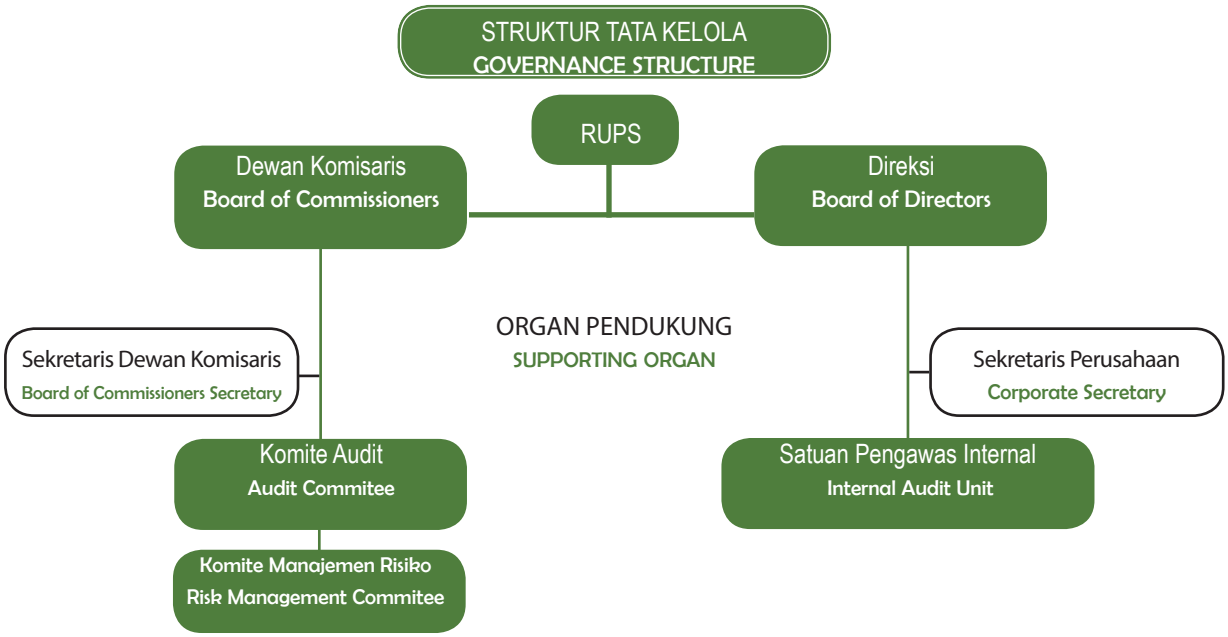

Dewan Komisaris telah mempunyai Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko untuk memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya. Selain itu, Manajemen memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari Komite di Bawah Direksi.

ORGAN UATAMA OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ogan Utama Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peranan utama dalam meningkatkan nilai (value) perusahaan dan menjadi pilar utama dalam mendorong dan menggerakkan pelaksanaan GCG di perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PTPN VIII.

Pemegang saham PTPN VIII

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan telah membuat suatu keputusan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 7 Oktober 2014 Nomor : PTPN VIII/RUPS/01/X/2014, Nomor : SK-55/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang salah satunya menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan 90% saham Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014.

Saham PTPN VIII adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, terdiri dari Saham Seri A yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Saham Seri B yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar PTPN VIII, maka Pemegang Saham Seri A mendapatkan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:

The Board of Commissioners has an Audit Committee and Risk Management Committee to empower the supervisory function of the Board of Commissioners, assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and obligations, and to formulate the policies of the Board of Commissioners within the scope of its duties. In addition, Management has supporting organs as a work unit to control, oversee and be responsible for the implementation of GCG as well as a partner of the Committee under the Board of Commissioners.

THE MAIN ORGANS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TheCorporate main organs which consist of the General Meeting of Shareholders (AGM), the Board of Commissioners and Board of Directors have a major role in increasing the value of company and become the key pillars in pushing and moving the GCG implementation in the company.

General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders, which is hereinafter referred to as Annual General Meeting of Shareholders (AGM) is the organ that holds the highest authority in the Company and have all powers that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners, within the limits specified in the Act No. 40, 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the PTPN VIII Articles of Association.

The Shareholders of PTPN VIII

The Minister of State Owned Enterprises of The Republic of Indonesia as the corporate shareholder has made decision, as stated in the Shareholders Decision dated October 7, 2014 No. PTPN VIII/RUPS/01/X/2014 and No. SK-55/D1.MBU/10/2014 regarding the Amendment of Articles of Association, one of which agreed to change the structure of shareholders of the Company as a result of the transfer of 90% of the Republic of Indonesia shares to and in order to increase capital participation of the Republic of Indonesia at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) based on the Government of Republic of Indonesia Regulation No.72 year 2014 dated 17 September 2014

PTPN VIII shares are shares issued in the name and on behalf of the owner listed in the Register of Shareholders, consisting of Series A Shares subscribed by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and Series B Shares subscribed by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Republic of Indonesia.

In accordance with Article 5, paragraph (3) of the Articles of Association of PTPN VIII, the Series A shareholders get privileges that are not owned by the holder of the Series B Shares, that is the right to perform:

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

1. Mengusulkan calon Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Mengusulkan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal;
3. Mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran;
4. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Menetapkan kebijakan umum terhadap Perseroan dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia; dan
7. Menyetujui penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan

Pemegang Saham Seri B merupakan pemegang saham biasa yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar PTPN VIII telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 28, tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-10133.40.20.2014 tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VIII dan telah didaftarkan sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07803.40.21.2014 tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VIII.

1. Suggesting candidates for the Board of Commisioners and Board of Directors;
2. Suggesting changes to the articles of association including changes in capital;
3. Suggesting a merger, consolidation, acquisition and company separation, filing of a petition for declaration of company bankruptcy, and dissolution;
4. Requesting a report and an explanation of certain matters to the Board of Directors and Board of Commisioners with pay attention to the legislation;
5. Proposing the remuneration for the Board of Directors and Board of Commisioners;
6. Establishing general policies for the Company in Production sector, Marketing sector, Finance sector, Accounting and Treasury sector, Procurement sector, Planning and Development sector, Information Technology sector, Human Resources sector; and
7. Approving the salary, pension or retirement benefits and other income for employees which exceed the obligations imposed in the legislations.

The series B shareholders representing ordinary shareholders who have authorities under applied legislations.

Amendment to the PTPN VIII Articles of Association had been set forth in Notarial Deed of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN No. 28, dated October 23, 2014 and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia as in the Minister of Justice and Human Rights Decision No. : AHU-10133.40.20.2014 dated October 27, 2014 regarding Approval of Change of Limited Liability Legal Entity of PT Perkebunan Nusantara VIII and has been registered as in as in the Letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-07803.40.21.2014 dated October 27,2014 regarding Notification Acceptance of PT Perkebunan Nusantara VIII Article of Association Amendment.

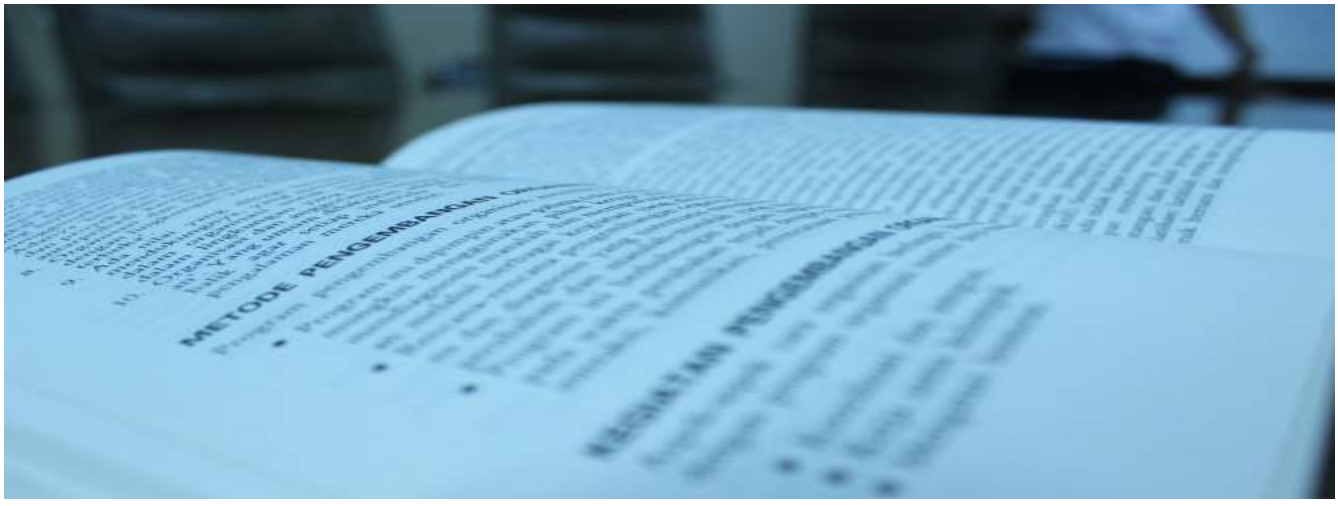

Struktur Kepemilikan Saham
Share Ownership Structure

Pemegang Saham *Shareholders*	2016		
	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rp) *Nominal per Share (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) *Total Share Value (Rp)*
Modal Dasar *Authorized Capital*			
- Saham Seri A Series A Shares	1	1.000.000	1.000.000
- Saham Seri B Series B Shares	3.499.999	1.000.000	3.499.999.000.000
Jumlah Modal Dasar *Total Authorized Capital*	3.500.000	1.000.000	3.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Subscribed and Fully Paid Capital*			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri B Series B Shares	89.753	1.000.000	89.753.000.000
PT Perkebunan Nusantara III			
- Saham Seri A Series A Shares	1	1.000.000	1.000.000
- Saham Seri B Series B Shares	807.773	1.000.000	807.773.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	897.527	1.000.000	897.527.000.000

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini Pemegang Saham Seri A harus dapat:
   a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Seri B dan stakeholders sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham Pengendali yang sebenarnya dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal diminta otoritas terkait.
2. Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perseroan, perlu diupayakan agar akuntabilitas, dan hubungan antar perseroan dapat dilakukan secara transparan.
3. Pemegang Saham Seri B bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Saham harus dapat:
   a. Memisahkan kepemilikan harta Perseroan dengan kepemilikan harta pribadi.
   b. Memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Shareholders Responsibility

1. Controlling Shareholders, in this case the Series A Shareholders should be able to:
   a. Pay attention to the interest of Series B Shareholders and stakeholders in accordance to laws and regulations.
   b. Disclose to law enforcement agencies about the actual controlling shareholders in case there are allegations of breaches of laws and regulations if prompted by related authorities.
2. If shareholder is the controlling shareholders in some companies, it is necessary that accountability and the relationship between the companies can be done in a transparent manner.
3. Series B Shareholders are responsible for using their rights properly in accordance with the Articles of Association and legislation.
4. Shareholders should be able to:
   a. Separate the ownership of company assets with the ownership of private property.
   b. Separate its function as the shareholder and as a member of the Board of Commissioners or Board of Directors in terms of the shareholder holds position in one of the two organs.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham, PTPN VIII selalu mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, beserta seluruh ketentuan internal Perseroan yang termasuk ke dalam hierarki kebijakan Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS

Dalam Anggaran Dasar PTPN VIII, RUPS Perusahaan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan
   RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi: RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa.
   RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2016, PTPN VIII melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa.

Detail Penyelenggaraan RUPS

1. RUPS Tentang Persetujuan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016
   Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015
   Waktu : 14.15 s/d 15.00
   Tempat : Ruang Rapat Lantai 13, Gedung Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Nomor Risalah: RIS/I.1/1000/XII/2015

Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan Surat Direksi PTPN VIII Nomor : SB/V.2/3877/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, dengan agenda dan keputusan RUPS sebagai berikut:

In protecting the interest of shareholders, PTPN VIII always refer to the Company Articles of Association and all internal regulations of the Company which belong to company's policy hierarchy, according to applied laws and regulations.

GMS Execution

In the Article of Association of PTPN VIII, Corporate GMS consists of:

1. Annual General Meeting
   Annual General Meeting is held each year, including Annual General Meeting about the Approval on Annual Report and Annual General Meeting about the Approval on Corporate Budget & Work Plan (CBWP).
2. Extraordinary GMS.
   Extraordinary GMS is a GMS that is held at any time based on the need for the interests of the Company.

Throughout 2016, PTPN VIII held 2 (Two) Annual General Meetings and did not carry out theExtraordinary GMS.

GMS Execution Details

1. GMS on the 2016 Corporate Budget & Work Plan (CBWP) Approval
   Day/Date : Sunday, December 28, 2015
   Time : 14.15 WIB until 15.00
   Tempat : Meeting Room floor 13, Ministry of State Owned Enterprises Building Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta Minutes Number: RIS/I.1/1000/XII/2015

GMS Notification conducted by PTPN VIII Board of Directors Letter No. : SB/V.2/3877/XII/2015 dated 2 December 2015, with agenda and decision of GMS as follows:

No.	Agenda	Keputusan RUPS / Decision of GMS
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina LingkunganTahun 2016. Approval of Work Plan and Corporate Budget 2016 and Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program 2016.	Menyetujui RKAP Tahun 2016, dengan pokok-pokok sebagai berikut: • Asumsi-asumsi Pokok • Areal, Produksi, Produktivitas • Proyeksi Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain (Konsolidasi) • Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasian • Rencana Investasi & Perencanaan • Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) • Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2016

No.	Agenda	Keputusan RUPS / Decision of GMS
		Approve the RKAP of 2016, with the following items: • Principal Assumptions • Area, Production, Productivity • Projected Income & Other Comprehensive Income (Consolidated) • Investment Plan & Planning • Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of 2016
2.	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016. Determination of Operational Aspect Indicators for Assessment of Company Health Level 2016.	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016. Establishes Operational Aspects of Indicators for Assessment of Company Health Level 2016.
3.	Penetapan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 Determination of Contract Management of Board of Directors and Board of Commissioners Year 2016	Menetapkan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 Establish Contract Management Board of Directors and Board of Commissioners Year 2016
4.	Penetapan Key Performance Indikator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Determination of Key Performance Indicators (KPI) as stipulated in Management Contract Year 2016 between the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders.	Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Tahun 2016. Establish Key Performance Indicator (KPI) as stipulated in Contract of Management Year 2016 between Board of Directors and Board of Commissioners with Board of Commissioners Year 2016.
5.	Penetapan Key Performance Indikator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2016. Determination of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners of 2016.	Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2016. Establish the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners of 2016.
6.	Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Provision of authorization to the Board of Commissioners, to approve if there are any actions that result in the change of program and allocation of investment budget maximum of 10% from RKAP ceiling and accountable in GMS.	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Provide authorization to the Board of Commissioners to approve if there are any actions that result in change of program and investment budget allocation maximum 10% of RKAP ceiling and accountable in GMS.
7.	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN. Inauguration of the enactment of Regulation of Minister of SOE Number: PER-09 / MBU / 07/2015 regarding PKBL BUMN.	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/ MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN. Inaugurated the enactment of Regulation of the Minister of SOEs no. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning State Owned Enterprise (PKBL BUMN).

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Agenda	Keputusan RUPS / Decision of GMS
8.	Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Inauguration of Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE Jo. Minister of SOE Regulation no. PER-09 / MBU / 2012 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.	Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Inaugurated the enactment of Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOE Jo. Minister of SOE Regulation no. PER-09 / MBU / 2012 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.
9.	Persetujuan prinsip penghapusbukuan nilai buku aset non produktif senilai Rp. 1,38 miliar.	Menyetujui secara prinsip penghapusbukuan nilai buku aset non produktif senilai Rp. 1,38 miliar.
10.	Persetujuan prinsip pengagunan aset HGU PT Perkebunan Nusantara VIII senilai Rp. 2,03 triliun dalam rangka reprofiling pinjaman. Approval of the principle of collecting assets HGU PT Perkebunan Nusantara VIII worth Rp. 2.03 trillion in reprofiling loans.	Menyetujui secara prinsip pengagunan aset HGU PT Perkebunan Nusantara VIII senilai Rp. 2,03 triliun dalam rangka reprofiling pinjaman. Approving in principle the collateral of HGU assets of PT Perkebunan Nusantara VIII valued at Rp. 2.03 trillion in reprofiling loans.
11.	Persetujuan prinsip pengagunan aset HGU PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cikasungka dan Kebun Agrabinta untuk penarikan kredit investasi sebesar Rp.100,8 miliar. Approval of the principle of collecting assets of HGU PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cikasungka and Kebun Agrabinta for withdrawal of investment credit of Rp.100,8 billion.	Menyetujui secara prinsip pengagunan aset HGU PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cikasungka dan Kebun Agrabinta untuk penarikan kredit investasi sebesar Rp.100,8 miliar. Approved in principle the collateral of HGU assets of PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cikasungka and Kebun Agrabinta for the withdrawal of investment credit amounting to Rp.100,8 billion.
12.	Persetujuan prinsip penambahan modal saham di PT PSBI dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Proyek Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Berbasis Rel Jakarta-Bandung. Approval in principle of additional share capital in PT PSBI and other actions required for the implementation of Project Development Facilities and Infrastructure Based Rail Mode Jakarta-Bandung.	Menyetujui secara prinsip penambahan modal saham di PT PSBI dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Proyek Sarana dan Prasarana Moda Transportasi Berbasis Rel Jakarta-Bandung. Approval in principle of additional share capital in PT PSBI and other actions required for the implementation of Project Development Facilities and Infrastructure Based Rail Mode Jakarta-Bandung.

13.	Persetujuan prinsip rencana kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain serta tindakan lain yang diperlukan dalam pengembangan komoditi kelapa sawit, kopi dan agrowisata senilai Rp. 238,4 miliar. **Approval of principle of plan of cooperation with business entity or other party and other action needed in development of commodity of palm, coffee and agro-tourism worth Rp. 238.4 billion.**	Menyetujui rencana kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain serta tindakan lain yang diperlukan dalam pengembangan komoditi kelapa sawit, kopi dan agrowisata senilai Rp. 238,4 miliar. **Approve the plan of cooperation with business entities or other parties as well as other actions required in the development of oil palm, coffee and agro commodities worth Rp. 238.4 billion.**

2. RUPS Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015
Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2016
Waktu : Pukul 09.30 s.d 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kementerian BUMN Lantai 12A Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat
Nomor Risalah: RIS/I.1/433/VI/2016

Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan Surat Direksi PTPN VIII Nomor : SB/I.1/1752/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016, dengan agenda dan keputusan RUPS sebagai berikut:

2. GMS on the 2015 Annual Report Approval & the 2015 Financial Statements Ratification
Day/Date : Sunday, June 20, 2016
Time : 09.30 until 10.30 WIB
Place : Meeting Room floor 13, Ministry of State Owned Enterprises Building Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Central Jakarta Minutes Number: RIS/I.1/433/VI/2016

GMS Notification conducted by PTPN VIII Directors Letter No. : SB/I.1/1752/VI/2016 dated June 18, 2016 with agenda and decision of GMS as follows:

No.	Agenda	Keputusan RUPS
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. **Approval of the Company's Annual Report on the condition and progress of the Company during Fiscal Year 2015, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2015.**	Persetujuan menyetujui Laporan tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. **Approval approves the Company's Annual Report on the circumstances and progress of the Company during the Fiscal Year 2015, including the Report of Supervision of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2015.**
2.	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, serta pengesahan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Tahun Buku 2014 dan 2013 kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014. **Enactment of the Annual Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) of the Fiscal Year 2014 as well as the granting of full volledig acquit et de charge.**	Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai laporannya Nomor : 001D/LAI-N8/PKBL/II/15 tanggal 3 Februari 2015 dengan pendapat wajar dengan semua hal material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perusahaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. **Annual Report Ratification including Financial Report of Partnership and Community Development Program of Fiscal Year 2014 which has been audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Partners according to its report**

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Agenda	Keputusan RUPS
	Endorsement of the Financial Statements of the Company for Fiscal Year 2015 as well as the Granting of Full Resolution and Disclaimer of Responsibility (volledig acquit et de charge) To the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the supervision and management actions carried out during the Fiscal Year 2015 and the approval of restatement of the financial statements for Fiscal Year 2014 and 2013 to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision carried out during the Fiscal Year 2014.	Number: 001D / LAI-N8 / PKBL / II / 15 dated February 3, 2015 with reasonable opinion with all material matters , As well as to provide the acquisition and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the CLAs that have been conducted during Fiscal Year 2014, as long as such actions are recorded in the Company's books and do not conflict with the provisions and regulations .
3.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan PKBL yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) of the Company for Fiscal Year 2015 as well as Provision of Volledig acquit et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the supervision and management of the PKBL Book Year 2015.	
4.	Persetujuan Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris, serta Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016. Approval of Salary of Directors and Honorarium of the Board of Commissioners, and Allowances and Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Year 2016.	
5.	Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publilk (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Approval of the establishment of the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro and Surja to audit the Company's Financial Report and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year ending on 31 December 2016.	

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the organ in charge of supervising the company in general and/ or special accordance with the statutes and to provide advice to the Board of Directors in carrying out the management activities of the company.

PTPN VIII memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan. Beberapa kebijakan penting adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/86/II/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di PT Perkebunan Nusantara VIII
2. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/404/VI/2012 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Perkebunan Nusantara VIII
3. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/405/VI/2012 Kode Etik Insan PT Perkebunan Nusantara VIII
4. Keputusan Direksi Nomor: KEP/III.1/732/X/2012 Tentang Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan GCG PT Perkebunan Nusantara VIII
5. Keputusan Direksi Nomor: KEP/III.1/777/XI/2012 Tentang Tata Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII
6. Keputusan Direksi Nomor: KEP/III.1/340/V/2013 Tentang Struktur Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) PT Perkebunan Nusantara VIII
7. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/755/XI/2013 Tentang Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) PT Perkebunan Nusantara VIII
8. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/374/VIII/2014 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara VIII
9. Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/327/VIII/2014 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Perkebunan Nusantara VIII

KERANGKA GCG PTPN VIII

PTPN VIII memiliki kerangka GCG yang dibentuk berdasarkan sistem Tata Kelola yang ada di PTPN VIII. Adapun kerangka GCG PTPN VIII adalah sebagai berikut:

PTPN VIII has a number of policies in order to improve the implementation of Good Corporate Governance. Some important policies are as follows:

1. Decree of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 86 / II / 2012 On the Implementation of Good Corporate Governance at PT Perkebunan Nusantara VIII
2. Decree of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 404 / VI / 2012 About Handling of Conflict of Interest PT Perkebunan Nusantara VIII
3. Decision of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 405 / VI / 2012 Code of Ethics of PT Perkebunan Nusantara VIII
4. Decree of the Board of Directors Number: KEP / III.1 / 732 / X / 2012 About Responsible for Implementation and Monitoring of GCG of PT Perkebunan Nusantara VIII
5. Decree of the Board of Directors Number: KEP / III.1 / 777 / XI / 2012 Concerning the Working Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VIII
6. Decree of the Board of Directors Number: KEP / III.1 / 340 / V / 2013 About Whistleblowing System Management Structure (WBS) PT Perkebunan Nusantara VIII
7. Decree of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 755 / XI / 2013 About Code of Conduct PT Perkebunan Nusantara VIII
8. Decree of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 374 / VIII / 2014 About Guidelines for Implementation of Risk Management PT Perkebunan Nusantara VIII
9. Decree of the Board of Directors Number: KEP / I.1 / 327 / VIII / 2014 About Guidelines for Gratification Control PT Perkebunan Nusantara VIII

GCG FRAMEWORK PTPN VIII

PTPN VIII has a GCG framework established under the existing Governance system in PTPN VIII. The framework of GCG PTPN VIII is as follows:

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

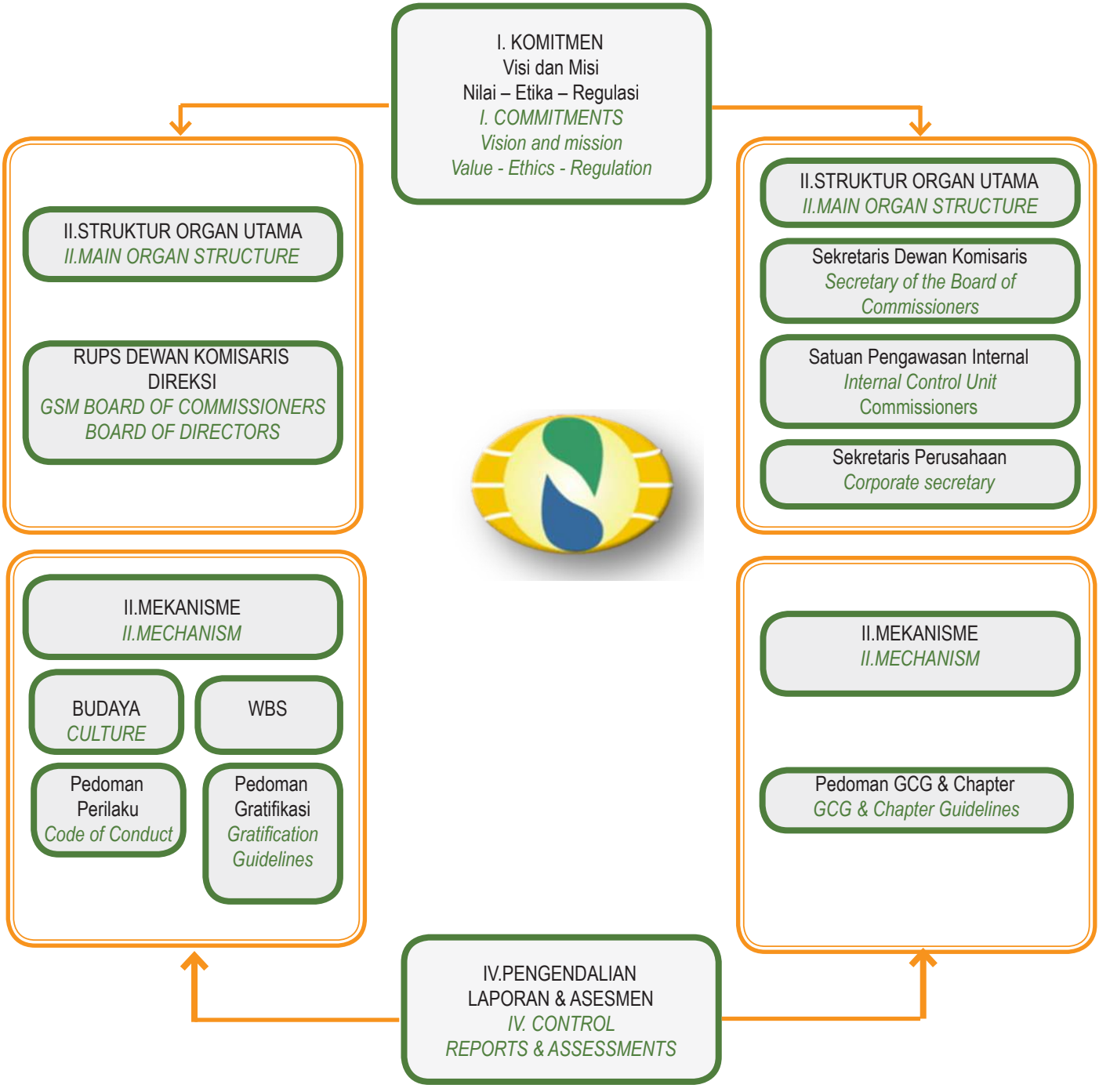

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Practice

Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh pemahaman atas corporate governance dan corporate management. Dalam arti sempit, corporate governance hanya melibatkan organ utama perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi), sementara dalam arti luas corporate governance yang baik melibatkan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan stakeholders lainnya seperti pemerintah, karyawan, pemasok, pelanggan, kreditur, dan masyarakat serta kelompok lainnya.

Corporate governance harus menjamin pengarahan strategi perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif dan akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS, sedangkan corporate management menjabarkan strategi-strategi tersebut ke dalam kebijakan dan program perusahaan.

Upaya terwujudnya good corporate management dalam proses corporate governance terletak pada pemikiran bahwa suatu perusahaan akan dapat dikelola dengan baik jika terdapat komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang dijiwai oleh prinsip-prinsip GCG.

Komitmen tersebut tertuang dalam penetapan dan perumusan visi, misi, tujuan serta pemilihan strategi yang diikuti dengan penetapan kebijakan yang selaras baik kebijakan umum maupun operasional. Rumusan visi, misi dan strategi perusahaan diselaraskan dengan prinsip-prinsip GCG. Strategi yang diformulasikan oleh Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris untuk dinilai kesesuaiannya dengan visi dan misi perusahaan.

Selanjutnya dengan arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab mengelola kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahan dengan menjabarkan strategi yang telah ditetapkan tersebut ke dalam program kerja dan rencana tindakan. Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan oleh Direksi dalam bentuk pengelolaan perusahaan melalui penetapan kebijakan dan penciptaan budaya dan etika etika perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Successful GCG Implementation is strongly influenced by the understanding of corporate governance and corporate management. In a narrow sense, corporate governance involves only the company's main organs (AGM, the Board of Commissioners and the Board of Directors), while in the broad sense, a good corporate governance involves the AGM, the Board of Commissioners, Board of Directors, management and other stakeholders such as governments, employees, suppliers, customers, creditors, society and other groups.

Corporate governance should ensure the guidance of the corporate strategy, effective monitoring of management and accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the AGM, while corporate management lays out those strategies into corporate policies and programs.

The effrts to realize a good corporate management in the corporate governance process lies in the idea that a company will be well managed if there is a strong commitment at the company from the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors, which is inspired by the principles of GCG.

The commitment is manifested in the establishment and formulation of vision, mission, goals and strategy selection, followed by the establishment of policies that allign both general and operational policies.The formulation of corporate vision, mission and strategy are aligned with the principles of GCG. The strategy formulated by the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners to assess its compliance with corporate vision and mission.

Furthermore, with the direction and supervision of the Board of Commissioners, Board of Directors is responsible for managing the company's business sactivities in accordance with the goals and interests of the company by describing the strategies that have been assigned to the work program and plan of action. Commitments are then implemented by the Board of Directors in the form of management of the company through the establishment

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

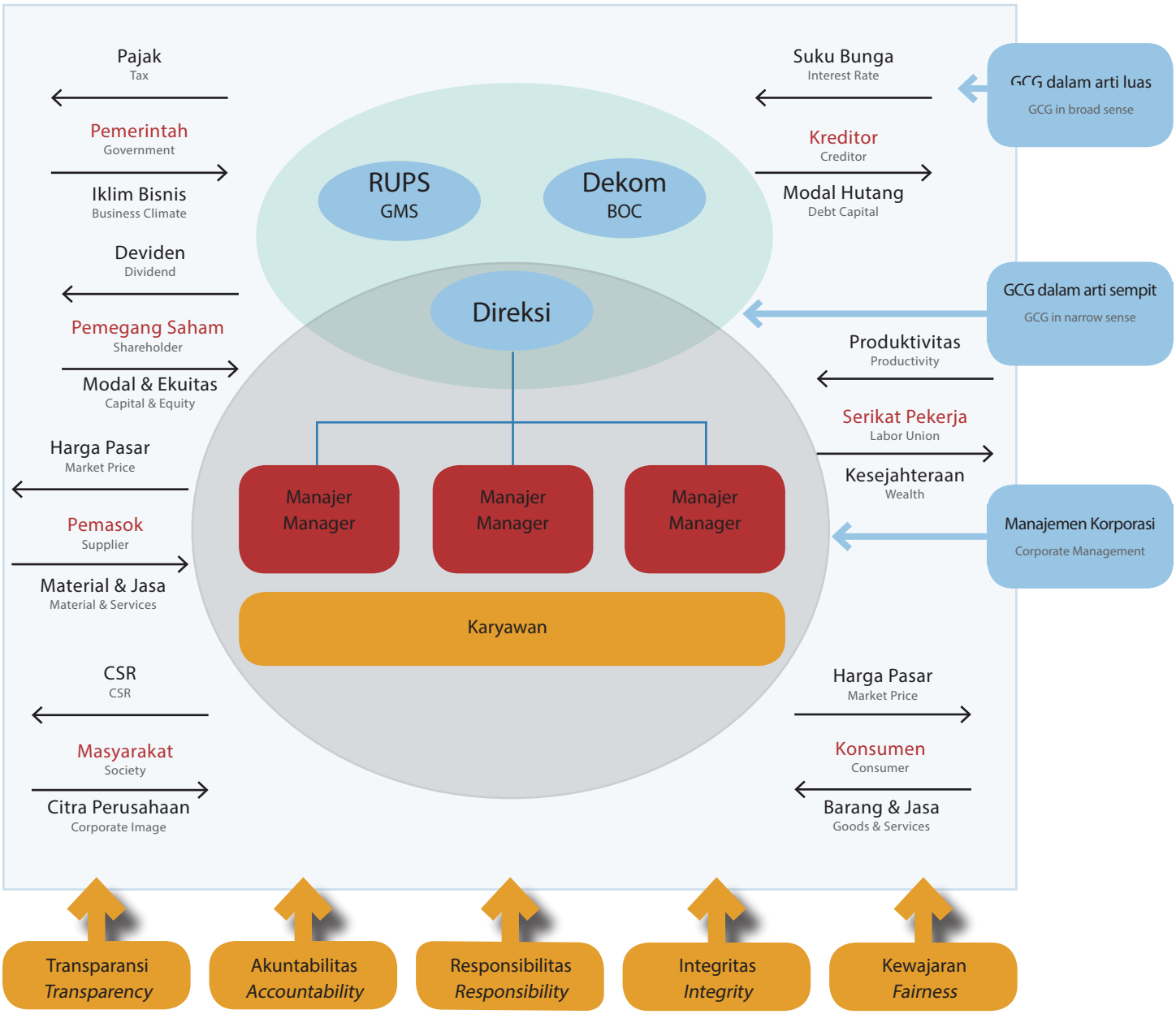

Penerapan good corporate governance merupakan kegiatan berkesinambungan yang dapat memberikan optimisme dan keyakinan bagi perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan, menjaga kepercayaan dari para pemegang saham dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk terus bersama dan sejalan dengan perusahaan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan nilai guna mewujudkan perusahaan yang tangguh, unggul dan bermartabat.

Implementation of good corporate governance is an ongoing activity that can create optimism and confidence for the company to provide the best services for the customers, keeping the confidence of the shareholders and the public and other stakeholders to hold together and in line with the company to achieve its goals and improve the value in order to realize formidable, superior and dignified company.

PENILAIAN ATAS PENERAPAN GCG

Penilaian Penerapan GCG di PTPN VIII mengacu pada Pasal 44 Peraturan Menteri Negeri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 11 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik pada BUMN Bab XIII Tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang mewajibkan BUMN maupun Anak Perusahaan BUMN untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN/ Anak Perusahaan BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN/Anak Perusahaan BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan melakukan evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN/Anak Perusahaan BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian yang menggunakan jasa instansi Pemerintah yang berkompenten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 4 (empat) periode. Pada tahun 2016, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor:

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN GCG TAHUN 2016

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG wajib dilakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, dapat segera menetapkan rencana tindak, yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG pada tahun 2016 dilakukan dalam bentuk Penilaian (Assessment). Penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Penilaian terhadap penerapan GCG pada tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.

INDIKATOR / PARAMETER PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter sesuai SK Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.

Indikator/parameter penilaian atas penerapan GCG adalah alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG yang terdiri dari :

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GCG

Assessment of GCG Implementation in PTPN VIII refers to Article 44 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 11, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance Chapter XIII About Measurement of GCG Implementation, which requires SOEs and Subsidiaries To measure GCG implementation in the form of assessment, which is a program to identify GCG implementation in SOE / Subsidiary Company through measurement of implementation and implementation of GCG in SOE / BUMN Subsidiary which conducted periodically every 2 (two) years and evaluate (Review), which is a program to describe the follow-up implementation and implementation of GCG in BUMN / BUMN Subsidiaries conducted in the following year after the assessment, which includes evaluation of the assessment results and follow-up on the recommendation improvement. Assessment that uses the services of competent government agencies in the field of GCG is carried out by the BPKP West Java Representative who has conducted the GCG assessment periodically for 4 (four) periods. In 2016, according to the Letter of Assignment Chief Representative BPKP West Java Province Number:

ASSESSMENT OF THE APPLICATION OF GCG IN 2016

In the effort to improve and improve the quality of GCG implementation, it is imperative that the measurement of GCG implementation be carried out, so that if there are still deficiencies in its implementation, it can immediately establish action plan, which includes necessary corrective action. Measurement of GCG implementation in 2016 is done in the form of Assessment. Assessment (assessment) is a program to identify the implementation of GCG in the Company through the measurement of the implementation and implementation of GCG on a regular basis every 2 (two) years.

BASIS OF ACTIVITY IMPLEMENTATION

Assessment of GCG implementation in 2016 is implemented based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments.

INDICATOR / PARAMETER ASSESSMENT

Implementation of the assessment is done by using the indicator / parameter according to SK Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6th, 2012 on Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance in SOE.

The assessment indicator / parameter on GCG implementation is a measuring tool for assessing the quality of BUMN initiatives in applying GCG principles. The indicators / parameters are grouped into 6 (six) factors / aspects of GCG implementation consisting of:

1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
6. Faktor lainnya.

1. Commitment to the implementation of Good Corporate Governance on an ongoing basis;
2. Shareholders and GMS / Capital Owners
3. Board of Commissioners / Board of Supervisors;
4. Board of Directors;
5. Disclosure and Information Disclosure;
6. Other factors.

TUJUAN

Tujuan penilaian penerapan GCG adalah untuk mengukur kualitas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memonitor konsistensi penerapan GCG, penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance di Perusahaan.

PURPOSE

The objective of appraising GCG implementation is to measure quality, identify strengths and weaknesses, monitor consistency of GCG implementation, refine and develop corporate governance policy in the Company.

	Aspek *Aspect*	Bobot *Weight*	Tahun *Year*	Skor *Score*	Capaian (%) *Achievements (%)*	Klasifikasi *Classification*
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan *Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance on a Sustainable basis*	7	2012	5,935	84,786	Baik *Good*
			2014	6,320	90,31	Sangat Baik *Very Good*
			2016	6,4040	91,49	Sangat Baik *Very Good*
II	Pemegang Saham & RUPS *Shareholders & GMS*	9	2012	8,001	88,900	Baik *Good*
			2014	8,433	93,71	Sangat Baik *Very Good*
			2016	7,9764	88,63	Sangat Baik *Very Good*
III	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	35	2012	28,764	82,182	Baik *Good*
			2014	29,623	84,64	Baik *Good*
			2016	31,0011	88,57	Sangat Baik *Very Good*
IV	Direksi *Board of Directors*	35	2012	30,092	85,977	Baik *Good*
			2014	31,931	91,23	Sangat Baik *Very Good*
			2016	32,8759	93,93	Sangat Baik *Very Good*
V	Pengungkapan Informasi & Transparansi *Disclosure of Information & Transparency*	9	2012	7,902	87,800	Baik *Good*
			2014	6,753	75,04	Cukup *Enough*
			2016	6,7041	74,747	Cukup *Enough*
VI	Aspek Lainnya *Other Aspects*	5	2012	0,000	0,000	-
			2014	0,000	0,000	
			2016	0,000	0,000	
	Total *Total*	100,00	2012	80,694	80,694	Baik *Good*
			2014	83,060	83,060	Baik *Good*
			2016	84,96	84,96	Baik *Good*

EVALUASI INTERNAL PENERAPAN GCG (SELF ASSESSMENT)

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT GCG TAHUN 2015

Terhadap kekurangan penerapan GCG sebagaimana rekomendasi hasil Assessment GCG Tahun 2014 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui pelaksanaan

INTERNAL EVALUATION OF GCG IMPLEMENTATION (SELF ASSESSMENT)

COMPLETE ACTING RESULT OF GCG SELF ASSESSMENT YEAR 2015

Against the lack of GCG implementation as the recommendation of GCG Assessment Result of 2014 has been done improvement and improvement through the implementation of GCG Self

Self Assessment GCG Tahun 2015, dengan melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut Hasil Assessment GCG Tahun 2014 melalui Memo Sekretaris Perusahaan Nomor : M/I.1/322/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Monitoring Tindak Lanjut Assessment GCG Tahun 2014.

Hasil kegiatan pemantauan tindak lanjut Hasil Assessment GCG Tahun 2014 dan Self Assessment GCG Tahun 2015, sebagai berikut:

Assessment Year 2015, by conducting follow up monitoring of GCG Assessment Result Year 2014 through Memo Corporate Secretary Number: M / I.1 / 322 / X / 2015 dated October 8, 2015 on Follow-Up GCG Assessment Monitoring of 2014.

Results of follow-up monitoring activities GCG Assessment Results 2014 and Self Assessment GCG 2015, as follows:

No	Area Of Improvement (AOI)	Status Tindak Lanjut *Follow-up Status*		
	Rekomendasi Per Aspek Penerapan GCG *Recommendation Per Aspect of GCG Implementation*	Selesai *Done*	Belum Selesai *Not finished*	Jumlah *amount*
I	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Commitment to the implementation of good corporate governance*	4	0	4
II	Pemegang Saham dan RUPS/pemilik modal *Shareholders and GMS / owners of capital*	2	3	5
III	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	16	6	22
IV	Direksi *Board of Directors*	13	8	21
V	Pengungkapan dan keterbukaan informasi *Disclosure of Information & Transparency*	5	0	5
	Total Rekomendasi *Total Recommendation*	40	17	57
	%			70%

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan PTPN VIII.

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Anak Perusahaan BUMN, BUMN dan/atau Negara, melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau mengundurkan diri.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is the organ in charge of supervising the company in general and/ or special accordance with the statutes and to provide advice to the Board of Directors in carrying out the management activities of the company.

APPOINTMENT AND DISCONNECTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the shareholders through the GMS. All members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed taking into consideration the aspect of integrity, competence and reputation adequate to the needs of PTPN VIII.

TERMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The dismissal of the Board of Commissioners shall be performed if it is unable to perform its duties properly, violates the provisions of articles of association and / or statutory regulations, engages in acts that harm the Subsidiaries of SOEs, SOEs and / or States, conduct actions that violate ethics and / or proper propriety Respected as a member of the Board of Commissioners of a BUMN Subsidiary, is found guilty of a court decision that has had a permanent legal force, or resigned.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Uraian komposisi Dewan Komisaris selama periode 2016, sebagai berikut :

COMPOSITION THE BOARD OF COMMISSIONERS

A description of the composition of the Board of Commissioners during the period 2016 as follow:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Periode *Period*	Dasar Pengangkatan *Base of Appointment*
Agus Pakpahan	Komisaris Utama *The Main Commissioner*	21 November 2013 *November 21, 2013*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-388/MBU/2013 *Ministerial Decree SOEs No. SK-388/MBU/2013*
Herry Suhardiyanto	Komisaris *Commissioner*	21 November 2013 *November 21, 2013*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-388/MBU/2013 *Ministerial Decree SOEs No. SK-388/MBU/2013*
Sutriono Edi	Komisaris *Commissioner*	21 November 2013 *November 21, 2013*	Keputusan Menteri BUMN No. SK-388/MBU/2013 *Ministerial Decree SOEs No. SK-388/MBU/2013*
I Made Putrawan	Komisaris *Commissioner*	7 April 2014 *April 7, 2014*	Keputusan Menteri BUMN SK-72/MBU/2014 *Ministerial Decree SOEs No. SK-72/MBU/2014*
Karen Tambayong	Komisaris *Commissioner*	8 September 2015 *September 8, 2015*	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-168/MBU/09/2015& No. KPJAK/hold/SKPTS/R/11/2015 *Ministerial Decree SOEs & Main Director PTPN III (Persero) No. SK-168/MBU/09/2015& No. KPJAK/hold/SKPTS/R/11/2015*
	Komisaris Utama *The Main Commissioner*	1 September 2016 *September 1, 2013*	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016 *Ministerial Decree SOEs & Main Director PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016*
Elen Setiadi	Komisaris *Commissioner*	1 September 2016 *September 1, 2013*	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016 *Ministerial Decree SOEs & Main Director PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016*
Antonius Harso Waluyo Witono	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	1 September 2016 *September 1, 2013*	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016 *Ministerial Decree SOEs & Main Director PTPN III (Persero) No. SK-205/MBU/09/2016& No. 3.00/ SKPTS/R/34/2016*

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bagian Data Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

A brief history of each member of the Board of Commissioners can be seen in the Corporate Data section in this Annual Report

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-205/MBU/09/2016 & No. 3.00/SKPTS/R/34/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN VIII, bahwa Pemegang Saham PTPN VIII memberhentikan dengan hormat Agus Pakpahan sebagai Komisaris Utama, Sutriono Edi dan I Made Putrawan sebagai Komisaris dan mengalihkan penugasan Karen Tambayong yang semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama serta mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris dan Antonius Harso Waluyo Witono sebagai Komisaris Independen.

Based on the Ministry of SOEs and Director of PTPN III (Persero) Number: SK-205 / MBU / 09/2016 and No. 3.00 / SKPTS / R / 34/2016 regarding Discharge, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN VIII, that the Shareholders PTPN VIII dismiss with respect Agus Pakpahan as Commissioner, Sutriono Edi and I Made Putrawan as Commissioner and shift assignment Karen Tambayong originally as Commissioner President Commissioner and appoint Elen Setiadi as Commissioner and Antonius Harso Waluyo Witono as Independent Commissioner.

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

DESCRIPTION RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY BOARD OF COMMISSIONERS

Division of Labor BOC

Untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembagian kerja antar Anggota Dewan Komisaris PTPN VIII melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris SK/Dekom/04/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PTPN VIII, dengan rincian sebagai berikut :

To increase the efficiency and effectiveness of the Board of Commissioners, has been established division of labor between the Board of Commissioners of PTPN VIII by the Decree of the Board of Commissioners SK / Dekom / 04 / XII / 2015 dated December 30, 2015 on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PTPN VIII, with the following details :

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas *Task*
Agus Pakpahan	Komisaris Utama *President Commissioner*	Koordinator *Coordinator*
Herry Suhardiyanto	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Inovasi Produksi, Keuangan & TI *Supervision in the field of Production & IT Innovation*
Sutriono Edi	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Aset dan Keuangan *Supervision in the field of Asset and Finance*
I Made Putrawan	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Produksi & SDM *Supervision in Production & HR*
Karen Tambayong	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Pengembangan Komoditas Baru dan Pemasaran *Supervision in the field of Development New Commodities and Marketing*

Penggantian Anggota Dewan Komisaris yang terjadi pada tahun 2016 ditindaklanjuti dengan perubahan pembagian tugas Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/Dekom/01/11/2017 tanggal tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PTPN VIII, dengan rincian sebagai berikut :

Replacement of Board of Commissioners that occurred in 2016 followed up with the changing division of BOC by the Decree of the Board of Commissioners No. SK / Dekom / 01/11/2017 dated on the Division of Duties BOC PTPN VIII,the details are as follows :

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas *Task*
Karen Tambayong	Komisaris Utama *President Commissioner*	Koordinator *Coordinator*
Herry Suhardiyanto	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Inovasi Produksi, Keuangan & TI *Supervision in the field of Production & IT Innovation*
Elen Setiadi	Komisaris *Commissioner*	Pengawasan di bidang Hukum & Pemasaran *Supervision in Law & Marketing*

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris, kecuali dapat dibuktikan bahwa:
   a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
   b. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
   c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-

Tasks Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall supervise the management policy, the course of management in general either in the Company or the Company's businesses conducted by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget and the Articles of Association and the General Meeting Shareholders Decisions, as well as the applied laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Responsibility

1. The Board of Commissioners is fully responsible for the supervision of the company's interests and objectives of the company.
2. Each member of the Board of Commissioners shall in good faith, prudence, and responsible in carrying out monitoring and providing advice to the Board of Directors, for the benefit and in accordance with the purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Commissioners are fully responsible personally for the loss of the Company if such person guilty or negligent in performing their duties. In the event that the Board of Commissioners consists of two (2) members or more, then the responsibilities are distributed evenly for any member of the Board of Commissioners, unless it can be demonstrated that the member:
   a. has conducted surveillance in good faith and prudence for the benefit and in accordance with the intent and purpose of the company;
   b. does not have a personal interest, either directly or indirectly, for the management of the Board of Directors which resulted in a loss; and
   c. has provided advice to the Board of Directors to prevent the continuation of such losses arising.

Authority

In performing its duties, the Board of Commissioners are authorized to:

1. Look at the books, letters and other documents, check cash for verification purposes and other securities and the

lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Perseroan;
3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

Company's assets;
2. Enter the grounds, buildings, and offices used by the Company;
3. Ask for an explanation of the Board of Directors and/or other officials on issues related to the management of the Company;
4. Know all the policies and actions that have been and will be run by the Board of Directors;
5. Ask for the Board of Directors and/ or other officials unde rthe BOD with the knowledge of the Board of Directors to attend the meeting of the Board of Commissioners;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Lay off temporarily the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
8. Establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the ability of the company;
9. Use experts for certain things in a certain period of time and the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Perform the management of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;
11. Attend Meeting of the Board of Directors and provide insights into matters discussed;
12. Carry out other supervisory authorities to the extent not contrary to the laws and regulations, the Articles of Association, and / or decision of the General Meeting of Shareholders.

Obligation

In supervising the management of the Company, the Board of Commissioners shall:

1. Adhere to the Articles of Association and legislation and is obliged to implement the precautionary principle of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Monitor the effectiveness of good corporate governance practices applied by the Company;
3. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
4. Research, review and sign the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
5. To advise the General Meeting of Shareholders of the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget of the reasons for the Board of Commissioners signed a Long Term Plan and Work Plan and Budget;
6. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on any matter of importance to the management of the Company;

7. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
9. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
10. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
11. Membentuk Komite Audit;
12. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
14. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya;
15. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
16. Memberikan persetujuan atas usulan Direksi PTPN VIII tentang Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Ketua SPI;
17. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Hak

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, Dewan Komisaris berhak untuk:

1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Direksi untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif.
2. Mendapatkan hasil laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengenai hasil pemeriksaan.
3. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan kesempatan membela diri di depan RUPS, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan.
5. Mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perseroan atau Pemegang Saham.
6. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, sebagai berikut :

7. Report immediately to the General Meeting of Shareholders in the event of symptoms of decreased performance of the Company;
8. Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
9. Provide explanations, opinions and advice to the AGM regarding the Annual Report, if requested;
10. Develop annual work program and included in the Work Plan and Budget;
11. Establish an Audit Committee;
12. Propose Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
13. Make Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and keep a copy;
14. Report to the Company regarding its ownership and / or their families in the Company and other Company;
15. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
16. Provide a report on the monitoring task has been carried out during the past financial year to the General Meeting of Shareholders;
17. Carry out other obligations in the context of the task of monitoring and providing advice in good faith, prudent, and responsible, to the extent not contrary to the laws and regulations, the Articles of Association, and / or decision of the General Meeting of Shareholders.

Rights

In carrying out the duties, responsibilities an authority, the Board of Commissioners reserves the rights to:

1. Obtain the required information from the Board of Directors to be able to function effectively.
2. Get the report of the Internal Audit Unit (IAU) of the results of the examination.
3. Obtain compensation and benefits / facilities including full compensation positions AGM type and amount determined by taking into account the applicable provisions.
4. Get the opportunity to defend themselves in front of the AGM, prior to the AGM's decision to dismiss the concerned member.
5. Get the chance to prove that he did not commit errors or omissions that may result in losses to the Company or the Shareholders.
6. Resign from office by giving written notification to the Company with a copy to the Shareholders, the Board of Commissioners and members of the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his resign.

TASK OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2016, the Board has been carrying out its duties in terms of monitoring and providing advice to the Board of Directors in accordance with the Articles of Association, as follows:

Pendapat, Arahan dan Nasihat Dewan Komisaris Kepada Direksi
Board of Commissioners Opinion, Instruction and Advice to Board of Director

No	Nomor Surat *Letter Number*	Tanggal *Date*	Pendapat, Arahan dan Nasihat *Opinion, Instruction and Advice*
1.	01/Dekom/I/2016	02-01-2016	Rekomendasi Persetujuan Pengajuan Pinajam ke PTPN III (Persero) *Recommended Approval of Loan Application to PTPN III (Persero)*
2.	03/Dekom/I/2016	08-01-2016	Penjelasan Kajian Rencana Revaluasi Aset *Explanation of Review of Asset Revaluation Plan*
3.	06/Dekom/III/2016	03-03-2016	Perubahan Struktur Organisasi PTPN VIII *Changes of Organizational Structure PTPN VIII*
4.	13/Dekom/V/2016	23-05-2016	Usulan Penunjukan Auditor Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. *The Proposed Appointment of Auditor of Financial Statements for Fiscal Year 2016.*
5.	41/Dekom/X/2016	18-10-2016	Tata Kelola Perusahaan *Corporate governance*

Tanggapan Dewan Komisaris Kepada Direksi
Board of Commissioners Response to Board of Directors

No	Nomor Surat *Letter Number*	Tanggal *Date*	Tanggapan *Respone*
1.	02/Dekom/III/2016	06-01-2016	Pertimbangan Dewan Komisaris atas Proyek Pengembangan Kereta Cepat *Consideration of the Board of Commissioners on speed Rail Development Project*
2.	07/Dekom/III/2016	03-03-2016	Permohonan Pembebasan Tanggung Jawab Kerjasama dengan PT Jabar Rekind Geothermal *Responsibility Exemption Request Cooperation with PT Jabar Rekind Geothermal*
3.	14/Dekom/V/2016	26-05-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja TW I tahun 2016 PTPN VIII *BOC response to Performance 2016 TW I PTPN VIII*
4.	22/Dekom/VII/2016	29-07-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Perkembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung *Responses Board of Commissioners on Fast Train Project Progress Jakarta - Bandung*
5.	26/Dekom/VIII/2016	04-08-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Lahan HGU *Responses Board of Commissioners on Request offs and land alienation HGU*
6.	28/Dekom/VIII/2016	18-08-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Pengajuan Pinjaman dan Pengagunan Aset Tetap *esponses Board of Commissioners on Request Loan Application and Alienation of Fixed Asset*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No	Nomor Surat *Letter Number*	Tanggal *Date*	Tanggapan *Respone*
7.	29/Dekom/VIII/2016	18-08-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Semester I tahun 2016 PTPN VIII *Responses Board of Commissioners to the First Half 2016 Performance PTPN VIII*
8.	33/Dekom/IX/2016	08-09-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Revisi RKAP tahun 2016 *Responses Board of Commissioners on Revision RKAP 2016*
9.	37/Dekom/IX/2016	23-09-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Rencana Kerjasama Pinjam Pakai Lahan Kebun Panglejar untuk Pembangunan Trase & Stasiun Kereta Api *Responses Board of Commissioners on Request Cooperation Plan Borrow and Use of Land for Development Panglejar Gardens Trace & Railway Station*
10.	45A/Dekom/XI/2016	15-11-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja TW III tahun 2016 PTPN VIII *Responses Board of Commissioners on TW III 2016 performance PTPN VIII*
11.	53/Dekom/XII/2016	15-12-2016	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pemenuhan Penyertaan PTPN VIII pada PT PSBI berupa Lahan untuk TOD seluas 1.270 Ha *Responses Board of Commissioners on Fulfillment of PTPN VIII Participation in PT PSBI form of land for the TOD area of 1,270 Ha*

Persetujuan Dewan Komisaris Kepada Direksi
Board of Commissioners Approval to Board of Directors

No	Nomor Surat *Letter Number*	Tanggal *Date*	Persetujuan *Approval*
1.	18/Dekom/VI/2016	21-06-2016	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi *Approval of Changes in Organizational Structure*

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS
VISIT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja ke unit kerja (Kebun) sebagai berikut :

Throughout 2016, the Board has made a working visit to the work unit (Gardens) as follows:

No	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Tanggal *Date*	Objek (Kebun)
1.	Agus Pakpahan	22 - 24 Juli 2016 *22 to 24 July, 2016* 11 Agustus 2016 *August 11, 2016*	Dayeuhmanggung, Papandayan, Cisaruni & Batulawang Rancabali
2.	Herry Suhardiyanto	26 Oktober 2016 *October 26, 2016*	Ciater
3.	I Made Putrawan	28 -29 Juli 2016 *28 to 29 July, 2016*	Rancabali
4.	Karen Tambayong	27 - 28 Juli 2016 *27 to 28 July, 2016* 30 Agustus 2016 *August 30, 2016* 16-17 September 2016 *16 to 17 September, 2016* 26 Oktober 2016 *26 Oct, 2016*	Rancabali Bukit Unggul – Sukawana Papandayan, Cisaruni, Dayeuhmanggung Ciater

No	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Tanggal *Date*	Objek (Kebun)
5.	Elen Setiadi	22 & 26 Oktober 2016 *October 22 & 26, 2016*	Gunung Mas
6.	Antonius HW Witono	26 Oktober 2016 *October 26, 2016*	Ciater

KEBIJAKAN REMUNERASI

Dasar Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris PTPN VIII tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PTPN VIII No. 3.00/SKPTS/26/2016, No. SK-26/S-MBU/06/2016, No. S-49/D1.MBU/06/2016 tanggal 30 juni 2016 tentang Penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

1. RUPS menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan PER-04/MBU/2014
2. Formulasi penghitungan gaji Direktur Utama mengacu pada pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan penghitungan gaji Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris
3. Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VIII sebagaimana dalam Risalah RUPS Nomor:

REMUNERATION POLICY

Basic Remuneration Determination

Determination of remuneration for the Board of Commissioners of PTPN VIII in 2016 pursuant to Decree No. PTPN VIII Shareholders 3.00 / SKPTS / 26/2016, No. SK-26 / S-MBU / 06/2016, No. S-49 / D1.MBU / 06/2016 dated June 30, 2016 regarding the Stipulation of salary / honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2016.

Remuneration Determination Procedure Board of Commissioners and Board of Directors

1. GMS set earnings of Directors and Board of Commissioners based on PER-04 / MBU / 2014
2. Formulations President Director's salary calculation refers to the internal guidelines established by the Minister as a reference for the calculation of salary Board of Commissioners and Board of Commissioners
3. Salary / honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners established under Decision 2016 as the Shareholders General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company PT Perkebunan Nusantara VIII as the Minutes of the GMS Number:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration Structure

No.	Jenis Penghasilan *Type of Income*	Ketentuan *Condition*
1.	Honorarium Honorarium	Besarnya Faktor Jabatan The amount of Position Factor
		Komisaris Utama 45% dari Gaji Direktur Utama President Commissioner at 45% of President Director's Salary
		Komisaris 90% dari Honorarium Komisaris Utama Commissioner at 90% of President Commissioner's Honorarium
2.	Tunjangan Allowances	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium Paid at 1 (one) month Honorarium
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Diberikan sebesar 20% dari Honorarium, bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas kendaraan tidak diberikan tunjangan transportasi Paid at 20% of the honorarium, members of BOC who get the facility of transport vehicles are not given allowances

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Jenis Penghasilan *Type of Income*	Ketentuan *Condition*
	Santunan Purna Jabatan Post Service Allowance	Berupa Premi Asuransi paling banyak 25% dari Honorarium dalam satu tahun, termasuk di dalamnya premi asuransi kecelakaan dan kematian In form of Insurance Premium at most 25% of the honorarium in one year, including accident and death insurance premiums
3.	Fasilitas Facilities	
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami serta maksimum 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja) Provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, for the concerned and 1 (one) wife / husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years (never been married or have never worked)
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Support Facility	Dibayarkan sesuai pengeluaran (at cost), sampai dengan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa Paid in accordance to the expenditure (at cost), up to as witnesses, suspects and defendants

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

1. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan Saham Dewan Komisaris

Tahun 2016, PTPN VIII tidak memberikan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja dan Saham kepada Dewan Komisaris.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar PTPN VIII, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk adanya pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 29 kali, meliputi Rapat Dewan Komisaris tanpa mengundang Direksi sebanyak 14 kali dan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi sebanyak 15 kali.

Remuneration Determination Indicators board of Commissioners

1. Salary Determination in the form of salary / honorarium, benefits and facilities that are fixed done taking into account income, assets, financial condition and capacity, inflation, and other relevant factors, and not contrary to the legislation in force.
2. Determination of income in the form of allowances and bonuses which are variable, is done taking into account the achievement of targets, soundness and financial capability as well as other relevant factors.

Performance Bonus, Bonus Non-Performance, and Stocks board of Commissioners

2016, PTPN VIII does not provide Bonus Performance, Non-Performance Bonus Shares to the BOC.

FREQUENCY OF MEETING AND BOARD OF COMMISSIONERS MEETING ATTENDANCE

According to the provisions of Article 16 paragraph (7) of the Articles of Association PTPN VIII, the Board held a meeting at least once a month and during the meeting the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. In each meeting of the Board of Commissioners made the minutes of the meeting, containing matters discussed (including the dissenting opinion / dissenting member of the Board of Commissioners, if any) and things are decided. Throughout 2016, the Board has conducted a meeting as much as 29 times, including the Board of Commissioners meeting without inviting the Board of Directors 14 times and the Board Meeting by inviting the Board of Directors for 15 times.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS
FREQUENCY OF MEETING AND BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Total Meeting*	Kehadiran *Presence*	Ketidakhadiran *Absence*	% Hadir *% of Presence*
Agus Pakpahan	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	-	100%
Alirahman	Komisaris Commissioner	11	8	-	73%
Karen Tambayong*)	Komisaris Commissioner	14	14	-	100%
Herry Suhardiyanto	Komisaris Commissioner	14	13	1	93%
Sutriono Edi	Komisaris Commissioner	8	8	-	100%
I Made Putrawan	Komisaris Commissioner	8	8	-	100%
Elen Setiadi **)	Komisaris Commissioner	6	5	1	83%
Antonius HW Witono **)	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	5	1	83%

*) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-205/MBU/09/2016 & No. 3.00/SKPTS/R/34/2016, Sdri. Karen Tambayong diangkat sebagai Komisaris Utama PTPN VIII menggantikan Sdr. Agus Pakpahan.
**) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-205/MBU/09/2016 & No. 3.00/SKPTS/R/34/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN VIII, Sdr. Elen Setiadi dan Sdr. Antonius Harso Waluyo Witono diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PTPN VIII menggantikan Sdr. Sutriono Edi dan Sdr. I Made Putrawan

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi
Board of Commissioners Meeting Frequency (inviting Board of Directors)

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Total Meeting*	Kehadiran *Presence*	Ketidakhadiran *Absence*	% Hadir *% of Presence*
Agus Pakpahan	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	-	100%
Karen Tambayong*)	Komisaris Commissioner	15	15	-	100%
Herry Suhardiyanto	Komisaris Commissioner	15	14	1	93%
Sutriono Edi	Komisaris Commissioner	8	8	-	100%
I Made Putrawan	Komisaris Commissioner	8	8	-	100%
Elen Setiadi **)	Komisaris Commissioner	7	5	2	71%
Antonius HW Witono **)	Komisaris Independen Independent Commissioner	7	5	2	71%

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS TANPA MENGUNDANG DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING AGENDA WITHOUT INVITING THE BOARD OF DIRECTORS

No	Tanggal *Date*	Agenda
1.	02-01-2016	1. Laporan KARU *Reports KARU* 2. Analisa LM s.d Oktober 2015 *LM analysis sd October 2015* 3. Analisa Rencana Kerjasama Pembangunan Kereta Api Cepat *Analysis of The Rapid Railway Development Cooperation Plan* 4. Lain-lain *Etc*
2	04-02-2016	1. Analisa LM s.d Desember 2015 dan Laporan Keuangan 2015 *analysis to December 2015 and 2015 Financial Statements* 2. Program Kerja KARU 2016 *KARU Work Program 2016* 3. Program Kerja Dewan Komisaris 2016 *BOC Work Program 2016*
3.	03-03-2016	1. LM Januari 2016 *LM January 2016* 2. Analisa Perubahan Struktur Organisasi Tenaga Kerja *Analysis of Changes in Organizational Structure of Labor* 3. Tanggapan surat Direksi pelepasan tanggungjawab atas kerjasama Jabarekind *Response from the Board of Directors of the release of responsibility for cooperation Jabarekind* 4. Progress Audit KAP
4	07-04-2016	1. LM s.d Februari 2016 *LM till February 2016* 2. Progress Audit KAP
5	10-05-2016	1. LM s.d Maret 2016 *LM till March 2016* 2. Analisis dampak perubahan harga teh *Analysis of the impact of changes in the price of tea* 3. Persiapkan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Audit 2015 *Prepare GMS Approval of 2015 Audited Financial Statements* 4. Lain-lain *Etc*
6.	02-06-2016	1. LM s.d April 20161. *LM till April 2016* 2. Lain-lain *Etc*
7.	11-07-2016	1. LM s.d Mei 2016 *LM sd May 2016* 2. Analisa Permohonan Penghapusan Aset Kebun Goalpara Aset Afdeling Bungamelur *Analysis of Application Removal of Assets Assets Goalpara Gardens Cambodgien Bungamelur* 3. Lain-lain *Etc*
8.	04-08-2016	1. Laporan Pendahuluan Tim Kerja Bersama *Preliminary Report of the Joint Working Team* LM s.d Juni 2016 2. Lain-lain *Etc*
9.	08-09-2016	1. Perkenalan Dekom *Settling Dekom* 2. Revisi RKAP 2016 *RKAP Revised 2016* 3. Lain-lain *Etc*
10.	22-09-2016	1. Persiapan Pertemuan Dekom PTPN ke Yogyakarta *Preparatory Meeting PTPN Dekom to Yogyakarta* 2. Pembahasan Draft Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Kerjasama Pinjam Pakai Lahan Kebun Panglejar *Discussion Draft Response on Request Cooperation BOC Borrow and Use of Land Gardens Panglejar* 3. Lain –lain *Etc*

No	Tanggal *Date*	Agenda
11	18-10-2016	1. LM s.d Bulan September 2016 *LM sd Month September 2016* 2. Pembahasan RKAP Tahun 2017 *Discussion RKAP Year 2017* 3. Lain –lain *Etc*
12.	26-10-2016	1. Rencana Kerja Komite 2017 dan RKA Dekom 2017 *Committee Work Plan 2017, 2017 and RKA Dekom* 2. Pembahasan RKAP 2017 *Discussion CBP 2017* 3. Lain-lain *Etc*
13	17-11-2016	1. LM s.d Bulan Oktober 2016 *LM sd Month October 2016* 2. Lain-lain *Etc*
14	15-12-2016	1. Tinjaklanjut Rapat sebelumnya; *Follow Up Previous Meeting* 2. Pembahasan Surat Direksi No. SB/I.1/4522/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Permohonan Tanggapan atas Pemenuhan Penyertaan PTPN VIII pada PT PSBI berupa lahan yang digunakan untuk TOD seluas 1.270 Ha; *Discussion of Directors Letter No. SB / I.1 / 4522 / XII / 2016 dated December 6, 2016 regarding the Participation Request Response to the fulfillment of PTPN VIII PT PSBI form of land used for TOD area of 1,270 hectares;* 3. Lain-lain. *Etc*

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDANG DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING AGENDA BY INVITING THE BOARD OF DIRECTORS

No	Tanggal *Date*	Agenda
1.	02-01-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow-up of previous meetings* 2. LM s.d Nopember Tahun 2015 *LM till November 2015* 3. Rencana Sumber Pertumbuhan Baru PTPN VIII *New Sources of Growth Plan PTPN VIII* 4. Lain-lain *Etc*
2.	04-02-2016	1. Monitoring Perkembangan HSR *Monitoring Developments HSR* 2. Monitoring RKAP 2016 *Monitoring RKAP 2016* 3. Laporan Keuangan PTPN VIII Tahun 2015 *PTPN VIII Financial Statements 2015* 4. Tanggapan Surat Perubahan Struktur Organisasi PTPN VIII *Response Letter PTPN VIII Organizational Structure Change* 5. Lain-lain : (Surat Direksi tentang Permohonan Pelepasan Tanggungjawab Kerjasama Eksplorasi Geothermal) *Other: (Letter of Request Release of Responsibility The Board of Directors of Geothermal Exploration Cooperation)*
3.	03-03-2016	1. LM Januari Tahun 2016 *LM January 2016* 2. Progress Audit KAP *Progress Audit Firm* 3. Pelepasan Master Plan Kota Walini dan HSR *The release of the Master Plan for the City Walini and HSR* 4. lain-lain *Etc*
4.	07-04-2016	1. Closing Meeting KAP atas Audit Tahun Buku 2015 *Closing KAP Meeting on Audit for Fiscal Year 2015* 2. LM s.d Bulan Februari 2016 *LM sd Month February 2016* 3. Tindaklanjut FGD Struktur Organisasi *Follow-FGD Organizational Structure* 4. Pemaparan Konsep RJPP Tahun 2016 s.d 2020 *The concept of exposure RJPP 2016 till 2020* 5. Lain-lain *Etc*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No	Tanggal *Date*	Agenda
5.	10-05-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow-up of previous meetings* 2. LM s.d Maret 2016 *LM till March 2016* 3. Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Audit 2015 *Preparation of MGS Approval of 2015 Audited Financial Statements* 4. Progress Rencana Sumber Pertumbuhan Baru *Progress Plans New Sources of Growth* 5. Lain-lain *Etc*
6.	02-06-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow-up of previous meetings* 2. LM s.d April 2016 *LM till April 2016* 3. Konsep Program Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Perusahaan *Concept Program Improvement and Performance Improvement Company* 4. Roadmap Pengembangan Hortikultura Tahun 2016 s.d 2025 *Horticulture Development Roadmap 2016 till 2025* 5. Lain-lain *Etc*
7.	11-07-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow-up of previous meetings* 2. Tindaklanjut Hasil RUPS Audit 2015 *Audit follow-up of 2015 GMS Results* 3. LM s.d Mei 2016 4. Lain-lain *Etc*
8.	04-08-2016	1. Pemaparan narasumber : *Exposure sources:* • Ir. Sugiono MS (Peneliti Purna Bhakti PPKS) *(Researcher Purna Bhakti PPKS)* • Dr. Rohayati S. (PPTK Gambung) 2. Tindaklanjut rapat sebelumnya *Follow-up of previous meetings* 3. LM s.d Juni 2016 (Pembahasan program prioritas per bidang) *(discussion of program priorities per field)* 4. Laporan Tim Kerja Bersama *Report of the Joint Working Group* 5. Lain-lain *Etc*
9.	08-09-2016	1. Revisi RKAP 2016 *RKAP Revised 2016* 2. Pemaparan Kajian Dampak Operasional dan Financial Pinjaman Baru dari PTPN III (Persero) *Exposure Assessment of Operations and Financial Impact of New Loan of PTPN III (Persero)* 3. Lain-lain *Etc*
10.	22-09-2016	1. Monitoring Program Optimalisasi Aset dan Pengembangan Usaha *Asset Optimization Program Monitoring and Business Development* 2. Pendalaman Dampak pinjaman terhadap peningkatan kinerja *Deepening Impact of lending to the improved performance* 3. Progress Kereta Api Cepat *Progress Fast Train* 4. Lain-lain *Etc*
11.	18-10-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow up of previous meetings* 2. LM s.d bulan September 2016 *LM sd month September 2016* 3. Pembahasan RKAP th. 2017 *Discussion RKAP th. 2017* 4. Lain-lain *Etc*
12.	26-10-2016	1. Pembahasan RKAP th 2017 *Discussion RKAP th 2017* 2. Lain-lain *Etc*

No	Tanggal *Date*	Agenda
13.	03-11-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow Up of previous meetings* 2. Persiapan Pertemuan dengan Direksi PTPN III (Persero) *Preparation Meeting with the Board of Directors of PTPN III (Persero)* 3. Lain-lain *Etc*
14	17-11-2016	1. LM s.d bulan Oktober 2016 *LM till the month October 2016* 2. Progress Kereta Api Cepat *Progress Fast Train* 3. Lain-lain *Etc*
15	15-12-2016	1. Tindaklanjut Rapat sebelumnya *Follow Up of previous meetings* 2. Pembahasan Surat Dir. No. SB/I.1/4522/XII/2016 tgl 6 Des 2016 perihal Permohonan Tanggapan atas Pemenuhan Penyertaan PTPN VIII pada PT PSBI berupa lahan yang digunakan untuk TOD seluas 1.270 Ha *Discussion Letter Dir. No. SB / I.1 / 4522 / XII / 2016 Date 6 Des 2016 concerning the Participation Request Fulfillment Comments on PTPN VIII PT PSBI form of land used for TOD area of 1,270 Ha* 3. Lain-lain *Etc*

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

PTPN VIII melakukan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PTPN VIII; gambaran mengenai kondisi perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi; dan Informasi-informasi lainnya yang dianggap perlu.

Sepanjang tahun 2016, telah terjadi penggantian Anggota Dewan Komisaris, yaitu Sdr. Sutriono Edi dan Sdr. I Made Putrawan digantikan oleh Sdr. Elen Setiadi dan Sdr. Antonius Harso Waluyo Witono sebagai Komisaris dan Komisaris Independen, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-205/MBU/09/2016 dan No. 3.00/SKPTS/SKPTS/R/34/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN VIII.

Sekretaris Perusahaan mempersiapkan materi dan waktu pelaksanaan Program Pengenalan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/353/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Program Pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi. Program Pengenalan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 8 September 2016 sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor : 31/Dekom/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016, terdapat pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris, sebagai berikut:

RECOGNITION PROGRAM BOARD OF COMMISSIONERS

PTPN VIII undertake an induction program for new Members of the Board of Commissioners with the aim to provide an implementation of GCG at PTPN VIII; a description of the condition of the company related to the objectives, nature and scope of activities, financial performance and operations, strategy, short-term business plans and long-term competitive position, risks and other strategic issues; information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; description of the duties and responsibilities of Commissioners and Board of Directors; and other information-information that is deemed necessary.

Throughout 2016, there has been a replacement of Board of Commissioners, namely Mr. Sutriono Edi and Br. I Made Putrawan replaced by Br. Elen Setiadi and Br. Antonius Harso Waluyo Witono as Commissioner and Independent Commissioner, based on the decision of Minister of State SK-205 / MBU / 09/2016 and No. 3.00 / SKPTS / SKPTS / R / 34/2016 dated 1 September 2016 on Termination, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN VIII.

Company Secretary to prepare the material and time Introduction Program execution in accordance with the Decision of the Board of Directors: KEP / I.1 / 353 / III / 2011 dated March 17, 2011 on Recognition Program Board of Commissioners and Board of Directors. Program Introduction to the new Members of the Board of Commissioners are held in conjunction with the activities of Board Meeting on September 8, 2016 in accordance BOC Letter No. 31 / Dekom / IX / 2016 September 1, 2016.

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2016, there is the implementation of competence development programs for BOC, as follows:

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Komisaris *Commissioner*	Pelatihan *Training*	Peserta *Attendee*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
1.	Karen Tambayong	Seminar Penyegaran Komisaris BUMN Refresher Seminar Commissioner SOEs	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Ritz Carlton - Jakarta	BUMN Executive Club
2.	Antonius HW Witono	Panel Discussion "Peran Komisaris Independen dalam mendorong Efektifitas fungsi oversight Komite Audit dari perspektif Reguler" panel Discussion "The Role of Independent Commissioner in pushing Effectiveness Audit Committee oversight functions from the perspective Regular"	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hotel Bidakara -Jakarta	Indonesian Institute of Audit Committee (IIAC)

INDIKATOR DAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) tahun 2016 tercantum dalam Program Kerja Dewan Komisaris PTPN VIII Tahun 2016.

PROSES PENETAPAN KPI DEWAN KOMISARIS

1. Perangkat Dewan Komisaris membuat Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan.
3. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui Surat Nomor : 36/Dekom/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penyampaian Program Kerja Dewan Komisaris PTPN VIII 2016 dengan tembusan Direksi PTPN VIII.
4. RUPS mengesahkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris PTPN VIII Tahun 2017 sesuai Risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2016 Nomor : RIS/I.1/1000/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
5. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan atas kinerja perusahaan secara berkala (triwulanan) melalui :

INDICATORS AND PERFORMANCE ASSESSMENT BOARD OF COMMISSIONERS

Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) is a measure of the evaluation of the successful implementation of tasks and responsibilities of monitoring and providing advice to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations and / or statutes. Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) in 2016 are listed in the Work Program of the Board of Commissioners of PTPN VIII 2016.

KPI SETTING PROCESS BOARD OF COMMISSIONERS

1. Device BOC create Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) Board of Commissioners at the time of preparation of the annual budget and work plan.
2. The work plan and the annual budget that includes key performance indicators and targets which reflect the size of the successful implementation of stewardship and giving advice to the Board of Directors, submitted to the Board of Commissioners to do the discussion and endorsement.
3. Furthermore, the Board of Commissioners submit the Annual Budget and Work Plan of the Board of Commissioners to shareholders through letter No. 36 / Dekom / X / 2015 dated October 30, 2015 concerning the Submission of the Board of Commissioners Work Program 2016, with a copy of PTPN VIII Board of Directors of PTPN VIII.
4. AGM endorsed the Key Performance Indicators (KPI) Board of Commissioners of PTPN VIII Year 2017 according Minutes of the AGM on Ratification CBP 2016 Number: RIS / I.1 / 1000 / XII / 2015 dated December 28, 2015.
5. BOC submit a response to the company's performance on a regular basis (quarterly) via:

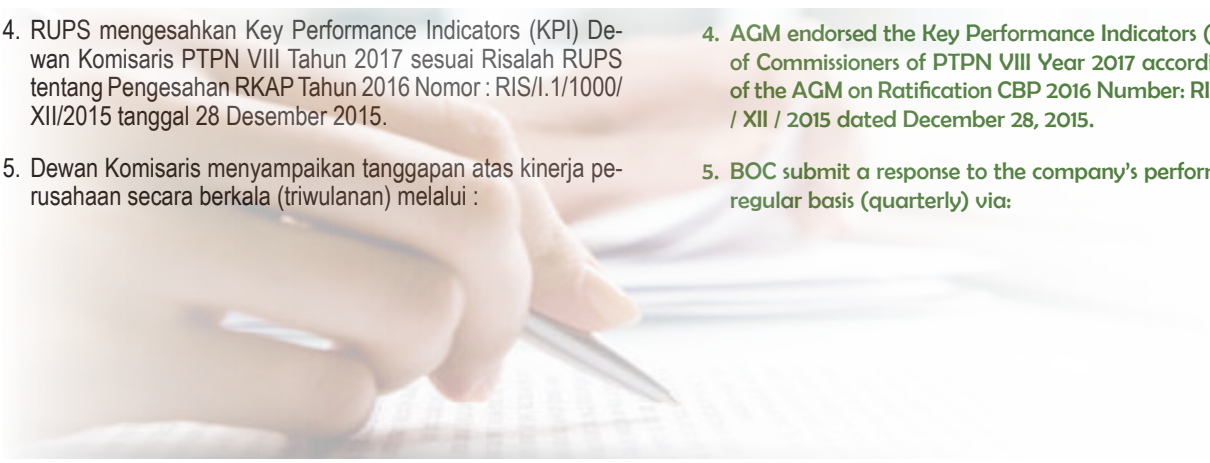

No	Nomor Surat *Letter Number*	Tanggal *Date*	Tanggapan *Respone*
1.	14/Dekom/V/2016	26-05-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja TW I tahun 2016 PTPN VIII BOC Response to Performance 2016 TW I PTPN VIII
2.	29/Dekom/V/2016	18-08-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Semester I tahun 2016 PTPN VIII BOC response to the First Half 2016 Performance PTPN VIII
3.	45A/Dekom/V/2016	15-11-2016	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja TW III tahun 2016 PTPN VIII Responses Board of Commissioners on TW III 2016 performance PTPN VIII

6. Pemegang Saham menilai kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS (ASSESSMENT) DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara reguler sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan acuan perbaikan ke depan. Hasil evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris terhadap pencapaian Indikator Penilaian kinerja dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Sedangkan hasil evaluasi terhadap penerapan GCG pada aspek Dewan Komisaris dimuat dalam Laporan Assessment GCG PTPN VIII. Laporan tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap pencapaian Indikator Penilaian Kinerja. Namun secara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris juga dinilai oleh BPKP Provinsi Jawa Barat dalam penilaian penerapan GCG di PTPN VIII.

Evaluasi terhadap penerapan GCG pada aspek Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

BOARD CHARTER (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS)

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Kebijakan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Tata Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual). Board Manual disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut senantiasa ditinjau secara berkala. Hal-hal yang diatur dalam Board Manual

6. Shareholders of assessing the performance of the Board of Commissioners through the GMS mechanism.

EVALUATION OF DUTY (ASSESSMENT) BOARD OF COMMISSIONERS

BOC's performance is evaluated on a regular basis as a form of accountability for implementing the tasks and references to future improvements. Results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners on the achievement of performance assessment indicators outlined in the Supervisory Report of the Board of Commissioners, while the results of the evaluation of the implementation of GCG at BOC aspects contained in the GCG Assessment Report PTPN VIII. The report was presented to the Shareholders at the AGM as a form of BOC.

PERSONS WHO ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

BOC conduct a self assessment (self-assessment) to the achievement of performance assessment indicators. However, the overall performance of the Board of Commissioners and Board of Directors evaluated collegially by the Shareholders at the AGM. In addition, the performance of the Board of Commissioners also considered by BPK West Java province in the assessment of the implementation of GCG at PTPN VIII.

The evaluation of the implementation of GCG in the aspect of the BOC conducted by Regulation SOE No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in state-owned companies and the Decree of the Minister of SOE No: SK-16 /S.MBU/2012 June 6, 2012 on the indicators / parameters Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.

BOARD CHARTER (GUIDELINES AND CONDUCT BOARD OF COMMISSIONERS WORK)

Guidelines and work rules BOC contained in the Joint Policy Board of Directors and the Board of Commissioners on the Procedure of Employment of Directors and Board of Commissioners (Board Manual). Board Manual prepared based on the rules and regulations in force. The document constantly reviewed regularly. Things are set in Board Manual and associated with

dan terkait dengan Dewan Komisaris, antara lain:
1. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris
   a. Organisasi
   b. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang
   c. Benturan Kepentingan
   d. Hak
   e. Pelatihan dan Pengembangan
   f. Organ Pendukung
   g. Penilaian dan Penghasilan Direksi

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN beserta perubahannya, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham serta atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan, yang dapat memperngaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Independensi menjamin terlaksananya mekanisme check and balance yang diharapkan dapat dijalankan sungguh-sungguh dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:
1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
2. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS INDEPENDEN

Tanggung Jawab Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. PTPN VIII memiliki 1 (satu) Komisaris Independen yaitu Antonius Harso Waluyo Witono yang diangkat pada RUPS tanggal

BOC, among others:
1. Basic Principles of Labor Relations Board of Directors and Board of Commissioners
2. board of Commissioners
   a. Organization
   b. Tasks, Responsibilities, Obligations and Privileges
   c. Conflict of Interest
   d. Right
   e. Training and development
   f. organ Support
   g. Rate and Income Board of Directors

INDEPENDENT COMMISSIONER

Under the terms of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Corporate Governance (Good Corporate Governance) in SOEs and its amendments, the composition of the Board of Commissioners of the Company, at least 20% (twenty percent) is a member of the Board Independent Commissioner set out in the appointment.
Board of Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have the financial, managerial ownership and / or related to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and / or shareholders and or relationship with the Company, which can affect the ability to act independently. The independence guarantee the implementation of checks and balances which are expected to run in earnest in the oversight function BOC.

CRITERIA FOR DETERMINING THE INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner criteria refer to the provisions of Article 21 of the Financial Services Authority Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company, as follows:
1. No shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
2. Not having affiliation with the Public Company, a member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Issuer or the Public Company; and
3. Do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Public Company.

RESPONSIBILITIES, DUTIES AND POWERS OF COMMISSIONERS OF INDEPENDENT

Responsibility of Independent Commissioner

Independent Commissioner has the primary responsibility to promote the implementation of the principles of good corporate governance (GCG) in the company through the empowerment of the Board of Commissioners in order to perform the task of monitoring and providing advice to the Board of Directors effective and provide added value to the company. PTPN VIII have 1 (one) Independent Commissioner Antonius Harso

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Tugas Komisaris Independen

1. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan

Wewenang Komisaris Independen

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite risiko, pengembangan dan GCG.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan. Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen.

Ketentuan jumlah Anggota Komisaris Independen di PTPN VIII paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. PTPN VIII memiliki Komisaris Independen sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Antonius Harso Waluyo Witono sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-205/MBU/09/2016 & Nomor: 3.00/SKPTS/R/34/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PTPN VIII.

namely Waluyo Witono appointed on the GMS date.

In an effort to carry out their responsibilities with both the Independent Commissioner should proactively seek to Board of Commissioners to supervise and provide advice to the Board of Directors related to, but not limited to the following matters:

1. Ensure that the company has an effective business strategy, including monitoring the schedule, the budget and the effectiveness of the strategy.
2. Ensure that the company raised executives and professional managers.
3. Ensure that the company has the information, system control, and audit system that works well.
4. Ensure that the company complies with applicable laws and regulations as well as the values set by the company in carrying out its operations.
5. Ensuring the risks and potential crisis is always identified and managed properly.
6. Ensuring the principles and practices of good corporate governance are adhered to and implemented well.

Independent Commissioner Tasks

1. Ensure transparency and greater openness company's financial statements.
2. Fair treatment of minority shareholders and other stakeholders.
3. Disclosure of conflict of interest transactions are reasonable and fair.
4. Companies' compliance with laws and regulations.
5. Ensure accountability organ of the company

Independent Commissioner Privileges

1. Independent Commissioner chaired the audit committee and the risk committee, development and corporate governance.
2. Independent commissioner based on rational considerations and prudence reserves the right to express opinions that are different from other board members shall be recorded in the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and different opinions that are material, shall be included in the annual report. Statement On Independence Independent Commissioner

Provisions number of Members of Independent Commissioner of PTPN VIII of at least 20% (twenty percent) of the total number of Commissioners. PTPN VIII have Independent Commissioner of 1 (one), that Antonius Harso Waluyo Witono accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises and Director of PTPN III (Persero) Number: SK-205 / MBU / 09/2016 and No. 3.00 / SKPTS / R / 34/2016 regarding Discharge, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN VIII.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENCE INDEPENDENT COMMISSIONER

Aspek Independensi *Aspects of Independence*	Antonius Harso Waluyo Witono
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di PTPN VIII *Does not have any affiliation with the Directors and / or member of the Board of Commissioners in PTPN VIII*	√
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan PTPN VIII *Not serve on the Board of Directors in the Companies affiliated with PTPN VIII*	√
Tidak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir *Not working in government agencies within a period of 3 (three) years*	√
Tidak bekerja di PTPN VIII atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir *Not working in PTPN VIII or its affiliates in the period of 3 (three) years*	√
Tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan PTPN VIII atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada PTPN VIII dan afiliasinya *Do not have a financial relationship, either directly or indirectly with PTPN VIII or other companies that provide services and products to PTPN VIII and affiliates*	√
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PTPN VIII. *Free of interest and business activity or other relationship that could hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think independently in the scope of PTPN VIII.*	√

URAIAN DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DESCRIPTION OF DIRECTORS

Organ Company's Board of Directors is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company, both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association and the provisions of applicable law.

KOMPOSISI DIREKSI

Uraian komposisi Direksi selama periode 2016, sebagaiberikut :

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Description of the composition of the Board of Directors during the period of 2016 as follows:

Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*	Tanggal *Date*	Keterangan *Information*
Dadi Sunardi	Keputusan Menteri BUMN No. SK-93/MBU/2012 Decree of the Minister of SOEs No. SK-93 / MBU / 2012	1 Maret 2012 March 1, 2012	Direktur Utama President Director
Bambang Murtioso	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-214/MBU/11/2015 & KPJAK/Hold/SKPTS/R/18/2015 Decree of the Minister of SOE & Director of PTPN III (Persero) No. SK-214 / MBU / 11/2015 & KPJAK / Hold / SKPTS / R / 18/2015	2 November 2015 November 2, 2016	Direktur Director

Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*	Tanggal *Date*	Keterangan *Information*
	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-148/MBU/07/2016 & 3.00/SKPTS/R/17/2016 Decree of the Minister of SOE & Director of PTPN III (Persero) No. SK-148 / MBU / 07/2016 & 3.00 / SKPTS / R / 17/2016	15 Juli 2016 July 15, 2016	Direktur Utama President Director
Gunara	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-214/MBU/11/2015 & KPJAK/Hold/ SKPTS/R/18/2015 Decree of the Minister of SOE & Director of PTPN III (Persero) No. SK-214 / MBU / 11/2015 & KPJAK / Hold / SKPTS / R / 18/2015	2 November 2015 November 2, 2016	Direktur Director
I.G.N Suharta Wijaya	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-214/MBU/11/2015 & KPJAK/Hold/ SKPTS/R/18/2015 Decree of the Minister of SOE & Director of PTPN III (Persero) No. SK-214 / MBU / 11/2015 & KPJAK / Hold / SKPTS / R / 18/2015	2 November 2015 November 2, 2016	Direktur Director
Tatang Supriatna	Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) No. SK-148/MBU/07/2016 & 3.00/SKPTS/R/17/2016 Decree of the Minister of SOE & Director of PTPN III (Persero) No. SK-148 / MBU / 07/2016 & 3.00 / SKPTS / R / 17/2016	15 Juli 2016 July 15, 2016	Direktur Director

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-148/MBU/07/2016 & 3.00/ SKPTS/R/17/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN VIII, bahwa Pemegang Saham PTPN VIII memberhentikan dengan hormat Dadi Sunardi sebagai Direktur Utama, dan mengalihkan penugasan Bambang Murtioso yang semula sebagai Direktur menjadi Direktur Utama, serta mengangkat Tatang Supriatna sebagai Direktur PTPN VIII.

Based on the Ministry of SOEs and Director of PTPN III (Persero) Number: SK-148 / MBU / 07/2016 & 3.00 / SKPTS / R / 17/2016on Termination, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Directors of PTPN VIII, that the Shareholders PTPN VIII dismiss with respect Dadi Sunardi as Managing Director, and shift assignment Bambang Murtioso initially as Director as Managing Director, as well as lifting Tatang Supriatna as Director of PTPN VIII.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Berdasarkan Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Selanjutnya penetapan pembagian tugas Anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Direksi PTPN VIII Nomor : SK/I.1/491/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 tentang Pembagian Tugas Direksi PTPN VIII, dengan rincian sebagai berikut :

SHARING DUTIES OF DIRECTORS

Pursuant to Article 11 paragraph (25) of the Articles of Association, roles and responsibilities of each member of the Board of Directors determined by the General Meeting of Shareholders. In the case of the General Meeting of Shareholders did not specify the roles and responsibilities, the roles and responsibilities between the Board of Directors determined by the Board's decision. Furthermore, the establishment of the division of tasks carried out by the Decision of the Board of Directors Member Board of Directors of PTPN VIII Number: SK / I.1 / 491 / XI / 2015 dated November 10, 2015 on the Division of Duties of Directors of PTPN VIII, with details as follows:

No	Nama *Name*	Bidang Tugas *Task field*
1.	Dadi Sunardi	Direktur Utama President Director
2.	Bambang Murtioso	Direktur Produksi Director of production
3.	Gunara	Direktur SDM & Umum Director of Human Resources & General
4.	I.G.N Suharta Wijaya	Direktur Keuangan Director of Finance

Penggantian Anggota Direksi yang terjadi pada tahun 2016 ditindaklanjuti dengan perubahan pembagian tugas Anggota Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP/III.1/492/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PTPN VIII, dengan rincian sebagai berikut :

Replacement of Directors that occurred in 2016 followed up with changes in the division of tasks Directors Directors' Decree No. KEP / III.1 / 492 / VIII / 2016 dated August 25, 2016 on the Division of Duties and Powers of Directors of PTPN VIII, with details as follows:

No	Nama *Name*	Bidang Tugas *Task field*
1.	Bambang Murtioso	Direktur Utama President Director
2.	Tatang Supriatna	Direktur Operasional Director of Operations
3.	Gunara	Direktur Manajemen Aset Director of Asset Management
4.	I.G.N Suharta Wijaya	Direktur Komersil Commercial Director

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

TUGAS

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam menjalankan tugas tersebut, wajib diiringi itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND POWERS OF DIRECTORS

TASK

Directors in charge of running all actions related to the achievement of the performance and management of the company for the benefit of the company and in accordance with the purposes and objectives of the company, as well as representing the company both inside and outside the court on all matters and all the events associated with the company. In performing these duties, shall be accompanied by good faith and responsibility in performing their duties for the benefit and business

dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Uraian Tugas Direksi

Uraian tugas Direksi sesuai Keputusan Direksi PTPN VIII Nomor : KEP/III.1/762/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII adalah sebagai berikut :

Direktur Utama

Lingkup dan Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan sasaran, strategi, kebijakan, dan program perusahaan yang dituangkan dalam RKAP, RJP, dan RUPS.
3. Merencanakan, membina, dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan.
4. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengamanan kekayaan perusahaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Bertindak sebagai Pimpinan Umum Perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
7. Membina Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan, Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Manajemen Kinerja serta General Manager untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
8. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang berupa Neraca dan Daftar Laba/Rugi serta laporan lainnya secara berkala kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Instansi lainnya.

Direktur Operasional

Lingkup dan Tanggung Jawab :

1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang produksi dan industri hilir terpadu.
2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang produksi dan industri hilir terpadu.
3. Menghasilkan budidaya, produksi komoditi dengan produktivitas, kualitas, dan harga pokok sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dan Manajer dalam ruang lingkup direktoratnya.
5. Menyiapkan dan menyajikan laporan kinerja bidang produksi dan industri hilir terpadu beserta analisanya secara berkala sebagai laporan manajemen kepada Pemegang Saham, Komisaris, dan Instansi terkait.
6. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk bidang produksi dan industri hilir terpadu.

companies with restrictions as set forth in the regulations and legislation in force, the Articles of Association, and / or decision of the AGM.

Duties of Directors

Description of duties of Directors in accordance with Decree of Directors of PTPN VIII: KEP / III.1 / 762 / X / 2016 dated October 24, 2016 About the Organization and Work Flow PT Perkebunan Nusantara VIII is as follows:

President Director

Scope and Responsibilities:

1. Managing the company's interests and objectives of the company.
2. Set goals, strategies, policies, and programs as outlined in the CBP company, CPR, and GMS.
3. Plan, build, and develop the effectiveness and efficiency of enterprise organizations in achieving the company's objectives.
4. Maintain and manage the company's assets based on the principles, rules, and regulations.
5. Organize and develop a surveillance system for safeguarding the wealth of the company based on the rules and regulations.
6. Acting as General Director of the Company, to coordinate the operations of the company in accordance with the plans and policies that have been set.
7. Fostering Head of Company Secretariat, Head of Internal Audit and Head of Department of Information Technology and Performance Management as well as General Manager to achieve effectiveness and efficiency of implementation of tasks and responsibilities.
8. Preparing and presenting reports the company's business results in the form of balance sheet and list of profit / loss and other reports periodically to the Shareholders, Board of Commissioners, and other institutions.

Director of Operations

Scope and Responsibilities:

1. Formulate goals, strategies, policies, and programs in the field of integrated production and downstream industries.
2. Implement, monitor and evaluate the strategies, policies and programs in the field of integrated production and downstream industries.
3. Produce cultivation, production of commodities with productivity, quality, and cost of goods in accordance with the targets.
4. Foster effectiveness and efficiency of the duties and responsibilities of the Chief and Manager ranks within the scope of his directorate.
5. Preparing and presenting a performance report industrial production and integrated downstream and analysis on a regular basis as a management report to the Shareholders, Board of Commissioners, and related institutions.
6. Planning, implementing, and controlling the use of the budget to the field of integrated production and downstream industries.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Direktur Manajemen Aset
Lingkup dan Tanggung Jawab:

1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, Hukum dan PKBL, serta Optimalisasi Aset.
2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, Hukum dan PKBL, serta Optimalisasi Aset.
3. Membangun sistem manajemen SDM dan menyelenggarakannya.
4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dalam ruang lingkup direktoratnya.
5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang SDM, Hukum dan PKBL, serta Optimalisasi Aset secara efisien dan efektif.
6. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya.
7. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang SDM, Hukum dan PKBL, serta Optimalisasi Aset.

Direktur Komersil
Lingkup dan Tanggung Jawab:

1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan, akuntansi, pemasaran serta pengadaan barang dan jasa.
2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan, akuntansi, pemasaran serta pengadaan barang dan jasa.
3. Mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian dalam ruang lingkup direktoratnya.
5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang keuangan, akuntansi, pemasaran serta pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.
6. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan.
7. Membangun hubungan dengan lembaga pendanaan dan instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya.

TANGGUNG JAWAB

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Director of Asset Management
Scope and Responsibilities:

1. Formulate goals, strategies, policies, and programs in the field of HR, Legal and CSR, and Asset Optimization.
2. Implement, monitor and evaluate the strategies, policies and programs in the field of HR, Legal and CSR, and Asset Optimization.
3. Building a human resource management system and organize it.
4. Foster effectiveness and efficiency of the duties and responsibilities of the Head of the ranks within the scope of his directorate.
5. Fostering a business unit leaders in the management of HR, Legal and CSR, as well as the optimization of assets efficiently and effectively.
6. Build relationships with institutions relevant agencies in supporting the effective discharge of their duties.
7. Preparing and presenting a report the company in the field of HR, Legal and CSR, and Asset Optimization.

Commercial Director
Scope and Responsibilities:

1. Formulate goals, strategies, policies, and programs in the areas of finance, accounting, marketing and procurement of goods and services.
2. Implement, monitor and evaluate the strategies, policies and programs in the areas of finance, accounting, marketing and procurement of goods and services.
3. Managing finance company effectively and efficiently.
4. Foster effectiveness and efficiency of the duties and responsibilities of the Head of the ranks within the scope of his directorate.
5. Fostering a business unit leaders in the management of finance, accounting, marketing and procurement of goods and services efficiently and effectively.
6. Prepare and present financial statements of the company.
7. Build relationships with funding agencies and relevant agencies in supporting the effective implementation of their duties.

RESPONSIBLE

Each member of the Board of Directors personally take full responsibility for the losses if the relevant company at fault or negligent performing their duties. In the event that the Board of Directors consists of two (2) members of the Board of Directors or more, then the responsibility apply jointly and severally for any member of the Board of Directors, unless it can be proved that:

- The loss is not due to error or negligence;
- Had maintains good faith and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the company;
- Do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, of acts of management resulting in losses; and
- Have taken action to prevent the continuation of such losses arising.

Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko serta praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi di PTPN VIII sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk BUMN Perkebunan serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Disamping itu, Direksi juga melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan tugas SPI dan Sekretaris Perusahaan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris.

WEWENANG

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PTPN III (Persero);
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

KEWAJIBAN DAN HAK DIREKSI
KEWAJIBAN

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

In addition, the Board of Directors also has responsibility for the internal control structure and implementation of risk management as well as the practices of good corporate governance. The Board of Directors ensures that accounting practices at PTPN VIII in accordance with generally accepted accounting principles for state-owned plantations as well as generally accepted accounting principles in Indonesia. In addition, the Board of Directors to evaluate the effectiveness of the implementation of SPI and Corporate Secretary duties and conduct follow-up required in accordance with the directives of the Board of Commissioners.

AUTHORITY

1. Establish management policies of the Company;
2. Arrange handover of Directors to one or several members of the Board of Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
3. Arrange handover of Directors to one or several workers of the Company either alone or together or to other persons, to represent the Company in and out of court;
4. Set the provisions of the employment of the Company including the establishment of salaries, pensions or old-age benefits and other income for employees of the Company by the legislation in force, with the provisions of the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for workers that goes beyond the obligations imposed legislation, must obtain prior approval from the PTPN III (Persero);
5. Appoint and dismiss employees of the Company the Company based on employment regulations and legislation in force;
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Company;
7. Perform all acts and other acts regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company by other parties and / or any other party to the Company, as well as representing the company's inside and outside the court on all matters and all cases, with the restrictions as set forth in the regulations legislation, Articles of Association and / or the General Meeting of Shareholders.

LIABILITIES AND RIGHTS OF DIRECTORS
LIABILITY

1. Try and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the purpose and business activities;
2. Prepare in time the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget, and amendments and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval General Meeting of Shareholders.
3. Briefed General Meeting of Shareholders on the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget.
4. Creating Shareholder Register, Special Register, Treatise General Meeting of Shareholders and Board of Directors Meeting Minutes.

5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen perseroan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali da-

5. Make Annual Report as a form of liability management of the Company, as well as the company's financial documents referred to in the Act on Document Company.
6. Develop Financial Statements by Financial Accounting Standards and handed over to the Public Accountants for auditing.
7. Delivering the Annual Report including the Financial Statements General Meeting of Shareholders to be approved and ratified, as well as a report on the rights of the Company which are not recorded in the books among other things as a result of write-offs of receivables.
8. Briefed General Meeting of Shareholders of the Annual Report;
9. Delivering the Balance Sheet and Income Statement which was approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Justice and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation.
10. Delivering the report to change the composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister responsible for law and Human rights.
11. Maintaining the Register of Shareholders, Special List, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report and financial documents of the company as referred to in letter b points 4) and 5) of this paragraph, and other company documents.
12. Saving at the domicile of the company: Shareholder Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Minutes, Annual Report and financial documents of the company and other company documents referred to in item 11 letter b) of this paragraph.
13. Develop accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the maintenance function, recording, storing, and monitoring.
14. Providing regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and / or shareholders;
15. Preparing the Company's organizational structure complete with details and duties;
16. Provide an explanation about all the things asked or requested members of the Board of Commissioners and Shareholders;
17. Develop and establish a blueprint for the organization of the Company;
18. Running other obligations in accordance with the provisions set forth in these Statutes and set by General Meeting of Shareholders pursuant to the legislation.

FREQUENCY OF MEETING AND BOARD OF DIRECTORS MEETING ATTENDANCE

According to the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG), Board of Directors Meeting held regularly, at least once in every

lam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi, yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
Sepanjang tahun 2016, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

month, and in the meeting of Directors may invite the Board of Commissioners. Minutes of the Meeting of the Board of Directors made up for each meeting of the Board of Directors, which includes all matters discussed and decided upon at the Meeting, including but not limited to the opinions that developed in meetings, good opinion to support or not support or dissenting opinion (dissenting), and absences members of the Board of Directors, if any.
Throughout 2016, the Board of Directors has conducted a meeting of 20 (twenty) times.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Amount Meeting*	Kehadiran *Presence*	Ketidakhadiran *Absence*	% Hadir *% Present*
Dadi Sunardi	Direktur Utama *President Director*	11	11	-	100%
Bambang Murtioso*)	Direktur *Director*	20	19	1	95%
Gunara	Direktur *Director*	20	19	1	95%
I.G.N Suharta Wijaya	Direktur *Director*	20	17	3	85%
Tatang Supriatna *)	Direktur *Director*	9	9	-	100%

*) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN & Direktur Utama PTPN III (Persero) Nomor: SK-148/MBU/07/2016 & 3.00/SKPTS/R/17/2016, Sdr. Bambang Murtioso diangkat sebagai Direktur Utama PTPN VIII menggantikan Sdr. Dadi Sunardi dan mengangkat Sdr. Tatang Supriatna sebagai Direktur PTPN VIII

*) Based on the decision of the Minister of State Enterprises and Director of PTPN III (Persero) Number: SK-148 / MBU / 07/2016 & 3.00 / SKPTS / R / 17/2016, Br. Bambang Murtioso appointed as Director of PTPN VIII replaces Br. Dadi Sunardi and raised Br. Tatang Supriatna as Director of PTPN VIII

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Agenda Rapat Direksi
Board of Directors Meeting Agenda

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
1	12-01-2016	1. Pembahasan bahan presentasi Strategi Pencapaian RKAP 2016; Persiapan ‘’Peletakan Batu Pertama tgl 21 Januari 2016. *Discussion of the presentation material CBP Achievement Strategy 2016; Preparation ‘’ Construction Foundation date January 21, 2016*. 2. Persiapan “Peletakan Batu Pertama tanggal 21 Januari 2016”. *Preparation “Construction Foundation of January 21, 2016”* 3. Pembahasan perkembangan HSR dan penyelesaian internal proses pemenuhan dokumen prosedur HSR. *Discussion of HSR development and completion of the internal procedures document fulfillment process HSR.* 4. Struktur Organisasi. *Organizational structure.* 5. Perpanjangan Iklan Goalpara. *Extension Ads Goalpara.* 6. Penjualan Persediaan Old Tea dan eks Rijek. *Sales Inventory Old Tea and ex Rejection.* 7. Kerjasama Pengembangan IHT. *IHT Development Cooperation.* 8. Lain-lain : *Etc :* a. Penyelesaian PIR/NES. *Completion PIR / NES.* b. Sewa Pakai Mesin Innova Tea Roller (ITR) di Kebun Sedep. *Wear Rental Innova Engineering Tea Roller (ITR) at Sedep Gardens*. c. Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna. *Sawarna Beach Tourism Area Development.* d. Kerjasama dengan PT. PG Rajawali II. *Cooperation with PT. PG Rajawali II* e. Perkembangan Pembangunan Rest Area di Tol Cipali. *Development Trend Rest Area Toll Cipali* f. Optimalisasi Aset Kantor Dago Nomor 107 Bandung. *Optimizing Asset No. 107 Bandung Dago Office* g. Tindak Lanjut Tim Penyusun HPS. *Follow-up HPS Development Team*
2	11-02-2016	1. Strategi Pertumbuhan Baru. *New Growth Strategy* 2. Pelaksanaan Pelatihan Bagi Karyawan Baru. *Implementation Training for New Employees.*
3	01-03-2016	1. Pengembangan Sumber Pertumbuhan Baru. *New Growth Resources Development* 2. Perubahan Struktur Organisasi. *Changes in Organizational Structure* 3. Review Roadmap BUMN Industri Hilir Teh. *Review Downstream Roadmap Tea SOE.*
4	18-03-2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya. *Follow-up of the previous meeting* 2. Pengembangan Kota Walini (TOD dan Non TOD). *Walini Urban Development (TOD and Non TOD)* 3. Lain –lain. *Etc.*
5	22-03-2016	1. Temuan BPK RI Perihal Kerjasama Pinjam Pakai Lahan KJK Teknosa. *BPK findings regarding Cooperation Borrow and Use of Land KJK Teknosa.* 2. Persiapan FGD Perubahan Struktur Organisasi. *Preparation for FGD Changes in Organizational Structure.* 3. Pengelolaan Kebun Sawit dengan EMHA Group. *Management of Oil Palm Plantations with Emha Group* 4. Tindaklanjut Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tgl. 3 Maret 2016. *Follow-Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Directors Date. March 3rd, 2016* 5. Lain-lain : *Etc.* a. Pra PKB Triwulan II/2016. *Pre PKB Quarter II / 2016* b. Jasa Pengawalan Panen Teh Sdr. Dr. A. Imran Rosadi dari PPTK Gambung. *Escort Service Harvest Tea Br. Dr. A. Imran Rosadi of PPTK Gambung* c. Pembayaran Secara Bertahap Kepada Pihak Ke III (Supplier). Gradual Payment To Party III (Supplier).

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
6	04-04-2016	1. Pemaparan Rencana Program Kerja Bagian Setbang Tahun 2016. *Exposure Program Plan Work Part Setbang 2016* 2. Pemaparan Master Plan Agrowisata Tahun 2016. *Exposure Agro 2016 Master Plan* 3. Pemaparan Konsep RJPP 2016-2020. *Exposure RJPP Concept 2016-2020* 4. Tindaklanjut FGD Struktur Organisasi. *Follow-FGD Organizational Structure* 5. Pelaksanaan Assesment PJP. *Implementation Assessment PJP*
7	12-04-2016	1. Tindak Lanjut Temuan Audit BPK RI 2015 atas kerjasama Pinjam Pakai Lahan dengan PT Jabar Rekind Geothermal (PT. JRG). *Follow-up Audit Findings RI 2015 on cooperation Borrow and Use of Land and PT Jabar Rekind Geothermal (PT. JRG).* 2. Konsep Remunerasi Berbasis Kinerja. *The concept of performance-based remuneration* 3. Lain-lain : Etc : a. Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja di Anak Perusahaan. *Mechanism of Employment in the Subsidiary* b. Mekanisme Kerjasama Investasi dari Sumber Dana Investor. *Investment Cooperation Mechanism of Investor Funding Source.* c. Publikasi dan informasi Pemberitaan KCIC. *Publications and information News KCIC* d. Tahap Pekerjaan Pemilihan Mitra PLTM/PLTMH Antara PTPN VIII dengan LIPI. *Partner Selection of Works Stage micro power / MHP Between PTPN VIII with LIPI.*
8	28-04-2016	1. Tindak lanjut Terhadap persediaan Bibit Kopi dan Sawit tahun 2016. *Follow-up Against Coffee Seed and Oil inventories in 2016* 2. Tindak lanjut Terhadap rencana pemupukan di TBM teh, karet dan sawit pada tahun 2016. *Follow-up To plan TBM fertilization in tea, rubber and palm oil in 2016*. 3. Areal TBM Buah dan Karet yang menjadi areal TOD. *Fruits and Rubber TBM area which becomes areal TOD* 4. Tahapan Pekerjaan antara PTPN VIII degan PT. Provalindo Nusa pada Project Management Hotel Dago 107. *Work Stages between PTPN VIII degan PT. Nusa Provalindo in Project Management Hotel Dago 107* 5. Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Bisnis Plan Hortikultura MADEP Consulting & Training Service. A*pplication for Extension of Time Completion Consulting Services Business Plan Preparation MADEP Horticulture Consulting & Training Service.* 6. Usulan Pembentukan Anak Perusahaan. *Proposed Establishment of Subsidiary* 7. Konsep Remunerasi Berbasis Kinerja. *The concept of performance-based remuneration* 8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Mesin Petik. *Fulfillment Means Picking Machine*
9	17-05-2016	1. Surat PT Kopjasa Keahlian Teknosa (KKT) perihal Permohonan Keringanan Penyelesaian Kewajiban KJK TEKNOSA. *Letter PT Kopjasa Expertise Teknosa (of the summit) Request Waivers Settlement Obligations concerning KJK Teknos*a 2. Pembuatan Kajian Pembangunan Industri Tepung Pisang Tahun 2016 yang didampingi konsultan dengan menggunakan anggaran unit Aneka Usaha. *Making the Banana Flour Industry Development Studies 2016 were accompanied by a consultant using Aneka Usaha budget unit* 3. Persiapan Bahan Presentasi Program Peningkatan Kinerja Perusahaan Tgl. 23 Mei 2016 di Kantor Perwakilan Holding Jakarta. *Preparation Presentation Date Company Performance Improvement Program. May 23, 2016 in Jakarta Representative Office Holding*
10	27-05-2016	1. Rencana Pemenuhan Peningkatan Modal Disetor PT Perkebunan Nusantara VIII ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. *Requirement Plan Increased Paid in Capital PT Perkebunan Nusantara VIII PT Pilar SOE Synergy Indonesia.*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
11	13-06-2016	1. Tindaklanjut Hasil Rapat Rencana Pengembangan Hortikultura di Kementerian BUMN Tgl. 3 Juni 2016. *Follow-Results Horticulture Development Plan Meeting at the Ministry of SOEs date. June 3rd, 2016.* 2. Pembahasan Usulan RKAP Revisi Tahun 2016. *Discussion of Proposed Revised 2016 RKAP* 3. Skema penyertaan saham PTPN VIII ke PT PSBI. *Share participation scheme PTPN VIII to PT PSBI* 4. Lain-lain*: Etc:* a. Program PKBL Tahun 2016 sektor peternakan sapi perah. *Partnership Program 2016 dairy farming sector.* b. Progress tindak lanjut penyusunan Annual Report tahun 2015. *Progress follow up the preparation of the Annual Report 2015.*
12	25-07-2016	1. Persiapan Evaluasi Kinerja Semester I / 2016 dan Pembahasan Teknis RKAP Revisi 2016 oleh Holding. *Preparation Performance Evaluation Semester I / 2016 and Technical overview CBP Revised 2016 by Holding.* 2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Brainstorming Program Perbaikan Kinerja PTPN VIII bersama Pinisepuh. *Preparation Implementation Performance Improvement Program Brainstorming together Pinisepuh PTPN VIII* 3. Rencana Kunjungan Kerja Direksi Dalam Rangka Pembinaan & Evaluasi Kinerja Kebun. *Plan Working Visit of Directors in the Context of Development and Performance Evaluation Gardens.* 4. Tindak lanjut Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tanggal 11 Juli 2016. *Follow-up of the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Directors On July 11, 2016.* 5. Penyesuaian Struktur Organisasi PTPN VIII. *Organizational Structure Adjustment PTPN VIII.* 6. Rencana Kegiatan untuk Assesment Karyawan Strata IV PTPN VIII. *Employee Assessment Action Plan for Tier IV PTPN VIII* 7. Kompensasi Penggunaan Lahan dan Ijin Lintas Jalan Oleh PT. Arkora Hydro di Kebun Papandayan. *Compensation and Land Use Permit Cross Roads By PT. Arkora Hydro Gardens Papandayan.* 8. Lain-lain: a. Program Pengenalan Direksi PTPN VIII. *Introduction Program Directors of PTPN VIII.* b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Transfer Knowledge Terkait Program Perbaikan Kinerja Perusahaan. *Implementation Plan for Knowledge Transfer Activities Related to the Company's Performance Improvement Program.*
13	09-08-2016	1. Progress Tindak Lanjut rencana kerjasama budidaya BSF. *Progress Follow-up plan of cultivating cooperation BSF* 2. Hal-hal yang menjadi Pending Matters dari Hasil Pertemuan dengan UPC Renewables. *Things are becoming Pending Matters of the outcome of the meeting with the UPC Renewables* 3. Tindak lanjut Kerjasama Pembangunan Hotel Dago 107 PTPN VIII. *Follow-up of Development Cooperation Dago Hotel 107 PTPN VIII.* 4. Permohonan Kelengkapan Booth PON XIX GAPEKHI. *Request Completeness Booth GAPEKHI PON XIX.* 5. Tindak Lanjut Laporan Kelompok Kerja Bersama Pada Rakomdir Tanggal 4 Agustus 2016. *Follow-up Report of the Joint Working Group On Rakomdir On August 4, 2016* 6. Program akselerasi penyesuaian golongan karyawan dengan jabatannya. *Acceleration program hierarchical level adjustment with the position* 7. Lain-lain: *Etc:* a. Tindak lanjut atas komplain pembeli terkait perbedaan antara chop sample dengan shipping sample teh. *Follow-up on complaints related buyer the difference between the sample chop with shipping samples of tea.* b. Rencana tindak lanjut penanganan persediaan Old tea leafy grade terikat kontrak. *Follow-up plan inventory handling leafy Old tea grade contract.*

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
14	23-08-2016	1. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. *Follow-up Meeting Previous*. 2. Paket Pengembangan Komoditi Hortikultura PTPN VIII. *Horticultural Commodity Development Package PTPN VIII.* 3. Hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara organisasi dan tata kerja PTPN VIII dengan Surat Edaran Holding perihal nomenklatur jabatan Direksi. *Things that need to be adjusted between the organization and functioning of PTPN VIII Circular Letter regarding nomenclature Holding Board of Directors positions.* 4. Tindak lanjut terhadap surat GAPEKKHI nomor: 11/GAPEKKHI/8/2016 Perihal Peruntukan Penggunaan Kegiatan GAPEKKHI di Jl. Ir. H. Djuanda No. 92 Bandung. *Follow-up to the letter GAPEKKHI number: 11 / GAPEKKHI / 8/2016 regarding allotment of usage GAPEKKHI activities in Jl. Ir. H. Juanda No. 92 Bandung.* 5. Kajian Lahan untuk Pasar Cisompet Kebun Bunisari Lendra. *Land for Market Studies Bunisari Lendra Cisompet Gardens.* 6. Usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Feasibility Study dan Rencana Anggaran Biaya Konsultan Anak Perusahaan Bidang Usaha Protein Alternatif. *Proposed Terms of Reference (TOR) Feasibility Study and Budget Plan Consultants Subsidiary Business Sector: Alternative Protein.* 7. Lain-lain: *Etc:* a. Permohonan Ijin Konversi Tanaman. *Request License Conversion Plant*
15	16-09-2016	1. Tindak Lanjut Rapat sebelumnya. *Follow-up meetings beforehand* 2. Nilai Kompensasi Penggunaan Lahan dan Ijin Lintas Jalan oleh PT Gerin Trend di Kebun Tambaksari. *Value Compensation and Land Use Permits Cross Roads by PT Gerin Trend in gardens Tambaksari* 3. Nilai Kompensasi Lahan dan Ijin Pembangunan Pasar di Kebun CIkaso oleh Kepala Desa Tegalbuleud dan Bupati Sukabumi. *Land Compensation Value and Market Development Permit in Gardens Cikaso by the Village Head Tegalbuleud and Sukabumi Regent* 4. Pengajuan Biaya Pemeliharaan TBM Teh, Karet, Sawit. *Maintenance costs TBM filing Tea, Rubber, Palm Oil* 5. Rencana Kegiatan Leadership Enrichment Training oleh bagian SDM. *Leadership Enrichment Action Plan Training by the SDM.* 6. Progress High Speed Rail (HSR): a. Pelaksanaan appraisal lahan PTPN VIII yang direncanakan untuk tambahan penyertaan (inbreng) ke PT PSBI. *Implementation of land appraisal PTPN VIII planned for the additional inclusion (inbreng) to PT PSBI.* b. Rencana Pengembangan Non TOD yang terintegrasi dengan pengembangan TOD (Hasil rapat tanggal 15 September 2016, dengan PT KCIC dan Surbana Jurong selaku konsultan Urban Planner). *Non TOD Development Plan that is integrated with the development of TOD (The meeting on 15 September 2016 with PT KCIC and Surbana Jurong as a consultant Urban Planner).*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
16	29-09-2016	1. Pembahasan Lingkup Bidang SDM: *Discussion on Human Resource Scope:* a. Tindak Lanjut Program Akselerasi Karyawan. *Follow-up Program Acceleration Employees.* b. Mekanisme Penetapan Penilaian dan penyesuaian Karyawan Promosi PJS (Pemangku Jabatan Sementara) maupun level pimpinan di lingkup kebun. *Determination of assessment and adjustment mechanism Employee Promotions PJS (Stakeholder Positions Provisional) as well as the leadership level in the scope of the gardens.* 2. Pemenuhan Kebutuhan Mesin Petik Teh. *Fulfillment Tea Picking Machine* 3. Usulan Impairment (Penyisihan atas Penurunan Nilai) Aset. *Proposed Impairment (Allowance for impairment) Assets.* 4. Matrik Rencana Kerjasama Investasi Bagian Optimalisasi Aset. *Investment Cooperation Plan Matrix Asset Optimization section.* 5. Pemenuhan Alat Angkutan Panen TBS Sawit. *Fulfillment Transport Equipment Oil Harvest TBS.* 6. Lain-lain: *Etc:* a. Uji Coba Penerapan Reward and Punisment Panen Teh. *Trial Application of Reward and Punisment Harvest Tea* b. Pembentukan Tim Akselerasi Kinerja PTPN VIII. *Performance Acceleration Team PTPN VIII.*
17	06-10-2016	1. Pengadaan Barang dan Jasa secara E – Procurement. *Procurement in E - Procurement.* 2. Penerapan Tunjangan Kinerja. *Application of Performance Allowance.*
18	17-10-2016	1. Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Industri Hilir Teh dengan KPBN. *Follow-up Results Discussion Downstream Tea with KPBN.* 2. Progress Report Keikutsertaan PTPN VIII pada Proyek Kereta Cepat. *The participation of PTPN VIII Progress Report on Fast Train Project.* 3. Matrik Hasil Pembahasan Temuan SPI di Kebun Pasirmalang. *Matric Results Discussion of Findings SPI in Pasirmalang Gardens.* 4. Pengurusan Legalitas PAUD PTPN VIII. *Handling Legality ECD PTPN VIII.* 5. Penyelesaian Sertifikat HGU Kebun Papandayan, Miramare, dan Bunisari lendra. *Completion Certificate HGU Gardens Papandayan, Miramare, and Bunisari Lendra.* 6. Persiapan Porseni BUMN. *Preparation Porseni SOEs.*
19	28-11-2016	1. Inventarisasi Aset Areal TOD Seluas 1.270 Ha Kebun Panglejar. *Inventory of Assets Covering an area of 1,270 Ha area TOD Panglejar Gardens.* 2. Rencana (Masterplan dan Feasibility Study) pengembangan lahan Non TOD dengan Pengembangan TOD. *Plan (Masterplan and Feasibility Study) Non TOD land development with TOD Development.* 3. Tindak Lanjut Penambahan Afdeling di Perkebunan Bojong Datar. *Follow-Up Additions Cambodgien in Plantation Bojong Datar.* 4. Matrik Hasil Pembahasan Temuan SPI di Kebun Pasirmalang. *Matric Results Discussion of Findings SPI in Pasirmalang Gardens* 5. Usulan Edaran Subsidi Listrik Untuk Rumah Karyawan. *Circular Proposed Electricity Subsidy For Home Employee.* 6. Laporan Audit Keragaan Tanaman Jeruk Oleh Balitjestro. *Audit Report Performance of Citrus By Balitjestro.* 7. Usulan Pengintegrasian Strategi Perusahaan melalui Penetapan Organisasi Setingkat Sub Bagian di bawah Bagian Sekretariat Perusahaan. *Proposed Corporate Strategy Integration through the Establishment Subdivision Level Organization under Section Corporate Secretariat.*

NO	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
20	13-12-2016	1. Progress Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Eprocurement. *Progress Procurement Through eProcurement System.* 2. Efisiensi Biaya dan Efektivitas Pengawalan Kinerja. *Cost Efficiency and Effectiveness Performance Escort.* 3. Exsecutive Summary Kunjungan Tim Adhoc di PTPN VIII. *Summary Exsecutive Adhoc Team Visit in PTPN VIII.* 4. Permohonan Penambahan Lahan Puskopkar PTPN VIII. *Addition Request Land Puskopkar PTPN VIII.*

Kunjungan Kerja Direksi

Sepanjang tahun 2016, Direksi telah melakukan kunjungan kerja ke unit kerja (Kebun) sebagai berikut :

Working visit of the Board of Directors

Throughout 2016, the Board of Directors has made a working visit to the work unit (Gardens) as follows:

No.	Direksi *Board of Directors*	Tanggal *Date*	Objek (Kebun) *Objects (Gardens)*
1	Direktur Utama	06-02-2016	Pasir Badak
		07-02-2016	Kertajaya
		23-02-2016	Panglejar
		27-02-2016	Wil. Pangalengan
		16-07-2016	Rancabali
		03-08-2016	Wil. Pangalengan
		18-08-2016	Wil. Pangalengan
		24-08-2016	Panglejar
		30-08-2016	Sinumbra
		07-09-2016	Wil. Ciwidey
		27-09-2016	Cikasungka
		11-10-2016	Malabar
		19-10-2016	Kertajaya
		24-10-2016	Wil. Pangalengan
		25-10-2016	Wil. Ciwidey
		09-11-2016	Jalupang
		14-12-2016	Cikumpay
		20-12-2016	Rancabali
2	Direktur Produksi/	07-01-2016	Wil. Pangalengan
	Direktur Operasional	13-01-2016	Ciater
		26-01-2016	Panglejar
		06-02-2016	Pasir Badak
		07-02-2016	Kertajaya
		16-02-2016	Sukawana

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Direksi *Board of Directors*	Tanggal *Date*	Objek (Kebun) *Objects (Gardens)*
		17-02-2016	Wangunreja
		19-02-2016	Cikasungka
		23-02-2016	Cisaruni
		24-02-2016	Cikupa
		27-02-2016	Wil. Pangalengan
		08-03-2016	Rancabali
		05-04-2016	Panglejar
		08-04-2016	Cikasungka
		13-04-2016	Cibungur
		14-04-2016	Sukamaju
		18-04-2016	Malabar
		26-04-2016	IHT Cibiru
		27-04-2016	IHT Cibiru
		18-05-2016	Bunisari Lendra
		31-05-2016	Jalupang
		01-06-2016	Wil. Pangalengan
		14-06-2016	Wangunreja
		16-06-2016	Pasir nangka
		21-06-2016	Batulawang
		12-07-2016	Wil Ciwidey
		16-07-2016	Rancabali
		21-07-2016	Jalupang
		22-07-2016	Batulawang
		26-07-2016	Cibungur
		30-07-2016	Wil. Pangalengan
		03-08-2016	Ciater
		05-08-2016	Cikumpay
		08-08-2016	Purbasari
		15-08-2016	Cikumpay
		30-08-2016	Wil. Pangalengan
		01-09-2016	Wil. Pangalengan
		06-09-2016	Cisaruni
		07-09-2016	Wil. CIwidey
		15-09-2016	Cikasungka
		14-10-2016	Tambaksari
		21-10-2016	Gedeh
		31-10-2016	Ciater
		01-11-2016	Sedep
		15-11-2016	Wil. Pangalengan

No.	Direksi *Board of Directors*	Tanggal *Date*	Objek (Kebun) *Objects (Gardens)*
		22-11-2016	Cikasungka
		23-11-2016	Sukawana
		28-11-2016	Ciater
		30-11-2016	Pasir nangka
		01-12-2016	Pasir nangka
		06-12-2016	Panglejar
		14-12-2016	Cisaruni
		19-12-2016	Pangalengan
		22-12-2016	Batulawang
		22-12-2016	Wil. Banten
3	Direktur SDM & Umum/	06-02-2016	Pasir Badak
	Direktur Manajamen Aset	07-02-2016	Kertajaya
		10-02-2016	Panglejar
		27-02-2016	Wil. Pangalengan
		17-03-2016	Parakansalak
		14-06-2016	Wangunreja
		16-06-2016	Pasir nangka
		21-06-2016	Pasirmalang
		22-06-2016	Batulawang
		16-07-2016	Rancabali
		24-08-2016	Panglejar
		27-08-2016	Cikaso
		28-08-2016	Agrabinta
		09 Juli 2016	Wil. IPDP
		15-09-2016	Dayeuhmanggung
		27-09-2016	Montaya
		11-10-2016	Ketamanah, Talunsantosa
		21-12-2016	Wangunreja
4	Direktur Keuangan/	06-02-2016	Pasir Badak
	Direktur Komersil	07-02-2016	Kertajaya
		10-02-2016	Panglejar
		27-02-2016	Wil. Pangalengan
		08-03-2016	Rancabali
		16-07-2016	Rancabali

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

PTPN VIII melakukan program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru dengan tujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PTPN VIII; gambaran mengenai kondisi perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi; dan Informasi-informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pada tahun 2016, telah terjadi penggantian Direksi, yaitu Sdr. Dadi Sunardi digantikan oleh Sdr. Bambang Murtioso sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Sdr. Tatang Supriatna sebagai Anggota Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Pemegang Saham PTPN VIII Nomor : SK-148/MBU/07/2016 & 3.00/SKPTS/R/17/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PTPN VIII.

Sekretaris Perusahaan mempersiapkan materi dan waktu pelaksanaan Program Pengenalan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/353/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Program Pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi. Program Pengenalan kepada Anggota Direksi yang baru dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Direksi tanggal 25 Juli 2016.

RECOGNITION PROGRAM DIRECTORS

PTPN VIII undertake an induction program for new Board Members with the aim to provide an implementation of GCG at PTPN VIII; a description of the condition of the company related to the objectives, nature and scope of activities, financial performance and operations, strategy, short-term business plans and long-term competitive position, risks and other strategic issues; information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; description of the duties and responsibilities of Commissioners and Board of Directors; and other information-information that is deemed necessary.

In 2016, there has been a replacement of the Board of Directors, namely Mr. Sunardi Dadi replaced by Br. Bambang Murtioso as Managing Director and the appointment of Br. Tatang Supriatna as a Member of the Board of Directors based on the decision of the Minister of State Enterprises and Director of the Company (Persero) PTPN III as Shareholders PTPN VIII Number: SK-148 / MBU / 07/2016 & 3.00 / SKPTS / R / 17/2016 dated July 15, 2016 on Termination, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Directors of PTPN VIII.

Company Secretary to prepare the material and time Introduction Program execution in accordance with the Decision of the Board of Directors: KEP / I.1 / 353 / III / 2011 dated March 17, 2011 on Recognition Program Board of Commissioners and Board of Directors. Program Introduction of new Board Members held in conjunction with the meeting of the Board of Directors on July 25, 2016.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI
COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM DIRECTORS

No.	Direksi *Board of Directors*	Pelatihan *Training*	Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Peserta *Participant*	Penyelenggara *Organizer*
1	Direktur Utama President Director	Seminar Industri Pupuk Mendukung Ketahanan Pangan yang berkelanjutan Fertilizer Industry Seminar Supporting sustainable food security	02/12/2016	Hotel Bidakara - Jakarta		PT Pupuk Indonesia
2	Direktur Operasional Director of Operations	-	-	-	-	-
3.	Direktur Manajemen Aset Director Asset management	Seminar Indonesia Human Capital Summit	27-28/10/2016	Ritz Carlton Pacific Place -Jakarta		Forum Human Capital - Indonesia

No.	Direksi *Board of Directors*	Pelatihan *Training*	Tanggal *Date*	Tempat *Place*	Peserta *Participant*	Penyelenggara *Organizer*
		Pelatihan Tea Taster Kepala Pengolahan Teh Tea Taster Training Head Tea Processing	12/11/2015	Hotel Ibis - Styles Bandung		Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
4	Direktur Komersil	-	-	-	-	-

INDIKATOR DAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Indikator Penilaian Kinerja Direksi

Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) tahun 2016 dimuat dalam Kontrak Manajemen.

Performance Indicators (KPI) disusun berdasarkan Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) pada BUMN sebagaimana Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN.

Berdasarkan pendekatan KPKU, terdapat 5 (lima) perspektif pengukuran kinerja usaha, dan terdapat 12 aspek pengukuran kematangan kesisteman perusahaan. Kelima perspektif pengukuran kinerja bisnis tersebut adalah :

1. Efektivitas produk dan proses
2. Fokus pelanggan,
3. Fokus tenaga kerja,
4. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan,
5. Keuangan dan pasar.

Keduabelas aspek pengukuran kematangan kesisteman perusahaan adalah :

1. Kepemimpinan Senior
2. Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan Tatakelola
3. Pengembangan Strategi
4. Implementasi Strategi
5. Suara Pelanggan
6. Engagement pelanggan
7. Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan
8. Pengelolaan Informasi, pengetahuan dan teknologi Informasi
9. Lingkungan Tenaga Kerja
10. Engagement tenaga kerja
11. Sistem Kerja
12. Proses Kerja

Proses Penetapan KPI Direksi

1. Identifikasi KPI
2. Penentuan KPI terpilih
3. Pembobotan KPI
4. Penentuan Target Kinerja,

PERFORMANCE INDICATORS AND EVALUATION OF DIRECTORS

Indicators of Performance Assessment of Directors

Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) is a measure of the evaluation of the successful implementation of tasks and responsibilities of the management of the company by the Board of Directors in accordance with the provisions of laws and regulations and / or statutes. Key Performance Indicators (Key Performance Indicators) 2016 contained in the Management Contract.

Performance Indicators (KPI) Determination Guidelines prepared based on Key Performance Indicators (KPI) at SOE as SOE Ministry Secretary Letter No. S-08 / S.MBU / 2013 dated January 16, 2013 concerning the Submission Guidelines and Criteria for Determining KPI Superior Performance Assessment in SOEs.

KPKU based approach, there are five (5) business performance measurement perspective, and there are 12 aspects of systemic maturity measurement company. Fifth business performance measurement perspective are:

1. The effectiveness of the products and processes
2. Customer focus,
3. The focus of labor,
4. Leadership, governance and social responsibility,
5. Finance and markets.

Twelfth aspect of maturity measurement kesisteman companies are:

1. Senior leadership
2. Responsibility of Society and Governance
3. Strategy development
4. implementation Strategies
5. voice of the Customer
6. Engagement customer
7. Measurement, Analysis, and Improvement Company Performance
8. Information management, knowledge and information technology
9. Labor Environment
10. Engagement labor
11. Work system
12. Work process

Determination process KPI of Directors

1. identification KPI
2. Determination of selected KPIs
3. weighting KPI
4. Determining Target Performance,

5. Pengesahan Kontrak Manajemen,
6. Pengukuran dan Pelaporan Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan
7. Evaluasi Pencapaian KPI Triwulanan dan Tahunan
8. Pengesahan Pencapaian KPI Tahunan

Evaluasi Pelaksanaan Tugas (Asesmen) Direksi

Direksi melakukan pengukuran kinerja atas realisasi setiap KPI. Selambat-lambatnya5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja perusahaan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan kinerja Direksi.

Pihak yang Melakukan Asesmen Atas Kinerja Direksi

Evaluasi atas kinerja Direksi dilakukan oleh evaluator eksternal (Kantor Akuntan Publik), kinerja Dewan Komisaris juga dinilai oleh BPKP Provinsi Jawa Barat dalam penilaian penerapan GCG di PTPN VIII.

BOARD CHARTER (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI)

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dimuat dalam Kebijakan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Tata Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual). Board Manual disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut senantiasa ditinjau secara berkala. Hal-hal yang diatur dalam Board Manual dan terkait dengan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
2. Direksi
   a. Organisasi
   b. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang
   c. Benturan Kepentingan
   d. Pembagian Tugas
   e. Hak
   f. Pelatihan dan Pengembangan
   g. Organ Pendukung
   h. Penilaian dan Penghasilan Direksi
3. Manajemen Risiko
4. Pengelolaan Aset
5. Sistem Manajemen Mutu
6. Tata Kelola Teknologi Informasi
7. Sistem Pengendalian Internal
8. Pengelolaan Informasi
9. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
10. Pengelolaan Keuangan
11. Keselamatan dan Kesempatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
13. Pengelolaan SDM
14. Pendelegasian Wewenang

REMUNERASI DIREKSI

Kebijakan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi PTPN VIII tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PTPN VIII No. 3.00/SKPTS/26/2016, No. SK-26/S-MBU/06/2016, No.S-49/D1.MBU/06/2016 tanggal 30 juni 2016 tentang Penetapan gaji/hon-

5. Endorsement Contract Management,
6. Measurements and KPI Reporting Quarterly and Annual Achievement
7. KPI Achievement Evaluation Quarterly and Annual
8. KPI Achievement Annual Endorsement

Evaluation of Duties (Assessment) Board of Directors

BOD measurement of performance on the realization of each KPI. Not later lambatnya5 (five) months after the end of the fiscal year, the Board of Directors prepares and submits the performance of this report to the AGM for approval by the performance of the Board of Directors.

Top Performing Party Performance Assessment of Directors

Evaluation of the performance of the Board of Directors carried out by an external evaluator (public accounting firm), the performance of the Board of Commissioners also considered by BPK West Java province in the assessment of the implementation of GCG at PTPN VIII.

BOARD CHARTER (GUIDELINES WORK AND CONDUCT OF DIRECTORS)

Guidelines and work rules contained in the Board of Directors of the Joint Policy Board of Directors and the Board of Commissioners on the Procedure of Employment of Directors and Board of Commissioners (Board Manual). Board Manual prepared based on the rules and regulations in force. The document constantly reviewed regularly. Things are set in Board Manual and associated with BOC, among others:

1. Basic Principles of Labor Relations Board of Directors and Board of Commissioners
2. management
   a. Organization
   b. Tasks, Responsibilities, Obligations and Privileges
   c. Conflict of Interest
   d. Division of tasks
   e. Right
   f. Training and development
   g. organ Support
   h. Rate and Income Board of Directors
3. Risk management
4. Asset management
5. Quality management system
6. Information Technology Governance
7. Internal Control Systems
8. Information management
9. Manage Relationships with Stakeholders
10. Financial management
11. Safety and Employment and Environment Preservation
12. Social and Environmental Responsibility
13. human Resource management
14. Delegation of Authority

REMUNERATION OF DIRECTORS

Remuneration Policy The Board of Directors

Determination of the remuneration of the Board of Directors of PTPN VIII in 2016 pursuant to Decree No. PTPN VIII Shareholders 3.00 / SKPTS / 26/2016, No. SK-26 / S-MBU / 06/2016, No. S-49 / D1.MBU / 06/2016 dated 30 June 2016 regarding the

orarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016

Stipulation of salary / honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2016.

Struktur Remunerasi Direksi
Structure Remuneration of Directors

No.	Jenis Penghasilan *Type of Income*	Ketentuan *Provision*
1	Gaji *Salary*	Besarnya Faktor Jabatan *The amount of Factor Position* Direktur Utama 100% *Director of 100%* Direktur 90% dari Gaji Direktur Utama *Director of 90% of salary Managing Director*
2	Tunjangan *allowance* Tunjangan Hari Raya Keagamaan *Religious holiday allowance* Tunjangan Perumahan *Housing allowance*	Dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Gaji *Paid amounted to 1 (one) month salary* Dibayarkan sebesar 40% dari Gaji dari gaji dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,-/bln (termasuk biaya utilitas). Bagi Direksi yang mendapatkan fasilitas rumah dinas tidak diberikan tunjangan perumahan *Paid for 40% of the salary of the salary with the provisions at most Rp. 25.000.000, - / month (including utilities). Directors who obtain official residence facilities is not given a housing allowance*
3	Fasilitas *Amenities*	
	Fasilitas kendaraan *Amenities vehicle*	Diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit kendaraan dinas termasuk biaya pemeliharaan dan operasional. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan kapasitas maksimal 3.500 CC, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan azas kepatutan. *Given in the form of one (1) unit of service vehicles including maintenance and operational costs. Specifications and types of vehicles is governed by the Board of Commissioners with a maximum capacity of 3,500 CC, taking into account the ability of companies and the principle of appropriateness.*
	Fasilitas Kesehatan *Health facility*	Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami serta maksimum 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). *Provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, to question and 1 (one) wife / husband and a maximum of 3 (three) children who have not attained the age of 25 years (never been married or have never worked).*
	Fasilitas Bantuan Hukum *Legal Support Facility*	Dibayarkan sesuai pengeluaran (at cost), sampai dengan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa. *Is paid according to expenditure (at cost) down to as witnesses, suspects and defendants.*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Anggota Direksi yang Menjabat Sebagai Komisaris Pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Penyertaan

Selain menduduki jabatan sebagai Direksi PTPN VIII, terdapat beberapa orang Anggota Direksi yang menjabat juga sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/Penyertaan, yaitu:

Appointed as members of the Board of Commissioners of Subsidiaries / Investments

In addition to positions as Directors of PTPN VIII, there are some Members Board of Directors as well as the Commissioner of Subsidiary / Inclusion, namely:

Nama *Name*	Jabatan di PTPN VIII *Position In PTPN VIII*	Anak Perusahaan/ Penyertaan *Subsidiaries / Investments*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*
Tatang Supriatna	Direktur Produksi Director of production	PT Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL)	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT SIL No. RUPS-002/VII/2016 tgl. 29-07-2016
Gunara	Direktur SDM & Umum Director of Human Resources & General	Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) Plantation Pension Fund (Dapenbun)	Kepala Cabang Branch head	BA Sertijab No. C.8/BA/338/10. XI/2015 tgl. 10-11-2015
I.G.N Suharta Wijaya	Direktur Keuangan Director of Finance	PT Agro Medika Nusantara (PT AMN)	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS PT AMN No. Kep/V/512/XI/2015 tgl. 19-11-2015

Remunerasi Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Penyertaan

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PTPN VIII Tahun 2015 dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Agro Medika Nusantara Nomor : RIS/AMN/598/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015, sebagai berikut:

Remuneration of Directors and Commissioners of the subsidiary / Participation

Determination of the remuneration of Directors and Board of Commissioners of the subsidiary PTPN VIII in 2015 conducted by the General Meeting of Shareholders of PT Agro Medika Nusantara No. RIS / AMN / 598 / VI / 2016 dated June 30, 2016 On Approval of the Annual Report and Approval of the Financial Statements for Fiscal Year 2015 as follows:

Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan

The structure of the Remuneration of Directors and Commissioners of the subsidiary

No.	Jenis Penghasilan Direksi *Income Type Directors*	Jenis Penghasilan Komisaris *Commissioner of Income Type*
1	Gaji *Salary*	Honorarium *Honorarium*
	Gaji Direktur sebesar Rp.32.283.000,- *Salary director of Rp.32.283.000, -.*	Honorarium Komisaris sebesar Rp.14.527.350,-. *Honorarium Commissioner for Rp.14.527.350, -*
2	Tantiem *Tantiem*	Tantiem *Tantiem*
	Tantiem Direksi Rp. 110.000.000,-. Pajak atas tantiem ditanggung oleh Penerima. *Tantiem Directors Rp. 110,000,000, -. Tax on bonuses borne by the Recipient.*	Tantiem Dewan Komisaris sebesar Rp.50.000.000,-.. Pajak atas tantiem ditanggung oleh Penerima. *Tantiem BOC amounted Rp.50.000.000, - .. Tax on bonuses borne by the Recipient.*
3	Tunjangan *Allowance*	Tunjangan *Allowance*
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan *Religious holiday allowance*	-

No.	Jenis Penghasilan Direksi *Income Type Directors*	Jenis Penghasilan Komisaris *Commissioner of Income Type*
	Dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Gaji. *Paid amounted to 1 (one) month salary*	
	Tunjangan Komunikasi *Benefits Communications*	Tunjangan Komunikasi *Benefits Communications*
	Sebesar Rp. 1.600.000,-/bulan *Rp. 1.600.000, - / month*	Sebesar Rp. 726.000,-/bulan, diberikan apabila tidak disediakan rumah jabatan oleh perusahaan. *Rp. 726,000, - / month, is given if the home office is not provided by the company.*
	Tunjangan Perumahan *Housing allowance*	-
	Dibayarkan sebesar 40% dari Gaji (termasuk biaya utilitas), dengan ketentuan bagi Direksi yang mendapatkan fasilitas rumah dinas tidak diberikan tunjangan perumahan. *Paid at 40% of salary (including utilities), with provision for the directors who get the home office facilities are not given housing allowance.*	
	Tunjangan Purna Jabatan *Full Benefit Position*	Tunjangan Purna Jabatan *Full Benefit Position*
	Berupa Premi Asuransi paling banyak 20% dari Gaji dalam satu tahun, termasuk di dalamnya premi asuransi kecelakaan dan kematian. *Insurance premiums in the form of at most 20% of the salary in one year, including accident insurance premiums and death.*	Berupa Premi Asuransi paling banyak 20% dari Gaji dalam satu tahun, termasuk di dalamnya premi asuransi kecelakaan dan kematian. Insurance premiums in the form of at most 20% of the salary in one year, including accident insurance premiums and death.
4	Fasilitas *Amenities*	Fasilitas *Amenities*
	Kendaraan Dinas *Office vehicle*	-
	Diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit kendaraan dinas termasuk biaya pemeliharaan dan operasional dengan kapasitas mesin maksimal 2.000 CC atau berupa tunjangan transportasi sebesar 25% dari gaji. Given in the form of one (1) unit of service vehicles including maintenance and operating costs with a maximum engine capacity of 2,000 CC or form of transport allowance of 25% of salary.	
	Kesehatan *Health*	-
	1. BPJS ditambah top up sesuai hak Direksi. *BPJS plus top up the Board of Directors according to their rights.*	
	2. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan fasilitas kesehatan. In the event that the Board of Directors concurrent positions as members of the Board of Commissioners of Subsidiaries / Joint Venture, it is only given to those concerned health facilities.	
	Bantuan Hukum *Legal aid*	Bantuan Hukum *Legal aid*
	Ditetapkan kemudian *Determined later*	Ditetapkan kemudian *Determined later*
	Perkumpulan Profesi *Professional associations*	-

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Jenis Penghasilan Direksi *Income Type Directors*	Jenis Penghasilan Komisaris *Commissioner of Income Type*
	Maksimal 1 (satu) perkumpulan, hanya diberikan biaya pendaftaran dan iuran tahunan. *A maximum of one (1) association, given only the registration fee and annual dues.*	
	Club Membership	-
	Maksimal 1 (satu) keanggotaan, hanya diberikan biaya pendaftaran dan iuran tahunan. *A maximum of one (1) association, given only the registration fee and annual dues.*	
	Biaya Representatif *Representative costs*	-
	Maksimal Rp.60.000.000,-/tahun *Rp.60.000.000 maximum, - / year*	

Penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris PT Sinkona Indonesia Lestari Tahun 2016 berdasarkan Keputusan RUPS PT Sinkona Indonesia Lestari Nomor : RUPS-001/III/2016 tentang Persetujuan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 tanggal 17 Maret 2016.

Determination of the remuneration of Directors and Commissioners of PT Sinkona Indonesia Lestari 2016 based on decisions of Shareholders of PT Sinkona Indonesia Lestari No. AGM-001 / III / 2016 regarding the approval of the Financial Statements and Approval of Financial Statements for Fiscal Year 2015 March 17, 2016.

Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris Perusahaan Penyertaan

Structure Remuneration of the Commissioners of the Company Participation

No.	Jenis Penghasilan Direksi *Income Type Directors*	Jenis Penghasilan Komisaris *Commissioner of Income Type*
1	Gaji *Salary*	Honorarium *Honorarium*
	Gaji Direktur Utama sebesar Rp.38.000.000,-. Gaji Direktur sebesar Rp. 34.200.000,- *Salary Director of Rp.38.000.000, -.* *Director salary of Rp. 34.2 million, -*	Honorarium Komisaris Utama sebesar Rp.17.100.000,-. Honorarium Komisaris sebesar Rp.15.390.000,-. *Honorarium Commissioner for Rp.17.100.000, -.* *Honorarium Commissioner for Rp.15.390.000, -.*
2	Tantiem	Tantiem
	Tantiem Direktur Utama Rp. 128.065.437 Tantiem Direktur Rp. 115.258.893 Pajak atas tantiem ditanggung oleh Penerima. *Tantiem Director of Rp. 128 065 437* *Tantiem Director Rp. 115 258 893* *Tax on bonuses borne by the Recipient.*	Tantiem Komisaris Utama sebesar Rp. 49.396.668 Tantiem Komisaris sebesar Rp. 44.457.002 Pajak atas tantiem ditanggung oleh Penerima. *Tantiem Commissioner of Rp. 49,396,668* *Tantiem Commissioner Rp. 44,457,002* *Tax on bonuses borne by the Recipient.*
3	Tunjangan *Allowance*	Tunjangan *Allowance*
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan *Religious holiday allowance*	Tunjangan Hari Raya Keagamaan *Religious holiday allowance*
	Dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Gaji. *Paid amounted to 1 (one) month salary.*	Dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan Honorarium *Paid amounted to 1 (one) month Honorarium*
	Tunjangan Komunikasi *Benefits Communications*	Tunjangan Purna Jabatan *Full Benefit Position*

No.	Jenis Penghasilan Direksi *Income Type Directors*	Jenis Penghasilan Komisaris *Commissioner of Income Type*
	Dibayarkan sesuai pengeluaran (at cost). *Is paid according to expenditure (at cost).*	Berupa Premi Asuransi paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun, termasuk di dalamnya premi asuransi kecelakaan dan kematian *Insurance premiums in the form of at most 25% of the salary in one year, including accident and death insurance premiums*
	Tunjangan Perumahan *Housing allowance*	Tunjangan Transportasi *Transport allowance*
	Dibayarkan sebesar 40% dari Gaji (termasuk biaya utilitas). diberikan karena tidak disediakan rumah jabatan oleh Perusahaan. *Paid at 40% of salary (including utility costs). as it had not provided the home office by the Company.*	Dibayarkan sebesar 20% dari Honorarium *Paid at 20% of Wages*
	Tunjangan Purna Jabatan *Full Benefit Position*	
	Berupa Premi Asuransi paling banyak 25% dari Gaji dalam satu tahun, termasuk di dalamnya premi asuransi kecelakaan dan kematian. *Insurance premiums in the form of at most 25% of the salary in one year, including accident insurance premiums and death.*	
4	Fasilitas *Amenities*	Fasilitas *Amenities*
	Fasilitas Kendaraan *Vehicle facility*	
	Fasilitas Kesehatan *Health facility*	
	Fasilitas Bantuan Hukum *Legal Support Facility*	Fasilitas Bantuan Hukum *Legal Support Facility*
		Ditetapkan kemudian *Determined later*
	Fasilitas Perkumpulan Profesi *Facilities Professional Association*	Fasilitas Perkumpulan Profesi
	Maksimal 2 (dua) perkumpulan *A maximum of two (2) associations*	Maksimal 2 (dua) perkumpulan *A maximum of two (2) associations*
	Fasilitas Club Member *Amenities Club Member*	
	Maksimal 2 (dua) keanggotaan *A maximum of two (2) Membership*	
	Fasilitas Biaya Representasi *Amenities Fee Representation*	
	Diberikan dalam bentuk corporate credit card *Given in the form of corporate credit card*	

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama perusahaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peran yang sangat penting. Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggungjawab dan wewenang Direksi dalam mengelola perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati tanggungjawab dan wewenang Dewan

RELATIONS BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Board of Directors and Board of Commissioners as the company's main organ in his duties have a very important role. The working relationship of Directors and Board of Commissioners based on the principles as follows:

1. BOC respect the responsibilities and authority of the Board of Directors in managing the company as stipulated in the legislation and the Articles of Association of the Company;
2. Directors respects the responsibilities and authority of the

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan;
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah hubungan check and balances dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:
1. Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
   a. Tercapainya Value of the Firm sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham.
   b. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen resiko.
   c. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham.
   d. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.
   e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perusahaan.
   f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perusahaan :
   a. Sasaran Usaha, Strategi, Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
   b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
   c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi perusahaan dan personalianya;
   d. Struktur organisasi perusahaan yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan.

Sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, telah ditetapkan Pedoman Tata Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual).

Board of Commissioners to supervise and provide advice to the management policy of the Company;
3. Each working relationship between the Board of Directors with BOC is a formal institutional relationship, in the sense of always based on a standard mechanism or correspondence that is accountable;
4. The working relationship of Directors and Board of Commissioners is the relationship of checks and balances in order to achieve its goals.

In connection with this matter, in accordance with their respective functions, the Board of Directors and Board of Commissioners have committed to jointly:
1. Realize the goals the Company's achievement of the Company's business viability in the long term as reflected in:
   a. Achieving Value of the Firm as expected by the shareholders.
   b. Effective and efficient implementation of internal control and risk management.
   c. Achieving yield (return) is reasonable for shareholders.
   d. Protection of the interests of stakeholders fairly.
   e. Proper succession and management continuity throughout the organization of the Company.
   f. The fulfillment of the implementation of GCG.
2. Have agreed on the following to support the achievement of the vision and mission and strategy of the Company:
   a. Business Goals, Strategy, Long-Term Plan and Annual Work Plan and Budget;
   b. Policies to comply with legislation and the Articles of Association of the Company;
   c. Policies and corporate performance assessment methods, units within the company's organization and its personnel;
   d. The organizational structure of the company that supports the achievement of business goals of the company.

As a guideline for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out the duties, powers and obligations to meet the interests of shareholders and other stakeholders, has been set Guidelines Labor Relations Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual).

ORGAN PENDUKUNG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

ORGAN SUPPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Organ pendukung GCG memiliki fungsi dan peranan membantu Organ Utama GCG dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

GCG supporting organs has the function and role for helping the Main Organs of GCG in applying the principles of good corporate governance.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung Dewan Komisaris PTPN VIII, terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite.

THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGAN

The Supporting Organs of BOC is the BOC's Instrument that helps the Board in carrying out its duties. The BOC's Supporting Organ of PTPN VIII consisting of the Secretariat of the BOC and Committee.

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Dewan Komisaris PTPN VIII telah membentuk Sekretariat Dewan Komisaris, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the duties and functions, the BOC of PTPN VIII has established a Secretariat of the BOC, which is headed by the Secretary of the BOC assisted by the Secretariat Staff of the BOC. Both of them are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Profil Sekretariat Dewan Komisaris

Secretariat of the Board of Commissioners Profile

M. WINARNO

Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary

Lahir di Tegal, 23 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dari Universitas STIE YAI dan pendidikan S2 Magister Manajemen dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2013 mendapat penugasan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: Dekom/ 01/ I/ 2013 tanggal 15 Januari 2013.

Born in Tegal, January 23, 1976. Graduated the Bachelor Program from STIE YAI University and Master of Management from Universitas of Indonesia. In 2013 gets the assignment as Secretary of the BOC of PTPN VIII by the Board of Commissioners Decree Number: Dekom/01/I/2013 dated January 15, 2013.

.

BUDI RISMARYANTO

Staf Sekretariat Dewan Komisaris BOC Secretary's Staff

Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1981. Menyelesaikan pendidikan SMA dari SMA Wijaya. Pada tahun 2014 mendapat penugasan sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK/Dekom/01/I/2014 tanggal 28 Januari 2014

Born in Jakarta, October 28, 1981. He graduated high school from Wijaya high school. In 2014 gets the assignment as staff of the Board of Commissioners Secretary of PTPN VIII by based on the Board of Commissioners Decree Number: SK/Dekom/01/I/2014 dated January 28, 2014.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selaku Pimpinan Sekretariat, Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
5. Mendokumentasikan dengan baik administrasi penyelenggaraan kegiatannya.

Kebijakan Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penetapan rumusan besaran dan jenis remunerasi mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-03/MBU/Wk/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penegasan Mengenai Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Penetapan penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PTPN VIII Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK/Dekom/04/IV/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Penetapan Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK/Dekom/01/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Secretarial of the Board of Commissioners Tasks

Secretariat of the Board of Commissioners do the activities to assist the Board in carrying out its duties in the form of:

1. Prepare the meeting, including meeting materials (briefing sheet) Board of Commissioners;
2. Make the minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the articles of association of the company;
3. Administer document BOC, both incoming mail, outgoing mail, minutes of meetings and other documents;
4. Drafting the Work Plan and Budget Board of Commissioners;
5. Drafting the Reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

As Chief Secretary, Secretary to the Board of Commissioners also perform other tasks such as:

1. Ensure that the Board of Commissioners comply with legislation and apply the principles of good corporate governance;
2. Provide the information required by the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary in order to facilitate the task of the Board of Commissioners;
4. As a liaison (liaison officer) BOC with other parties.
5. Documenting the good administration of the activities.

Remuneration Policy of the BOC Secretary

Income for Secretary and staff of the Secretariat of the BOC determined by the Board of Commissioners with the capability of the Company. Determination of the amount and type of remuneration formula refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 on BOC/ Supervisory Board Supporting Organs and the State-Owned Enterprises Minister of SOEs letter No. SE-03/MBU/Wk/2014 dated March 11, 2014 About Assertions on Income of the Board of Commissioners / Board of Trustees Secretary.

The stipulation of income of Secretary and staff of the Secretariat of the BOC of PTPN VIII 2014 made by decision of the Board of Commissioners Number: SK/Dekom/04/IV/2014 dated April 3, 2014 on the Stipulation of Income of Secretary of the Board of Commissioners PTPN VIII (Persero) and Decision of the Board of Commissioners Number: SK/Dekom/01/I/ 2014 dated January 28, 2014.

Struktur Remunerasi Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris

The Remuneration Structure of BOC's Secretary and Staff of Secretariat

No	Jenis Penghasilan *Type of Income*	Ketentuan *Condition*
	Sekretaris Dewan Komisaris	
1	Honorarium	15% dari Gaji Direktur Utama
2	Tantiem/Insentif Kinerja	15% dari Tantiem Direktur Utama
3	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar 5% dari Honorarium per bulan
	Tunjangan Transportasi	Diberikan sebesar 20% dari Honorarium
	per bulan	
	Santunan Purna Jabatan	Diberikan sebesar 25% dari Honorarium per bulan
4	Fasilitas	
	Fasilitas Kesehatan	Diberikan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan perusahaan

KOMITE DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor: SK/Dekom/05/XII/2016 Tentang Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII, yaitu:

COMMITTEE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VIII Number: SK / Dekom / 05 / XII / 2016 About Committees Supporting the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VIII, namely:

KOMITE AUDIT

Struktur Keanggotaan Komite Audit

Struktur Keanggotaan Komite Audit PTPN VIII tahun 2016, sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE

Structure of Audit Committee

The structure of PTPN VIII Audit Committee in 2016, as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Periode *Period*
Agus Pakpahan	Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Members of the Board of Commissioners as Chairman	
Karen Tambayong *)	Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Members of the Board of Commissioners as Chairman	
Edi Jaenudin	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	

*) Karen Tambayong menggantikan Agus Pakpahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/03/IX/2016 tanggal 30 September 2016

*) Karen Tambayong replace Agus Pakpahan by decision of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 03 / IX / 2016 of September 30, 2016

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Profil Komite Dewan Komisaris The Board of Commissioners Commitee Profile

KAREN TAMBAYONG
Ketua Komite Chairman of Audit Committee

Lahir di Surabaya, 24 April 1956. Lulusan Kandidat Ingenieur Bouwkunde, Technische Hogeschool, Delft, Nederland pada tahun 1977. Anggota Tim Ahli Pembangunan, Kasteel van Keunkenhof Park (2015), The Netherlands; Tenaga Ahli Program Pengembangan Kota Hijau, Kementerian Pekerjaan Umum (2012 – sekarang); Nara Sumber Tetap Kementrian Pekerjaan Umum Bidang Kebun Raya, Green Infrastucture, Green Building Green Campus PU; Tenaga Ahli, PT Trisigma Inti Solusi (2013 – sekarang); Direktur Utama, PT. Fajar Puspa Alam (2001 – sekarang); Pemilik, Kebun Pembibitan Floribunda (1996 – sekarang). Tenaga Ahli, Kota Tomohon (2006 – 2010); Ketua Tim, Pembuatan Grand Design Kota Bunga Tomohon (2006 – 2010); Ketua Tim, Pembuatan Masterplan Kawasan Khusus Pertanian Tomohon (2008); Direktur Keuangan, New Line Floral Education Centre (2003 – 2010); Manager Keuangan, Kebun Pembibitan Floribunda (1994 – 1996); Manager Keuangan, PT. Survindo Perdana Satria (1994 – 1996); Manager Pemasaran, Kebun Pembibitan Floribunda (1988 – 1990).

Sejak tahun 2016 mendapat penugasan sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/03/IX/2016 tanggal 30 September 2016

Born in Surabaya, 24 April 1956. Candidates Graduates Ingenieur Bouwkunde, Technische Hogeschool, Delft, the Netherlands in 1977. The Expert Team Member Development, Kasteel van Keunkenhof Park (2015), The Netherlands; Expert Green City Development Program, the Ministry of Public Works (2012 - present); Fixed Resource Ministry of Public Works for the Botanical Garden, Green Infrastructure, Green Building Green Campus PU; Experts, PT TRISIGMA Core Solution (2013 - present); President Director, PT. Puspa Dawn Nature (2001 - present); The owner, Floribunda Nursery Gardens (1996 - present). Experts, Tomohon (2006 - 2010); Team Leader, Making Grand Design Flower City of Tomohon (2006 - 2010); Team Leader, Special Area Development Master Plan for Agriculture Tomohon (2008); Director of Finance, New Line Floral Education Center (2003 - 2010); Finance Manager, Floribunda Nursery Gardens (1994 - 1996); Finance Manager, PT. Survindo Prime Satria (1994 - 1996); Marketing Manager, Floribunda Nursery Gardens (1988-1990).

Since 2016 gets the assignment as Chairman of the Audit Committee by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 03 / IX / 2016 of September 30, 2016

EDI JUNAEDIN
Anggota Komite Audit Audit Committee Members

Lahir di Majalengka, 9 Juni 1973. Lulusan Sarjana Ekonomi dan Magister Akuntansi UNPAD dan saat ini Beliau juga menjabat sebagai Manajer Audit di KAP Djoemarma, Wahyudin dan rekan. Sejak tahun 2012 mendapat penugasan sebagai Anggota Komite Risiko Usaha PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/02/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 1 Juni 2012 s.d 31 Mei 2014.
Selanjutnya diangkat kembali sebagai Anggota Komite Risiko Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/06/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Sub Komite Risiko Usaha dan Investasi Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 1 Juni 2014 s.d 31 Mei 2016.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/05/XII/2016 tanggal 15

Desember 2016 tentang Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII diangkat sebagai Anggota Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan 31 Mei 2017.

Born in Majalengka, June 9, 1973. A graduate Bachelor of Economics and Master of Accounting ubuntu and this time he also served as Audit Manager in KAP Djoemarma, Wahyudin and colleagues. Since the year 2012 gets the assignment as a Member of the Business Risk Committee PTPN VIII by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 02 / V / 2012 dated May 28, 2012 concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period June 1, 2012 till May 31, 2014.
Furthermore reappointed as a Member of the Business Risk Committee by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 06 / V / 2014 dated May 30, 2014 on Termination and Appointment Membership Sub-Committee on Business Risk and Investment in the Audit and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period June 1, 2014 till May 31, 2016.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 05 / XII / 2016 dated December 15, 2016 on the Committees Supporting the Board of Commissioners PT Perkebunan Nusantara VIII was appointed as a Member of the Audit Committee to serve until the May 31, 2017.

AHMAD ZAKIE MUBARROK
Audit Committee Members Anggota Komite Audit

Lahir di Wonosobo, 16 Februari 1985. Lulusan Sarjana Ekonomi UNPAD dan Magister Akuntansi UGM. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Quality Assurance di KAP Djoemarma, Wahyudin dan rekan. Sejak tahun 2014 mendapat penugasan sebagai Anggota Komite Audit PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/08/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Sub Komite Audit Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 9 Juni 2014 s.d 8 Juni 2016. Selanjutnya diangkat kembali sebagai Anggota Sub Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor: SK/Dekom/01/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Sub Komite Audit Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII untuk Periode 9 Juni 2016 s.d 8 Juni 2017.

Born in Wonosobo, February 16, 1985. Graduates of Economics Padjadjaran University and Master of Accounting UGM. Currently he also serves as Quality Assurance in KAP Djoemarma, Wahyudin and colleagues. Since 2014 gets the assignment as member of the Audit Committee of PTPN VIII by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 08 / VI / 2014 dated June 9, 2014 on the Appointment of Members Sub Audit Committee The Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period of June 9, 2014 till June 8th, 2016.
Furthermore reappointed as Member of Sub-Committee by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 01 / VI / 2016 dated June 9, 2016 on Dismissal and Appointment of Members of the Sub Committee on Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII for the Period June 9th, 2016 till June 8th, 2017.

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 disebutkan bahwa persyaratan bagi anggota Komite Audit adalah independensi, integritas dan bekerja secara profesional dengan rasa tanggung jawab. Kriteria independensi yang ditetapkan adalah :

- Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha dipilih melalui fit and proper test.
- Pihak diluar perusahaan yang diangkat menjadi anggota Komite Audit dan Risiko Usaha tidak mempunyai hubungan

Independence of the Audit Committee Member

According to the provisions in the Charter of the Audit Committee and SOE Minister Regulation No. PER-12 / MBU / 2012 stated that the requirement for members of the Audit Committee are independence, integrity and work professionally with a sense of responsibility. The independence criteria specified are:

- Members of the Audit Committee and Business Risk been through a fit and proper test.
- Parties outside the company appointed a member of the Audit Committee and Business Risk does not have a business

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

usaha maupun hubungan afiliasi dengan perseroan, Direktur atau Dewan Komisaris.

Tidak menerima kompensasi apapun dari PTPN VIII (Persero) atau dari anak perusahaan atau afiliasinya selain penghasilan yang diterima dalam kaitannya dengan penugasannya sebagai anggota Komite Audit dan Risiko Usaha.

Tugas Komite Audit

1) Membantu Dewan Komisaris untuk pelaksanaan pengawasan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit, yang dilaksanakan oleh Satuan Pengendalian Intern maupun eksternal auditor.
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
5) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
   a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang kana dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
   b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
   c) Melakukan penelaahan atas pelaksanakan pemeriksaan auditor internal dan Satuan Pengawas Internal
   d) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, dan
   e) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dewan Komisaris lainnya.

Kewajiban Komite Audit

1) Menyusun dan menyampaikan Piagam Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2) Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
3) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi;
4) Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
5) Disiplin dan patuh atas ketetapan dan peraturan yang berlaku, termasuk mengadakan rapat rutin dan membuat risalah serta mendokumentasikan risalahnya.

relationship or affiliation with the company, the Director or the Board of Commissioners.

Did not receive any compensation from PTPN VIII (Persero) or of its subsidiaries or affiliates in addition to income received in relation to his assignment as a member of the Audit Committee and Business Risk.

The task of the Audit Committee

1) Assist the Board of Commissioners for the supervision of the effectiveness of internal control systems and the effectiveness of the implementation of the tasks of external auditors and internal auditors.
2) Assess the implementation of activities and results of the audit, conducted by the Internal Control Unit and external auditors.
3) Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.
4) Ensuring that there has been a satisfactory review procedures for any information issued by the company.
5) Provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.
6) Carry out other tasks that dberkaitan by the Board of Commissioners, among others, include:
   a) Reviewing the financial information kana issued by the company such as financial reports, projections and other financial information;
   b) Reviewing the companies' compliance with laws and regulations relating to the activities of the company
   c) Reviewing the internal audit procedures and implementing Internal Audit Unit
   d) Reviewing the complaints relating to the Company, and
   e) To identify matters that require the attention of Commissioners as well as carrying out the tasks given BOC.

The obligation of the Audit Committee

1) Prepare and submit to the Board of Commissioners Committee Charter to be determined;
2) Prepare and submit the annual work program to the Board to be determined;
3) Submit a report to the Board of Commissioners on every execution of tasks, accompanied by a recommendation;
4) Make quarterly reports and an annual report to the Board of Commissioners.
5) Discipline and abide by the statutes and regulations, including holding regular meetings and make the minutes as well as documenting his treatise.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO **RISK MANAGEMENT COMMITTEE**
Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko **Structural Risk Management Committee Membership**
Struktur Keanggotaan Komite Risiko Usaha PTPN VIII tahun 2016, sebagai berikut:
Business Risk Committee membership structure of PTPN VIII in 2016, as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*
Karen Tambayong	Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua
Antonius HW Witono*	Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua
Cahya Irawadi	Anggota Komite Risiko Usaha
Citra Sukmadilaga	Anggota Komite Risiko Usaha

*)Antonius HW Witono menggantikan Karen Tambayong berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/05/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016
***) Antonius HW Witono replace Karen Tambayong by decision of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 05 / XII / 2016 dated December 15, 2016**

Profil Komite Manajemen Risiko Profile of Risk Management Committee

ANTONIUS HARSO WALUYO WITONO
Ketua Komite Manajemen Risiko **Chairman of Risk Management Committee**
Lahir di Jakarta, 14 Oktober 1962. Meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi dari Unika Atmajaya pada 1987.
Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PTPN VIII (2016 – sekarang), Komisaris PT. Dwi Wastika Maju (2012 – sekarang), Direktur Utama PT. Gapura Multi Mandiri (2006 – 2012), Direktur Pengembangan Usaha PT. Puteraco Indah (1995 – 2005), Komisaris PT. Puteraco Indah (1991 – 1995), dan Kepala Seksi Pemasaran Cetak Gramedia (1989 – 1991)

Born in Jakarta, October 14, 1962. He holds a Bachelor's degree in Administrative Sciences from Atma Jaya Catholic University in 1987.
He served as Independent Commissioner of PTPN VIII (2016 - present), Commissioner of PT. Dwi Wastika Forward (2012 - present), President Director of PT. Archway Multi Mandiri (2006 - 2012), Business Development Director of PT. Puteraco Beautiful (1995 - 2005), Commissioner of PT. Puteraco Beautiful (1991 - 1995), and Section Chief Marketing Print Gramedia (1989 - 1991)

Cahya Irrawaddy
Anggota Komite Manajemen Risiko **Risk Management Committee Member**
Lahir di Bandung, 4 Januari 1966. Lulusan Sarjana Ekonomi dan Magister Akuntansi UNPAD dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Manajer Audit di KAP Djoemarma, Wahyudin dan rekan. Sejak tahun 2012 mendapat penugasan sebagai Anggota Komite Audit PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/04/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pengangkatan Anggota Sub Komite Audit Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 1 Juli 2012 s.d 30 Juni 2014.
Selanjutnya diangkat kembali sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/10/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Anggota Sub Komite Audit Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 1 Juli 2014 s.d 30 Juni 2016.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/05/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII diangkat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa tugas sampai dengan 30 Juni 2017.

Born in Bandung, January 4, 1966. Graduated Bachelor of Economics and Master of Accounting ubuntu and this time he also served as Audit Manager in KAP Djoemarma, Wahyudin and colleagues. Since the year 2012 gets the assignment as member of the Audit Committee of PTPN VIII by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 04 / VI / 2012 dated June 29, 2012 on the Appointment of Members Sub Audit Committee The Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period July 1, 2012 till June 30, 2014.
Furthermore reappointed as member of the Audit Committee pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 10 / VI / 2014 dated June 30, 2014 on Termination and Appointment Back Members Sub Audit Committee The Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period July 1, 2014 till June 30, 2016.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 05 / XII / 2016 dated December 15, 2016 on the Committees Supporting the Board of Commissioners PT Perkebunan Nusantara VIII was appointed as a Member of Risk Management Committee to serve until the June 30, 2017.

CITRA SUKMADILAGA
Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member
Lahir di Bandung, 1 Januari 1980. Lulusan Sarjana Ekonomi UNPAD, Master Business of Administration on Finance dan Doctor of Philosophy on Finance Universitas Putra Malaysia. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Secretary of Master Accounting Program di UNPAD. Sejak tahun 2014 mendapat penugasan sebagai Anggota Komite Audit PTPN VIII berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII (Persero) Nomor : SK/Dekom/09/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Sub Komite Audit Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk Periode 9 Juni 2014 s.d 8 Juni 2016.
Selanjutnya diangkat kembali sebagai Anggota Komite Risiko Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/02/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Sub Komite Risiko Usaha dan Investasi Pada Komite Audit dan Risiko Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII untuk Periode 9 Juni 2016 s.d 8 Juni 2017.
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor : SK/Dekom/05/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII diangkat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa tugas sampai dengan 8 Juni 2017.

Born in Bandung, January 1, 1980. Graduates of Economics Padjadjaran University, Master of Business of Administration on Finance and Doctor of Philosophy on Finance University Putra Malaysia. Currently he also serves as Secretary of Master of Accounting Program at Padjadjaran University. Since 2014 gets the assignment as member of the Audit Committee of PTPN VIII by Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII (Persero) number: SK / Dekom / 09 / VI / 2014 dated June 9, 2014 on the Appointment of Members Sub Audit Committee The Audit Committee and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the period of June 9, 2014 till June 8th, 2016.
Furthermore reappointed as a Member of the Business Risk Committee by Decree of the

Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 02 / VI / 2016 dated June 9, 2016 on Dismissal and Appointment of Members of the Sub Committee on Business Risk and Investment in the Audit and Business Risk PT Perkebunan Nusantara VIII for the period June 9, 2016 till June 8th, 2017.
Based on the Decree of the Board of Commissioners of PTPN VIII Number: SK / Dekom / 05 / XII / 2016 dated December 15, 2016 on the Committees Supporting the Board of Commissioners PT Perkebunan Nusantara VIII was appointed as a Member of Risk Management Committee to serve until the June 8, 2017.

Tugas:
1) Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko baik risiko operasi maupun risiko strategi serta menlaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi, yang efektif terhadap proses manajemen risiko perusahaan;
2) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas risiko yang dihadapi dalam setiap tahapan proses bisnis perusahaan dan saran-saran langkah mitigasi, baik yang preventif maupun yang kuratif.
3) Menilai kembali penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi, termasuk saran-saran perbaikan manajemen;
4) Melakukan evaluasi strategi optimalisasi asset perusahaan, mulai dari inventarisasi dan pengembangan pangkalan data, rencana pemanfaatan asset dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam lingkup perencanaan jangka menengah dan jangka panjang;
5) Mengkaji kembali usulan Direksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap usulan rencana investasi perusahaan, penyertaan/pelepasan modal pada bagan usaha lain: kerjasama dengan pihak ketiga, penarikan dan pemberian pinjaman, penghapusan piutang, pinjam pakai asset dan lain-lain;
6) Melakukan identifikasi atas berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan berbagai risiko, kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan usaha.
7) Melakukan evaluasi atas hasil kinerja dari proyek pengembangan usaha dan investasi, baik berbentuk kerjasama maupun usaha sendiri.
8) Melakukan evaluasi rancang bangun dan perencanaan restrukturisasi perusahaan, dan
9) Melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Dewan Komisaris lainnya.

Kewajiban
1) Menyusun dan menyampaikan Piagam Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2) Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
3) Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi;

Tugas:
1) Assist the Board to conduct a risk assessment and risk management both operating risk and risk strategy and menlaah adequacy, completeness and implementation, which is effective against the company's risk management process;
2) Provide input to the Board of Commissioners on the risks faced in each phase of the company's business processes and suggestions for mitigation measures, both preventive and curative.
3) Assessing the application of risk management policies by the Board of Directors, including suggestions for the improvement of management;
4) To evaluate the asset optimization strategy of companies, ranging from inventory and data base development, asset utilization plans and strategies and corporate policies within the scope of the medium-term and long-term;
5) Directors review the proposal and provide recommendations to the Board on the proposal of the company's investment plan, investments / disposals of other venture capital in the chart: cooperation with third parties, the withdrawal and granting of loans, receivables, leasing and other assets;
6) To identify the various activities that can lead to a variety of risks, strengths, opportunities, threats and weaknesses faced by the company in the competition.
7) Evaluate the performance results of business development and investment projects, either in the form of cooperation as well as their own business.
8) To evaluate the design and planning of corporate restructuring, and
9) Perform an analysis of the issues that require the attention of the Board of Commissioners and carry out the tasks given BOC.

Obligation
1) Prepare and submit to the Board of Commissioners Committee Charter to be determined;
2) Prepare and submit the annual work program to the Board to be determined;
3) Submit a report to the Board of Commissioners on every execution of tasks, accompanied by a recommendation;

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

4) Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris;
5) Disiplin dan patuh atas ketetapan dan peraturan yang berlaku, termasuk mengadakan rapat rutin dan membuat risalah serta mendokumentasikan risalahnya.

4) Make quarterly reports and an annual report to the Board of Commissioners;
5) Discipline and abide by the statutes and regulations, including holding regular meetings and make the minutes as well as documenting his treatise.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite
Frequency of Meetings and Attendance Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meeting*	Kehadiran *Presence*	Ketidakhadiran *Absence*	% Hadir *% Present*
Agus Pakpahan*	Ketua Komite Committee Chairman	8	8	-	100
Karen Tambayong	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	4	4	-	100
Edi Jaenudin	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	12	12	-	100
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	12	12	-	100
Antonius HW Witono	Ketua Komite Manajemen Risiko Chairman of Risk Management Committee	-	-	-	-
Cahya Irawadi	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	12	12	-	100
Citra Sukmadilaga	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	12	12	-	100

Remunerasi Komite Dewan Komisaris
Penghasilan Komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penetapan rumusan besaran dan jenis remunerasi mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penetapan penghasilan Komite Dewan Komisaris PTPN VIII Tahun 2016 dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK/Dekom/09/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan Honorarium Anggota Komite Audit dan Risiko Usaha PTPN VIII, yaitu sebesar 15% dari Gaji Direktur Utama per bulan.

Remuneration Committee of the Board of Commissioners
Income Committee established by the Board of Commissioners Board of Commissioners with the capability of the Company. Determination of the amount and types of remuneration formula refers to the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-12 / MBU / 2012 on Support Organ BOC / Supervisory Board of the State Owned Enterprises.

Determination of earnings Committee of the Board of Commissioners of PTPN VIII 2016 is based on BoC Decree No. SK / Dekom / 09 / XII / 2013 dated December 13, 2013 regarding the Stipulation Honorarium Committee Member of Audit and Business Risk PTPN VIII, amounting to 15% of salary Director of per month.

Struktur Remunerasi Anggota Komite Dewan Komisaris
The structure of the Remuneration Committee Member of Board of Commissioners

Anggota *Member*	Jabatan *Position*	Besaran (Rp.) *Scale* (Rp.)
Edi Jaenudin	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	Rp. 12.420.000,-
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Komite Audit Audit Committee Members	Rp. 12.420.000,-
Cahya Irrawaddy	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	Rp. 12.420.000,-
Citra Sukmadilaga	Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	Rp. 12.420.000,-

Pelaksanaan Kegiatan Komite Dewan Komisaris
1. Evaluasi dan Kajian
   Sepanjang Tahun 2016, Komite Dewan Komisaris telah melakukan beberapa evaluasi dan kajian diantaranya:
   a. Kinerja Korporasi
   b. Kinerja Komoditas
   c. Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) Lahan PTPN VIII
   d. Evaluasi RKAP Perubahan (RKAP-P) 2016
   e. Analisis RKAP 2017
   f. Evaluasi Satuan Pengawasan Internal (SPI)
2. Rapat Koordinasi Komite dengan Manajemen
   Coordination Meeting with the Management Committee

Implementation Committee of the Board of Commissioners
1. **Evaluation and Assessment**
   Throughout 2016, the Committee of the Board of Commissioners has conducted several evaluations and studies include:
   a. Corporate performance
   b. Commodities performance
   c. Problems Hak Guna Usaha (HGU) land PTPN VIII
   d. Evaluation of Changes CBP (CBP-P) 2016
   e. Analysis CBP 2017
   f. Evaluation of the Internal Audit Unit (SPI)

No	Bagian/Unityang Terlibat *Sections / Units Involved*	Topik Pembahasan *Topic Discussion*
1	Satuan Pengawasan Internal (SPI) Internal Control Unit	- Evaluasi triwulan atas pengawasan SPI. *Evaluation on surveillance SPI quarter* - Evaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) *Evaluation Work Program Annual Inspection (PKPT)* - Tindak lanjut pemeriksaan auditor eksternal (KAP dan BPK) *Follow-up examination of the external auditor (KAP and BPK)* - Penyusunan prosedur evaluasi pengendalian internal. *Preparation of internal control evaluation procedures* - Penyusunan profil risiko perusahaan bersama dengan tim manajemen risiko. *The preparation of the company's risk profile with the risk management team* - Progress audit laporan keuangan tahun buku 2015 *Progress audit the financial statements of fiscal year 2015*
2	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	- Penyusunan profil risiko perusahaan *The preparation of the company's risk profile* - Perubahan struktur organisasi *Changes in organizational structure*

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No	Bagian/Unityang Terlibat *Sections / Units Involved*	Topik Pembahasan *Topic Discussion*
3	Bagian Akuntansi Accounting Department	- Pembahasan Laporan Manajemen (LM) bulanan *Discussion Report Management (LM) monthly* - Analisa RKAP tahun 2016 *Analysis RKAP 2016* - Penyelesaian Subsidiary Loan Agreement (SLA) *Settlement Subsidiary Loan Agreement (SLA)* - Program perbaikan kinerja PTPN VIII *Performance improvement program PTPN VIII* - Evaluasi kinerja kebun *Evaluation of the performance of the garden* - Progress audit laporan keuangan tahun buku 2015 *Progress audit the financial statements of fiscal year 2015*
4	Bagian Keuangan Financial Department	- Evaluasi penggunaan dana akselerasi dari pinjaman PTPN III *Evaluation of the use of funds from the loan acceleration PTPN III*
5	Bagian Tanaman Plant Department	- Analisa RKAP tahun 2016 *Analysis RKAP 2016* - Evaluasi kinerja kebun *Evaluation of the performance of the garden*
6	Bagian Teknik dan Pengolahan Engineering and Processing Department	- Analisa RKAP tahun 2016 *Analysis RKAP 2016* - Evaluasi kinerja kebun *Evaluation of processing performance garden*
7	Bagian Hukum dan PKBL Legal and PKBL Department	- Penyelesaian permasalahan HGU *Problem solving HGU*
8	Bagian Optimalisasi Aset Asset Optimization section	- Analisa kerjasama pemanfaatan aset *Analysis Cooperation Asset Utilization*
9	Industri Hilir Teh (IHT) Downstream Tea (IHT)	- Analisa sistem penjualan dan persediaan Analysis of sales and inventory system

3. Kunjungan ke Kebun/Unit Usaha di Wilayah Kerja PTPN VIII **Visits to Gardens / Work Area Business Unit at PTPN VIII**

Sepanjang tahun 2016 Komite Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke kebun/unit usaha di wilayah kerja PTPN VIII sebagai berikut:
Throughout 2016, the Committee BoC has made a visit to the garden / business units in the region of PTPN VIII as follows:

No	Tanggal *Date*	Kebun/Unit Usaha *Gardens / Business Unit*	Topik *Topic*
1	16 Agustus 2016 August 16, 2016	Kebun Bukit Unggul Bukit Unggul Gardens	Kunjungan kerja terkait kinerja teh dan penyaluran dana PKBL. Visits performance-related work and distribution of funds PKBL tea.
2	22 Oktober 2016 October 22, 2016	Kebun Bukit Unggul Bukit Unggul Gardens	Kunjungan kerja terkait kinerja karet dan hortikultura. Working visit related to the performance of rubber and horticulture.
3	3 November 2016 November 3, 2016	Kebun Ciater Ciater Gardens	Kunjungan kerja terkait kinerja teh dan agrowisata Performance-related working visit tea and agrotourism

4. Kunjungan ke Kebun/Unit Usaha di Wilayah Kerja PTPN VIII
   Pada tanggal 31 Maret – 2 April 2016 Komite telah melakukan kunjungan kebun di luar wilayah kerja PTPN VIII dalam bentuk studi banding dengan Kebun Teh Liki milik PT. Mitra Kerinci (RNI Group) bersama dengan Kepala Bagian Tanaman dan Peneliti dari Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung.

Kualifikasi dan Kompetensi Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Audit dan Risiko Usaha memiliki integritas, kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012, anggota Sub Komite Audit PTPN VIII (Persero) memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dan anggota Sub Komite Risiko Usaha memiliki keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko.

Piagam Komite Audit dan Komite Risiko Usaha (Charter Komite)
Piagam Komite Audit

Piagam Audit (Audit Charter) merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang disusun sebagai acuan kerja bagi Komite Audit agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasan dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan Manajemen PTPN VIII.Piagam Audit memuat antara lain visi, misi dan nilai-nilai; kedudukan, peranan dan fungsi; tugas dan tanggung jawab; wewenang; hubungan kerja; standar etika; persyaratan profesional.

Piagam Komite Risiko Usaha

Piagam Komite Risiko Usaha PTPN VIII disusun sebagai Pedoman Kerja bagi Komite Risiko Usaha dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berhubungan dengan pihak-pihak terkait di perusahaan seperti Satuan Manajemen Resiko, dan Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Piagam Audit memuat antara lain visi dan misi; maksud, tugas, kewajiban, wewenang, tanggung jawab dan pelaporan; pengangkatan dan pemberhentian, komposisi, pimpinan, persyaratan keanggotaan, kode etik dan masa kerja.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Organ Pendukung Direksi adalah perangkat Direksi yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung Direksi PTPN VIII, terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah organ pendukung Good Corporate Governance yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan

4. Visits to Gardens / Work Area Business Unit at PTPN VIII
   On March 31-April 2, 2016 the Committee had visited the gardens outside the working area of PTPN VIII in the form of a comparative study with Tea Gardens Liki PT. Mitra Kerinci (RNI Group) together with the Head of Plant and researchers from the Research Center for Tea and Quinine (PPTK) Gambung.

Qualifications and Competence Committee Member of Audit and Risk Management

All members of the Audit Committee and Business Risk integrity, educational qualifications and competence were good. In accordance with the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12 / MBU / 2012, members of the Sub-Committee of PTPN VIII (Persero) has an educational background or expertise in accounting or finance and a member of the Sub Committee on Business Risk has expertise in finance and risk management ,

Audit Committee Charter and Business Risk Committee (Committee Charter)
Audit Committee Charter

Audit Charter (charter) is one of the elaboration of guidelines for the implementation of Good Corporate Governance (GCG), conceived as a reference work for the Audit Committee in order to work in a professional manner in accordance with the purpose of the assignment as well as a means of communication with PTPN Management Audit VIII.Piagam load between another vision, mission and values; the status, role and functions; duties and responsibilities; authority; work relationship; ethical standards; professional requirements.

Business Risk Committee Charter

Business Risk Committee Charter PTPN VIII structured as Working Guidelines for the Business Risk Committee in carrying out its duties and in dealing with related parties in companies such as Risk Management Unit, and the Planning and Development. Audit Charter includes among others the vision and mission; purpose, duties, obligations, powers, responsibilities and reporting; appointment and dismissal, composition, leadership, membership requirements, codes of conduct and working lives.

SUPPORT ORGAN OF DIRECTORS

Supporting organ Directors Board of Directors is a device that helps the Board of Directors in performing their duties. Support Organ PTPN VIII Board of Directors, composed of the Secretary of the Company and the Internal Audit Unit (SPI).

CORPORATE SECRETARY

The CORPORATE Secretary is a supporter of good corporate governance organs were appointed and dismissed by the Managing Director by the company's internal mechanism with

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor : KEP/III.I/448/X/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), Sekretaris Perusahaan merupakan Bagian yang melaksanakan fungsi staffing kepada Board of Directors (BoD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Corporate Secretary yang meliputi aspek Kesekretariatan Perusahaan, Aspek Legal Bisnis (Kepatuhan), Hubungan masyarakat, Protokoler, Hubungan Investor, Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko untuk mencapai efektivitas tujuan perusahaan.

the approval of the Board of Commissioners. Based on the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII: KEP / III.I / 448 / X / 2014 on Organization and Work Procedure PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), Corporate Secretary of the Section performing staffing functions to the Board of Directors (BoD) in planning, implementation and control in the field of Corporate Secretary, Corporate Secretariat covering aspects, Legal aspects of Business (Compliance), public relations, protocol, Investor Relations, Good Corporate Governance and Risk Management to achieve the effectiveness of the company's goals.

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

DIAN HADIANA ARIEF
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Lahir di Garut pada tanggal 9 Maret 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990. Beliau memulai karir di PTPN VIII pada tahun 1992. Dalam perjalan karimya, beliau sempat menjabat sebagai Administratur Kebun dan Manajer Wilayah. Sejak tanggal 6 November 2016, beliau mendapat tugas sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PTPN VIII Nomor: KEP/III.1/484/XI/2016 Tanggal 6 November 2016.

Born in Garut on March 9, 1968. Graduated from the Faculty of Agriculture Agricultural S1 Bogor Agricultural Institute (IPB) in 1990. He started his career at PTPN VIII in 1992. In the course of his career, he had served as Administrator of gardens and Regional Manager. Since November 6, 2016, he was given the job as Secretary of the Company under the Decree of the Board of Directors of PTPN VIII: KEP / III.1 / 484 / XI / 2016 On November 6, 2016.

Riwayat Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

a. Kursus Manajemen Perkebunan (KMP)
   - Kursus Manajemen Perkebunan Menengah (KMPM) diselenggarakan oleh LPP Yogyakarta (1994);
b. Seminar Manajemen
   - Seminar Dasar mengenai Dampak Lingkungan PPLH IPB Amdal A
c. Teknologi informasi
   - Pelatihan Komputer Data Entry
   - Pelatihan Yunior Program

Competence Development History Company Secretary

a. Plantation Management Course (NMC)
   - Plantation Management Course Intermediate (KMPM) organized by LPP Yogyakarta (1994);
b. Management seminar
   - Basic Seminar on Environmental Impact EIA IPB PPLH A
c. Information Technology
   - Computer Training Data Entry
   - Junior Training Program

Organisasi Sekretariat Perusahaan

Kedudukan Sekretariat Perusahaan dalam struktur organisasi manajemen staf di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara VIII berada langsung di bawah Direktur Utama. Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Sekretariat & Hubungan Masyarakat
2. Kepala Sub Bagian Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko
3. Kepala Sub Bagian Umum

Corporate Secretariat Organization

The position of Company Secretary in the organizational structure of the management staff at the Head Office of PT Perkebunan Nusantara VIII are directly under the Director. Head of the Secretariat of the Company in the execution of his duties is responsible to the Managing Director and assisted by four (4) Head of Section, namely:

1. Head of Section Secretariat and Public Relations
2. Head of Section of Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management
3. Head of Section General

4. Kepala Sub Bagian Change Management Office (CMO)

Fungsi Sekretaris Perusahaan
1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (Liaison Officer); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Pedoman Sekretaris Perusahaan disusun sebagai pedoman bagi Sekretaris Perusahaan agar dapat melaksanakan tugasnya secara professional. Dengan demikian diharapkan Sekretaris Perusahaan dapat menyediakan informasi yang sesuai standard dan kualitas tertentu untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Pedoman Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/345/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, dan memuat antara lain : landasan pembentukan, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan, fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Sekretaris Perusahaan; Standar Kompetensi Sekretaris Perusahaan; dan Hubungan Sekretaris Perusahaan dengan stakeholders; serta Pelaporan Sekretaris Perusahaan.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
Satuan Pengawasan Intern adalah organ pendukung Good Corporate Governance yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Profil Kepala SPI
Head of Internal Audit Profile

AGUS WISMA
Kepala SPI **Head of Internal Audit**
Lahir di Bandung tanggal 13 Agustus 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 1988 dan pendidikan S2 Manajemen Keuangan dari Program Pasca Sarjana UNPAD tahun 1996. Beliau memulai karir di PTPN VIII pada tahun 1990. Dalam perjalanan karirnya, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Sejak tahun 2014, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PTPN VIII Nomor: KEP/III.1/71/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat No: 02/Dekom/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 perihal Persetujuan Penetapan Kepala Satuan Pengawasan Intern.

4. Head of Section Change Management Office (CMO)

Function of Corporate Secretary
1. Ensuring that the Company comply with the disclosure requirements in line with the implementation of corporate governance principles;
2. Provide the information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested;
3. As a link (Liaison Officer); and
4. Administer and store company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special List and minutes of meetings of the Board of Directors, board meetings and the GMS.

Work Guidelines of Corporate Secretary
Guidelines Corporate Secretary prepared for the guidance of the Corporate Secretary in order to carry out their duties in a professional manner. It is expected the Company Secretary to provide information pursuant to certain quality standards and to support the activities of the company in achieving the performance goals set. Guidelines established through the Corporate Secretary of the Board of Directors Decision No. KEP / I.1 / 345 / III / 2011 dated March 24, 2011, and includes among others: foundation establishment, organizational structure, vision and mission, objectives, functions, duties, responsibilities and authority of the Corporate Secretary; Competency Standards Corporate Secretary; and Corporate Secretary Relations with stakeholders; Reporting and Corporate Secretary.

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)
Internal Audit Unit is a good corporate governance supporting organ headed by a chief who is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Born in Bandung on August 13, 1964. Graduate Bachelor program in Accounting from Faculty of Economy Universitas Padjadjaran (UNPAD) in 1988 and the Magister in Financial Management from Universitas Padjadjaran Post Graduate Program in 1996. He started his career at PTPN VIII in 1990. During his tenure, he had served as Head of Accounting and Head of Planning and Development. Since 2014, he served as Head of Internal Audit based on the Board of Directors of PTPN VIII Decision Number: KEP/III.1/71/II/2014 dated February 17, 2014 after obtaining the approval of the Board of Commissioners through letter No. 02/Dekom/I/2014 dated January 16, 2014 regarding the Approval of Head of Internal Audit Stipulation.

Riwayat Pengembangan Kompetensi Kepala SPI

a. Kursus Manajemen Perkebunan (KMP)
   - Kursus Manajemen Perkebunan Madya (KMPM) diselenggarakan oleh LPP Yogyakarta (1992);
   - Kursus Manajemen Perkebunan (KMP) diselenggarakan oleh LPP Yogyakarta (2006).

b. Kursus Manajemen Keuangan/Akuntansi
   - Seminar Current Issues in Management Accounting diselenggarakan oleh TKPA-Unpad (1991);
   - Workshop Standar Akuntansi Keuangan diselenggarakan oleh IAI (1999);
   - Aspek Akuntansi & Aktuaria Atas Imbalan Kerja diselenggarakan oleh IAI Jabar (2005);
   - Workshop PSAK 24 (Revisi 2004) diselenggarakan oleh Dapenbun & Jaga Hikmah (2005);
   - Penerapan PSAK-24 (Revisi 2004) diselenggarakan oleh Infomega Diliman (2005);
   - Pendidikan Profesi Berkelanjutan 'Akuntansi Imbalan Kerja' diselenggarakan oleh IAI-Jabar (2005);
   - Budgeting Control Activities Develop diselenggarakan oleh Diklat Centre (2007);
   - DHN Training Budget and Cash Flow Manajemen diselenggarakan oleh DHN (2007);
   - Inhouse Training Aktuaria Dana Pensiun diselenggarakan oleh Dapenbun (2009);
   - Workshop Penerapan PSAK Baru (IFRS) untuk BUMN diselenggarakan oleh Tim Koordinasi BUMN (2010).
   - Executive Gathering oleh Psikologi UNPAD (2011)
   - Seminar Enterprise Risk Management dan Pengendalian Internal oleh Kantor Pusat PTPN VIII (2011)
   - The Balance Ways oleh PT.QLM Nurani Bangsa (2011)
   - Diklat Auditor SPI oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2014)
   - Mukernas FKSPI se-Indonesia oleh FKSPI (2014)

c. Kursus Internal Audit
   - Seminar Nasional 'Paradigma Baru Pengendalian Intern dan Perspektifnya' diselenggarakan oleh STIEB-IAI Jabar (1996);
   - Diklat Audit Operasional diselenggarakan oleh LPP & BPKP (1997);
   - Audit Intern Tingkat Lanjutan I diselenggarakan oleh YPIA (1998);
   - Audit Intern Tingkat Lanjutan II diselenggarakan oleh YPIA (1998);
   - Pendidikan dan Pelatihan Audit Internal tingkat lanjutan

Head of IAU Competence Development Records

a. Plantation Management Course (KMP)
   - Associate Course of Plantation Management (KMPM) held by LPP Yogyakarta (1992);
   - Course of Plantation Management (KMP) held by LPP Yogyakarta (2006).

b. Course Financial Management / Accounting
   - Seminar on Current Issues in Management Accounting organized by TKPA-UNPAD (1991);
   - Financial Accounting Standards Workshop organized by IAI (1999);
   - Aspects of Accounting and Actuarial Over Employee Benefits organized by IAI Jabar (2005);
   - PSAK 24 (Revised 2004) Workshop organized by Dapenbun & Jaga Hikmah (2005);
   - The application of PSAK 24 (Revised 2004) organized by Infomega Diliman (2005);
   - Continuing Professional Education 'Accounting for Employee Benefits' organized by IAI-Jabar (2005);
   - Budgeting Control Activities Develop organized by the Diklat Centre (2007);
   - DHN Training Budget and Cash Flow Management organized by DHN (2007);
   - Inhouse Training Actuarial Pension Fund held by Dapenbun (2009);
   - Workshop on Application of New PSAK (IFRS) for SOEs held by SOE Coordination Team (2010).
   - Executive Gathering by Psychology Padjadjaran University (2011)
   - Seminar on Enterprise Risk Management and Internal Control by the Central Office PTPN VIII (2011)
   - The Balance Ways by PT.QLM Conscience Nation (2011)
   - Auditor Training SPI by BPK Representative West Java (2014)
   - Mukernas FKSPI in Indonesia by FKSPI (2014)

c. Internal Audit Course
   - National Seminar on 'The New Paradigm of Internal Control and its Perspectives' organized by STIEB-IAI Jabar (1996);
   - Operational Audit Training held by LPP and BPKP (1997);
   - Internal Audit Advanced Level I conducted by the YPIA (1998);
   - Internal Audit Advanced Level II conducted by YPIA (1998);
   - Education and Training of Advanced level Internal

diselenggarakan oleh YPIA (1999);
- Audit Intern Tingkat Manajerial diselenggarakan oleh YPIA (1999);
- Pelatihan dan lulus ujian sertifikasi Internal Auditor diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi QIA (1999);
- Kursus Audit Pajak diselenggarakan oleh LPP-Yogyakarta (2006);
- Workshop Pendidikan dan Pelatihan Auditor Satuan Pengawasan Intern diselenggarakan oleh BPKP-Jabar (2014).
- Mukernas FKSPI se Indonesia Tahun 2015
- Workshop penerapan Sistem Pengendalian Intern oleh BPKP Tahun 2015
- Seminar Nasional dan Mukernas FKSPI Tahun 2016 dengan topik "Strategic Partnerships : Mengoptimalkan Partnership Fungsi Internal Audit Dalam Mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"
- Konferensi Nasional I FKSPI Tahun 2016 dengan topik "Meningkatkan Daya Saing BUMN di Era Pasar Bebas : Tantangan dan Peluang Holding BUMN"
- Round Table Discussion "Kerugian Negara : Risiko Bisnis atau Tipikor" Tahun 2016

GCG dan Manajemen Risiko
- Pengembangan Fungsi Pengawasan menuju Good Governance diselenggarakan oleh Pendidikan Internal Audit (1999);
- Sosialisasi Good Corporate Governance diselenggarakan oleh BPKP (2005);
- Seminar Enterprise Risk Management dan Pengendalian Internal (2011).

Teknologi Informasi
- Pelatihan Program Structure Query Language (SQL) Tahun 2015
- Pelatihan Audit Sistem Informasi Tahun 2015
- Pelatihan Program Audit Command Language (ACL) Tahun 2016

Organisasi SPI

Kedudukan Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam struktur organisasi manajemen staf di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara VIII berada langsung di bawah Direktur Utama. Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

a. Kasubag Pengawasan I
b. Kasubag Pengawasan II
c. Kasubag Pengawasan III

Fungsi SPI

Fungsi SPI adalah:

a. Melakukan pengawasan melalui penilaian atas kepatuhan, pengendalian intern dan manajemen risiko.
b. Melakukan Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan

Audit conducted by YPIA (1999);
- Internal Audit Managerial Level organized by YPIA (1999);
- Training and Internal Auditor certification exam held by QIA Certification Council (1999);
- Tax Audit Course organized by LPP-Yogyakarta (2006);
- Workshop on Education and Training Auditor Internal Audit conducted by BPK-Jabar (2014).
- Mukernas FKSPI across Indonesia in 2015
- Workshop on the implementation of the Internal Control System by BPK 2015
- National Seminar and Mukernas FKSPI 2016 with the topic "Strategic Partnerships: Partnership Optimizing Internal Audit Function In Support of Directors and Commissioners Improve Corporate Excellence in the Era of the ASEAN Economic Community (AEC)"
- I FKSPI National Conference 2016 on the topic "Improving the Competitiveness of State Enterprises in the Era of the Free Market: Challenges and Opportunities Holding SOE"
- Round Table Discussion "Losses Country: Business or a Corruption Risk" 2016

GCG and Risk Management
- Development Oversight towards Good Governance organized by the Internal Audit Education (1999);
- Socialization of Good Corporate Governance organized by the BPK (2005);
- Seminar on Enterprise Risk Management and Internal Control (2011).

Information Technology
- Training Program Structure Query Language (SQL) 2015
- Information Systems Audit Training 2015
- Training Program Audit Command Language (ACL) 2016

IAU organization

The position of Head of Internal Control Unit within the organizational structure of the management staff at the Head Office of PT Perkebunan Nusantara VIII are directly under the Director. Head of Internal Control Unit in the execution of his duties is responsible to the Managing Director and assisted by three (3) Head of Section, namely:

a. Head of Supervision I
b. Head of Monitoring II
c. Head of Supervision III

IAU functions

IAU functions are:

a. Conduct surveillance through the assessment of compliance, internal control and risk management.
b. Perform evaluation of the effectiveness of internal

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan.

Piagam Pengawasan (Internal Audit Charter)

Internal Audit Charter disusun sebagai pedoman bagi para auditor SPI PTPN VIII agar dapat melaksanakan tugas secara professional. Dengan demikian diharapkan SPI dapat menghasilkan laporan Audit dan rekomendasi yang sesuai standar dan kualitas tertentu untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Penyusunan Internal Audit Charter telah mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FK-SPI).

Internal Audit Charter memuat antara lain landasan pembentukan, visi dan misi, maksud dan tujuan, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari SPI serta hubungan kemitraan dengan eksternal auditor dan Komite Audit; Standar Atribut dan Standar Kinerja Internal Audit; serta standar perilaku sebagai pedoman bagi auditor SPI dalam menjalankan praktik internal audit.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, maka terhadap Internal Audit Charter yang disusun tahun 2011 telah dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran pada tahun 2013 terkait perluasan ruang lingkup fungsi SPI.

Pelaksanaan Tugas SPI

Pengawasan (Audit)

Tugas pengawasan SPI dilaksanakan dalam bentuk Audit Operasional, Stock Opname Produksi, Inventarisasi Sumber Daya dan Evaluasi. Realisasi pengawasan SPI selama tahun 2016 sebagai berikut :

control, risk management and corporate governance processes.

Supervision Charter (Internal Audit Charter)

Internal Audit Charter prepared as guidance for IAU auditors of PTPN VIII in order to carry out duties in a professional manner. It is expected IAU can generate audit reports and recommendations and quality standards specific to support the activities of the company in achieving the performance targets set. Preparation of the Internal Audit Charter has considered the Internal Audit Professional Standards made by the Communications Forum of Internal Audit (FK-SPI).

Internal Audit Charter includes among others the foundation formation, vision and mission, goals and objectives, powers, duties and responsibilities of the IAU as well as partnerships with the external auditors and the Audit Committee; Standard of Attributes and Performance Standards of Internal Audit; and standards of conduct as a guide for the IAU auditors in performing internal audit practices.

With the publication of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) In State-Owned Enterprises, then to the Internal Audit Charter drawn up in 2011 has been carried out adjustments and updates in 2013 related to the expansion of the scope of the IAU function.

The Tasks Execution of IAU

Supervision (Audit)

IAU surveillance tasks carried out in the form of Operational Audit, Inventory Taking Production, Resource Inventory and Evaluation. Realization of IAU's task during 2016 as follows:

Uraian *Description*	Realisasi *Realization*	PKPT	%
Audit Operasional *Operational audit*	100	100	100
Audit Tujuan Tertentu *Audit Specific Purpose*	5	4	125
Stock Opname Produksi *Production Stock Opname*	8	4	200
Inventarisasi Sumber Daya *Inventory of Resource*	26	-	-

1. Realisasi audit operasional sampai dengan triwulan IV/2016 sebanyak 100 atau 100% dari PKPT.
2. Realisasi audit dengan tujuan tertentu sampai dengan triwulan

1. The realization of operational audits until the fourth quarter / 2016 as many as 100 or 100% of PKPT.
2. Realization of the audit with the specific goal until the fourth

IV/2016 sebanyak 5 objek audit atau 125% dari PKPT.
3. Realisasi Stock Opname Produksi sampai dengan triwulan IV/2016 sebanyak 8 objek, yaitu di Gudang Pelabuhan dan Gudang Pedalaman.
4. Realisasi inventariasi sumber daya sampai dengan bulan triwulan IV/2016 sebanyak 26 unit kerja.

Peran SPI Dalam Proses Pengendalian Internal

Peran SPI dalam proses Pengendalian Internal sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/636/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 Tentang Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. Melakukan monitoring dan assessment atas pelaksanaan pengendalian internal berkenaan dengan tingkat risiko yang dihadapi Perusahaan, rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal, serta usaha-usaha perbaikan termasuk penyelesaian temuan-temuan audit, baik dari auditor eksternal maupun internal.
2. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, SPI mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan pengendalian internal sebagi berikut:
   a. Melaksanakan monitoring dan assessment atas pelaksanaan pengendalian internal untuk tingkat entitas dan transaksional secara terus menerus atas Pengendalian Internal Operasional, Pengendalian Internal dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal untuk menjamin Kepatuhan;
   b. Melaksanakan audit pengendalian internal Perusahaan untuk menentukan efektivitas dari rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan untuk tingkat entitas dan transaksional secara triwulanan atas Pengendalian Internal Operasional, Pengendalian Internal dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal untuk menjamin Kepatuhan;
   c. Melaksanakan audit khusus berkaitan dengan pengendalian internal Perusahaan apabila diperlukan;
   d. Memantau upaya perbaikan yang dilakukan manajemen atas hasil audit pengendalian internal;
   e. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit pengendalian internal yang dilakukan oleh Auditor Eksternal;
   f. Memberikan laporan hasil audit pengendalian internal secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, termasuk rekomendasi perbaikan dan tanggapan yang diperoleh dari Bagian/Unit Kerja yang diaudit.

Klasifikasi temuan sepanjang Tahun 2016 berdasarkan Aspek Kepatuhan, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko, jumlah temuan atas Laporan Hasil Audit (LHA) sampai dengan Triwulan IV/2016 yang terbit di klasifikasikan sebagai berikut :

quarter / 2016 as many as 5 or 125% of the audit object of PKPT.
3. Taking Stock realization production until the fourth quarter / 2016 of 8 objects, namely in the Warehouse Godown and Outback.
4. Inventariasi realization of resources to the month of quarter IV / 2016 as many as 26 units.

IAU's role in Internal Control Process

IAU's role in the process of internal control as the Board of Directors Decision No. KEP / I.1 / 636 / VI / 2011 dated June 7, 2011 About the Public Policy Internal Control System are:

1. Monitoring and assessment of the implementation of internal controls with respect to the level of risk faced by the Company, the design and implementation of internal controls, as well as improvement efforts including the completion of the audit findings, both from external and internal auditors.
2. In order to fulfill the above obligations, SPI has duties and responsibilities in relation to internal control as follows:
   a. Implement monitoring and assessment of the implementation of internal control for the level of the entity and transactional continuously on Internal Control Operations, Internal Control in the context of Financial Reporting and Internal Controls to ensure compliance;
   b. Implementing the Company's internal control audit to determine the effectiveness of the design and implementation of internal control for the level of the entity and transactional quarterly basis on Internal Control Operations, Internal Control in the framework Financial Reporting and Internal Controls to ensure compliance;
   c. Carry out special audits related to the Company's internal controls, if needed;
   d. Monitor the management improvement efforts made on the results of the audit of internal control;
   e. Coordinate the implementation of the internal control audit conducted by the External Auditor;
   f. Provide internal control audit report quarterly to the Managing Director with a copy to the Audit Committee, including recommendations for improvement and feedback obtained from Section / Work Unit audited.

Classification of findings throughout 2016 based Aspects of Compliance, Internal Control and Risk Management, the number of findings of Audit Reports (LHA) up to Quarter IV / 2016, published classified as follows:

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No	Aspek *Aspect*	2016	
		Temuan *Finding*	%
1.	Kepatuhan Compliance	308	50
2.	Pengendalian Internal Internal Control	52	8
3.	Manajemen Risiko Risk Management	258	42
	Jumlah Temuan: Total Findings:	540	100

Dalam tahun 2016 SPI mengkoordinasikan pelaksanaan audit eksternal, yaitu melaksanakan pendampingan General Audit Tahun Buku 2015 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Peran SPI Dalam Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan, SPI bertugas memberikan opini yang independen kepada Direksi, Komite Risiko dan Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengeloa Risiko terhadap efektivitas penanganan risiko dan mendukung dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi proses Manajemen Risiko Perusahaan sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/374/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PTPN VIII. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Pengawasan Intern melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan audit terhadap efektivitas pelaksanaan penanganan risiko.
2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan proses Manajemen Risiko Perusahaan.
3. memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan, Komite Risiko dan Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengelola Risiko terhadap hasil audit.

Peran SPI Dalam Whistleblowing System

Peran SPI dalam Whistleblowing System sebagaimana Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan pada tanggal 3 Desember 2013 adalah sebagai Unit Investigasi WBS yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang memadai, maka rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Direksi untuk memutuskan. Akan tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan.

Peran SPI Dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Internal dan Eksternal

Sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/487/VII/2013 tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Tindak

In 2016, SPI coordinate the implementation of the external audit, which is carrying out mentoring General Audit for Fiscal Year 2015 by Public Accounting Firm (KAP).

IAU's Role In Risk Management Process

In order to implement Enterprise Risk Management Policy, IAU tasked with providing an independent opinion to the Board of Directors, Risk Committee and Secretary of the Company as Pengeloa Unit Risks to effectiveness of risk management and support in the development, implementation and evaluation process as Enterprise Risk Management Directors Decree No. KEP/I.1/374/VIII/2014 dated August 14, 2014 on Guidelines for Risk Management of PTPN VIII. To carry out basic tasks as mentioned above, Internal Audit perform the following activities:

1. carry out an audit on the effectiveness of risk management.
2. give feedback on the implementation of the Enterprise Risk Management process.
3. provide advice and recommendations to the Board of Directors, Risk Committee and Secretary of the Company as the Risk Management Unit of the audit results.

IAU's Role In Whistleblowing System

IAU's role in Whistleblowing system according to the Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners adopted on December 3, 2013 is as WBS Investigation Unit which is assigned to investigate further the substance of the violations reported. The goal is to find and collect the evidence needed to make sure that it has been a violation. In the event that there is sufficient evidence, the recommendation sanctions against abuses granted to the Board of Directors to decide. However, if there is no sufficient evidence found, the investigation process will be stopped and the report of violation will not be continued.

IAU's Role In Monitoring the Results of Internal and External Supervision Audit Follow-Up

As the Board of Directors Decision No. KEP/I.1/487/VII/2013 dated July 29, 2011 About the Guidelines of Recommendations Results

Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, SPI bertanggung jawab memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern secara efektif dan efisien, dengan cara :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dengan Unit Kerja terkait.
2. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris Cq Komite Audit.
3. Mendokumentasikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dengan baik.

of Internal and External Supervision Follow-up Monitoring, IAU's responsible for monitoring the follow-up to recommendations resulting from internal control effectively and efficiently, in a way:

1. Coordinate the implementation of the follow-up on the results of the internal control relevant to the Work Unit.
2. Report the results of follow-up monitoring of the internal control recommendations to the Director with a copy of the Audit Committee of the Board of Commissioners Cq.
3. Document the results of the follow-up monitoring of internal control recommendations with good results.

Dari evaluasi tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi laporan hasil audit, sampai dengan triwulan IV/2016, sebanyak 87 LHA telah direview dan ditetapkan status, sedangkan 8 LHA masih dalam proses pemantauan tindak lanjut, dengan penjelasan sebagai berikut :

From the follow-up evaluation on the findings and recommendations of the audit report, until the fourth quarter / 2016, as many as 87 LHA have been reviewed and set status, while 8 LHA is still in the process of follow-up monitoring, with the following explanation:

No	Status LHA *LHA Status*	LHA	Rekomendasi *Rekommendation*
1.	LHA yang telah ditetapkan LHA predetermined	89	714
2.	LHA dalam proses evaluasi LHA in the evaluation process	6	44
	Jumlah Amount	95	758

Dari hasil evaluasi tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi laporan hasil audit sebanyak 89 LHA, telah ditetapkan status rekomendasinya sebagai berikut :

From the results of follow-up evaluation on the findings and recommendations of the audit report as many as 89 LHA, have been assigned the status of its recommendations as follows:

No	Status Tindak Lanjut Rekomendasi *Recommendations Follow-Up Status*	Jumlah *Amount*	%
1.	Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (Selesai) Follow-up was in accordance with the recommendation (Done)	650	91
2.	Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (Belum Selesai) Follow-up is not in accordance with the recommendation (Unfinished)	37	5
3.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti (Belum Ditindaklanjuti) The recommendation has not been executed (Hasn't been Followed-Up)	27	4
4.	Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (Tidak Dapat Ditindaklanjuti) Recommendations can not be followed (Can not be Followed-up)	-	-
	Jumlah Rekomendasi: Total Recommendations	714	100

Secara keseluruhan temuan dan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja/ Bagian sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/487/ VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal.

Overall the results of the audit findings and recommendations have been acted upon and carried out in form of repairations by Work Unit / Departments in accordance with the Board of Directors Decree No. KEP/I.1/487/VII/2013 dated July 29, 2013 on the Guidelines of the Results of Internal and External Supervision Results Recommendation Follow-Up Monitoring.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Pemeriksaan Eksternal
EXTERNAL EXAMINATION

PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan. Opini auditor atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham antara lain dalam rangka pemberian *acquit et decharge* Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Sejalan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Proses Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN VIII Nomor: RIS/I/433/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016 Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, dengan agenda Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Dewan Komisaris PTPN VIII melakukan proses pengadaan atas jasa Audit Kantor Akuntan Publik sebagaimana disampaikan dalam Surat Dewan Komisaris PTPN VIII Nomor 35/Dekom/IX/2016 tanggal 20 September 2016
3. Surat KAP Purwantono, Sungkoro & Surja Nomor 05747/PSS-AS/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Surat Pengantar Terhadap Surat Nomor 05758/PSS-AS/2016 tanggal 22 September 2016 Perihal Penawaran Harga.
4. Surat PTPN VIII Nomor KEP/PL/1350/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.
5. Perjanjian Pekerjaan Jasa Audit Laporan Keuangan Antara PTPN VIII dengan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tanggal 12 Oktober 2016 dengan nilai jasa audit sebesar Rp. 323.037.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016.

EXAMINATION OVER THE FINANCIAL STATEMENTS

Annual Financial Statements audited by external auditors appointed by the AGM of candidates proposed by the Board of Commissioners. Examination of the financial statements (financial audit) company for the purpose of obtaining the auditor's opinion on the fairness of the financial statements and annual accounts of the company. The auditor's opinion on the financial statements and annual accounts required by the shareholders, among others, in order to award acquit et decharge of Directors and Board of Commissioners. In line with the Limited Liability Company Act No. 40 of 2007, the examination of financial statements and annual accounts of the Company Limited public accountant.

Determination Process Public Accounting Firm (KAP)

1. In accordance Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) PTPN VIII Number: RIS / I / 433 / VI / 2016 dated June 18, 2016 On Approval of the Annual Report and Approval of the Financial Statements for Fiscal Year 2016, with the agenda Approval of the establishment of the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ended December 31, 2016.
2. BOC PTPN VIII conduct the procurement process on public accounting firm Audit services as stated in the Letter of the Board of Commissioners of PTPN VIII No. 35 / Dekom / IX / 2016 dated September 20, 2016
3. KAP letter Purwantono, Sungkoro & Surja No. 05 747 / PSS-AS / 2016 dated September 22, 2016 regarding Letter To The Letter No. 05 758 / PSS-AS / 2016 dated September 22, 2016 regarding the Offer Price.
4. PTPN VIII Letter No. KEP / PL / 1350 / IX / 2016 of September 30, 2016 Subject Appointment Provider For Work Implementation Audit Services Fiscal Year 2016.
5. Employment Agreement Between Financial Services PTPN VIII with KAP Purwantono, Sungkoro & Surja on 12 October 2016 with a value of Rp audit services. 323 037 000 (three hundred and twenty-three million thirty-seven thousand Rupiah) to audit the Company's Financial Statements and Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program 2016.

Kantor Akuntan Publik Yang Telah Mengaudit Laporan Keuangan PTPN VIII

Public Accounting Firms Whom Audited the Financial Statements of PTPN VIII

Tahun Buku *Fiscal Year*	Kantor Akuntan Publik *Public Accountant Firm*	Signing Partner
2009	Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan	Drs. Mulyana Mastam, Ak ,MM, CPA
2010	Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan	Drs. Mulyana Mastam, Ak ,MM, CPA
2011	Kantor Akuntan Publik Koesasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan	Darmenta Pinem, SE, CPA
2012	Kantor Akuntan Publik Koesasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan	Darmenta Pinem, SE, CPA
2013	Kantor Akuntan Publik Koesasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan	Darmenta Pinem, SE, CPA
2014	Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan	Drs.Djarwoto, Ak, CPA
2015	Purwantono, Sungkoro & Surja	Tia Adityasih
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja	Tia Adityasih

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Sistem Pengendalian Internal
INTERNAL CONTROL SISTEM

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya, serta seluruh personil Perusahaan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Program kerja dan tindakan yang telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor : KEP/I.1/636/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 Tentang Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System) yang dibuat berdasarkan The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control-Integrated Framework sebagaimana tercermin dalam penjelasan mengenai Pengendalian Internal PTPN VIII, baik tingkat entitas maupun tingkat transaksional yang mana harus mencakup komponen-komponen pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment);
2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment);
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities);
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication); dan
5. Pemantauan (Monitoring)

Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh PTPN VIII adalah melakukan evaluasi dan reviu terhadap kebijakan perusahaan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan kebijakan yang baru.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control is a process designed and implemented by the Board of Commissioners, Directors and other members of management, as well as the entire personnel of the Company are intended to provide reasonable assurance on the achievement of the effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with laws and regulations.

The work program and action has been taken on an ongoing basis according to the Decree of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII: KEP / I.1 / 636 / VI / 2011 dated June 7, 2011 On Internal Control System (Internal Control System) made by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal Control-Integrated Framework as reflected in the explanation of internal Control PTPN VIII, both the entity level and the level of transactional which should include components of internal control as follows:

1. Environmental Control (Control Environment);
2. Risk Assessment (Risk Assessment);
3. Activities Control (Control Activities);
4. Information and Communication (Information and Communication); and
5. Monitoring (Monitoring)

Internal Control System that has been done by PTPN VIII is an evaluation and review of company policies that are no longer relevant to the development of the company and changes in legislation, for further preparation of the new policy.

Hasil Revisi dan Penyusunan Kebijakan Manajemen Dalam Bentuk Keputusan Direksi
Results Revision of Management Policy in the Form of Directors' Decision

No	No Keputusan *Decision Number*	Tentang *About*
1	KEP / III.1 / 01 / I / 2016	Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap Karyawan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII Tahun 2016 Salary and Allowances Environment Permanent Employees at PT Perkebunan Nusantara VIII 2016
2	KEP / I.1 / 186 / IV / 2016	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Perkebunan Nusantara VIII Guidelines for Handling Conflict of Interest PT Perkebunan Nusantara VIII
3	KEP / III.2 / 257 / V / 2016	Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan PT Perkebunan Nusantara VIII Guidelines for Handling and Resolution of Problems of Land PT Perkebunan Nusantara VIII
4	KEP / III.1 / 379 / VII / 2016	Disiplin Kerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara VIII Employee Discipline PT Perkebunan Nusantara VIII

No	No Keputusan *Decision Number*	Tentang *About*
5	KEP / V.3 / 402 / VII / 2016	Pedoman Pemilihan Mitra Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Perkebunan Nusantara VIII Selection Guidelines for Administrative Cooperation Partners Fixed Assets PT Perkebunan Nusantara VIII
6	KEP / III.1 / 406 / VII / 2016	Penghasilan Direksi dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII Tahun 2016 For Directors and Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VIII 2016
7	KEP / II.2 / 436 / VIII / 2016	Standar Operasional (SOP) Pengolahan Kopi Arabika PT Perkebunan Nusantara VIII Operational Standards (SOP) Arabica Coffee Processing PT Perkebunan Nusantara VIII
8	KEP / III.1 / 492 / VII / 2016	Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII Distribution of Duties and Powers of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII
9	KEP / III.1 / 649 / VIII / 2016	Organisasi dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII Organization and Working Procedures PT Perkebunan Nusantara VIII
10	KEP / III.3 / 665 / IX / 2016	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara VIII Guidelines for Procurement of Goods and Services PT Perkebunan Nusantara VIII
11	KEP / IV.3 / 725 / IX / 2016	Pedoman Penjualan Tanaman Kayu PT Perkebunan Nusantara VIII Wood Plant Sales Guidelines PT Perkebunan Nusantara VIII
12	KEP / III.1 / 735 / IX / 2016	Pedoman Penetapan Tunjangan Kinerja PT Perkebunan Nusantara VIII Performance Benefit Determination Guidance PT Perkebunan Nusantara VIII
13	KEP / III.1 / 762 / X / 2016	Organisasi dan Tata Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII Organization and Working Procedures PT Perkebunan Nusantara VIII
14	KEP / I.1 / 828 / XI / 2016	Standar Operasional Prosedur (SOP) Supply Chain dan Pemasaran Buah Unit Aneka Usaha PT Perkebunan Nusantara VIII Standard Operating Procedure (SOP) Supply Chain and Marketing Assorted Fruit Business Unit PT Perkebunan Nusantara VIII
15	KEP / IV.4 / 865 / XI / 2016	Perubahan atas Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII No. KEP/IV.4/665/ IX/2016 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara VIII Amendment to Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara VIII No. KEP / IV.4 / 665 / IX / 2016 on Guidelines for Procurement of Goods and Services PT Perkebunan Nusantara VIII

Hasil Revisi dan Penyusunan Kebijakan Manajemen Dalam bentuk Surat Edaran Direksi
Results Revision of Management Policy Directors Circular in shape

No	No Surat *Letter Number*	Tentang *About*
1	SE / III.1 / 37 / I / 2016	Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Order Administration and Management Services Health BPJS
2	SE / V.1 / 103 / II / 2016	Tata cara Permintaan dan Pemberian Modal Kerja Procedures for Granting Demand and Working Capital
3	SE / V.1 / 221 / V / 2016	Ketentuan Tata Cara Pembukaan Rekening Bank atas nama Perusahaan Conditions Bank Account Opening Procedures on behalf of the Company
4	SE / V.1 / 265 / V / 2016	Pembayaran Gaji Karyawan Payment of Employee Salaries

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No	No Surat *Letter Number*	Tentang *About*
5	SE / I.1 / 325 / VI / 2016	Penetapan Tarif Fasilitas Agrowisata Determination of Rates Amenities Agrowisata
6	SE / I.1 / 326 / VI / 2016	Larangan Gratifikasi Prohibition of Gratification
7	SE / V.1 / 371 / VII / 2016	Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Adjustment Amount of exemption
8	SE / III.2 / 413 / VII / 2016	Kompensasi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Compensation Use of Land and / or buildings in the Framework of Land Management and Settlement Issues
9	SE / I.1 / 670 / IX / 2016	Pemberlakuan (Ratifikasi) Peraturan Kementerian BUMN kepada seluruh Bagian dan Unit Kerja di Wilayah PTPN VIII Entry (Ratification) Regulation of the Ministry of SOEs to all Sections and Regional Working Unit PTPN VIII
10	SE / III.1 / 796 / X / 2016	Pengaturan Tunjangan Kinerja untuk Kepala Afdeling dan Kepala Pengolahan Performance Allowance arrangements for Cambodgien Head and Head of Processing
11	SE / I.1 / 826 / XI / 2016	Tata Cara Penjualan Lokal Aneka Buah oleh Unit Kebun Procedures for Local Sales Unit Various Fruit Gardens
12	SE / I.1 / 827 / XI / 2016	Pelaksanaan Audit/ Pendampingan/Reviu/Konsultan/Bimbingan oleh BPKP Audit / Assistance / 'Review / Consultant / Guidance by BPK
13	SE/IV.1/839/XI/2016	Pengawalan Program Akselerasi/Perbaikan Kinerja Perusahaan Escort Program Acceleration / Performance Improvement Company
14	SE/III.1/897/XII/2016	Perubahan atas Surat Edaran nomor SEU/III.1/884/XII/2016, Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 Amendment to Circular Letter number SEU / III.1 / 884 / XII / 2016 regarding National Holidays and Leaves Year 2017
15	SE/I.1/905/XII/2016	Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Unit Industri Hilir Terpadu Procurement of Goods and Services for the Integrated Downstream Industry Unit

Manajemen Risiko
Risk Management

Untuk membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen perusahaan, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar penataan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut.

Penerapan manajemen risiko perusahaan mengacu pada Kerangka Kerja ISO 31000, dengan pertimbangan bahwa kerangka ini lebih praktis dan sejalan dengan struktur organisasi dan bentuk badan hukum perusahaan yaitu perusahaan perseroan yang pengaturannya mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kegiatan manajemen risiko pada tahun 2016 ini lebih diutamakan pada pelaksanaan proses manajemen risiko, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko pada tanggal 21 September 2016 (M/I.1/308/IX/2016) dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pengukuran risiko kepada Bagian Hukum dan Umum sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengkajian hukum dan pengelolaan pendayagunaan Aset Tetap dengan Cara Lainnya.
2. Menyusun profil risiko dengan beberapa unit kerja di Kantor Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

To help integrate risk management into enterprise management systems, risk management should be put in a risk management framework. This framework will be the basis of the company's risk management arrangements are effective through the application of risk management processes at various levels of the organization and in the specific context of the organization.

The implementation of enterprise risk management framework refers to the ISO 31000, given that this framework is more practical and in line with the organizational structure and legal form of company that liability company whose setting refers to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
Risk management activities in 2016 have an advantage in the implementation of the risk management process, with the following explanation:

1. To disseminate a risk management policy on September 21, 2016 (M / I.1 / 308 / IX / 2016) in order to provide a better understanding of risk measurement to the Public Law Department and as a technical implementation unit in the field of legal studies and management of Fixed Assets utilization with Cara other.

No	Memo *Memo*	Tanggal *Date*	Bagian *Part*
1	M/I.1/311/IX/2016	24 September 2016 September 24, 2016	SPI Internal Control Unit
2	M/I.1/321/X/2016	8 Oktober 2016 October 8, 2016	Tanaman Plant
3	M/I.1/308/IX/2016	13 Oktober 2016 October 13, 2016	Teknik dan Pengolahan Enginering and processing

Dalam kurun waktu tahun 2016, telah dilaksanakan beberapa pengukuran risiko, baik untuk rencana kegiatan kerjasama dengan mitra strategis yang dikelola oleh Bagian Optimalisasi Aset dan Pengembangan Usaha maupun untuk risiko tak terencana atau risiko-risiko yang belum teridentifikasi sebelumnya, identifikasi risiko dilaksanakan setiap saat pada waktu ancaman terhadap pencapaian target atau tujuan perusahaan atau unit kerja teridentifikasi.

In the period of 2016, has implemented several measures of risk, both for the action plan of cooperation with strategic partners that are managed by Section Optimization of Assets and Business Development as well as for the risk of unplanned or risks that have not been previously identified, risk identification carried out at any moment in time threat to the achievement of the targets or objectives of the company or work unit identified.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Pengukuran Risiko untuk Rencana Kegiatan Kerjasama dengan Mitra Strategis Maupun Risiko yang Tak Terencana
Measurement of Risk to the Action Plan of Cooperation with Strategic Partners as Well as the Risk of Unplanned

N0	Kajian *Study*	Nomor & Tanggal Risk Register *Number & Date Risk Register*
1.	Penyertaan Modal Saham Berupa Lahan di Kebun Panglejar Form of Equity Shares of Land in Gardens Panglejar	RR/HSR/01/I/2016
2.	Rencana Kerjasama Pendayagunaan Aset Lahan & Bangunan PTPN VIII di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 92, Bandung oleh Sagalaya Cooperation Plan Asset Utilization of Land & Building PTPN VIII in Jl. Ir. H. Juanda No. 92, Bandung by Sagalaya	RR/HSR/02/I/2016
3.	Rencana Pinjam Pakai Lahan HGU Kebun Pasir Badak Untuk Pembangunan Kantor Satpolair oleh Kepolisian Resor Sukabumi Borrow and Use of Land HGU plans Gardens Pasir Badak For Office Development Satpolair by Police Sukabumi	RR/III.2/03/V/2016
4.	Rencana Kerjasama Pendayagunaan Lahan untuk ATM BRI Land Reform Cooperation Plan for ATM BRI	RR/V.3/04/V/2016
5.	Rencana KSU Pengembangan Wisata Glamping di Kebun Rancabali dengan PT Prakarsa Mulia. KSU Plan for Tourism Development in the Garden Rancabali Glamping with PT Initiative Honor.	RR/V.3/05/VI/2016
6.	Rencana Kerjasama Usaha Untuk Budidaya Tanaman Jahe oleh PT Agro Nusantara Business Cooperation Plan To Plant Cultivation Ginger by PT Agro Nusantara	RR/V.3/06/VI/2016
7.	Rencana Atas Kerjasama Penggunaan HGU Kebun Gunung Mas Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana SMKN Puncak Cisarua Bogor Up Plan Cooperation of Use HGU Gardens Gunung Mas Infrastructures for Development SMK Puncak Cisarua, Bogor	RR/III.2/07/VI/2016
8.	Rencana Pinjam Pakai Lahan Kebun Panglejar oleh PT. KCIC Borrow and Use of Land Gardens plans Panglejar by PT. KCIC	RR/HSR/08/IX/2016
9.	Kerjasama Pengunaan Sebagian Lahan HGU dan Lintas Jalan PTPN VIII Kebun Papandayan oleh PT. Arkora Hydro Use of Some Land Cooperation and Cross Roads HGU PTPN VIII Gardens Papandayan by PT. Hydro Arkora	RR/V.3/09/IX/2016
10.	Rencana Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Komoditi Kina di Kebun Bukitunggul dengan PT Sinkona Indonesia Lestari Cooperation Plan of Operations (KSO) Kina Commodity Development in the Garden Bukitunggul with Sinkona Indonesia PT Lestari	RR/III.3/10/XI/2016
11.	Rencana Kerjasama Usaha Penanaman Tebu di Kebun Wangunreja & Jalupang dengan PT PG II (RNI Group) Business Cooperation Plan Sugarcane Planting in Garden Wangunreja & Jalupang with PT PG II (RNI Group)	RR/III.3/II/XI/2016
12.	Rencana Kerjasama Pengembangan Pasar Cisompet, Kebun Bunisari Lendra Cooperation Plan Cisompet Market Development, Gardens Bunisari Lendra.	RR/III.3/12/XII/2016

Pengukuran Risiko untuk Risiko Tidak Terencana atau Risiko-Risiko yang Belum Teridentifikasi Sebelumnya
Measurement of Risk for Unplanned Risks or Risks that Have Not Been Identified Previously

No	Kajian Risiko *Risk Assessment*
1	Kajian atas Keputusan Rapat Periodik BMD PTPN & PT RNI. Periodic review of the Resolutions of BMD PTPN and RNI.
2	Kajian atas Proses Pengajuan Penghapusbukuan Aset. Study on Asset Write-offs filing process.
3	Kajian atas Usulan Perubahan Anggaran Dasar PTPN VIII. Study on Proposed Amendment will PTPN VIII.
4	Kajian atas KAK Pengadaan Jasa Konsultasi TI. Study on KAK Procurement IT Consulting Services.
5	Kajian atas Mekanisme Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset. Study on Mechanism of the Asset Transfer and Removal.
6	Kajian atas Draft SK Pengangkatan Calon Karyawan. Study on Draft Decree Appointment Prospective Employees.
7	Kajian atas Tindaklanjut Penyelesaian Kerjasama dengan PT Agro Sejahtera Lestari. Study on Follow Settlement Partnership with PT Agro Lestari Sejahtera.
8	Kajian atas Penyelesaian Tindaklanjut Kasus Kepegawaian. Case Study Follow-up to the Settlement Officer.
9	Kajian atas Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIRBUN. Study on the State Receivables Farmer Settlement Project Ex PIRBUN.
10	Kajian atas Draft Pedoman Pengendalian Gratifikasi PTPN I s.d XIV. Study on Draft Guidelines for Control of Gratification PTPN I sd XIV.
11	Kajian atas Penyederhanaan Struktur Organisasi. Study on Organizational Structure Simplification.
12	Kajian atas Mekanisme Pengajuan Pengurangan BPHTB. Study on Mechanism of Filing Reduction BPHTB.
13	Kajian atas atas Rencana Penjualan Aset PT AMN. Study on the Proposed Asset Sale PT AMN.
14	Kajian atas Fasilitas Rumah Dinas Direksi. Home Office review of the amenities of Directors.
15	Kajian atas Draft Perubahan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Home Office review of the amenities of Directors.
16	Kajian atas atas Draft Perjanjian Distributor. A study of top Draft Distributor Agreement.

Beberapa risiko penting yang dihadapi perusahaan selama tahun 2016 antara lain:

1. Risiko Produk Komoditas
   Risiko dalam perdagangan Komoditas adalah fluktuasi harga. Harga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar Komoditas. Permintaan ditentukan oleh pertambahan penduduk, pertambahan penggunaan, penggunaan baru dan karena substitusi.

Some of the important risks faced by the company during 2016 include:

1. Commodity Products Risk
   Risk in Commodity trading is price fluctuations. Price is determined by supply and demand in commodity markets. Demand is determined by population growth, increased usage, the use of new and because of substitution. Offers changed

Penawaran berubah karena pertambahan kapasitas produksi (luas lahan yang ditanam atau pabrik baru yang dibangun), musim, cuaca baik atau buruk, larangan atau insentif pemerintah, bencana alam maupun perang atau perdamaian. Jadi banyak sekali faktor yang tidak bisa diramalkan.

2. Risiko Tenaga Kerja
Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak + 53.835 orang dengan komposisi tenaga kerja sebagaimana disampaikan sebelumnya (hubungan kerja : 38% pekerja tetap, 62% pekerja tidak tetap, pendidikan : 73% lulusan SD dan usia : 31% usia 50-54 tahun), menimbulkan risiko antara lain risiko kewajiban pengangkatan pekerja tidak tetap/outsourching sesuai UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, risiko rendahnya produktivitas kerja, risiko penetapan upah (UMK/UMP/UMR), dsb.

3. Risiko Lahan (Areal)
Dengan komposisi status lahan 30.13% bersertifikat dan 69.87% dalam proses perpanjangan HGU, menimbulkan risiko okupasi lahan, risiko berkurangnya areal HGU karena dikeluarkannya lahan yang belum clean and clear dari permohonan HGU, risiko tidak optimalnya pemanfaatan lahan (non tanaman).

4. Risiko Pasar dan Kompetitor
   a. Untuk produk hasil tanaman sawit dan karet, PTPN VIII memiliki market share yang relatif kecil dibandingkan dengan PTPN lainnya dan perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh produktivitas dan rendemen yang masih rendah serta luas areal karet dan kelapa sawit masih dibawah perusahaan lain yang sejenis. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet dan kelapa sawit, perusahaan melakukan penggantian tanaman lama dengan klon unggulan serta mengaplikasikan teknologi tepat guna.
   b. Munculnya kompetitor baru untuk produk karet, dan kelapa sawit, seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand;
   c. Semakin ketatnya persyaratan produk dan proses yang diterapkan oleh pasar;
   d. Meningkatnya kegiatan yang dilakukan kompetitor eksisting maupun perusahaan lain yang potensial dapat mempengaruhi competitive advantage dan kemampuan perusahaan untuk bertahan, melalui cara - cara yang dilakukan meliputi mengeluarkan produk baru, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas dan mengelola biaya. Adanya kompetitor yang memilki performansi sangat baik (dalam hal kualitas, biaya murah atau waktu respon

due to the increase of production capacity (total area planted or built a new plant), the season, the weather is good or bad, ban or government incentives, natural disaster or war or peace. So a lot of factors that can not be foreseen.

2. Labor Risk
With a workforce of + 53 835 people with workforce composition as stated previously (working relationship: 38% permanent workers, 62% of non-regular workers, education: 73% of primary school graduates and age: 31% aged 50-54 years), pose a risk among others, the risk of liability removal of temporary workers / outsourcing in accordance with Law No.13 of 2003, the risk of low productivity of labor, the risk of wage determination (MSE / UMP / UMR), etc.

3. Land (Area) Risk
With the composition of land status and certified 30.13% 69.87% in the concession renewal process, raises the risk of land occupation, the risk reduction in the concession area due to the issuance of land that is not clean and clear from the concession application, the risk is not optimal utilization of land (non-crop).

4. Market and Competitors Risk
   a. For products of palm and rubber crops, PTPN VIII has a relatively small market share compared with other PTPN and private companies in Indonesia. This is due to the productivity and yield are still low and the area of rubber and palm oil is still below other similar companies. To improve the productivity of rubber and palm oil, the company doing the replacement of old plants with clones and applying appropriate technology.
   b. The emergence of new competitors for rubber products, and palm oil, such as Malaysia, Vietnam and Thailand;
   c. Increasingly strict requirements of products and processes applied by the market;
   d. Increased activities carried out existing competitors or other companies that could potentially affect the competitive advantage and the ability of the company to survive, by the way - a way that is conducted on the issuing of new products, improve product quality, increase productivity and manage costs. The presence of competitors who have a very good performance (in terms of quality,

terhadap permintaan pelanggan) akan mengakibatkan turunnya competitive advantage perusahaan.

5. Risiko Ketersediaan Modal
   Kurangnya ketersediaan modal dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk berkembang, menjalankan rencana bisnis dan menghasilkan pendapatan di masa datang. Perusahaan tidak memiliki akses yang cukup ke sumber modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis strategi bisnis dan membangun sumber pendapatan masa depan. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) jika perusahaan sangat membutuhkan modal atau kompetitor memiliki cash yang cukup besar, struktur biaya yang rendah, marketshare yang besar, atau memiliki akses terhadap modal melalui kerjasama strategic (strategic alliances).

6. Risiko Perencanaan Srategis
   Risiko ini terekspose sebagai dampak atas ketidakakuratan dalam perencanaan, mulai dari potensi produksi, analisa pasar, pengelolaan biaya dan alokasi sumber dana untuk investasi yang tidak tepat, secara umum menentukan keberadaan (eksistensi) dan tingkat kemajuan perusahaan kedepan.

Mitigasi Risiko

Merupakan salah satu bentuk penanganan risiko berupa tindakan sistematis dan terukur, baik volume, waktu, sasaran hasil, biaya maupun penanggungjawabnya, untuk menurunkan level risiko (kemungkinan, dampak atau kedua-duanya, dan termasuk di dalamnya pengalihan risiko ke pihak lain) dari level Ekstrem atau Tinggi ke level risiko yang dapat diterima (sekurang-kurangnya Moderat).

1. Risiko produk komoditas, dipengaruhi oleh unsur ketidakpastian atas fluktuasi harga dan ketidaktercapaian produksi/produktivitas.
   - Fluktuasi harga, salah satunya dikendalikan melalui konsistensi mutu
   - Ketidaktercapaian produksi merupakan internal factor, langkah mitigasi melalui analisa kesesuaian lahan, penggunaan kloon/varietas unggul, pemenuhan populasi standar, kecukupan asupan (pupuk), pemeliharaan sesuai kultur teknis. Sementara mitigasi atas risiko iklim/cuaca melalui pengelolaan lingkungan mikro klimat.

2. Risiko Tenaga Kerja, dipengaruhi oleh ketidaktepatan dalam pengelolaan SDM. Dengan memperhatikan

low cost or response time to customer demand) will lead to lower enterprise competitive advantage.

5. Availability of Capital risk
   The lack of availability of capital can interfere with the ability of the company to develop, execute the business plan and generate revenue in the future. The Company does not have sufficient access to capital resources required to develop a business, running a business and the business strategy to build a source of future income. This could lead to a competitive disadvantage (competitive disadvantage) if the company is in need of capital or competitors have sizable cash, low cost structure, large marketshare, or have access to capital through strategic cooperation (strategic alliances).

6. Strategic Planning Risk
   This risk exposure as the impact on inaccuracies in the planning, ranging from production potential, market analysis, cost management and allocation of resources for investment that is not appropriate, generally determines the existence (existence) and the rate of progress of the company's future.

Risk Mitigation

Is one form of risk mitigation in the form of systematic and measurable actions, good volume, timing, objectives, costs and penanggungjawabnya, to reduce the level of risk (probability, impact or both, and includes the transfer of risk to another party) from the level of Extremes or High to acceptable risk levels (at least moderate).

1. The risk of commodity products, influenced by uncertainty over price fluctuations and the failure in production / productivity.
   - Fluctuations in the price, one of which is controlled by the consistency of quality
   - failure in the production of an internal factor, mitigation through land suitability analysis, the use of Kloon / high-yielding varieties, compliance standard population, adequate intake (fertilizer), maintenance of appropriate technical culture. While mitigate the risks of climate / weather through micro-climatic environmental management.

2. Risk of Labor, which is affected by inaccuracies in HR management. Having regard to the characteristics of the

karakteristik ketersediaan tenaga kerja berdasarkan jumlah, latar belakang pendidikan dan usia maka pengalokasian tenaga kerja secara tepat menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas SDM yang mendukung terhadap pencapaian sasaran perusahaan. Sementara Program Pengembangan SDM dilakukan secara kontinue untuk memenuhi gap kesenjangan kapabilitas SDM disertai evaluasi yang memadai atas hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

3. Risiko Lahan (areal)
Risiko lahan menjadi terekspose, dengan kecenderungan semakin meluasnya okupasi/ penjarahan lahan, sementara penegakan regulasi hukum menjadi tidak bisa diandalkan. Mitigasi atas risiko lahan/areal dengan mendorong proses penyelesaian sertifikasi HGU melalui dukungan Kementerian BUMN serta sosialisasi peran dan keberadaan perusahaan melalui program CSR lebih diintensifkan pada program-program yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkungan sekitar.

4. Risiko Pasar dan Kompetitor
Dipengaruhi oleh market share yang rendah pada komoditi karet dan kelapa sawit, munculnya beberapa produsen baru yang lebih kompetitif serta ketatnya persaingan pasar termasuk regulasi yang berlaku. Mitigas atas risiko pasar dan kompetitor diantaranya dengan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan (standar mutu, peningkatan produktivitas, pengelolaan biaya sehingga dapat bersaing, mengaplikasikan teknologi tepat guna serta menciptakan produk baru).

5. Risiko Ketersediaan Modal
Dipengaruhi oleh keterbatasan sumber dana untuk pengembangan/investasi, sementara keberadaan/ existensi perusahaan harus diimbangi dengan adanya pengembangan investasi, atas keterbatasan ini pengembangan-pengembangan yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan melalui strategi kerjasama melalui optimalisasi asset yang dimiliki perusahaan.

6. Risiko Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis menentukan keberadaan (eksistensi) dan tingkat kemajuan perusahaan kedepan, hal ini menjadi sangat krusial apabila perencanaan tidak dilakukan secara akurat baik karena sumber data (data based) yang tidak mencerminkan informasi sebenarnya, maupun asumsi bisnis yang tidak tepat akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Mitigasi atas risiko perencanaan

availability of labor based on the number, educational background and age of the appropriate allocation of labor is the key to improve the productivity of human resources support to the achievement of corporate goals. While the Human Resources Development Program conducted continuously to meet the human resource gap capability gap with an adequate evaluation of the results of the implementation of education and training.

3. Land (area) Risk
Risk land became exposed, with increasingly widespread tendency occupational / looting of land, while the enforcement of legal regulations become unreliable. Mitigate the risk of land / acreage to encourage the process of finalizing the concession certification through the support of the Ministry of State-Owned Enterprises and dissemination role and existence of the company through its CSR program to be intensified in programs that directly benefit the communities surrounding environment.

4. Market and Competitors Risk
Influenced by the low market share in commodity rubber and palm oil, the emergence of several new producers more competitive and market competition including the applicable regulations. Mitigas market risks and competitors such as by increasing the competitiveness of the products (quality standards, increased productivity, cost management so that they can compete, applying appropriate technology as well as creating a new product).

5. Availability of Capital Risks
Influenced by the lack of financial resources for development / investment, while the presence / company's existence must be balanced with the development of investment, over this limitation developments of the company can be done through cooperation strategy by optimizing the assets owned by the company.

6. Strategic Planning Risk
Strategic planning determines the existence (existence) and the rate of progress of the company in the future, it becomes crucial when planning is not done accurately well as the source of the data (data-based) which does not reflect the actual information, and the inaccurate assumption that the business would be misleading in decision making. Mitigation of risks including

strategis diantaranya dengan menetapkan sumber daya manusia yang tepat dibidang perencanaan, penyusunan studi kelayakan yang komprehensif dalam pelaksanaan investasi serta basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

strategic planning by setting the appropriate human resources in the field of planning, the preparation of a comprehensive feasibility study on the implementation of the investment as well as a database that can be accounted for.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Program Pengendalian Gratifikasi
Gratuity Control Program

Sebagai perwujudan komitmen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dan mendukung peningkatan kepatuhan dan kesesuaian terhadap pedoman etika perusahaan, terutama dalam membangun hubungan yang sehat dan etika berusaha dengan para pemangku kepentingan perusahaan (stakeholders), Direksi telah menetapkan Keputusan Direksi PTPN VIII (Persero) Nomor : KEP/I.1/327/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi PTPN VIII (Persero) yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Insan PTPN VIII (Persero) dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi. Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi meliputi : komitmen Direksi dan Dewan Komisaris, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, dan pemantauan atas pelaksanaan dan

As the embodiment of the company's commitment to the implementation of sustainable governance and state administration is clean and free from corruption, collusion and nepotism in accordance with applicable legislation, as well as to create a conducive environment control and support improved compliance and conformity to the ethical guidelines of the company, especially in building healthy relationships and business ethics with the company's stakeholders (stakeholders), the Board of Directors has set the Decree of Directors of PTPN VIII (Persero): KEP / I.1 / 327 / VII / 2014 dated July 18, 2014 on Gratuity Control PTPN VIII (Persero), the formulation refers to the Minister of State for State Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2014 dated March 17, 2014 on Gratification Control Program within the Ministry of SOE.

Gratuity Control Policy is intended to provide guidance for personnel PTPN VIII (Persero) in determining the potential actions or lead to corruption, especially gratification. The scope of Gratuity Control Guidelines include: commitment of Directors and Board of Commissioners, the provisions of gratification, the functions assigned to manage gratuity, gratuities reporting mechanisms, and monitoring of the implementation of the provisions and

sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.

Implementasi pengendalian gratifikasi di PTPN VIII dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan gratifikasi sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, diantaranya dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Utama No. SB/I.1/1823/VI/2016 tgl 24 Juni 2016 tentang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi, surat ditujukan kpd Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

sanctions for irregularities gratification.

Implementation of controls gratification in PTPN VIII conducted through gratification management activities in accordance with the law and company policies that apply, including the publication of Circular Director No. SB / I.1 / 1823 / VI / 2016 Date June 24, 2016 about ban on giving / receiving gratuities, a letter addressed kpd Officer 1 (one) level below the Board of Directors.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan, PTPN VIII berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Pengelolaan perusahaan seluruhnya tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap perusahaan dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip yang meliputi : Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency), dan Kewajaran (fairness).

Sesuai dengan prinsip Kemandirian, bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi Insan PTPN VIII (Persero). Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan sering timbul potensi pertentangan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Adanya pertentangan kepentingan atara pribadi dengan perusahaan akan menimbulkan situasi dilematis yang pada akhirnya dapat berakibat terjadinya kerugian bagi perusahaan. Insan PTPN VIII harus menghindarkan diri dari situasi dilematis akibat adanya pertentangan kepentingan antara pribadi dengan perusahaan.

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk membangun budaya perusahaan yang lebih beretika. Untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan adanya benturan kepentingan, Direksi telah menetapkan Keputusan Direksi PTPN VIII (Persero) Nomor : KEP/I.1/404/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Insan PTPN VIII (Persero) dalam bersikap dan bertindak pada saat menghadapi situasi dilematis atau benturan kepentingan (conflict of interest).

Ruang lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan meliputi : prinsip, kebijakan perusahaan, sikap Insan PTPN VIII, mekanisme pelaporan benturan kepentingan, pengenaan sanksi terhadap benturan kepentingan.

In the implementation of the company management, PTPN VIII is committed to applying the principles of good corporate governance consistently and continuously. Management company wholly subject to all applicable regulations of the company and stick to the application of the principles include: Transparency (transparency), Accountability (accountability), Accountability (responsibility), Independence (independency), and fairness (fairness).

In accordance with the principle of self-reliance, that the management of the company must be done professionally without any conflict of interest and influence / pressure from any party. Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the interests of the company and the personal interests of Insan PTPN VIII (Persero). In the implementation of the company's business activities are often raised potential conflicts of interest between personal interests and the interests of the company. The existence of a personal conflict of interest with the company Atara will pose a dilemma situation, which in turn may result in losses for the company. PTPN VIII Individuals should avoid dilemma situation due to a conflict between personal interests with the company.

One of the company's commitment to realize the management of the Company that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN) and to build a more ethical corporate culture. To avoid making personal gains and other parties due to a conflict of interest, the Board of Directors has set the decision of the Directors PTPN VIII (Persero) Number: KEP / I.1 / 404 / VI / 2012 dated June 26, 2012 on Guidelines for Handling Conflict of Interest. Purpose of this document is a guide for personnel PTPN VIII (Persero) in attitude and action in the face of a dilemma or conflict of interest situations (conflict of interest).

The scope of the Guidelines for Handling Conflicts of Interest include: principles, company policies, attitudes Insan PTPN VIII, reporting mechanisms of conflict of interest, the imposition of sanctions against conflicts of interest.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan, antara lain dengan mendistribusikan ketentuan dan melakukan kegiatan diseminasi kepada karyawan di lingkungan Perusahaan.

Implementasi penanganan Benturan Kepentingan di PTPN VIII dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan Penanganan Benturan Kepentingan sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, diantaranya:

1. Penandatanganan Surat Pernyataan & Pakta Integritas untuk pengangkatan calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
2. Penandatanganan Surat Pernyataan & Pakta Integritas oleh Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Penandatanganan Surat Pernyataan & Pakta Integritas oleh Direksi dalam pelaksanaan kerjasama strategis dengan mitra.
4. Daftar Pemegang Saham : Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
5. Daftar Khusus : Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Antar Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham di PTPN VIII sebagaimana tercantum dalam Daftar Khusus sesuai Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-10133.40.20.2014 tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VIII.

Efforts were undertaken to improve the understanding of Handling Conflict of Interest policy, among others, by distributing the provision and dissemination activities to employees of the Company.

Implementation handling of Conflicts of Interest in PTPN VIII performed by implementing management activities Handling of Conflicts of Interest in accordance with the laws and applicable company policies, including:

1. Signing Statement & Integrity Pact for the appointment of senior officials under the Board of Directors.
2. Signing Statement & Integrity Pact by the Tender Committee for Procurement of Goods and Services.
3. Signing Statement by the Board of Directors and the Integrity Pact in the implementation of strategic cooperation with partners.
4. List of Shareholders: Shares Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors
5. Special List: Relationship Between Family and Relationships Finance Member of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership

Members of the BOC and BOD do not hold shares in PTPN VIII as specified in the Special Register in accordance Attachment Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-10133.40.20.2014 dated October 27, 2014 On Approval of Change of Legal Entity Limited Liability PT Perkebunan Nusantara VIII.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Klasifikasi Saham *Share Classification*	Jumlah lembar Saham *Amount of Shares*	Keterangan *Description*
Dewan Komisaris				
Agus Pakpahan	Komisaris Utama	-	-	Nihil/ Nothing
Karen Tambayong*	Komisaris/Komisaris Utama	-	-	Nihil/ Nothing
Herry Suhardiyanto	Komisaris	-	-	Nihil/ Nothing
Sutriono Edi	Komisaris	-	-	Nihil/ Nothing
I Made Putrawan	Komisaris	-	-	Nihil/ Nothing
Elen Setiadi*	Komisaris	-	-	Nihil/ Nothing
Antonius HW Witono*	Komisaris	-	-	Nihil/ Nothing
Direksi (Baru)				
Dadi Sunardi	Direktur Utama	-	-	Nihil/ Nothing

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Klasifikasi Saham *Share Classification*	Jumlah lembar Saham *Amount of Shares*	Keterangan *Description*
Bambang Murtioso*	Direktur/Direktur Utama	-	-	Nihil/ Nothing
Gunara	Direktur	-	-	Nihil/ Nothing
I.G.N Suharta Wijaya	Direktur	-	-	Nihil/ Nothing
Tatang Supriatna*	Direktur	-	-	Nihil/ Nothing

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Antar Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Antar para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Family Relationship Family and Finance Relationships between Member of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders

Among the Members of the Board of Directors and Members of Board of Commissioners Board of Directors with no family relationship up to the third degree, either vertically or horizontally to the side lines, including the relationship arising from the marriage.

Nama *Name*	Hubungan Keluarga *Family Relationship*			Hubungan Keluarga *Financial Relationship*		
	Direksi *BOD*	Komisaris *BOC*	Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholder*	Direksi *BOD*	Komisaris *BOC*	Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholder*
Dewan Komisaris						
Agus Pakpahan*	-	-	-	-	-	-
Herry Suhardiyanto	-	-	-	-	-	-
Sutriono Edi*	-	-	-	-	-	-
I Made Putrawan*	-	-	-	-	-	-
Karen Tambayong*	-	-	-	-	-	-
Elen Setiadi*	-	-	-	-	-	-
Antonius HW Witono*						
Direksi						
Dadi Sunardi*	-	-	-	-	-	-
Bambang Murtioso*	-	-	-	-	-	-
Gunara*	-	-	-	-	-	-
I.G.N Suharta Wijaya*	-	-	-	-	-	-
Tatang Supriatna*	-	-	-	-	-	-

*Pergantian Dewan Komisaris dan Direksi PTPN VIII selama Tahun 2016.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

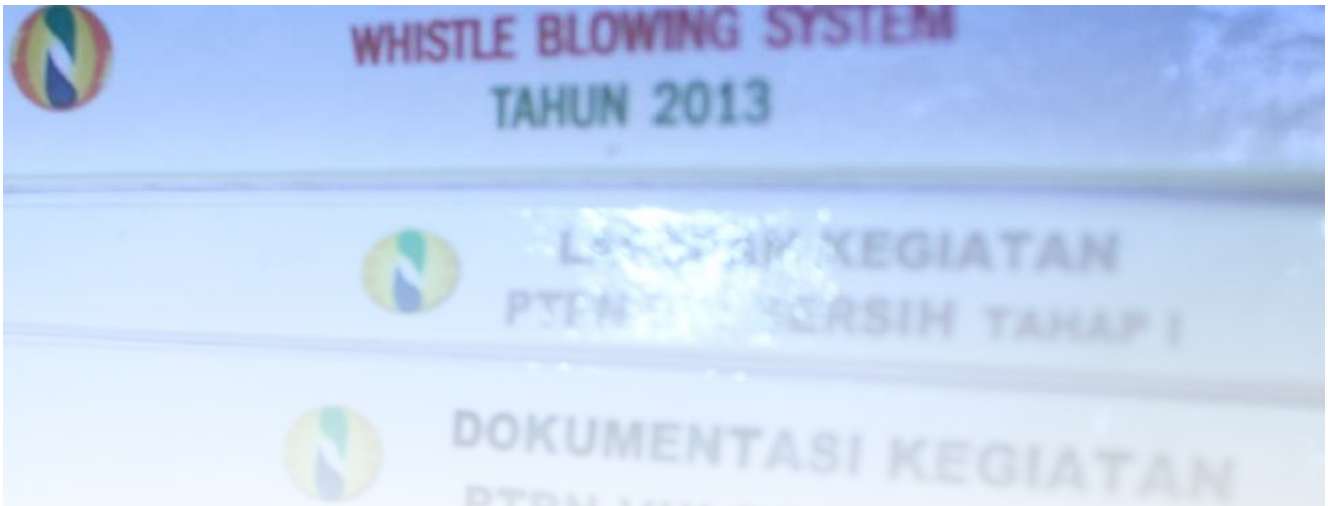

Whistleblowing system adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pelapor dalam melaporkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan.

PTPN VIII telah menyediakan dan mengelola jalur komunikasi bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran atau kecurangan (whistleblowing) seperti pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku dan terjadinya kecurangan (fraud).

Media penyampaian pelaporan pelanggaran yang disediakan Pengelola WBS PTPN VIII, adalah melalui Website www.pn8.co.id/whistleblower.
Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi dan pengelolaan pelaporan pelanggaran sejak tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Whistleblowing system is a part of the internal control system to prevent irregularities and fraudulent practices and strengthen the implementation of good governance practices. This system is expected to increase the level of participation of the complainant in reporting violations that could harm the company.

PTPN VIII has been providing and managing communication paths for employees and other stakeholders to report any indication of abuse or fraud (whistleblowing) such as violation of the code of conduct, violation of applicable procedures, and fraud.

Media for violation reporting provided by the management of WBS PTPN VIII are through www.pn8.co.id/whistleblower.
A series of activities that have been carried out in the framework of the implementation and management reporting of violations since the year 2012 are as follows:

No.	Aktivitas *Activity*
I.	Tahap Persiapan Awal Early Preparation Phase • Penyusunan rencana kerja penerapan WBS. WBS implementation work plan establishment. • Pembahasan rencana kerja penerapan WBS dengan KARU dan SPI. Discussion of the WBS implementation work plan with Audit and Business Risk Commitee and IAU. • Penyampaian rencana kerja dan kebutuhan biaya untuk implementasi WBS kepada Direksi. Submission of The WBS Implementation work plan and cost requirements to the Board of Directors. • Kesepakatan Direksi dan Komisaris untuk membentuk unit pengelola WBS dan penunjukan tim untuk mempersiapkannya. Agreement between BOD and BOC to form a WBS management unit and team appointment for the preparation. • Penetapan Pengelola WBS. WBS manager establishment.

No.	Aktivitas *Activity*
II.	Tahap Persiapan Lanjutan Advance Preparation Phase • Pengadaan sarana fisik kantor dan media penyampaian laporan pelanggaran (Hotline, email, kotak pos khusus). Procurement of office infrastructure and media for violations reports delivery (Hotline, email, special PO box). • Penyusunan materi untuk Executive Briefing tentang WBS bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Preparation of material for the Executive Briefing on WBS for the BOD and BOC. • Penyusunan materi workshop untuk Manager mengenai WBS, khususnya peran Manajemen dalam WBS dan juga pelatihan Training for Trainers bagi para manager yang akan memberikan pelatihan WBS. Preparation of workshop materials for managers regarding WBS, particularly the role of management in the WBS and also Training for Training for managers who will provide WBS training. • Executive Briefing untuk Direksi dan Komisaris tentang pelaksanaan WBS. Executive Briefing for Directors and Commissioners on the implementation of the WBS.
III.	Peluncuran Program WBS WBS Program Launching • Persiapan materi promosi dan penggandaan Buku Petunjuk informasi tentang WBS untuk dibagikan kepada karyawan dan tamu. Preparation of promotional materials and doubling Manual for information about WBS distributed to employees and guests. • Penyusunan acara peresmian peluncuran program WBS yang antara lain berisikan: Preparation of the WBS Program Launching ceremony that contains: - Penandatanganan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta Pejabat Senior Perusahaan; Signing the commitment of BOD, BOC and Senior Officers of the Company; - Sambutan Direksi/Dewan Komisaris; Greetings from the BOD/ BOC; - Sambutan dari luar perusahaan; Greetings from third parties; - Perkenalan media WBS dan nomor untuk dihubungi. WBS Media and hotline number Introduction. • Penentuan waktu pelaksanaan upacara seremoni peluncuran penerapan WBS dan persiapan fisik dan acara lainnya. The timing of the ceremony ceremony launching the application of WBS and physical preparation and other events. • Penentuan Peluncuran Penerapan WBS. WBS Implementation Launching Establsihment
IV.	Pelatihan dan Sosialisasi WBS WBS Training and Socialization • Penyusunan jadwal pelatihan dan sosialisasi secara keseluruhan. Preparation of the training schedule and overall socialization. • Persiapan logistik dan akomodasi untuk pelatihan dan sosialisasi. Preparation of logistics and accommodation for training and socialization. • Sosialisasi/Workshop untuk Senior Manager. Socialization/Workshop for Senior Manager. • Sosialisasi dan Workshop untuk Manager. Socialization/Workshop for Manager. • Pelatihan Training for Trainers bagi para Manager. Socialization Training for Trainers for Managers. • Pelatihan dan sosialiasi untuk karyawan. Socialization and Training for Employees.

No.	Aktivitas *Activity*
V.	Penerapan WBS WBS Implementation • Final check up seluruh infra struktur WBS, termasuk Helpline yang ada. Final check-up of the entire infrastructure of WBS, including the existing helpline. • Pelaksanaan WBS secara penuh dan siap menerima pelaporan dan proses berikutnya. Full WBS Implementation and ready to receive reporting and subsequent processing. • Perencanaan kegiatan komunikasi berkala. Periodic communication activities planning. • Pelaksanaan komunikasi berkala. Periodic communication implementation.
VI.	Monitoring dan Review Monitoring and Review • Penyusunan jadwal monitoring dan review. Monitoring and Review Schedule Arrangement. • Pelaksanaan review/assessment program WBS. Review/ Assessment Implementation of WBS program. • Implementasi rekomendasi perbaikan hasil assessment. Implementation of assessment result's repair recommendation.

Penyampaian Laporan Pelanggaran
Kebijakan Perlindungan Bagi Whistleblower

Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya. Perusahaan melindungi Pelapor yang bertidikad baik, melalui:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor apabila Pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi Pelapor
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor atau Perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan fisik, terror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada Unit Kerja mana tindaklanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Pelapor yang lengkap identitasnya.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Penanganan Pengaduan

1. Infrastruktur Penyampaian Laporan
   Perusahaan menyediakan saluran khusus bagi Pelapor yang akan menyampaikan pengaduan/laporan pelanggaran yaitu:
   a. Telepon;
   b. Website Perusahaan;
   c. Email;
   d. Facsimile; dan
   e. Surat resmi yang ditujukan kepada Pengelola WBS,

Abuse Report Submission
For Whistleblower Protection Policy

Rapporteur who wanted him to be kept secret was granted bail on personal identity secret. Reporting bertidikad protect the company either through:

1. Availability of facilities reporting channels
2. Guarantee anonymity if the Reporting Reporting provides identity and information that can be used to contact the Rapporteur
3. Guarantee information security and protection against reprisals from the Party or the Company, which is a threat of physical safety, terror psychological, safety of property, legal protection and job security, stress, delayed promotion, demotion or promotion, unfair dismissal, harassment or discrimination in all forms and records that harm the personal data files.
4. Information on the implementation of follow-up, such as when and how and to which follow-handed Work Unit. This information was submitted confidentially to complete the Reporting identity.

The delivery mechanism Abuse Report and Complaints

1. Infrastructure Report Submission
   The company provides specialty channels for Rapporteur will submit a complaint / report a violation, namely:

a. Telephone;
b. website Company;
c. E-mail;
d. facsimile; and
e. An official letter addressed to the business WBS, by way of

dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan.

2. Kewenangan Penanganan Pelaporan pelanggaran
   a. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi, atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   b. Dalam hal pelanggaran dialkukan oleh Anggota Dewan Komisaris maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen.
   c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Karyawan dan anggota petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi, dapat ditindaklanjuti oleh Auditor Internal.
   d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Anggota Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan sebagainya sepanjang relevan.
3. Mekanisme Penyampaian Laporan
   Mekanisme penyampaian pelaporan pelanggaran oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui Atasan Langsung secara berjenjang, direktorat dan fungsi terkait, namun apabila Pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyalurkan pelaporan pelanggaran melalui saluran WBS
   Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran melalui saluran WBS dilaksanakan sesuai dengan flowchart sebagaimana terdapat dalam Struktur Pengelolaan WBS.
4. Kekebalan Administratif
   Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratikepada Para Pelapor yang beritikad baik.

Kebijakan tersebut diatas dapat diberikan kepada Pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran Berat, atau bila terpaksa terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya berlaku di internal perusahaan.

5. Komunikasi Dengan Pelapor
   Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui 1

direct transfer or by post to the Company.

2. Handling authority Reporting violations
   a. In case of violation by a Member Board of Directors, or a person who has a special relationship with the Board of Directors, then a violation report submitted to the Commissioner. Handling more submitted to the Board of Commissioners and, if necessary investigations, can use the investigator / independent external auditor.
   b. In case of violation by a Member of the Board of Commissioners dialkukan then a violation report was submitted to the Director. Further handling of the violation report carried out by the Board of Directors, and if required an investigation, can use the investigator / independent external auditor.
   c. In case of violations committed by employees and staff members Violation Reporting System, the violation report is submitted directly to the Managing Director. Further handling of the violation report carried out by the Board of Directors, and if required an investigation, can be acted upon by the Internal Auditor.
   d. In case of violation by a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors and Managing System Reporting Violations, then a violation report was submitted to the law enforcement authorities such as police, prosecutors, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Business Competition Supervisory Commission, and so on throughout relevant.
3. Mechanism Submission of Reports
   Delivery mechanisms of reporting violations by the Reporting basically done through formal channels, namely through Direct Supervisors in stages, directorates and related functions, but if the Reporting view means the complaint is not effective or there is doubt, the Rapporteur can channel reporting violations through channel WBS
   Reporting mechanism for addressing violations through channel WBS implemented in accordance with the flowchart as contained in the Management Structure WBS.
4. Administrative immunity
   The Company is committed to developing a culture that encourages employees to report violations dare he knows. This is done by giving immunity to the sanctions administratikepada The Rapporteurs are acting in good faith.
   The policy above can be given to the Rapporteur who have never done weight violation, or when forced to be involved in the offense, but in good faith reported violations. Immunity to administrative sanctions are only valid in the Company.
5. Communication With Reporting
   Communication with the mandate will be carried out

(satu) petugas yaitu Petugas Sub-Unit Administrasi WBS yang menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

through one (1) officer that officer WBS Administration Sub-Unit that receives reports of violations. In this communication Rapporteur will also obtain information regarding the handling of the reported cases, whether actionable or not.

Struktur Pengelolaan WBS

Dalam penyusunan infrastruktur WBS, hal yang terpenting adalah kejelasan dari akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan WBS di Perusahaan.

Management Structure WBS

In preparing the WBS infrastructure, the most important thing is the clarity of accountability and responsibility to encourage the implementation of WBS in the Company.

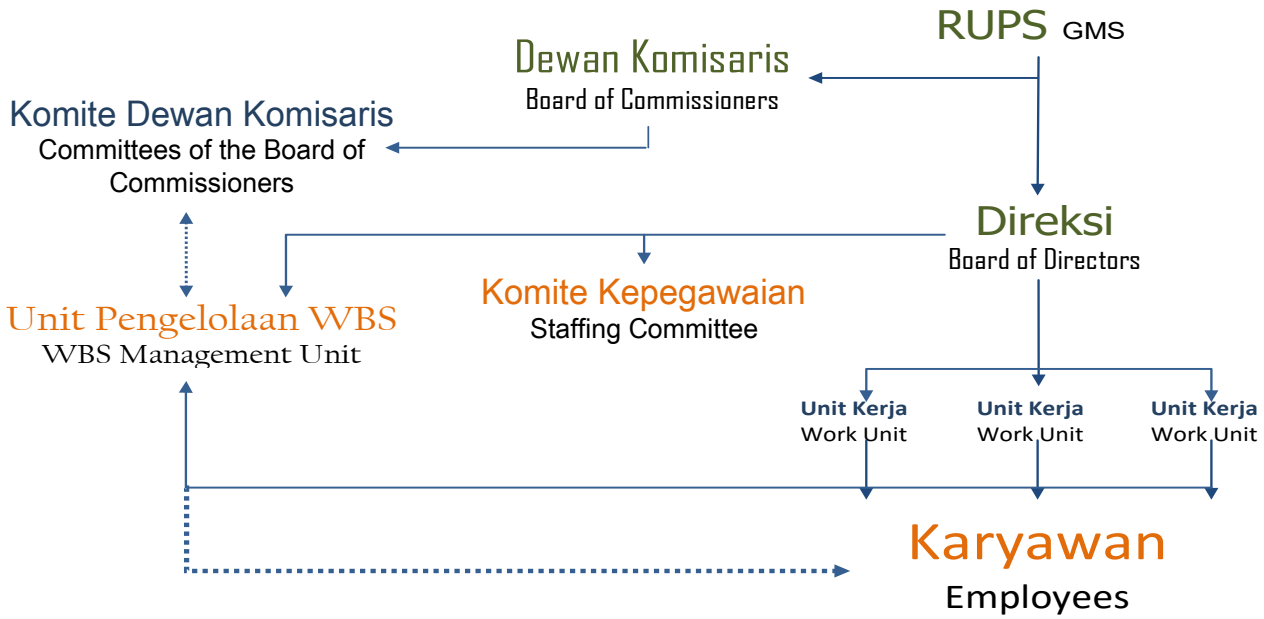

1. Direksi
   Bertanggung jawab atas efektivitas rancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan penyelenggaraan WBS secara keseluruhan serta berkewajiban menetapkan arahan dan melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan WBS berjalan dengan baik
2. Dewan Komisaris
   Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan. Pemantauan pelaksanaan WBS dapat diserahkan kepada Komite Dewan Komisaris.
3. Unit Pengelola WBS
   Unit yang dibentuk dan ditetapkan Direksi untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Pelapor untuk melaporkan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas Pelaporan pelanggaran. Unit Pengelola WBS harus independen dari operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses

1. Board of Directors
   Responsible for the effectiveness of the design, implementation and maintenance of the overall operation of the WBS and the duty set landing and take measures to ensure that all activities of the organization runs well WBS
2. board of Commissioners
   Is responsible to supervise the adequacy and effectiveness of the implementation of the WBS in the Company. Monitoring the implementation of the WBS may be submitted to the Committee of the Board of Commissioners.
3. WBS Unit business
   The units were formed and assigned the Board of Directors to organize and manage the communication lines for the Rapporteur to report on early indications, clarifying start and conduct investigations into violations Reporting. WBS Unit business should be independent of the company's operations daily and have access to the highest leader of

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

kepada Pimpinan tertinggi perusahaan.
Pengelolaan WBS dikoordinasikan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibantu oleh Sekretaris Perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) elemen utama, yaitu:
a. Sub-Unit Administrasi WBS; dan
b. Sub-Unit Investigasi

4. Komite Kepegawaian
Merupakan Komite Khusus yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi untuk mengkaji laporan-laporan pelanggaran dan memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Direksi untuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilkukan Terlapor.

the company.
WBS management is coordinated by the Internal Audit Unit (IAU), assisted by the Secretary of the Company consisting of two (2) main elements, namely:
a. WBS Administration Sub-Unit; and
b. Sub-Unit of Investigation

4. Personnel Committee
Formed a Special Committee and the Board of Directors established under Decision to investigate reports of violations and give consideration / recommendation to the Board for sanctions against the violation dilkukan Party.

Jumlah Pengaduan Tahun 2016
Hasil penanganan pelaporan pelanggaran melalui media WBS selama tahun 2016:

Number of Complaints 2016
Results handling violations through media reporting WBS during 2016:

Tahun Year	Media Pelaporan *Reporting Media*			Kategori Pelaporan *Reporting Category*		laporan yang Ditindaklanjuti *Followed-up Report*	Status
	Surat *Letter*	Call Center	Website	Fraud	Non Fraud		
2016	1	-	-	1	-	1	Selesai/ Finished

Pada tahun 2016, telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan WBS oleh Satuan Pengawas Intern berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Utama No : ST/1.2/530/IV/2016 tanggal 15 Juni 2016. Hasil evaluasi dimuat dalam Laporan Hasil Audit (LHA) No. LHA/I.2/52/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan tindak lanjut atas rekomendasi dimuat dalam Surat Nomor : RHS/I.2/719/ VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016.

Tindak Lanjut Pelaporan WBS Tahun 2016
Selama Tahun 2016, terdapat 1 (satu) pelaporan pelanggaran melalui WBS yaitu:

1. Informasi WBS dari Unit Kebun Cikumpay
Pokok permasalahan yaitu informasi upah pekerjaan overlump di Crumb Rubber (CR) yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan penerimanya.
Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bagian Satuan Pengawasan Intern dengan melakukan audit terhadap Unit Kebun Cikumpay dengan kesimpulan bahwa upah pekerjaan overlump terkait jumlah dan penerimanya telah sesuai dengan ketentuan dan dicatatkan dengan administrasi yang sesuai sehingga tidak dapat disebutkan ada pelanggaran yang terjadi.

In 2016, evaluations have been conducted on the implementation of WBS by the Internal Control Unit based on the Task of Managing Director of No: ST / 1.2 / 530 / IV / 2016 dated June 15, 2016. The results of the evaluation contained in the Audit Report (LHA) No. LHA / I.2 / 52 / VIII / 2016 dated August 19, 2016 and follow-up on the recommendations contained in the Letter Number: RHS / I.2 / 719 / VIII / 2016 dated August 27, 2016.

Follow-up Reporting WBS 2016
During 2016, there is one (1) reporting violations through WBS namely:

1. Information from Units Gardens WBS Cikumpay
The main problem is information overlump wage jobs in Crumb Rubber (CR) which is not in accordance with the allocation and the recipient.
The report had been followed up by the Internal Audit Section to conduct an audit of Units Gardens Cikumpay with the conclusion that wages overlump work regarding the number and the recipient complies with the terms and registered with the appropriate administration that can not be mentioned no violations.

Penyelesaian Permasalahan Hukum
Settlement of Legal Issues

Mekanisme penanganan perkara hukum yang dihadapi perusahaan telah diatur dalam Surat Edaran Direksi PTPN VIII Nomor : SE/I.1/30/I/2014 tanggal 23 Januari 2014. Perkara hukum yang dihadapi perusahaan selama tahun 2014 sebagai berikut:

The mechanism of handling lawsuits facing the company has set in Circular Directors PTPN VIII Number: SE / I.1 / 30 / I / 2014 dated January 23, 2014. Case law faced by the company during 2014 as follows:

No.	Pokok Perkara *Principale Case*	Status Penyelesaian *Completion Status*	Dampak Terhadap Perusahaan *Impact on Company*	Sanksi *Sanctions*
1	17/Pdt.G/2016/PN.Pwk Blok Campaka Kebun Cikumpay seluas 52,9 Ha Tergugat I : PTPN VIII Block Campaka Cikumpay Gardens area of 52.9 ha Defendant I: PTPN VIII	Saat ini proses persidangan dalam tahapan penyampaian Replik dari Penggugat Currently the trial process in the delivery phase of the Plaintiff's Reply		
2	772/Pdt.G/2016/PN.TNG Lahan diserpong yang telah dilepas kepada PT. Supra Veritas	Sedang dalam proses persidangan di PN Tangerang, dalam tahap Duplik Currently in Tangerang district court proceedings, in step Rejoinder		
3	18/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pwk Perlawanan terhadap sita eksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 7 Juni 2012 No : 045/2000/Eks jo. Penetapan Sita Eksekusi PN Purwakarta No: 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2012 dan Berita Acara Sita Eksekusi No : BA.ST/Del.Pdt. Eks/2012/PN.Pwk tanggal 28 Juni 2012 Turut Terlawan : PTPN VIII The resistance to the confiscation execution Purwakarta District Court dated June 7, 2012 No. 045/2000 / Ex-jo. Determination of Execution PN Sita Purwakarta No: 01 / Pen.Pdt / Del.Sita.Eks / 2012 and the Minutes of Sita Execution No: BA.ST/ Del.Pdt.Eks/2012/PN.Pwk dated June 28, 2012 Participate challenged: PTPN VIII	Tingkat 1 di PN Purwakarta, Putusan Sela mengabulkan eksepsi Terlawan (Augustins, Cs) Putusan banding menguatkan putusan PN Purwakarta dan saat ini sudah diajukan kasasi di Mahkamah Agung RI Level 1 in the PN Purwakarta, Injunctions granted an exception is challenged (Augustins, Cs) appeal ruling upheld the ruling PN Purwakarta and has now filed an appeal in the Supreme Court		
4	09/Pdt.G/2016/PN.Cbd Kebun Cibungur Afdeling Ubrug Desa Ubrug, Kecamatan Warung Kiara seluas 630 Ha Tergugat I : PTPN VIII Gardens Cibungur Cambodgien Ubrug Ubrug Village, District Warung Kiara area of 630 Ha Defendant I: PTPN VIII	Sudah diputus di PN Cibadak, Amar putusan menerima gugatan Penggugat (mengalahkan PTPN) namun pada tingkat banding dimenangkan oleh PTPN VIII dan saat ini pihak lawan sudah mengajukan Kasasi di MA RI. PN has been disconnected at Cibadak, Amar verdict accept Plaintiff (beat PTPN) but on appeal was won by PTPN VIII and this time the opponent has filed a cassation to the Supreme Court of Indonesia.		

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

No.	Pokok Perkara *Principale Case*	Status Penyelesaian *Completion Status*	Dampak Terhadap Perusahaan *Impact on Company*	Sanksi *Sanctions*
5	47/Pdt.G/2014/PN.Cjr Kebun Panglejar Afdeling Rajamandala seluas + 150 Ha dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 75 Milyar Tergugat I : PTPN VIII Gardens Panglejar Cambodgien Rajamandala area + 150 Ha and punitive damages amounting to Rp. 75 billion Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Cianjur dan dimenangkan PTPN VIII (Inkracht). Has been disconnected in Cianjur District Court and won PTPN VIII (inkracht)		
6	05/Pdt.G/2016/PN.Grt Permohonan 20 % lahan yang dikelola PTPN VIII Kebun Bunisari lendra Tergugat I : PTPN VIII Request 20% of land managed by PTPN VIII Gardens Bunisari Lendra Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Garut dan dimenangkan oleh PTPN VIII (Inkracht) Has been disconnected in Garut District Court and won by PTPN VIII (inkracht)		
7	06/Pdt.G/2014/PN.Rkb Kebun Cisalak Baru Blok Terbang II Desa Pasir Tanjung seluas 1,27 Ha yang terkena proyek bendungan karian Tergugat I : PTPN VIII New Cisalak Gardens Block Fly II Pasir Tanjung area of 1.27 hectares affected by the dam project Karian Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dimenangkan PTPN VIII (Inkracht). It has been decided in the District Court and won Rangkasbitung PTPN VIII (inkracht)		
8	07/Pdt.G/2014/PN.Rkb Kebun Cisalak Baru Blok Terbang II Desa Pasir Tanjung seluas 2 Ha yang terkena proyek bendungan karian Tergugat I : PTPN VIII New Cisalak Gardens Block Fly II Pasir Tanjung 2 hectares affected by the dam project Karian Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan dimenangkan PTPN VIII (Inkracht). It has been decided in the District Court and won Rangkasbitung PTPN VIII (inkracht)		
9	42/Pdt.G/2013/PN.Cbn Kebun Gunung Mas Afdeling Cikopo Selatan yang masuk dalam sertifikat HGU Nomor 277 dan 278 Tergugat I : PTPN VIII Gardens Gunung Mas Cambodgien South Cikopo included in the concession certificate No. 277 and 278 Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Cibinong dan dimenangkan oleh PTPN VIII (Inkracht) Has been disconnected in Cibinong District Court and won by PTPN VIII (inkracht)		

No.	Pokok Perkara *Principale Case*	Status Penyelesaian *Completion Status*	Dampak Terhadap Perusahaan *Impact on Company*	Sanksi *Sanctions*
10	199/Pdt.G/2013/PNCbn Kebun Cikasungka Desa Banyuresmi Blok Cirangsad seluas 9,2045 Ha Tergugat I : PTPN VIII Gardens Block Cirangsad Cikasungka Banyuresmi Village area of 9.2045 ha Defendant I: PTPN VIII	Telah diputus di Pengadilan Negeri Cibinong dan dimenangkan oleh PTPN VIII sampai pada tingkat banding (Inkracht) Has been disconnected in Cibinong District Court and won by PTPN VIII to the appellate level (inkracht)		
11	66/G/2016/PTUN.BDG Surat BPN Kab. Sukabumi kepada Budi Munawar Khutomi, dkk perihal penolakan permohonan hak milik terhadap tanah seluas 75 Ha di Afdeling Tenjoresmi Tergugat Int : PTPN VII BPN Surat district. Sukabumi to Budi Munawar Khutomi, et al regarding the rejection of applications of property rights to the land area of 75 hectares in Afdeling Tenjoresmi Defendant Int: PTPN VII	Telah diputus pada tingkat pertama dan banding dengan putusan mengalahkan BPN, sehingga BPN sudah mengajukan upaya kasasi ke MA RI. Has been disconnected at first instance and appeal to the decision defeat BPN, so that BPN has filed an appeal to the Supreme Court RI efforts.		

Dampak terhadap Perusahaan
Permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan selama tahun 2016 pengaruhnya terhadap Perusahaan tidak signifikan karena telah dilakukan mitigasinya.

Impact on Companies
Legal issues faced by the company during 2016 were not significant influence on the company because it has done its mitigation.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Corporate Information and Data Access

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan informasi perusahaan, PTPN VIII telah menerbitkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Perusahaan Nomor: KEP/ I.1/707/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.

Media Informasi Publik

PTPN VIII menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik melalui media informasi berupa:

a. Portal resmi Perusahaan : website perusahaan : www.pn8.co.id;
b. Dokumen publik seperti Laporan Tahunan (Annual Report);
c. Papan pengumuman di Kantor Pusat dan Kantor Unit Kerja;
d. Bulletin internal, standing banner, leafleat, dsb.

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan informasi perusahaan kepada publik, telah ditetapkan Surat Edaran Direksi PTPN VIII Nomor : SE/I.1/868/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Pengelolaan dan Pemutakhiran Portal Perusahaan. Kebijakan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut : Pengelola Portal Perusahaan yang dilaksanakan Bagian yang membidangi teknologi informasi, kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran situs (update official website) seperti perbaikan tampilan, upload berita, forum dialog seputar kegiatan perusahaan, upload peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan, galeri foto kegiatan perusahaan dan lain-lain.

Under Law No. 14 of 2008 on Public Information, every public agency shall provide, deliver and / or publish public information under its authority to the Public Information, in addition to information that is excluded in accordance with the provisions, as well as build and develop information systems and documentation for managing public information properly and efficiently so that it can be accessed easily. In order to improve the effectiveness of information management company, PTPN VIII had issued Decree PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Guidelines for Management of Corporate Information Number: KEP/I.1/707/X/2012 dated October 18, 2012.

Media Public Information

PTPN VIII provides access to enterprise information and data to the public through the media information such as:

a. Official Portal Company: company website: www.pn8.co.id;
b. Public documents such as the Annual Report (Annual Report);
c. Noticeboard at the Head Office and the Office of Work Unit;
d. Internal Bulletin, standing banners, leafleat, etc.

To improve the effectiveness of the management of corporate information to the public, the Board of Directors has determined Circular PTPN VIII Number: SE / I.1 / 868 / XII / 2012 dated December 14, 2012 regarding the Company's Management Portal Updates. The policy must contain the following: business conducted Portal Companies Section in charge of information technology, management and updating of the site (updated official website) as improved display, upload news, a forum for dialogue about the activities of the company, the upload rules and regulations relating to company, corporate events photo gallery and others.

Pedoman Perilaku Etika
Code of Conduct

Pedoman Perilaku Etika (code of conduct) merupakan salah satu GCG Manual yang memuat nilai-nilai etika berusaha dan wajib disusun dalam rangka penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. PTPN VIII berupaya menegakkan integritas dan nilai etika sebagai dasar dalam beroperasi dan sebagai bagian dari lingkungan pengendalian yang sehat dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Perusahaan.

Penetapan Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Insan PTPN VIII untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianggap baik. Penerapan dari nilai-nilai tersebut diyakini akan dapat menciptakan budaya perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan citra yang positif dan nilai tambah bagi perusahaan.

Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII berlaku bagi seluruh Insan PTPN VIII, dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, serta para pemangku kepentingan perusahaan (stakeholders). Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII memuat hal-hal mengenai:

1. Kewajiban Melaksanakan Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII.
2. Visi dan Misi.
3. Budaya Perusahaan.
4. Kewajiban dan Larangan Bagi Insan PTPN VIII.
5. Perilaku Insan PTPN VIII : Benturan Kepentingan, Suap, Imbalan, Hadiah, Jamuan Bisnis, Sumbangan, Penggunaan Aset dan Sumberdaya Perusahaan, Pengelolaan Informasi Perusahaan, Aktivitas Politik.
6. Hubungan Insan PTPN VIII dengan stakeholders.
7. Kepatuhan atas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Penegakan Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII.

Internalisasi Pedoman Perilaku

Internalisasi Pedoman Perilaku Etika Perusahaan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi secara terencana ke seluruh unit kerja di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII melalui berbagai media antara lain : penyebaran buku saku, leaflet dan juga dimuat dalam website perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Setiap insanPT Perkebunan Nusantara VIII dapat meminta penjelasan atasannya apabila terdapat ketidakjelasan berperilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Penegakan Pedoman Perilaku Etika PTPN VIII

Dalam rangka menegakkan Pedoman Perilaku PTPN VIII, upaya

Guidelines for Ethical Conduct (Code of Conduct) is one of the GCG Manual containing ethical values sought and must be prepared in order to implement GCG consistently and continuously. PTPN VIII seeks to uphold the integrity and ethical values as the basis for the operation and as part of a healthy control environment with regard to the provisions, and norms as well as the Company's articles.

Determination of PTPN VIII Ethics Code of Conduct is intended to provide a reference to the personnel PTPN VIII to behave in accordance with the basic values that are considered good. The application of these values is believed to be able to create a culture of enterprise that will ultimately provide a positive image and added value for the company.

PTPN VIII Ethics Code of Conduct applies to all personnel PTPN VIII, starting from the Board of Commissioners, Directors and Employees, as well as the company's stakeholders (stakeholders). Code of Conduct Ethics PTPN VIII contains matters concerning:

1. Implement the Code of Conduct Ethical Obligation PTPN VIII.
2. Vision and Mission.
3. Corporate Culture.
4. Obligations and Don'ts For Individuals PTPN VIII.
5. Behavior Insan PTPN VIII: Conflict of Interest, Bribery, Rewards, Gifts, Entertainment Business, Contribution, Asset and Resource Usage Company, Corporate Information Management, Political Activities.
6. Relationship with stakeholders Insan PTPN VIII.
7. Compliance with Laws and Regulations applicable legislation.
8. Enforcement Code of Conduct Ethics PTPN VIII.

Internalization of Code of Conduct

Internalization of Corporate Ethics Code of Conduct implemented in the form of socialization in a planned manner to all work units within the PT Perkebunan Nusantara VIII through various media such as: number of booklets, leaflets and also posted on the company's website. Dissemination conducted by the Corporate Secretary. Every human PT Perkebunan Nusantara VIII can ask for clarification if there are ambiguities superiors behaved with regard to the implementation of tasks and responsibilities.

Enforcement of the Code of Conduct Ethics PTPN VIII

In order to enforce the Code of Conduct PTPN VIII, the efforts

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

yang dilakukan antara lain:

1. PenandatangananPakta Integritas secara berkala setiap tahun oleh Insan PTPN VIII.
2. Penetapan kebijakan perusahaan mengenai Kode Etik melalui Keputusan Direksi Nomor: KEP/I.1/755/XI/2013 tanggal 28 November 2013, yang didalamnya memuat larangan dan kewajiban Insan PTPN VIII serta mekanisme penangganan pelanggaran kode etik.
3. Penetapan kebijakan perusahaan mengenai penanganan benturan kepentingan melalui Keputusan Direksi PTPN VIII (Persero) Nomor : KEP/I.1/404/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.
4. Penetapan kebijakan perusahaan mengenai pengendalian gratifikasiSurat Edaran Direksi PTPN VIII Nomor : SE/I.1/290/VII/2016tanggal 6 Juli 2016 Tentang Gratifikasi Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1436 H.
5. Penetapan kebijakan perusahaan mengenai Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).
6. Dalam hal pengenaan sanksi, Insan PTPN VIII yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PTPN VIII. Insan PTPN VIII yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran dan tidak melaporkan, dianggap melakukan pelanggaran yang bobot pelanggarannya dianggap melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
7. Pembentukan Komite Kepegawaian yang bertugas untuk mengevaluasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Insan PTPN VIII dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait sanksi atas pelanggaran kode etik sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/755/XI/2013.

made, among others:

1. The signing of the Integrity Pact regularly every year by Insan PTPN VIII.
2. Determination of company policy regarding Directors Code of Conduct through Decree No. KEP / I.1 / 755 / XI / 2013 dated November 28, 2013, which includes the prohibition and duty personnel penangganan PTPN VIII and mechanisms code violations.
3. Determination of the company's policy regarding the handling of conflicts of interest by the Decision of the Board of Directors of PTPN VIII (Persero): KEP / I.1 / 404 / VI / 2012 dated June 26, 2012.
4. Determination of company policy on gratuities controlDirectors of PTPN VIII Circular Letter No. SE / I.1 / 290 / VII / 2016 dated July 6, 2016 About Gratification in the Context of Eid al-Fitr 1436 H.
5. Determination of company policy regarding Violation Reporting System Guidelines (Whistleblowing System).
6. In the case of the imposition of sanctions, Insan PTPN VIII proven violation of Code of Conduct be penalized in accordance with the regulations of the PTPN VIII. Insan PTPN VIII proved any violations and did not report, commits an offense who weighs offense commits an offense and can be penalized.
7. Formation Personnel Committee whose task is to evaluate the code violations committed by personnel PTPN VIII and provide recommendations to the Board of Directors related to sanctions for violations of the code of conduct in accordance Directors Decision No. KEP / I.1 / 755 / XI / 2013

Penanganan Keluhan Pelanggan
HANDLING CUSTOMER COMPLAINTS

Dalam rangka meningkatkan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders, perusahaan telah menetapkan prosedur penanganan keluhan pelanggan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP/I.1/484/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Klain Pelanggan atas Produk PTPN VIII (Persero) dan Surat Edaran Direksi Nomor : SE/I.1/354/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 perihal Pedoman Penanganan Keluhan.

Mekanisme penanganan keluhan pelanggan sebagai berikut :

1. Keluhan dapat disampaikan secara lisan (melalui telepon atau secara langsung datang) atau secara tertulis (melalui surat, e-mail, dan media massa) kepada Sekretaris Perusahaan atau bagian lain di Kantor Pusat atau bagian administratasi unit kerja/kebun untuk keluhan operasional kebun/unit.
2. Bagian penerima keluhan memastikan bahwa keluhan yang diterima sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya dalam menangani keluhan tersebut. Jika keluhan tersebut di luar kewenangan dan tanggung jawabnya, maka bagian tersebut mendistribusikan keluhan tersebut kepada bagian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan keluhan.
3. Sekretaris Perusahaan atau bagian lain di Kantor Pusat atau bagian administrasi di kebun/unit mencatat keluhan tersebut dalam laporan keluhan yang berisi informasi mengenai waktu penyampaian keluhan, pihak yang menyampaikan keluhan, media penyampaian keluhan, isi keluhan, maksud dan tujuan disampaikannya keluhan.
4. Bagian penanggung jawab keluhan sesuai dengan kewenangannya, mempersiapkan dan memeriksa dokumen pendukung, mengidentifikasi, dan menganalisis keluhan tersebut dan kemudian memutuskan apakah keluhan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak.
5. Jika keluhan tersebut layak dan hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya teknis operasional, maka penyelesaiannya cukup dilaksanakan oleh bagian penanggung jawab keluhan. Namun, apabila keluhan tersebut bersifat strategis yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting yang signifikan, maka keluhan tersebut harus disampaikan kepada Direksi untuk dilaksanakan penanganannya bersama dengan bagian penanggung jawab.
6. Bagian penanggung jawab dan/atau Direksi melaksanakan tindakan perbaikan atas keluhan tersebut dan hasil perbaikan serta jawaban atas keluhan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
7. Sekretaris Perusahaan menyampaikan tanggapan, penjelasan, atau keputusan resmi Direksi kepada pihak yang

In order to increase the value-added relationship to the company and its stakeholders, the company has established procedures for handling customer complaints as Directors Decree No. KEP / I.1 / 484 / VII / 2012 dated July 6, 2012 on the Establishment of Complaints Handling Team and Customer's claims on products PTPN VIII (Persero) and the Directors Circular Letter No. SE / I.1 / 354 / III / 2011 dated March 24, 2011 regarding Guidelines for Handling Complaints.

Customer complaint handling mechanisms as follows:

1. Complaints may be submitted orally (by phone or in person to come) or in writing (by mail, e-mail, and mass media) to the Corporate Secretary or other parts of the Central Office or part administratasi units / garden to the complaint operational gardens / unit ,
2. The reception complaints ensure that the complaints received in accordance with the authority and responsibility he has in dealing with the complaint. If the complaint is outside the authority and responsibility, then that part of the complaint distribute to the part that has the authority and responsibility in resolving the complaint.
3. Company Secretary or other parts of the Central Office or the administration in the garden / unit recorded the complaint in a complaint report which contains information regarding the submission of the complaint, the complainant, media grievance, the contents of the complaint, the complaint conveys intent and purpose.
4. Section in charge of complaints in accordance with the authority, preparing and checking the supporting documents, identify, and analyze the complaint and then decide whether the complaint is worthy to be followed or not.
5. If the complaint is decent and only about things that are technically operational, then the solution is quite carried out by the section in charge of complaints. However, if the complaint is ideally expected to produce significant impacts are significant, then the complaint must be submitted to the Board of Directors to be implemented together with part handling responsibilities.
6. Section responsible and / or the Board of Directors to implement the corrective action on the complaint and the result of improvements as well as the answers to the complaint submitted to the Secretary of the Company.
7. Company Secretary submit comments, explanations, or official decision the Board of Directors to interested

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Manajemen Management report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

berkepentingan.

8. Masing-masing bagian penanggung jawab keluhan mendokumentasikan semua dokumen penanganan keluhan tersebut, sebagai bahan masukan untuk perbaikan aktivitas perusahaan selanjutnya.

PT Perkebunan Nusantara VIII menyediakan berbagai media/ saluran yang dapat digunakan oleh stakeholders dalam menyampaikan keluhannya, masukan, saran, ataupun compliment baik melalui surat, email ataupun website ke alamat:

PT Perkebunan Nusantara VIII
Jl. Sindangsirna No.4, Bandung 40153
Telepon : (022) 2038966-69
Fax : (022) 20314455
email : ptpn8@pn8.co.id
website : www.pn8.co.id

Penerimaan Keluhan dari Pelanggan

Pada tahun 2016, perusahaan telah melaksanakan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen diantaranya keluhan dari pemasok, pembeli dan karyawan. Rekomendasi hasil survey telah ditindaklanjuti dan hasil survey menunjukan tingkat kepuasan yang baik.

parties.

8. Each section in charge of the complaint document all such complaints handling documents, as inputs for further improvement of the company's activities.

PT Perkebunan Nusantara VIII provides a variety of media / channels that can be used by stakeholders to submit complaints, feedback, suggestions, or compliment either by mail, email or website address:

PT Perkebunan Nusantara VIII
Jl. Sindangsirna 4, Bandung 40153
Phone: (022) 2038966-69
Fax: (022) 20314455
email: ptpn8@pn8.co.id
website: www.pn8.co.id

Acceptance of Customer Complaints

In 2016, the company has conducted a survey to determine the level of customer satisfaction / customer including complaints from suppliers, buyers and employees. Recommendations have been followed up the survey results and the survey showed a good level of satisfaction.

Sepanjang tahun 2016 perusahaan telah menerima keluhan dari stakeholders, meliputi:

Throughout 2016, the company had received complaints from stakeholders, including:

Tahun *Year*	Jumlah Keluhan *Number of Complaints*			Keluhan yang Ditindaklanjuti *Complaints are followed up*	Status Penyelesaian *Status completion*
	Karyawan *Employee*	Pembeli *Buyer*	Pemasok *Suppliers*		
2016	-	22	-	22	Selesai / Finished

1. Keluhan dari karyawan
   Secara umum keluhan dari karyawan bersifat pengaduan yang berkaitan dengan substansi kepegawaian. Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi dengan Bagian Sumber Daya Manusia untuk dapat ditindaklanjuti. Khusus apabila keluhan berkenaan dengan kesesuaian lingkungan kerja, dapat diberikan Surat Keputusan (SK) Mutasi Karyawan setelah melalui pertimbangan Manajemen.
2. Keluhan dari pelanggan
   Keluhan yang disampaikan oleh pelanggan umumnya berkaitan dengan proses pengiriman dan kualitas produk perusahaan. Keluhan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

1. Complaints from employees
   In general complaints from employees are complaints related to staffing substance. Every employee is given the opportunity for an audience with the Human Resources Department to be actionable. Special if a complaint regarding the suitability of the work environment, can be given Decree (SK) Mutation employees after consideration of Management.
2. Complaints from customers
   Complaints by customers are generally associated with the delivery process and the quality of the company's products. The complaints are followed up in accordance with the applicable provisions in the company.

3. Keluhan dari pemasok
Sepanjang tahun 2016 tidak menerima keluhan dari pemasok yang terdaftar sebagai rekanan perusahaan.

3. Complaints from suppliers
Throughout 2016 did not receive complaints from suppliers who are registered as partners.

Realisasi Program Kerja GCG Tahun 2016
GCG Work Program Realization In 2016

No	Uraian *Description*
1	Target (Sasaran) Kerja : Target (Target) Work:
	Tercapainya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, yang ditunjukan dengan Nilai/Skor Hasil Penilaian/Evaluasi Penerapan GCG. Achieving the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously, which is indicated by the Value / Score Assessment / Evaluation GCG.
2	Uraian : Description:
	a. Melakukan pengkajian terhadap kebijakan (sistem, prosedur, pedoman kerja) di bidang kepatuhan dan good corporate governance dan menyusun usulan/rekomendasi perbaikan kepada Direksi. Conduct an assessment of policies (systems, procedures, guidelines) in the areas of compliance and good corporate governance and prepare proposals / recommendations for improvement to the Board.
	b. Sosialisasi kebijakan (sistem, prosedur, pedoman kerja) di bidang kepatuhan dan Good Corporate Governance. Socialization policies (systems, procedures, guidelines) in the areas of compliance and good corporate governance.
	c. Penyusunan Laporan Preparation of reports
	1. Penyusunan Laporan GCG Tahun 2016. Preparation of GCG Report 2016.
	2. Penyusunan bahan kegiatan Sekretaris Perusahaan untuk Laporan Triwulanan. Preparation of materials for the Corporate Secretary of activities Quarterly Reports.
	3. Penyusunan Laporan Evaluasi GCG (Self Assessment) Tahun 2016. Preparation of Evaluation Report GCG (Self Assessment) 2016.
3	Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengukuran Penerapan GCG Tahun 2014 Following up on Recommendations Results of Measurement GCG 2014
	a. Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti = 19 Recommendations unfinished actionable = 19
	b. Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti = 38 The recommendation has been completed actionable = 38
4	Pengukuran Penerapan GCG Measurement GCG
	a. Menindaklanjuti rekomendasi Hasil Assessment GCG Tahun 2014. GCG Assessment Results to follow the recommendations of 2014
	b. Pelaksanaan Evaluasi (Self Assessment) GCG 2016. Implementation Evaluation (Self Assessment) GCG 2016,
5	Pengembangan SDM Human Resource development
	a. Pelatihan GCG GCG Assessment Results to follow the recommendations of 2014
	b. Pelatihan Manajemen Risiko Risk Management Training

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

&

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Partnership Program and Community Development

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Sesuai Visi perusahaan yang "peduli lingkungan" seperti ditegaskan melalui misi "Menghasilkan produk bermutu dan ramah lingkungan, mengelola perusahaan dengan menerapkan good governance, mengoptimalkan seluruh sumber daya secara mandiri maupun bersama-sama mitra strategis, mengedepankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) seiring dengan kemajuan perusahaan, merupakan bentuk penegasan komitmen Kami terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Kepedulian Kami terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat, Kami berkewajiban memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat karena kami percaya masyarakat memiliki nilai budaya lokal yang harus kita lestarikan bersama.

CSR merupakan bagian dari program jangka panjang perusahaan terhadap perbaikan kualitas sosial dan lingkungan dan salah satu upaya untuk menambah nilai positif (membangun Citra) perusahaan dimata para pemangku kepentingan. CSR dapat dimaknai juga sebagai komitmen Kami dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan. Kami memiliki komitmen untuk menjaga standar tertinggi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, Kami turut aktif dalam penerapan prinsip CSR pada pengelolaan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar perkebunan, sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Keputusan Direksi No.KEP/I.1/344/III/2011 tanggal Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP/III.1/492/VIII/2013 tanggal 31 Juli 2013, Tentang

Appropriate Vision of the company that is "environmentally concerned" as affirmed through the mission "Produce quality products and environmentally friendly, manage the company by applying good governance, optimize all resources independently or together strategic partners, promote Social and Environmental Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) in line with the company's progress, is a form of affirmation of our commitment to social and environmental conditions.

Our concern for the community and the environment is one form of corporate social responsibility. As part of the community, We are obliged to pay attention and protect the interests of the community because we believe people have local cultural values that we must preserve together.

CSR is part of the company's long-term program of social and environmental quality improvement and one of the efforts to add a positive value (build image) company in the eyes of the stakeholders. CSR can also be interpreted as our commitment to contribute to sustainable economic development to improve the quality of life of all stakeholders. We are committed to maintaining the highest standards of Corporate Governance implementation as one of the main prerequisites for business success and sustainability.

As a company engaged in plantation, we are active in the implementation of CSR principles on corporate management as a form of social and environmental responsibility to the community, especially the communities around the plantation, in accordance with Limited Liability Company Law No.40 of 2007 and Directors Decree No.KEP /I.1/344/III/2011 dated March 2011 on Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility. Based on Directors Decree No. KEP / III.1 / 492 / VIII / 2013 dated July 31, 2013, Regarding the improvement of the Organizational Structure of PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PKBL Section is omitted. Implementation of PKBL's operational activities

penyempurnaan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), Bagian PKBL ditiadakan. Pelaksanaankegiatan operasional PKBL berada di bawah Sekretaris Perusahaan melekat fungsinya pada urusan Humas dengan pertanggungjawaban di bawah koordinasi Direktur SDM & Umum.

Secara berkesinambungan pelaksanaan program-program CSR PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) terus ditingkatkan kualitasnya dan diukur tingkat pencapaian hasilnya atau manfaatnya serta berharap bahwa seluruh program CSR PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mempunyai nilai manfaat bagi para stakeholder sesuai visi perusahaan.

Program CSR dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar Perusahaan, dengan tujuan antara lain :

a. Membangun tata kelola perusahaan yang baik.
b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
c. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana dilingkungan perusahaan.
d. Terbangunnya reputasi dan citra yang baik bagi perusahaan.
e. Mengurangi tingkat risiko (keamanan) terhadap aktivitas perusahaan.
f. Media bagi perusahaan untuk berkontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan.
g. Sarana belajar dan bereksperimen berbagai program pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat yang efektif.
h. Sarana mengembangkan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak secara saling menguntungkan.

Wilayah Pelaksanaan program CSR Kami adalah sebagai berikut:

1. Pembagian wilayah berdasarkan letak geografis, yakni:
   a. Wilayah 1, Desa atau kelurahan tempat unit kerja/ kebun berada;
   b. Wilayah 2, Kecamatan tempat unit kerja/kebun berada;
   c. Wilayah 3, Kota/Kabupaten tempat unit kerja/kebun unit berada; dan
   d. Wilayah 4, Provinsi tempat kantor unit kerja/kebun berada.

2. Wilayah di luar kategori di atas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan khusus (Partisipasi) dan bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun kementerian BUMN, misalnya korban bencana alam, ketersediaan potensi sumber daya dan partisipasi masyarakat yang potensial untuk dikembangkan.

Anggaran CSR Kami catat sebagai pengeluaran perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), berdasarkan usulan unit kerja/kebun dan atau inisiatif perusahaan. Atas usulan tersebut, setiap tahunnya perusahaan menetapkan anggaran biaya CSR.

under the Corporate Secretary attaches its function to the Public Relations affairs with accountability under the coordination of the Director of Human Resources & General Affairs.

On an ongoing basis, the implementation of CSR programs of PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) continues to be improved in quality and measured the level of achievement of the results or benefits and hope that all CSR programs of PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) can be implemented properly and correctly and have value for the benefit Stakeholders according to the company's vision.

The CSR program is intended to improve the welfare and independence of the communities surrounding the Company, with the following objectives :

a. Building good corporate governance;
b. Develop and improve the social, economic and cultural quality of the community;
c. Develop and improve facilities and infrastructure within the company;
d. Build reputation and good image for the company;
e. Reduce the level of risk (security) of corporate activity;
f. Media for companies to contribute to improving environmental conditions;
g. Means of learning and experimenting with effective environmental management and community development programs;
h. Means to develop partnership relationship with various parties mutually beneficial.

The Implementation Area of our Corporate Social Responsibility (CSR) program is as follows :

1. Regional divisions based on geographical location, namely:
   a. Area 1, Village or kelurahan where the work unit / garden is located;
   b. Region 2, District where work unit / garden is located;
   c. Area 3, City/Regency where the unit / work unit is located; and
   d. Region 4, Province where the office of work unit / garden is located.

2. The Areas outside above categories are implemented on the basis of special considerations (Participation) and in collaboration with the central government as well as the Ministry of SOEs, such as natural disaster victims, potential resource availability and potential community participation to be developed.

CSR Budget We record as corporate expenses in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), based on the proposed work unit / garden and / or corporate initiative. On the proposal, each year the company sets the CSR cost budget.

We started to implement the CSR Program in 2009 with the following categories :

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Kami mulai melaksanakan Program CSR pada tahun 2009 dengan kategori antara lain:

a. **Hibah**. Bantuan berupa barang atau alat yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung misalnya bantuan bencana alam dan sumbangan-sumbangan sejenisnya.
b. **Padat Karya.** Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan (project) tertentu misalnya: pengembangan kebun model, ternak unggul, bibit tanaman unggul.
c. **Penggunaan fasilitas perusahaan**. Memberikan kemudahan penggunaan fasilitas perusahaan seperti lapangan olah raga, sarana ibadah dan sebagainya.
d. **Pusat Informasi.** Menyediakan pusat informasi bagi masyarakat.
e. **Open house**. Membuka kesempatan pada masyarakat untuk mengenal proses bisnis perusahaan.
f. **Bantuan berkelanjutan.** mengalokasi dana untuk beasiswa, pengembangan seni budaya, penulisan buku dan sebagainya.

Ruang lingkup

Ruang lingkup CSR, diantaranya meliputi bidang lingkungan, ketenagakerjaan, HAM, pelayanan dan hak konsumen, serta pembangunan masyarakat, kemitraan dan sebagainya, yang dibagi 2 kelompok yaitu :

1. Eksternal
   Tanggung jawab eksternal dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan yang dikelola oleh Urusan Humas untuk menjaga dan menumbuhkan citra positif perusahaan di mata pemangku kepentigan. Pelaksanaan program eksternal CSR Kami seringkali diintegrasikan dengan program pemerintah, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kemandirian kehidupan masyarakat baik bidang sosial, ekonomi maupun budaya, menguatnya kelembagaan yang mampu mendorong tumbuhnya inovasi.

2. Internal
   Tanggung jawab internal dilaksanakan oleh Unit kerja/ Kebun, dalam rangka mengendalikan ekses negatif dari dampak-dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat dan keluarga karyawan untuk menjaga kelestarian lingkungan perkebunan.

Kami meyakini bahwa Sumber Daya Manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Oleh karenanya kebijakan Kami dalam melaksanakan rekrutmen karyawan untuk lebih mengutamakan masyarakat lokal yang berasal dari lingkungan sekitar perkebunan harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dan keamanan yang memadai.

Keberadaan masyarakat di sekitar perkebunan harus ditunjang oleh fasilitas infrastruktur yang memadai seperti sekolah, posyandu, dan poliklinik.

a. **Grant**. Assistance in the form of goods or tools that can be perceived benefits directly such as natural disaster relief and donations like.
b. **Labor intensive.** Involve the community in certain activities (projects) such as: the development of model gardens, livestock superior, superior plant seeds..
c. **Use of company facilities**. Provide ease of use of corporate facilities such as sports fields, religious facilities and so forth..
d. **Information Center**. Provide an information center for the community.
e. **Open house.** Opening the opportunity to the community to know the company's business processes.
f. **Help swallowing**. Allocate funds for scholarships, art and culture development, book writing and so on.

Scope

The scope of CSR includes environmental, employment, human rights, service and consumer rights, and community development, partnerships and so on, divided into two groups :

1. External
   External responsibilities are carried out by the Corporate Secretary administered by Public Relations to maintain and cultivate a positive image of the company in the eyes of key stakeholders. Implementation of our CSR external program is often integrated with government programs, which aim to improve the quality and independence of people's lives in the social, economic and cultural fields, the strengthening of institutions that are able to foster innovation

2. Internal
   Internal responsibility is carried out by the Work Unit / Garden, in order to control the negative excesses of the company's operational impacts on the community and the families of employees to preserve the environment of the plantation.

We believe that Human Resources is an important asset for the company. Therefore, our policy in implementing employee recruitment to prioritize local communities originating from the surrounding environment of plantations should be balanced with adequate infrastructure and security development.

The existence of communities around the plantation should be supported by adequate infrastructure facilities such as schools, posyandu, and polyclinics.

Bentuk Program CSR

1. Bentuk program internal perusahaan adalah pengelolaan dampak lingkungan hidup (limbah, polusi udara serta kebisingan);
2. Bentuk program eksternal perusahaan adalah pengelolaan hubungan kemasyarakatan, Pelayanan terhadap publik dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian masyarakat, yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
   a) Bidang pendidikan
   b) Bidang Ekonomi Sosial dan Kemasyarakatan
   c) Bidang Kesehatan
   c) Bidang Kamtibmas dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan CSR

Bentuk kegiatan CSR diarahkan terhadap kebutuhan aktual (actual needs) masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode partisipatif, dengan tujuan :

1. Pemberdayaan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pelaku program.
2. Efektifitas dan keberhasilan program
3. Menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap program sehingga keberlanjutannya akan lebih terjamin.
4. Membangun kepercayaan (trust building) terhadap perusahaan dan merupakan embrio mengembangkan kerjasama (kolaborasi) secara lebih luas.

Dalam penerapan program, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipatif (pelibatan unsur masyarakat), “oleh dan untuk masyarakat” dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
2. Mendukung tercapainya kemandirian masyarakat baik sosial, ekonomi maupun kelembagaan
3. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
4. Kemitraan dengan stakeholder lain (Partnership)
5. Pendekatan sosial budaya
6. Tidak bersifat charity (hadiah) semata tetapi berawal dari aktivitas/potensi ekonomi masyarakat yang dikembang kan oleh perusahaan
7. Berfungsi sebagai stimulan dan generator (penggerak) awal dalam pembangunan ekonomi secara lebih luas dalam masyarakat yang berkelanjutan.

Forms CSR Program

1. The company's internal program form is the management of environmental impacts (Waste, air pollution and noise)
2. The form of corporate external program is the manage ment of community relations, Services to the public and community empowerment, improving the quality of life and community self-reliance, covering the following areas:
   a) Educational
   b) Social Economy and Society
   c) Health Sector
   d) Kamtibmas and Environment Sector

CSR Management

The form of CSR activities is directed towards the actual needs (actual needs) of society in accordance with the ability of the company, which in implementation is done by participatory methods, with the aim of:

1. Empowerment through community involvement as program implementers.
2. Effectiveness and success of the program
3. Grow a sense of belonging (sense of belonging) of society to the program So the sustainability will be more assured.
4. Building trust (trust building) to the company and is Embryo develops cooperation (collaboration) more broadly.

In the application of the program, carried out with the following principles :

1. Participatory (community involvement), “by and for society” in the appropriate sense With community needs and implemented by utilizing local labor Coming from the community itself.
2. Support the achievement of social independence of society, economics and also institutional
3. Accountability (can be accounted for)
4. Partnership with other stakeholders
5. Socio-cultural approach
6. Not charity (prize) but originated from activity / economic potential Community developed by the company
7. Functioning as an initial stimulant and generator (mover) in economic development More broadly in a sustainable society.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Partnership Program and Community Development

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara VIII dimulai sejak tahun 1989 dengan sebutan Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi. Tahun 1994 diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai Keputusan Menteri Keuangan no.316/KMK.016/1994.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau disingkat PKBL. Program ini bertujuan mendorong kegiatan dan pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan memberdayakan kondisi social masyarakat.

Realisasi PKBL Tahun 2016

Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII melalui pelaksanaan Program Kemitraan, telah menyalurkan dana sebesar Rp. 3,274 M. Dana tersebut diserap oleh sebanyak 9 mitra binaan yang tersebar dilingkungan kerja PTPN VIII. Bidang usaha yang digeluti oleh mitra binaan bervariasi, mulai dari sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan sektor lainnya.

Mendukung penyaluran bantuan Program Kemitraan tersebut di atas, juga diberikan program dukungan melalui bantuan promosi kepada para Mitra Binaan dalam bentuk pameran, dimana selama tahun 2016 telah diikutsertakan beberapa Mitra Binaan dalam pameran berskala nasional. Adapun untuk program Bina Lingkungan, di tahun 2016 telah disalurkan dana sebesar Rp. 685 Juta.

Program Bina Lingkungan dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pemecahan masalah sosial, melalui bantuan bencana alam, pengadaan sembako murah, pembangunan atau perbaikan sarana umum.

Kegiatan utama PKBL dilakukan baik di kantor pusat maupun di unit kerja kebun, yaitu :
1. Penyaluran dana pinjaman
2. Pembinaan (pendidikan, promosi/pameran)
3. Pemberian bantuan Dana Bina Lingkungan
4. Penagihan piutang
5. Monitoring kegiatan usaha
6. Pelaporan kegiatan PKBL

Realisasi penyaluran Program Kemitraan s.d tahun 2016 sebesar Rp.60,639 Milyar dan realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan sebesar Rp.31,896 Milyar.

Implementation of Partnership Program and Community Development (PKBL) PT Perkebunan Nusantara VIII started since 1989 with the title of Coaching Entrepreneurs Economic Weak and Cooperative. Year 1994 changed to Small Business and Cooperative Development (PUKK) in accordance Minister of Finance Decree no.316 / KMK.016 / 1994.

Furthermore, based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.Per-05 / MBU / 2007 dated 27 April 2007 concerning Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program, changed into Partnership and Community Development Program or abbreviated PKBL. This program aims to encourage the activity and growth of Community Economy and empower the social condition of the community.

Realization of PKBL Year 2016

Year 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII through the implementation of Partnership Program, has disbursed funds of Rp. 3,274 M. The fund is absorbed by as many as nine partners spread across the work environment PTPN VIII. The business sectors covered by the various partners, ranging from trade, industry, agriculture, plantation and other sectors.

Supporting the channeling of the Partnership Program's support above, a support program has also been provided through promotional assistance to Foundation Partners in the form of exhibitions, which during 2016 has been participated by several Partners in a national exhibition. As for the Community Development program, in 2016 has been disbursed funds of Rp. 685 Million.

The Community Development Program is implemented to accommodate the community's need for social problem solving, through natural disaster relief, the provision of cheap food, the development or improvement of public facilities.

The main activities of PKBL are done both at the head office and in the work unit of the garden, namely :

1. Distribution of loan funds
2. Coaching (education, promotion / exhibition)
3. Provision of Environmental Development Fund
4. Billing of accounts receivable
5. Monitoring of business activities
6. Reporting of PKBL activities

The realization of the Partnership Program disbursement in 2016 amounted to Rp.60,639 billion and the realization of the Community Development Program amounting to Rp 31.896 billion

Realiasi Penyaluran Program PKBL Tahun 2016 — Realization of the Partnership Program disbursement in 2016

URAIAN	Tahun 2016 Year 2016		S.d Tahun 2016 Until Years 2016		
	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	
Program Kemitraan					Partnership Program
Penyaluran Pinjaman	9	3,274,000,000	2657	55,268,547,272	distribution of Loan
Biaya Pembinaan				5,370,885,038	coaching Cost
Jumlah				60,639,432,310	Ammount
Program Bina Lingkungan					community Development Program
BUMN Pembina	7	685,000,000		19,950,929,732	BUMN Pembina
BUMN Peduli		87,990,000		11,945,317,498	BUMN Peduli
Jumlah		772,990,004	-	31,896,247,230	Ammount
Total Jumlah	13	772,990,004	2657	92,535,679,540	Total

Program Kemitraan

Penyaluran pinjaman modal kerja melalui Program Kemitraan diprioritaskan kepada kelompok usaha kecil disekitar PT Perkebunan Nusantara VIII, yang mempunyai potensi untuk dikembangkan serta mempunyai potensi padat karya untuk menciptakan lapangan kerja.

Pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan berdasarkan :

1. SK Menteri Keuangan No.1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 perihal Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.306/KMK/1991 tanggal 20 Maret 1991 perihal Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 22 Juni 1994, perihal Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Laba BUMN
4. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
5. surat Kementerian BUMN Nomor: S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013 tidak mengalokasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Laba Bersih tahun 2013.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan

Partnership Program

The channeling of working capital loans through the Partnership Program is prioritized to small business groups around PT Perkebunan Nusantara VIII, which has the potential to be developed and has the potential of labor intensive to create employment opportunities.

Implementation of Partnership Program is based :

1. Decree of the Minister of Finance No.1232 / KMK.013 / 1989 dated November 11, 1989 regarding the Guidelines for the Establishment of Wealthy Business Entrepreneurs and Co-operatives through State-Owned Enterprises;
2. Decree of the Minister of Finance No.306 / KMK / 1991 dated March 20, 1991 concerning the Amendment of Decree of the Minister of Finance No. 1232 / KMK.013 / 1989 dated November 11, 1989;
3. Decree of the Minister of Finance No.316 / KMK.016 / 1994 dated June 22, 1994, regarding the Guidelines for the Establishment of Small and Cooperative Enterprises through Funding from SOE's Profit
4. Decree of the Minister of SOEs No. Kep-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 regarding SOE Health Evaluation
5. Ministry of SOEs number: S-92 / D5.MBU / 2013 dated April 3, 2013 does not allocate Partnership and Community Development Programs from Net Profit in 2013.
6. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09 / MBU / 2015 on Partnership Program and Community Development of State-Owned Enterprises with small business and Community Development Program.

Penyaluran Program Kemitraan

Sektor Usaha	Penyaluran Pinjaman / Distribution of Loan				Business Sector
	2016		2015		
	Unit	Jumlah / ammount	Unit	Jumlah / ammount	
Industri			2	105,000,000	Industry
Perdagangan	4	215,000,000	2	350,000,000	Trading
Pertanian	3	1,009,000,000	3	450,000,000	Farm
Peternakan	2	2,050,000,000	4	267,000,000	Husbandry
Perkebunan					Plantation
Perikanan					Fishery
Jasa			2	75,000,000	Services
Lain-lain					Other
Jumlah	9	3,274,000,000	13	1,247,000,000	

Produksi “SAE Collection”
UMKM Mitra Binaan PT Perkebunan Nusantara VIII

Tingkat efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan hibah Program Kemitraan pada tahun 2016 adalah sebesar 29%, atau dengan nilai nol (0). Sedangkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman tahun 2016 adalah sebesar 49%, atau dengan nilai satu (2). Sampai dengan tahun 2016 realisasi penyaluran dana Program Kemitraan mencapai Rp 3.2 Miliar. Sumber dana pelaksanaan Program Kemitraan berasal dari alokasi laba perusahaan maksimal 2%, pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi pinjaman, dan jasa giro.

Penyaluran dana Program Kemitraan tersebut lebih diprioritaskan kepada pembentukan cluster, sehingga penyaluran dana dapat lebih terarah dan optimal. Dalam pembentukan cluster tersebut, PT Perkebunan Nusantara VIII dapat bersinergi dengan BUMN Pembina PKBL lain yang memiliki dana maupun keahlian dalam pembentukan cluster. Hal tersebut juga ditunjang dengan dilakukannya pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar usaha perusahaan, sehingga tujuan penyaluran dana yang lebih terarah dan optimal dapat semakin dipertajam.

The effectiveness of the Partnership Program loan and Partnership Program grant by 2016 is 29%, or zero (0). While the rate of return on loan collectibility in 2016 is 49%, or with a value of one (2). Up to 2015, the realization of Partnership Program funds is Rp 3,2 Billion. Sources of Partnership Program implementation fund comes from the allocation of company's profit maximum 2%, loan principal repayment, loan administration services, and giro services.

The channeling of Partnership Program funds is prioritized to cluster formation, so that fund distribution can be more focused and optimal. In the formation of the cluster, PT Perkebunan Nusantara VIII can synergize with other PKBL Pembina BUMN who have the funds and expertise in cluster formation. It is also supported by the mapping of the socio-economic conditions of the community around the business of the company, so that the goal of channeling funds more focused and optimal can be further sharpened.

Saldo piutang pinjaman mitra binaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 11.599.352.685, dengan rincian saldo piutang kualitas pinjaman sebagai berikut :

The balance of loans receivable of the assisted partners as of December 31, 2015 amounted to Rp 11,599,352,685, with details of outstanding loan loan receivables as follows:

Saldo Piutang Kualitas Pinjaman

Outstanding loan receivables

Kualitas Pinjaman	Saldo Piutang 2016	Saldo Piutang 2015	Quality Loan
Lancar	4,020,880,426	862,883,615	Current
Kurang Lancar	1,208,485,812	1,687,342,545	
Diragukan	2,183,631,608	1,582,500,687	
Macet	6,621,865,346	7,466,625,838	Loss
Jumlah	14,034,863,195	11,599,352,685	

Budidaya Cabe Paprika Gunung Halu
UMKM Mitra Binaan PT Perkebunan Nusantara VIII

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan diprioritaskan kepada bantuan untuk merubah kondisi sosial masyarakat di luar lingkungan unit kerja dengan sektor sesuai ruang lingkup. Sasaran untuk Program Bina Lingkungan adalah pembinaan lingkungan masyarakat sekitar unit kerja PT Perkebunan Nusantara VIII dalam wilayah pemerintah daerah setempat dengan maksud agar manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara nyata. Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII meliputi bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dilakukan berdasarkan:

1. Surat Keputusan Menteri Negara Pembinaan BUMN No.216/M.PBUMN/1999 tanggal 22 September 1999 perihal Penyaluran Program Bina Lingkungan.
2. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 perihal Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/IV/2007 tanggal 27 April 2007 perihal Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Bina Lingkungan memiliki enam kategori bentuk bantuan yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam; untuk meringankan beban para korban bencana, Kami mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, makanan dan minuman, serta kebutuhan dasar lainnya.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan ini dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Bantuan peningkatan kesehatan; program peningkatan kesehatan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan manusia.
4. Bantuan pengembangan sarana dan/atau sarana umum; diberikan dalam bentuk perbaikan kondisi fisik sarana dan prasarana umum lainnya dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
5. Bantuan sarana ibadah; diberikan dalam bentuk bantuan perbaikan tempat ibadah, pembangunan tempat ibadah, penyaluran bantuan kegiatan keagamaan, demi peningkatan kualitas sarana ibadah masyarakat.
6. Bantuan pelestarian alam; diberikan dalam bentuk kegiatan penanaman kembali, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk merehabilitasi kelestarian sumber daya alam.

Community Development Program

The Community Development Program is prioritized for assistance to change the social condition of the community outside the work unit environment with sector according to scope. The target for the Community Development Program is the community development around the work unit of PT Perkebunan Nusantara VIII within the local government area with the intention that the benefits of the existence of the company can be felt significantly. The Community Development Program of PT Perkebunan Nusantara VIII covers the assistance of natural disasters, education, health, public facilities and infrastructure and religious facilities.

The implementation of the Community Development Program is based onn:

1. Decree of State Minister of State-Owned Enterprises No.216 / M.PBUMN / 1999 dated 22 September 1999 regarding Distribution of Community Development Program.
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.Kep-236 / MBU / 2003 dated June 17, 2003, concerning the Mechanism of Fund Disbursement of Partnership Program and Community Development.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05 / MBU / IV / 2007 dated 27 April 2007 concerning Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program.

Community Development Program has six categories of assistance forms:

1. Assistance for natural disaster victims; To alleviate the burden of the disaster victims, We send aid in the form of medicines, food and beverages, and other basic needs..
2. Education and / or training assistance; This assistance in order to improve the quality of human life.
3. Health promotion assistance; Health improvement programs are provided in order to improve the quality of human health.
4. Assistance for the development of public facilities and / or facilities; Shall be provided in the form of improvements in the physical condition of other public facilities and infrastructure in order to improve the community welfare facilities.
5. Assistance of religious facilities; Given in the form of aid repair of places of worship, the construction of places of worship, the distribution of religious aid activities, for the improvement of the quality of public worship facilities..
6. Conservation assistance; Provided in the form of replanting activities, and other activities aimed at rehabilitating the sustainability of natural resources.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan lebih difokuskan pada sektor-sektor peningkatan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana umum, dan pelestarian alam yang strategis bagi masyarakat setempat dan selanjutnya dapat disalurkan melalui penyaluran dana Program Kemitraan.

Jumlah dana Program Bina Lingkungan yang disalurkan pada tahun 2016 sebesar Rp 685,8 juta, naik sebesar 321% dari realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp 184 juta.

The distribution of funds for the Community Development Program is more focused on the sectors of health improvement, the improvement of public facilities and infrastructure, and the strategic conservation of local communities and can be channeled through Partnership Program funding.

The total amount of the Community Development Program funds disbursed in 2016 amounted to Rp 685,8 million, an increase of 321% from the realization in 2015 which reached Rp 184 million.

Bantuan Dana Bina Lingkungan

Community Development Assistence Fund

URAIAN	Penyaluran Bina Lingkungan		
	2016	2015	
BUMN Pembina			BUMN Builder
Bencana Alam	85,000,000		Natural Disasters
Pendidikan Masyarat	142,330,000		Community Education
Kesehatan Masyarakat	3,000,000		Public Health
Sarana&Prasarana	250,000,000	63,000,000	
Sarana Ibadah	35,000,000	121,000,000	
Pelestarian Lingkungan	500,000		Environmental Conservation
Sosial Kemasyarakatan	170,000,000		
Jumlah	685.830.000	184,000,000	**Amount**

Rencana Tahun 2016

Dengan mempertimbangkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2016, beserta Laporan Keuangan yang telah di audit oleh KAP Hadori, Sugiarto Adi dan Rekan, serta hasil pembahasan dan diskusi dengan pengurus PKBL PT Perkebunan Nusantara VIII , maka rencana kegiatan dan program PKBL di tahun 2016 akan dilakukan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan
   a. Penyaluran dilaksanakan setiap triwulan sesuai dengan sumber dana yang tersedia, dengan prioritas masyarakat desa miskin di lingkungan unit kerja.
   b. Kegiatan pembinaan mitra binaan, melalui pelatihan, mengikutsertakan mitra binaan pada pameran-pameran, dan kegiatan lainya disesuaikan dengan waktu dan sumber dana tersedia.
   c. Kegiatan pelatihan petugas PKBL lingkungan unit kerja bersinergi dengan Bagian SDM dan disesuaikan dengan waktu dan dana.

2. Program Bina Lingkungan
   a. Membuat rencana kunjungan lapangan sesuai proposal yang diterima dan proaktif kunjungan lapangan untuk melihat potensi kondisi sosial masyarakat yang perlu mendapat bantuan.
   b. Membuat program kerja bantuan bersama dengan BUMN lain.

Plan Year 2016

Considering the Annual Report of Partnership and Community Development Program of PT Perkebunan Nusantara VIII 2016, along with the Financial Statement that has been audited by KAP Hadori, Sugiarto Adi and Partners, and the result of discussion and discussion with PKBL board of PT Perkebunan Nusantara VIII, the activity and program plan PKBL in 2016 will be conducted as follows:

1. Partnership Program
a. Distribution is conducted quarterly in accordance with available funding sources, with priority of poor rural communities within the work unit.
b. Coaching activities of the assisted partners, through training, involving partners in exhibitions, and other activities are tailored to the time and resources available.
c. Training activities of PKBL officers in the work unit environment synergize with Human Resources and adjusted with time and funds.

2. Community Development Program
   a. make field visit based on proposall received and proactive to field visit to see potential community condition that need assistance.
   b. Create a program of assistance work together witj other BUMN.

Sekilas PTPN VIII **PTPN VIII Highlight**
Ikhtisar Keuangan **Financial Review**
Laporan Managemen **Management Report**
Profil Perusahaan **Company Profile**
Analisis Manajemen Perusahaan **Analysis and Discussion of Management**
Tata Kelola Perusahaan **Good Corporate Governance**
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan **Corporate Social Responsibility**
Lampiran Laporan Keuangan **Financial Report Sheet**

Laporan Keuangan Pewrusahaan

Laporan Hasil Evaluasi Kerja

Management Letter

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Laporan Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Pengendalian Intern

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 - Indonesia, Kotak Pos 1176, Tlp. (62-22) 2038966
Fax. (62-22) 2031 455, E-mail:ptpn8@pn.8co.id; Website:http://www.pn8.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bambang Murtioso
   Alamat Kantor : Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 Jawa Barat
   Alamat Domisili : Komp. GBI Blok B-2 No. 29 Bandung, Jawa Barat
   Nomor Telepon : (022) 2038966
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ryanto Wisnuardhy
   Alamat Kantor : Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 Jawa Barat
   Alamat Domisili : Grand Setiabudi Apartement No. 130-134 Bandung, Jawa Barat
   Nomor Telepon : (022) 2038966
   Jabatan : Direktur Komersil

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Perkebunan Nusantara VIII dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT ON RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE YEAR ENDED PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII AND ITS SUBSIDIARY

We, the undersigned:

1. *Name* : *Bambang Murtioso*
   Office Address : *Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 West Java*
   Domiciled at : *Komp. GBI Blok B-2 No. 29 Bandung, West Java*
   Telephone : *(022) 2038966*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *Ryanto Wisnuardhy*
   Office Address : *Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 West Java*
   Domiciled at : *Grand Setiabudi Apartement No. 130-134 Bandung, West Java*
   Telephone : *(022) 2038966*
   Title : *Commercial Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and persentation of the consolidated financial statements.*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard and Plantation State Owned Accounting Guidelines.*
3. *All information in the consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
4. *The consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact.*
5. *We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control systems.*

This statement has been made truthfully.

Bandung, 28 Februari/*February 28, 2017*

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Bambang Murtioso	Ryanto Wisnuardhy
Direktur Utama/*President Director*	Direktur Komersil/*Commercial Director*

Jujur, Tulus dan Ikhlas

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 - 86	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Laporan Keuangan Tersendiri	i - vi	*Separate Financial Statements*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3141/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara VIII

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan d Indonesia, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian materiai, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesa ahan.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-3141/PSS/2017

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Perkebunan Nusantara VIII

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara VIII and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, the Company's compliance with laws and regulations that directly and materially effect on the presentation of such consolidated financial statements, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Sekilas PTPN VIII PTPN VIII Highlight
Ikhtisar Keuangan Financial Review
Laporan Managemen Management Report
Profil Perusahaan Company Profile
Analisis Manajemen Perusahaan Analysis and Discussion of Management
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
Lampiran Laporan Keuangan Financial Report Sheet

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3141/PSS/2017 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan entitas, dan (ii) pengendalian internal entitas.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-3141/PSS/2017 (continued)

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards (SPKN) established by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. An audit which is performed based on specified SPKN established by BPK also includes tests on: (i) entity's compliance with laws and regulations that directly affect and material to the presentation of entity's financial statements, and (ii) the entity's internal control.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3141/PSS/2017 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu Hal

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 28 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sehubungan dengan koreksi atas kesalahan penyajian paca liabilitas imbalan kerja. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-3141/PSS/2017 (continued)

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perkebunan Nusantara VIII and its subsidiary as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 28 to the accompanying consolidated financial statements, the Company restated the consolidated financial statements as of December 31, 2015 and for the year ended December 31, 2015, due to the correction of misstatement of employee benefits liability. Our opinion is not modified in respect of such matter.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3141/PSS/2017 (lanjutan)

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-3141/PSS/2017 (continued)

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara VIII and its subsidiary as of December 31, 2016 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information as of December 31, 2016 and for the year then ended is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended taken as a whole.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3141/PSS/2017 (lanjutan)

Hal lain (lanjutan)

Kami juga telah menerbitkan laporan-laporan auditor independen No. RPC-3142/PSS/2017 bertanggal 28 Februari 2017 dan No. RPC-3143/PSS/2017 bertanggal 28 Februari 2017 masing-masing atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal sebagaimana dipersyaratkan oleh SPKN yang ditetapkan oleh BPK.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-3141/PSS/2017 (continued)

Other matter (continued)

We also have issued independent auditors' reports No. RPC-3142/PSS/2017 dated February 28, 2017 and No. RPC-3143/PSS/2017 dated February 28, 2017, respectively, on compliance with laws and regulations and internal controls as required by SPKN established by BPK.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Tia Adityasih
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0029/*Public Accountant Registration No. AP.0029*

28 Februari 2017/*February 28, 2017*

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan kembali – Catatan 28/*As Restated – Note 28*)	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31,* 2014	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2,4,6,26	98.262.409.410	162.411.652.033	139.977.229.333	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	2,5,6,26	94.849.848.890	124.055.523.036	98.691.560.271	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	26				*Other receivables*
Pihak ketiga		5.587.865.284	7.535.420.545	15.722.961.665	*Third parties*
Pihak berelasi	2,6	215.623.409.052	8.829.877.572	9.377.814.287	*Related parties*
Persediaan	2,7	361.531.753.891	293.120.556.499	327.212.397.588	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	2,13a	-	210.030.972	-	*Prepaid tax*
Aset lancar lainnya	6,26	16.442.628.390	8.522.837.566	6.771.285.757	*Other current assets*
Total Aset Lancar		**792.297.914.917**	**604.685.898.223**	**597.753.248.901**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas asosiasi	2,8	53.452.840.337	49.290.273.502	45.238.107.625	*Investments in associate entities*
Aset pajak tangguhan	13f	270.507.048.087	205.448.613.875	111.300.556.572	*Deferred tax assets*
Tagihan pajak penghasilan	2,13b	-	28.367.246.527	47.813.569.025	*Claims for income tax refund*
Tanaman perkebunan	2,9				*Plantations*
Tanaman menghasilkan		1.569.164.899.683	1.469.231.615.101	1.247.307.917.606	*Mature plantation*
Tanaman belum menghasilkan		728.604.885.196	990.203.443.531	1.163.188.370.014	*Immature plantation*
Aset tetap	2,10	5.876.371.414.561	5.885.994.197.626	425.148.802.456	*Fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya		63.052.682.035	51.633.690.685	61.366.737.476	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar		**8.561.153.769.899**	**8.680.169.080.847**	**3.101.364.060.774**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET		**9.353.451.684.816**	**9.284.854.979.070**	**3.699.117.309.675**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan kembali – Catatan 28/*As Restated – Note 28*)	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31,* 2014	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	2,6,11,26	197.182.575.019	195.139.405.423	152.139.405.423	*Short-term bank loans*
Utang usaha	2,6,12,26	282.426.122.948	261.572.920.201	162.209.616.045	*Trade payables*
Utang lain-lain	26				*Other payables*
Pihak ketiga		44.950.646.005	12.609.743.697	11.122.488.143	*Third parties*
Pihak berelasi	2,6	417.364.669.166	19.572.361.780	18.094.807.836	*Related parties*
Uang muka pelanggan		83.538.385.288	70.333.636.883	59.080.693.165	*Advances from customers*
Utang pajak	2,13c	90.312.951.047	86.010.159.190	37.095.793.689	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	2,26	142.019.135.710	126.570.042.372	72.289.253.007	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	2,14,26				*Current maturities of long-term debts:*
Utang bank		22.404.776.344	16.560.173.899	214.765.094.408	*Bank loans*
Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia		2.588.253.376	2.588.253.376	77.643.682.422	*Loan to the Government of the Republic of Indonesia*
Total Liabilitas Jangka Pendek		**1.282.787.514.903**	**790.956.696.821**	**804.440.834.138**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2,14,26				*Long-term debts, net of current maturities:*
Utang bank		1.318.591.721.322	1.340.996.497.666	1.191.950.781.595	*Bank loans*
Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia		19.250.728.403	78.733.957.841	7.603.588.210	*Loan to the Government of the Republic of Indonesia*
Liabilitas imbalan kerja	2,15	1.592.551.485.038	1.501.520.250.637	943.565.581.491	*Employee benefits liability*
Liabilitas jangka panjang lainnya		7.835.934.916	-	-	*Other non-current liability*
Total Liabilitias Jangka Panjang		**2.938.229.869.679**	**2.921.250.706.144**	**2.143.119.951.296**	***Total Non-Current Liabilities***
TOTAL LIABILITIAS		**4.221.017.384.582**	**3.712.207.402.965**	**2.947.560.785.434**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan kembali – Catatan 28/*As Restated – Note 28*)	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31,* 2014	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					***Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar - 3.500.000 saham					*Share capital - Rp1,000,000 par value per share Authorized - 3,500,000 Shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 897.527 saham	16	897.527.000.000	897.527.000.000	897.527.000.000	*Issued and fully paid - 897,527 shares*
Uang muka penyetoran saham	14	32.774.926.942	-	-	*Deposits for future share capital subscription*
Saldo laba					*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		345.939.907.835	345.939.907.835	339.169.559.587	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		(1.625.220.810.497)	(1.154.846.575.526)	(480.573.307.624)	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		5.485.246.484.252	5.487.900.943.798	-	*Other comprehensive income*
Komponen ekuitas lainnya		(5.449.916.907)	(5.449.916.907)	(5.449.916.907)	*Other component of equity*
Sub-total		**5.130.817.591.625**	**5.571.071.359.200**	**750.673.335.056**	***Sub-total***
Kepentingan non-pengendali		1.616.708.609	1.576.216.905	883.189.185	*Non-controlling interest*
Total Ekuitas		**5.132.434.300.234**	**5.572.647.576.105**	**751.556.524.241**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**9.353.451.684.816**	**9.284.854.979.070**	**3.699.117.309.675**	***TOTAL LIABILITES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2016	Catatan/ *Notes*	Disajikan kembali - Catatan 28/*As restated - Note 28* 2015	
PENDAPATAN	1.320.412.679.858	2,17	1.515.496.937.471	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.070.663.259.468)	2,18	(1.140.405.081.987)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**249.749.420.390**		**375.091.855.484**	***GROSS PROFIT***
Beban pemasaran dan penjualan	(47.514.614.567)	2,19	(48.459.272.260)	*Marketing and selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(382.310.033.354)	2,20	(858.330.594.465)	*General and administrative expenses*
Penghasilan operasi lain	90.024.452.857	2,21	38.475.978.799	*Other operating income*
Beban operasi lain	(262.103.007.725)	2,22	(96.287.456.719)	*Other operating expenses*
RUGI USAHA	**(352.153.782.399)**		**(589.509.489.161)**	***OPERATING LOSS***
Penghasilan keuangan	21.263.663.316	2,23	1.520.922.317	*Finance income*
Pajak final atas penghasilan keuangan	(497.098.083)		(298.176.645)	*Final tax on finance income*
Beban keuangan	(73.264.486.879)	2,23	(30.939.603.251)	*Finance expense*
RUGI SEBELUM PAJAK	**(404.651.704.045)**		**(619.226.346.740)**	***LOSS BEFORE TAX***
Manfaat pajak penghasilan	27.841.135.003	13d	54.751.703.410	*Income tax benefits*
RUGI TAHUN BERJALAN	**(376.810.569.042)**		**(564.474.643.330)**	***LOSS FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2016	Catatan/ *Notes*	Disajikan kembali - Catatan 28/*As restated - Note 28* 2015	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will be reclassified to profit or loss:*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak	(198.687.500)		(76.825.440)	*Unrealized loss available for sale financial asset, net of tax*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Rugi pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(93.315.652.679)		(102.863.110.425)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan dari/(penurunan nilai atas) revaluasi tanah	(2.654.459.546)	10	5.488.510.788.068	*Gain/(impairment in value) on revaluation of land*
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, neto	**(96.168.799.725)**		**5.385.570.852.203**	***Other comprehensive income/(loss), net***
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(472.979.368.767)**		**4.821.096.208.873**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit/(loss) for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	(376.859.894.792)		(564.562.983.789)	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	49.325.750		88.340.459	*Non-controlling interest*
Total	**(376.810.569.042)**		**(564.474.643.330)**	***Total***
Total penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive Income/(loss) for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	(473.028.694.517)		4.820.398.024.144	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	49.325.750		698.184.729	*Non-controlling interest*
Total	**(472.979.368.767)**		**4.821.096.208.873**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to the equity holders of the parent entity*							Kepentingan Non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Total ekuitas/ *Total equity*	
						Saldo laba/*Retained earnings*					
		Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Uang Muka Penyetoran Modal/ *Deposits for future share capital subscription*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other component of equity*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Total/ *Total*			
Saldo 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014	**16,28**	**897.527.000.000**	**-**	**(5.449.916.907)**	**-**	**339.169.559.587**	**(480.573.307.624)**	**750.673.335.056**	**883.189.185**	**751.556.524.241**	***Balance as of January 1, 2015/ December 31, 2014***
Rugi tahun berjalan (disajikan kembali)	28	-	-	-	-	-	(564.562.983.789)	(564.562.983.789)	88.340.459	(564.474.643.330)	*Loss for the year (as restated)*
Cadangan umum		-	-	-	-	6.770.348.248	(6.770.348.248)	-	-	-	*General reserve*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(5.157.009)	(5.157.009)	*Dividend*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak		-	-	-	-	-	(76.825.440)	(76.825.440)	-	(76.825.440)	*Unrealized loss from available for sale financial asset, net of tax*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	-	-	(102.863.110.425)	(102.863.110.425)	-	(102.863.110.425)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan dari revaluasi tanah	10	-	-	-	5.487.900.943.798	-	-	5.487.900.943.798	609.844.270	5.488.510.788.068	*Gain on revaluation of land*
Saldo 31 Desember 2015 (disajikan kembali)	**16,28**	**897.527.000.000**	**-**	**(5.449.916.907)**	**5.487.900.943.798**	**345.939.907.835**	**(1.154.846.575.526)**	**5.571.071.359.200**	**1.576.216.905**	**5.572.647.576.105**	***Balance as of December 31, 2015 (as restated)***
Uang muka penyetoran modal	14	-	32.774.926.942	-	-	-	-	32.774.926.942	-	32.774.926.942	*Deposits for future share capital subscription*
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-		(376.859.894.792)	(376.859.894.792)	49.325.750	(376.810.569.042)	*Loss for the year*
Dividen		-	-	-	-	-	-	-	(8.834.046)	(8.834.046)	*Dividend*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak		-	-	-	-	-	(198.687.500)	(198.687.500)	-	(198.687.500)	*Unrealized loss from available for sale financial asset, net of tax*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-	-	-	-	(93.315.652.679)	(93.315.652.679)	-	(93.315.652.679)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Penurunan nilai atas revaluasi tanah	10	-	-	-	(2.654.459.546)	-	-	(2.654.459.546)	-	(2.654.459.546)	*Impairment in value on revaluation of land*
Saldo 31 Desember 2016	**16**	**897.527.000.000**	**32.774.926.942**	**(5.449.916.907)**	**5.485.246.484.252**	**345.939.907.835**	**(1.625.220.810.497)**	**5.130.817.591.625**	**1.616.708.609**	**5.132.434.300.234**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	1.255.437.886.709		1.539.133.156.872	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.212.926.233.549)		(1.208.296.670.553)	*Cash payments to suppliers and employees*
Kas yang diperoleh dari operasi	42.511.653.160		330.836.486.319	*Cash generated from operations*
Pembayaran bunga	(160.563.080.152)		(147.984.213.008)	*Payments for interest*
Pembayaran kas lainnya	(24.383.841.289)		(30.206.753.387)	*Cash payment for others*
Penerimaan modal kerja	2.043.169.596	11	-	*Receipts of working capital*
Penerimaan penghasilan bunga	2.016.565.233		1.222.745.672	*Receipts of interest income*
Kas neto yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(138.375.533.452)**		**153.868.265.596**	***Net cash provided by/ (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen	-		327.933.722	*Receipts of dividends*
Penambahan tanaman perkebunan	(29.639.854.441)		(82.919.492.385)	*Additions of plantations*
Perolehan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya	(59.818.897.276)		(9.148.053.418)	*Acquisitions of fixed assets and other non-current assets*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(89.458.751.717)**		**(91.739.612.081)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang bank	(17.986.000.000)	14	(125.550.000.000)	*Payments of bank loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	-	14	(3.925.059.415)	*Payment of loan to the Government of the Republic of Indonesia*
Penerimaan dari pinjaman bank	-		83.924.000.000	*Proceed from bank loans*
Pembayaran pinjaman kepada entitas asosiasi	(187.500.000.000)		-	*Payment of loan to associate company*
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	368.014.139.987		-	*Proceed from shareholder loan*
Kas neto yang diperoleh dari /(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**162.528.139.987**		**(45.551.059.415)**	***Net cash provided by /(used in) financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**(65.306.145.182)**		**16.577.594.100**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
DAMPAK NETO SELISIH KURS ATAS KAS DAN BANK	1.156.902.559		5.856.828.600	***NET EFFECTS OF EXCHANGE RATES CHANGES ON CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	162.411.652.033	4	139.977.229.333	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**98.262.409.410**	4	**162.411.652.033**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

Pendirian Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VIII (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Notaris Harun Kamil, S.H. No. 41 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-8336.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 8 Agustus 1996, Tambahan No. 8562. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Yuliani Idawati, S.H, Sp.N. No. 16 tanggal 25 Juli 2016 mengenai perubahan susunan direksi Perusahaan dan telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0070405 tanggal 10 Agustus 2016, dan Akta Notaris Yuliani Idawati, S.H, Sp.N. No. 7 tanggal 14 September 2016 mengenai perubahan susunan komisaris Perusahaan dan telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0081490 tanggal 20 September 2016.

Perusahaan merupakan hasil peleburan PT Perkebunan XI (Persero), PT Perkebunan XII (Persero) dan PT Perkebunan XIII (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996 dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. GENERAL

The Company's Establishment

PT Perkebunan Nusantara VIII (the Company) was established based on Notarial Deed No. 41 of Harun Kamil, S.H. dated March 11, 1996 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-8336.HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996, and was published in State Gazette No. 80 dated August 8, 1996, Supplement No 8562. The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest amendment of which was documented in the Notarial Deed No. 16 of Yuliani Idawati, S.H, Sp.N. dated July 25, 2016 in relation to change the member of the Company's Directors and was reported and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as documented in letter No. AHU-AH.01.03-0070405 dated August 10, 2016, and Notarial Deed No. 7 of Yuliani Idawati, S.H, Sp.N. dated September 14, 2016 in relation to change the member of the Company's Board of Commissioners and was reported and registered by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as documented in letter No. AHU-AH.01.03-0081490 dated September 20, 2016.

The Company was a mergers of PT Perkebunan XI (Persero), PT Perkebunan XII (Persero) and PT Perkebunan XIII (Persero), based on the Government Regulation No. 13 year 1996 and all its rights and obligations transfer to the Company.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, its scope of activities is mainly to engage in agro business and agro-industry sector, and optimizing the utilization of company resources to produce goods and/or services of high quality and competitive strength to chase profits which in order to enhance corporate value by applying the principles of limited companies. To achieve the objective, the Company performs the following activities:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
b. Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;
c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agrobisnis dan agro forestry.

Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 1996. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan mengelola perkebunan seluas 113.958 hektar yang terdiri dari 30 pabrik teh, 2 pabrik kelapa sawit dan 16 pabrik karet.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Sindangsirna No. 4, Bandung, Jawa Barat. Pabrik dan perkebunan teh, kelapa sawit, karet dan kina Perusahaan tersebar di beberapa lokasi di Jawa Barat dan Banten.

Entitas Induk dan Entitas Induk Terakhir

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Februari 2017.

1. GENERAL (continued)

The Company's Establishment (continued)

a. Agricultural activities consisting of land clearing, nursery, planting, maintenance and harvesting and other activities related to agriculture;

b. Production activities, including harvesting and processing of own plantations or other parties, become semi-finished goods and/or finished goods as well as its derivative products;
c. Trading activities, including marketing of the various products and other tradings related to the Company's activities;

d. Business development in agriculture, agro-tourism, agro-business and agroforesty.

The Company commenced its commercial operations in 1996. As of December 31, 2016 and 2015, the Company's planted area of 113,958 hectares which consist of 30 processing plants of tea, 2 processing plants of palm oil and 16 processing plants of rubber.

The Company's head office address is at Jl. Sindangsirna No. 4, Bandung, West Java. Processing plants and plantation area of tea, palm oil, rubber and quinine were spread in several location at West Java and Banten.

Parent and Ultimate Parent

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) and the Government of the Republic of Indonesia are the Company's parent and ultimate parent.

Completion of the Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, which were completed and authorized for issue by the Company's Directors on February 28, 2017.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then Ended (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

Struktur Entitas Anak

Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Subsidiary's Structure

Subsidiary which controlled by the Company directly as of December 31, 2016 and 2015 is as follow:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Total Aset Sebelum Eliminasi pada Tanggal 31 Desember 2016/ *Total Assets Before Elimination as of December 31, 2016*	Total Aset Sebelum Eliminasi pada Tanggal 31 Desember 2015/ *Total Assets Before Elimination as of December 31, 2015*	Persentase Kepemilikan Efektif/ *Effective Percentage of Ownership*
Langsung/*Direct*						
PT Agro Medika Nusantara ("AMN")	Subang	2012	Rumah sakit/*Hospital*	67.039.278.742	68.257.542.905	96,71%

PT Agro Medika Nusantara (AMN)

AMN didirikan berdasarkan Akta Notaris Yuliani Idawati, S.H., Sp.N. No. 3, tanggal 3 Februari 2012 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-28630.AH.01.01.Tahun2012 tanggal 29 Mei 2012.

PT Agro Medika Nusantara (AMN)

AMN was established based on Notarial Deed No. 3 of Yuliani Idawati, S.H., Sp.N. dated February 3, 2012 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-28630.AH.01.01.Tahun2012 dated May 29, 2012.

Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:

Key Management and Other Information

As of December 31, 2016 and 2015, the members of the Company's Boards of Commissioners, Directors and Audit and Risk Management Committees are as follows:

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Karen Tambayong	Agus Pakpahan	*President Commissioner*
Komisaris	Herry Suhardiyanto	Karen Tambayong	*Commissioner*
Komisaris	Elen Setiadi	Herry Suhardiyanto	*Commissioner*
Komisaris	Antonius Harso Waluyo Witono	Sutriono Edi	*Commissioner*
Komisaris	-	Made Putrawan	*Commissioner*
Direksi			***Directors***
Direktur Utama	Bambang Murtioso	Dadi Sunardi	*President Director*
Direktur	I.G.N Suharta Wijaya	I.G.N Suharta Wijaya	*Director*
Direktur	Gunara	Bambang Murtioso	*Director*
Direktur	Tatang Supriatna	Gunara	*Director*
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Karen Tambayong	Agus Pakpahan	*Chairman*
Anggota Komite Audit	Edi Jaenudin	Edi Jaenudin	*Member of Audit Committee*
Anggota Komite Audit	Ahmad Zakie Mubarrok	Ahmad Zakie Mubarrok	*Member of Audit Committee*
Komite Manajemen Risiko			***Risk Management Committee***
Ketua	Antonius Harso Waluyo Witono	Agus Pakpahan	*Chairman*
Anggota Komite Manajemen Risiko	Cahya Irawadi	Cahya Irawadi	*Member of Risk Management*
Anggota Komite Manajemen Risiko	Citra Sukmadilaga	Citra Sukmadilaga	*Member of Risk Management*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah beban kompensasi bruto bagi manajemen kunci (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai Kelompok Usaha) adalah Rp8.114.089.000 (2015: Rp8.155.446.400).

Pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha mempekerjakan 15.547 orang karyawan tetap (2015: 16.977 orang karyawan tetap) (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Pedoman Akuntansi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis akuntansi, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

1. GENERAL (continued)

Key Management and Other Information (continued)

For the year ended December 31, 2016, the amount of net compensation for key management (include Boards of Commissioners and Directors) of the Company and its Subsidiary's (collectively referred the Group) are Rp8,114,089,000 (2015: Rp8,155,446,400).

As of December 31, 2016, the Group has a total of 15,547 permanent employees (2015: 16,977 permanent employees) (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Accounting Guidance for State-Owned Enterprises of Plantations Companies.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Revaluasi tanah

Kelompok Usaha menilai kembali kebijakan akuntansinya atas aset tetap berkaitan dengan pengukuran kelompok aset tetap tertentu setelah pengakuan awal. Kelompok Usaha sebelumnya mengukur seluruh aset tetap dengan menggunakan model biaya sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", dimana setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Pada tahun 2015, Kelompok Usaha memilih untuk mengubah kebijakan akuntansi atas tanah karena Kelompok Usaha menyakini bahwa model revaluasi lebih mencerminkan nilai dari tanah tersebut.

Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha menggunakan model revaluasi dimana tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai berikutnya. Sesuai ketentuan PSAK No. 16 (Revisi 2011), perubahan kebijakan akuntansi tersebut berlaku secara prospektif.

Standar baru dan revisi standar

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha adalah selaras bagi periode yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian. Kelompok Usaha telah menerapkan seluruh standar akuntansi baru dan yang direvisi yang efektif tanggal 1 Januari 2016, termasuk standar akuntansi berikut yang dipertimbangkan relevan bagi Kelompok Usaha sehingga mempengaruhi posisi dan/atau kinerja keuangan Kelompok Usaha dan/atau pengungkapan terkait dalam kebijakan akuntansi maupun Catatan atas laporan keuangan konsolidasian:

PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

PSAK 70 memberikan opsi dalam akuntasi untuk entitas yang memilih untuk menerapkan pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SHPPP) untuk memilih menggunakan PSAK 25 (pendekatan umum), atau menggunakan ketentuan khusus dalam paragraf 10 - 23 dari PSAK 70 (pendekatan opsional).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Changes of Accounting Policies

Revaluation of land

The Group reconsiders its accounting principles for fixed assets in relation with measurement of a group of certain fixed assets after initial recognition. Previously, the Group measured the fixed assets with cost model in accordance with PSAK 16 (Revised 2011), "Fixed Assets", which after initial recognition, fixed assets are stated at acquisition cost less accumulated depreciation and impairment loss.

In 2015, the Group decided to revise the accounting principles for land since the Group believes that the revaluation model clearly reflects the value of the land.

After initial recognition, the Group applies the revaluation model which land is measured at fair value at the revaluation date less subsequent accumulated impairment loss. In accordance with the provision of PSAK 16 (Revised 2011), the revision of the accounting principle applies prospectively.

New and revised standards

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements. The Group has adopted all the new and revised standards that are effective on January 1, 2016, including the following new and revised accounting standards that are considered relevant to the Group and therefore affect the financial position and/or performance of the Group and/or the related disclosures in the accounting policies and Notes to the consolidated financial statements:

PSAK 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

PSAK 70 provides options in accounting for an entity that applied for the Tax Amnesty Law based on its Declaration Letter for Tax Amnesty (Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak or SHPPP) to apply PSAK 25 (General Approach); or to apply the specific provisions in paragraphs 10 - 23 of PSAK 70 (Optional Approach).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Standar baru dan revisi standar (lanjutan)

PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

Aset pengampunan pajak harus diukur pada jumlah yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) (sebagai biaya perolehan). Kewajiban lain terkait pengampunan pajak harus diukur pada jumlah kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual yang terkait dengan akuisisi aset pengampunan pajak.

PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri

Revisi terhadap PSAK 4 menetapkan bahwa entitas dapat mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi pada biaya perolehan, sesuai dengan PSAK 55 atau menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri.

Revisi ini hanya mempengaruhi laporan keuangan tersendiri masing-masing Perusahaan dan entitas anak.

ISAK 30: Pungutan

Pungutan didefinisikan dalam ISAK 30 sebagai didefinisikan sebagai arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik yang dikenakan oleh pemerintah kepada entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ISAK 30 mengklarifikasi bahwa entitas mengakui liabilitas atas pungutan pada saat aktivitas yang memicu pembayaran, seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, telah terjadi.

Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas Anak pada setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Changes of Accounting Policies (continued)

New and revised standards (continued)

PSAK 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities (continued)

The tax amnesty assets shall be measured at the amount reported in the "Surat Keterangan Pengampunan Pajak" (SKPP) (as deemed cost). Any related Tax Amnesty liability shall be measured at the amount of cash or cash equivalents that will settle the contractual obligation related to the acquisition of the Tax Amnesty assets.

PSAK 4: Separate Financial Statements

Revisions to PSAK 4 require entities to account for investments in subsidiaries, joint ventures and associates either at cost, in accordance with PSAK 55 or using the equity method in their separate financial statements.

The revision only has impact to the separate financial statements of each of the Company and subsidiaries.

ISAK 30: Levies

Levies are defined in ISAK 30 as outflows of resources embodying economic benefits imposed by government on entities in accordance with legislation. ISAK 30 clarifies that an entity recognizes a liability for a levy when the activity that triggers payment, as identified by the relevant legislation, occurs.

Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiary. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if, and only if, the Group has all of the following:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu investee, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:
i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali (KNP), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Kelompok Usaha dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Principles of Consolidation (continued)

i) Power over the investee (that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee);

ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests (NCI), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, kepentingan nonpengendali dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Pengukuran Nilai Wajar

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". PSAK ini, antara lain, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diijinkan. Penerapan PSAK ini tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di (i) pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau (ii) dalam hal tidak terdapat pasar utama, maka pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Principles of Consolidation (continued)

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

Fair Value Measurement

The Group applied PSAK No. 68, "Fair Value Measurement". This PSAK, among others, provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted. The adoption of this PSAK has no significant impact on the consolidated financial statements.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either: (i) in the principal market for the asset or liability; or (ii) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Jika bagian Kelompok Usaha atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan Kelompok Usaha dikurangkan menjadi nihil, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Kelompok Usaha memiliki kewajiban konstruktif atau hukum, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi kemudian melaporkan laba, maka Kelompok Usaha mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif Kelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Kelompok Usaha atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Investment in Associates (continued)

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

If the Group's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, it discontinues recognizing its share of further losses. After the Group's interest is reduced to nil, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya. Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Investment in Associates (continued)

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also the Company and its subsidiary's functional currency. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

The rate of exchange used as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
1 Dolar Amerika Serikat (US$)//Rupiah	13.436,00	13.795,00	*United States Dollar (US$) 1/Rupiah*
1 Pound Sterling (GBP)/Rupiah	16.507,05	20.451,11	*Pound Sterling (GBP) 1/Rupiah*

Transaksi dalam mata uang asing selain mata uang yang disajikan diatas adalah tidak signifikan.

Transactions in foreign currencies other than disclosed above are not significant.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

Transactions with Related Parties

The Group have transactions with related parties as defined in PSAK 7. The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are third parties.

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placement and not pledged as collateral for loans and not restricted to use.

Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang (*weighted average method*). Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada setiap akhir tahun keuangan.

Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is determined using the moving average method. Allowance for obsolescence of inventory is provided based on the periodic reviews of the physical conditions of the inventories at each financial year end.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Persediaan (lanjutan)

Kelompok Usaha menetapkan penyisihan atas keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

a) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diklasifikasikan, pada saat pengakuan awal, sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai efektif, bila memenuhi syarat.

Semua aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti kas dan bank, piutang usaha dan lain-lain, dan aset lancar lainnya (aset keuangan tersedia untuk dijual).

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Inventories (continued)

The Group provides allowance for obsolescence and/or decline in market values of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

a) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL"), loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at FVTPL, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

The Group designates its financial assets as loans and receivables, such as cash on hand and in banks, trade and other receivables, other current asset (available for sale financial asset).

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE). Keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Piutang Usaha dan lain-lain

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Kelompok Usaha tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat teridentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, such assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method. The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Trade and other receivables

An allowance is made for uncollectible receivables when there is objective evidence that the Group will not be able to collect the receivables. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.

Available-For-Sale (AFS) financial assets

If there is objective evidence that an impairment has occurred over equity instruments that do not have the quotation and is not carried at fair value because fair value can not be measured reliably, then the amount of any impairment loss is measured as the difference between the carrying value of financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the prevailing rate of return on the market for a similar financial asset. Impairment losses were not recoverable in the next period.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
ii. kelompok Usaha mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Kelompok Usaha mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Kelompok Usaha tidak mengalihkan maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
ii. the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) *has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or* (b) *has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of the financial asset ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, nor transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laba rugi.

Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.

Impairment

The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred loss event) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan atas penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba atau rugi.

Penghasilan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat SBE awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Financial Assets Carried at Amortized Cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment or impairment.

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is directly recognized in the profit or loss.

Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original EIR of the financial asset. Loans together with the associated allowance are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral, if any, has been realized or has been transferred to the Group.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada tahun berikutnya.

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, Kelompok Usaha melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan apabila terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk penurunan 'signifikan' dan 'berkepanjangan' dari nilai wajar aset yang di bawah biaya perolehannya. Penurunan 'signifikan' dievaluasi terhadap biaya perolehan aset awal dan 'berkepanjangan' dievaluasi berdasarkan periode dimana nilai wajar lebih rendah dari biaya perolehan awalnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss of financial assets increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in the profit or loss.

Financial Assets Carried at Cost

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses cannot be reversed in the subsequent year.

Available-for-sale (AFS) financial assets

For AFS financial asset, the Group assesses at each reporting date whether there is objective evidence that the asset is impaired.

Objective evidence of impairment includes a 'significant' or 'prolonged' decline in the fair value of the asset below its cost. 'Significant' is evaluated against the original cost of the investment and 'prolonged' against the period in which the fair value has been below its original cost.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a) Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (lanjutan)

Apabila pada saat dievaluasi terdapat penurunan nilai, akumulasi kerugian, yang diukur sebesar selisih antara biaya perolehan dan nilai wajarnya, dikurangi kerugian penurunan nilai atas aset investasi tersebut yang sebelumnya diakui pada laba rugi, dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lain dan diakui pada laba rugi.

Rugi penurunan nilai tidak dapat dibalik melalui laba rugi, namun kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui pada penghasilan komprehensif lain.

b) Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, utang dan pinjaman atau derivatif. Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman, dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai utang dan pinjaman, seperti utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar dan utang bank jangka panjang.

Pengukuran Selanjutnya

Utang Usaha dan Utang Lain-lain Lancar

Liabilitas untuk utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar dan utang bank jangka panjang dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

a) Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Available-for-sale (AFS) financial assets (continued)

When there is impairment assessed, the cumulative loss, measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in the statement of profit or loss, is removed from OCI and recognized in the profit or loss.

Impairment losses are not reversed through profit or loss, but increases in their fair value subsequent to the impairment are recognized in OCI.

b) Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loan, trade and other payables, accrued expenses, and long-term bank loan.

Subsequent Measurement

Loans and borrowings

Liabilities for short-term bank loans, trade and other payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

b) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

b) Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Borrowing and Long-term Interest-bearing Loan

Subsequent to initial recognition, borrowings and long-term interest-bearing loans are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through amortization process using the EIR method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included under "Finance Costs" account in profit or loss.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying values is recognized in profit or loss.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya.

Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan, dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman belum menghasilkan. Kapitalisasi biaya pinjaman tersebut berakhir ketika tanaman menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Tanaman menghasilkan

Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial Instruments (continued)

c) Offsetting Value of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited.

Plantations

Plantations are classified as immature plantations and mature plantations.

Immature plantations

Immature plantations are stated at acquisition cost, which consist mainly of the accumulated cost of land clearing, planting, fertilizing, and upkeeping, including capitalization of borrowing cost for financing of immature plantations development and allocations of other indirect costs based on planted hectares at the end of the year, until the plantations is available to harvest, as long as the carrying value of the immature plantations does not exceed the lower of replanting cost or recoverable value. Immature plantations are not amortized.

Mature plantations

Cost of immature plantations is reclassified into mature plantations when the plantation starts to produce. The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Tanaman Perkebunan (lanjutan)

Tanaman menghasilkan (lanjutan)

(i) Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 3 tahun;
(ii) Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 3 tahun, dan atau antara 60% dari jumlah seluruh pohon per blok telah menghasilkan tandan buah matang atau berat rata-rata buah per tandan telah mencapai tiga kilogram atau lebih;
(iii) Tanaman karet dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 5 tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok sudah dapat dideres dan mempunyai ukuran lilit batang 45 cm yang diukur pada ketinggian satu meter dari pertautan okulasi;
(iv) Tanaman kina dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 6 tahun;
(v) Tanaman kopi dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 tahun;
(vi) Tanaman holtikultura dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 1 - 4 tahun.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diestimasi sebagai berikut:

Jenis aset tanaman menghasilkan	Tahun/*Years*
Teh	50
Kelapa sawit	25
Karet	25
Kina	15
Holtikultura	2 - 20

Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, yang memenuhi kriteria pengakuan, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Plantations (continued)

Mature plantations (continued)

(i) Tea plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 3 years old;
(ii) The palm oil plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 3 years old, and or about 60% of trees per block produces fresh fruit bunches with weight per bunch of 3 kilograms or more;
(iii) The rubber plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 5 years old and 60% of the entire trees of each block can be tapped and the diameter of the trees is 45 centimeters which is measured at the height of one meter above grafting joint;
(iv) The quinine plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 6 years old;
(v) The coffee plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 3 years old;
(vi) The holticulture plantation is classified as mature plantations when the plantation has been aged between 1 - 4 years;

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives, estimated as follows:

Type of mature plantation
Tea
Palm oil
Rubber
Quinine
Holticulture

Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Costs of replacing part of fixed assets, which met the recognition criteria, are recognized as part of cost.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Kelompok Usaha dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

Fixed Assets (continued)

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun / *Years*	
Bangunan	5 - 20	*Buildings*
Jalan, jembatan dan saluran air	5 - 16	*Road, bridges and tunnels*
Mesin dan instalasi	8 - 20	*Machineries and installations*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	5	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian dan kantor	5	*Farming and office equipments*

Jumlah tercatat aset tetap direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

Nilai residu aset, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each reporting year end and adjusted prospectively if necessary.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and available for use. Assets under construction are not depreciated until they fulfill the criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Aset Tetap (lanjutan)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset Tidak Produktif

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap non-produktif dalam kelompok aset lain-lain dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang Tata cara Penghapusbukukan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukukan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun "Aset Tidak Lancar Lainnya". Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini, diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

Hak Atas Tanah

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Aset Takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fixed Assets (continued)

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Non-Productive Assets

Fixed assets not used in operations are classified into account non - productive fixed assets in the group of other assets and are presented net of net of impairment.

Removal and transfer of fixed assets following the provisions set forth in the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises number PER-02/MBU/2010 on Procedures Penghapusbukukan and Transfer of Fixed Assets of State Owned Enterprises.

Fixed assets proposed to be written off who subsequently been approved by the Board of Directors and proposed to the Board of Commissioners for approval requested deletion by the Shareholders, the cost and accumulated depreciation of unproductive assets are reclassified to non-productive assets in the account "Other Non-current Assets". Accumulated impairment of the unproductive assets formed as an implementation of the accounting impairment.

Incomes earned from the sale of fixed assets of the proposed deletion of this, is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

Landrights

Legal cost of landrights in the form of Business Usage Rights (Hak Guna Usaha or HGU), Building Usage Right (Hak Guna Bangunan or HGB), and Usage Rights (Hak Pakai or HP) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of landrights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Impairment of Non-financial Assets

At the end of each reporting year, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each reporting date to assess whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pembibitan

Bibitan dicatat pada biaya perolehan, terdiri dari kapitalisasi biaya-biaya untuk persiapan pembibitan, pembelian pokok bibit dan pemeliharaan, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beban Tangguhan

Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tetap tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Kelompok Usaha beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Nursery

Costs incurred in the preparation of the nursery, purchase of seeds and their maintenance are stated at cost, and presented as part of "Other Non-current Assets" in the statement of financial position.

Deferred Charges

Expenses incurred which have future economic benefits and exceed the end of accounting period are capitalized and amortized over their estimated useful life by using the straight-line method.

Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expense when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying assets for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

Taxations

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:
i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak;
ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:
i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Taxations (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:
i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, Kelompok Usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan, beban-beban, dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

i) PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan

ii) piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Taxations (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value Added Tax (VAT)

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT, except:

i) the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and

ii) receivables and payables that are stated inclusive of the VAT amount.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses. Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Imbalan Kerja

a) Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek adalah tantiem dan bonus.

Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen Kelompok Usaha dan dibebankan pada laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen Kelompok Usaha dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

Apresiasi karyawan

Apresiasi karyawan ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Kelompok Usaha dan disahkan oleh RUPS. Selisih antara jumlah apresiasi karyawan yang diestimasi oleh manajemen Kelompok Usaha dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana apresiasi karyawan tersebut disahkan oleh RUPS.

b) Imbalan Pasca Kerja

Kelompok Usaha diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), yang merupakan kewajiban imbalan pasti.

Kelompok Usaha memberikan imbalan jasa masa kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55-56 tahun dan imbalan lainnya berupa santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, cuti panjang, dan penghargaan masa kerja dengan syarat-syarat yang telah diputuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Kecuali untuk imbalan pensiun, imbalan tersebut tidak didanai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Employee Benefits

a) Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are accrued to the employees. Included in short-term employee benefits are tantiem and bonus.

Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current consolidated comprehensive income. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Shareholders' Meeting (GSM). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the stockholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

Employee appreciation

Employee appreciation is provided based on the estimation of Group's management and approved by GSM. The difference between the total employee appreciation estimated by management and approved by stockholders is recognized in the period when such employee appreciation is approved by GSM.

b) Post-employment Benefits

The Group is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"), which represents an underlying defined benefit obligation.

The Group provides employee benefits for employees who have reached normal pension age of 55-56 years old and other benefits such as post-retirement benefits, long vacation, post-retirement health care benefits and long service award which conditions have been agreed in Mutual Work Agreement. Except for the pension benefit, the other benefits are not funded.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

b) Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:
i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban imbalan pasti neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:
i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, dan

ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

c) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca-kerja lainnya, seperti uang penghargaan. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Employee Benefits (continued)

b) Post-employment Benefits (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality long-term bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms of maturity similar to the related pension liability.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:
i) the date of the plan amendment or curtailment; and
ii) the date the Group recognizes related restructuring costs and termination benefits.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:
i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
ii) Net interest expense or income.

c) Other Post-employment Obligations

The Group also provides other post-employment benefits, such as service pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Imbalan Kerja (lanjutan)

d) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Kelompok Usaha mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Kelompok Usaha menunjukkan komitmennya untuk memutuskan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah akhir tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

e) Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Imbalan lainnya seperti imbalan cuti jangka panjang dihitung berdasarkan Peraturan Kelompok Usaha dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan PPN. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk kelapa sawit, karet, berikut produk-produk agrikultural lainnya, diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Employee Benefits (continued)

d) Termination Benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement age. The Group recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after the end of reporting date are discounted at present value.

e) Other Long-term Benefits

Other benefits such as long service leave is calculated in accordance with the Group Regulations, using the projected unit credit method and discounted to present value.

Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and VAT. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sale of Goods

Revenue from sales arising from physical delivery of oil palm products, rubber, as well as other agricultural products, is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset or liability.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Revenue and Expenses (continued)

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of Functional Currency

The currency of each of the entities under the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and expenses from sale of goods and services rendered.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tanaman Perkebunan Menghasilkan (lanjutan)

Perubahan tingkat pemakaian, perkembangan teknologi dan keterbatasan hak atau pembatasan lainnya dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas tanaman perkebunan menghasilkan Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 9.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan Kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 15.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets and Amortization of Mature Plantations (continued)

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these fixed assets and mature plantations, and therefore future depreciation and amortization charges could be revised.

The net carrying value of the Group's mature plantations as of reporting dates are disclosed in Note 9.

The net carrying value of the Group's fixed assets as of reporting dates are disclosed in Note 10.

Employee Benefits

The measurement of the Group's obligation and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, and retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. The net carrying value of the Group's employee benefits liability as of reporting dates are disclosed in Note 15.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi pajak yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 13.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Deferred tax assets as of reporting dates are disclosed in Note 13.

4. KAS DAN BANK

4. *CASH ON HAND AND IN BANKS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Kas - Rupiah	290.436.732	936.320.273	*Cash on hand - Rupiah*
Bank			*Cash in banks*
Pihak Berelasi (Catatan 6)			*Related parties (Note 6)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52.709.988.422	113.573.187.349	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.737.347.323	27.187.988.794	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.555.038.305	9.045.721.231	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	689.553.168	687.738.295	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	463.799.977	981.386.027	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.805.677.438	2.007.881.150	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.496.481.795	5.183.561.883	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Poundsterling Inggris			*Great Britain Poundsterling*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.530.020.189	1.019.297.638	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total	96.987.906.617	159.686.762.367	*Sub-total*
Pihak Ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mega Tbk	557.199.105	1.207.325.893	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	288.923.704	384.029.824	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	137.943.252	197.213.676	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub-total	984.066.061	1.788.569.393	*Sub-total*
Total bank	97.971.972.678	161.475.331.760	*Total cash in banks*
Total	**98.262.409.410**	**162.411.652.033**	***Total***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

4. KAS DAN BANK (lanjutan) / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)*

Kas dan bank diasuransikan terhadap risiko kehilangan dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp540 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (2015: Rp572 juta).

Cash on hand and in banks are insured against losses under blanket policies with sum insured amounting to Rp540 million for the year ended December 31, 2016 (2015: Rp572 million).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the risk faced by the Group.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Elinkindo International	17.307.012.302	21.119.196.923	*PT Elinkindo International*
PT Sariwangi	12.194.012.706	11.830.551.077	*PT Sariwangi*
PT Borwita Citra Prima	7.278.945.832	7.628.488.129	*PT Borwita Citra Prima*
PT Tumbuh Jaya Sentosa	6.831.000.000	-	*PT Tumbuh Jaya Sentosa*
Unilever Asia Pte. Ltd., Singapura	5.854.033.972	4.349.032.307	*Unilever Asia Pte. Ltd., Singapore*
Southland Rubber Pte. Ltd.	-	12.937.940.565	*Southland Rubber Pte. Ltd.*
PT Unilever Indonesia	-	10.066.029.092	*PT Unilever Indonesia*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	64.117.619.892	67.561.604.937	*Others (each below Rp5 billion)*
Sub-total	113.582.624.704	135.492.843.030	*Sub-total*
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai	(19.263.536.595)	(12.904.227.549)	*Less allowance for impairment in value*
Total piutang usaha pihak ketiga	94.319.088.109	122.588.615.481	*Total trade receivables third parties*
Pihak Berelasi (Catatan 6)			*Related parties (Note 6)*
PT Sinkona Indonesia Lestari	530.760.781	1.466.907.555	*PT Sinkona Indonesia Lestari*
Total	**94.849.848.890**	**124.055.523.036**	***Total***

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement allowance for impairment in value is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal tahun	(12.904.227.549)	(3.440.009.361)	*Balance at beginning of year*
Penyisihan atas penurunan nilai	(6.359.309.046)	(9.464.218.188)	*Allowance for impairment in value*
Saldo akhir tahun	**(19.263.536.595)**	**(12.904.227.549)**	***Balance at ending of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Management believes that the allowance for impairment in value of other receivables is adequate to cover possible losses from impairment of such other receivables.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 11) dan utang jangka panjang (Catatan 14).

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Trade receivables are used as collateral for the short-term bank loan (Note 11) and long-term debt (Note 14).

6. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan entitas yang berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah, entitas dalam pengendalian bersama, entitas asosiasi dan pihak berelasi lainnya.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kas dan bank (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo kas dan bank yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 98,70% dan 98,32% dari total kas dan bank.

Piutang usaha (Catatan 5)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo piutang usaha dengan entitas berelasi adalah masing-masing sebesar 0,56% dan 1,18% dari total piutang usaha.

6. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

The Group entered into transactions with related parties, with entity that related to the Government of the Republic Indonesia and Local Government, under common control entity, associate entity and other related party.

The significant balances with the related parties are as follows:

Cash on hand and in banks (Note 4)

As of December 31, 2016 and 2015, cash on hand and in banks balances placed on entities related to the Government represent 98.70% and 98.32% of the total cash on hand and in banks, respectively.

Trade receivables (Note 5)

As of December 31, 2016 and 2015, trade receivables with related parties represent 0.56% and 1,18% of the total trade receivables, respectively.

Piutang lain-lain / *Other receivables*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	206.718.750.000	-	*PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.203.267.934	3.203.267.934	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara XII	2.688.889.968	2.680.798.846	*PT Perkebunan Nusantara XII*
PT Perkebunan Nusantara IV	1.581.674.052	1.813.092.037	*PT Perkebunan Nusantara IV*
PT Perkebunan Nusantara XIII	1.156.054.437	1.143.123.405	*PT Perkebunan Nusantara XIII*
PT Perkebunan Nusantara I	1.129.978.926	1.126.917.350	*PT Perkebunan Nusantara I*
PT Perkebunan Nusantara XIV	894.322.463	887.399.382	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
Hamburg Indonesische Import Gmbh, Jerman (Indoham)	656.664.083	656.664.083	*Hamburg Indonesische Import Gmbh, Germany (Indoham)*
PT Perkebunan Nusantara II	649.316.396	649.316.396	*PT Perkebunan Nusantara II*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta)	804.422.810	529.230.156	*Others (each below Rp500 million)*
Sub-total	219.483.341.069	12.689.809.589	*Sub-total*
Penyisihan atas penurunan nilai	(3.859.932.017)	(3.859.932.017)	*Allowance for impairment in value*
Total	**215.623.409.052**	**8.829.877.572**	***Total***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Piutang lain-lain (lanjutan)

Pada bulan Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian pemberian pinjaman tanpa agunan kepada PSBI, entitas asosiasi, sebesar Rp187.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2017. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perpanjangan jangka waktu pinjaman tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo piutang lain-lain dengan entitas berelasi masing-masing sebesar 97,47% dan 53,95% dari total piutang lain-lain.

Aset lancar lainnya (Catatan 26)

Perusahaan memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual dalam bentuk kepemilikan saham BNI, yang diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 110.000 lembar saham. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai kepemilikan saham tersebut adalah sebesar Rp607.750.000 (2015: Rp548.900.000).

Utang bank jangka pendek (Catatan 11)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh saldo utang bank jangka pendek ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Utang usaha (Catatan 12)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang usaha dengan entitas berelasi masing-masing sebesar 11,36% dan 7,53% dari total utang usaha.

Utang lain-lain

6. *SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

The significant balances with the related parties are as follows: (continued)

Other receivables (continued)

In January 2016, the Company entered into a non-collateral granting loan agreement to PSBI, the associate entity, amounting Rp187,500,000,000. This loan bears interest at 10.00% per year and will be mature on January 6, 2017. Until the reporting date, the extension of term of loan still on progress to complete.

As of December 31, 2016 and 2015, other receivables with related parties represent 97.47% and 53.95% of the total other receivables, respectively.

Other current assets (Note 26)

The Company has available for sale financial asset in terms of ownership of BNI's share which is traded on the Indonesian Stock Exchange totaling to 110,000 shares. As of December 31, 2016, the ownership amounting to Rp607,750,000 (2015: Rp548,900,000).

Short-term bank loans (Note 11)

As of December 31, 2016 and 2015, all of short-term bank loan balances placed on entities related to the Government of the Republic of Indonesia.

Trade payables (Note 12)

As of December 31, 2016 and 2015, trade payables with related parties represent 11.36% and 7.53% of the total trade payables, respectively.

Other payables

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III)	391.567.820.285	60.871.102	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	10.827.802.924	9.505.644.887	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
PT Rolas Nusantara Mandiri	3.000.000.000	3.000.000.000	*PT Rolas Nusantara Mandiri*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	11.969.045.957	7.005.845.791	*Others (each below Rp3 billion)*
Total	**417.364.669.166**	**19.572.361.780**	***Total***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII AND ITS SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then Ended (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Utang lain-lain (lanjutan)

Pada bulan Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman tanpa agunan dengan PTPN III, entitas induk, sebesar Rp250.000.000.000, dengan penarikan pinjaman dalam 2 tahap. Tahap I sebesar Rp187.500.000.000, yang digunakan untuk penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi dan Tahap II sebesar Rp62.500.000.000, yang digunakan dalam rangka sertifikasi HGU Kebun Panglejar dan Cikumpay serta biaya perijinan internal lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman Tahap I akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2017 dan Tahap II jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2017.

Pada bulan November 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas kredit modal kerja dengan PTPN III, entitas induk, sebesar maksimum Rp350.000.000.000 dikenakan suku bunga 9,75% per tahun dan akan jangka waktu 12 bulan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan sudah menarik pinjaman sebesar Rp118.014.139.987.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo utang lain-lain dengan entitas berelasi masing-masing sebesar 90,28% dan 60,82% dari total utang lain-lain.

Utang bank jangka panjang (Catatan 14)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh saldo utang bank jangka panjang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

6. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The significant balances with the related parties are as follows: (continued)

Other payables (continued)

In January 2016, the Company entered into a non-collateral loan agreement with PTPN III, the parent company, amounting Rp250,000,000,000, with the drawdown in two phases. Phase I amounting to Rp187,500,000,000, which is used for investments in Associate Entity and Phase II amounting to Rp62,500,000,00, which is used in the context of certification HGU of Panglejar and Cikumpay Estates as well as other internal licensing fees. This loan bears interest at 10.00% per year. Phase I of loan will be mature on January 1, 2017 and Phase II on March 3, 2017.

In November 2016, the Company entered into credit facilities for working capital with PTPN III, parent entity, with maximum limit amounting to Rp350.000.000.000, bears interest at 9,75% per year and will be mature in 12 months. As of December 31, 2016, the Company have made a drawdown amounting to Rp118,014,139,987.

As of December 31, 2016 and 2015, other payables with related parties represent 90.28% and 60.82% of the total other payables, respectively.

Long-term bank loans (Note 14)

As of December 31, 2016 and 2015, all of long-term bank loan balances placed on entities related to the Government of the Republic of Indonesia.

Details of related parties, nature of relationship and nature of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Hubungan/** ***Relationship***	**Sifat transaksi/** ***Nature of transactions***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts, credit facilities for working capital and investments*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, investasi jangka pendek/ *Placement of current accounts, credit facilities for working capital and investments, short-term investment*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

6. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Details of related parties, nature of relationship and nature of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro, fasilitas kredit modal kerja dan investasi/ *Placement of current accounts, credit facilities for working capital and investments*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*	Penyewaan tanah/*rental of land*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten/*Entity related to Local Government of West Java and Banten*	Penempatan giro/*Placement of current accounts*
PT Perkebunan Nusantara I	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Perkebunan Nusantara II	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Perkebunan Nusantara III	Entitas induk/*Parent Company*	Pinjaman jangka panjang/*Long term debt*
PT Perkebunan Nusantara IV	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Perkebunan Nusantara XII	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Perkebunan Nusantara XIII	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Perkebunan Nusantara XIV	Entitas dalam pengendalian bersama/ *Under common control entity*	Tagihan biaya pengobatan/*Medical reimbursement*
PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas asosiasi/*Associate entity*	Penyertaan saham dan penjualan komoditas perkebunan/ *Investment in share, sales of plantation comodities*
Hamburg Indonesische Import Gmbh, Jerman/*Germany* (Indoham)	Entitas asosiasi/*Associate entity*	Penyertaan saham dan penagihan atas biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga/*Investment in share and reimbursement of costs that have paid to third parties*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Entitas asosiasi/*Associate entity*	Penyertaan saham dan jasa keagenan pemasaran/*Investment in share and marketing services*
PT Rolas Nusantara Mandiri	Entitas asosiasi/*Associate entity*	Penyertaan saham/*Investment in share*
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Entitas asosiasi/*Associate entity*	Penyertaan saham/*Investment in share*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (Persero) Tbk	Pihak berelasi lainnya/*Other related party*	Penempatan giro/*Placement of current accounts*
PT Mega Eltra	Pihak berelasi lainnya/*Other related party*	Pembelian bahan pembantu (pupuk)/*Purchase of supporting materials (fertilizer)*

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Barang jadi			*Finished goods*
Teh	170.558.016.674	84.579.332.468	*Tea*
Kelapa Sawit	31.654.047.735	8.431.350.557	*Palm Oil*
Karet	30.872.986.564	12.492.617.674	*Rubber*
Lain-lain	3.643.974.642	279.505.624	*Others*
Total barang jadi (Catatan 18)	236.729.025.615	105.782.806.323	*Total finished goods (Note 18)*
Persediaan kayu	46.184.641.412	47.270.306.413	*Timber stocks*
Bahan Pembantu			*Supplies*
Pupuk	54.321.057.501	102.362.501.179	*Fertilizer*
Bahan bakar dan suku cadang	10.610.721.734	12.664.053.493	*Fuels and sparepart*
Bahan Kemasan	7.531.862.292	9.386.648.903	*Packaging materials*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5 miliar)	7.812.606.281	17.093.903.866	*Others (each below Rp5 billion)*
Sub-total	80.276.247.808	141.507.107.441	*Sub-total*
Penyisihan penurunan nilai	(1.658.160.944)	(1.439.663.678)	*Allowance for impairment in value*
Total bahan pembantu	78.618.086.864	140.067.443.763	*Total supporting materials*
Total	**361.531.753.891**	**293.120.556.499**	***Total***

Persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp492 miliar dan Rp500 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

Inventories are insured against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp492 billion and Rp500 billion, for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. Management is of the opinion that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risk if the Group suffered losses for those risk.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan. Persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 11) dan utang jangka panjang (Catatan 14).

Management believes that the allowance for impairment in value of inventories is adequate to cover possible losses from impairment of such inventories. Inventories are used as collateral for the short-term bank loan (Note 11) and long-term debt (Note 14).

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *8. INVESTMENTS IN ASSOCIATE ENTITIES*

2016	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total kepemilikan awal tahun/ *Total investment at beginning of year*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deductions)*	Bagian laba (rugi) neto/ *Equity in net earnings (loss)*	Total kepemilikan akhir tahun/ *Total investment at ending of year*	2016
Metode Ekuitas						***Equity method***
PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)	49,00%	25.998.658.618	-	5.254.215.994	31.252.874.612	*PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)*
PT Bio Industri Nusantara (BIN)	25,00%	5.976.014.504	-	33.350.841	6.009.365.345	*PT Bio Industri Nusantara (BIN)*
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	25,00%	1.125.000.000	-	(1.125.000.000)	-	*PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)*
Sub-total		**33.099.673.122**	**-**	**4.162.566.835**	**37.262.239.957**	***Sub-total***
Metode Biaya Perolehan						***Cost method***
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	7,07%	6.884.000.000	-	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,00%	50.000.000	-	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)	9,11%	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	*PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)*
Indoham	5,60%	1.408.005.957			1.408.005.957	*Indoham*
Sub-total		11.342.005.957	-	-	11.342.005.957	*Sub-total*
Uang muka setoran saham		6.256.600.380	-	-	6.256.600.380	*Deposit for future stock subscription*
Penyisihan penurunan nilai		(1.408.005.957)	-	-	(1.408.005.957)	*Allowance for impairment in value*
		16.190.600.380	**-**	**-**	**16.190.600.380**	
Total		**49.290.273.502**	**-**	**4.162.566.835**	**53.452.840.337**	***Total***

2015	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total kepemilikan awal tahun/ *Total investment at beginning of year*	Penambahan (pengurangan)/ *Additions (deductions)*	Bagian laba (rugi) neto/ *Equity in net earnings (loss)*	Total kepemilikan akhir tahun/ *Total investment at ending of year*	2015
Metode Ekuitas						***Equity method***
PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)	49,00%	22.475.215.452	-	3.523.443.166	25.998.658.618	*PT Sinkona Indonesia Lestari (SIL)*
PT Bio Industri Nusantara (BIN)	25,00%	6.572.291.793	-	(596.277.289)	5.976.014.504	*PT Bio Industri Nusantara (BIN)*
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	25,00%	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000	*PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)*
Sub-total		**29.047.507.245**	**1.125.000.000**	**2.927.165.877**	**33.099.673.122**	***Sub-total***
Metode Biaya Perolehan						***Cost method***
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	7,07%	6.884.000.000	-	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,00%	50.000.000	-	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)	9,11%	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	*PT Rolas Nusantara Mandiri (RNM)*
Indoham	5,60%	1.408.005.957	-	-	1.408.005.957	*Indoham*
Sub-total		11.342.005.957	-	-	11.342.005.957	*Sub-total*
Uang muka setoran saham		6.256.600.380	-	-	6.256.600.380	*Deposit for future stock subscription*
Penyisihan penurunan nilai		(1.408.005.957)	-	-	(1.408.005.957)	*Allowance for impairment in value*
		16.190.600.380	**-**	**-**	**16.190.600.380**	
Total		**45.238.107.625**	**1.125.000.000**	**2.927.165.877**	**49.290.273.502**	***Total***

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)***

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Metode ekuitas (lanjutan)

SIL

SIL didirikan pada tahun 1986, berkedudukan di Subang, Jawa Barat dan bergerak dalam industri pembuatan garam kina. Produk yang dihasilkan dijual ekspor dan kualitasnya telah mendapat pengakuan internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001, ISO 14001, *Good Manufacturing Practice* (*GMP*) serta *Food and Drug Administration* (*FDA*) *Approval* tahun 1998.

BIN

BIN merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan, PTPN III, PTPN V, dan PTPN VII yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan No. S.289/14-BUMN/1999 tanggal 8 September 1999. Perjanjian kerjasama perusahaan patungan berdasarkan Akta Notaris Tien Norman Lubis, S.H. No. 10 tanggal 10 November 1999, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-06812HT.01.01.TH.2001 tanggal 28 Agustus 2001. BIN bergerak dibidang usaha pupuk hayati. BIN telah memulai kegiatan usaha komersial sejak tahun 2003.

PSBI

PSBI didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M No. 21 tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015. PSBI merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATE ENTITIES (continued)

Equity method (continued)

SIL

SIL was established in 1986, located at Subang, West Java and and engaged in a quinine salt process industry. The product is for export purposes and the quality have international acknowledgement with certificates of ISO 9001, ISO 14001, Good Manufacturing Practice (GMP) and Foof and Drug Administration (FDA) Approval in 1998.

BIN

BIN is a joint company between the Company, PTPN III, PTPN V, and PTPN VII that approved by Minister of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia in its letter No. S.289/14-BUMN/1999 dated September 8, 1999. Joint company cooperation agreement based on Notarial Deed No. 10 of Tien Norman Lubis, S.H. dated November 10, 1999, and approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its letter No. C-06812HT.01.01.TH.2001 dated August 28, 2001. BIN engaged in organic fertilizer. BIN commenced its commercial operations in 2003.

PSBI

PSBI was established based on Notarial Deed No. 21 of Mala Mukti, S.H., LL.M dated October 2, 2015, regarding to high-speed railway Jakarta-Bandung. It was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-2460435.AH.01.01 Tahun 2015 dated October 12, 2015. PSBI is a joint company between the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Metode biaya perolehan

KPBN

Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009, disetujui perubahan Kantor Pemasaran Bersama menjadi Perseroan Terbatas. Perusahaan bersama dengan PTPN I sampai dengan XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) mendirikan KPBN. KPBN didirikan berdasarkan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH. No. 4 tanggal 16 November 2009. KPBN adalah perusahaan yang merupakan transformasi dari Kantor Pemasaran Bersama yang menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

RPN

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi saham pada RPN sebanyak 50 lembar saham dengan nilai sebesar Rp50.000.000 dan dengan persentase kepemilikan sebesar 6,00%. RPN berkedudukan di Bogor, Jawa Barat dan bergerak dalam bidang jasa penelitian, pelatihan, pengolahan data, dan konsultasi, menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perdagangan. Perusahaan telah menyetor uang muka setoran saham kepada RPN sebesar Rp6.256.600.380.

RNM

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan investasi saham pada RNM sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000 dan dengan persentase kepemilikan sebesar 9,11%. RNM berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur dan bergerak dalam bidang perdagangan hilir kopi dan teh serta produk hilir lainnya.

Indoham

Indoham bergerak dalam bidang usaha pemasaran dan perdagangan komoditi perkebunan dan bertempat kedudukan di Hamburg, Jerman. Mengingat kondisi kesulitan keuangan Indoham, Perusahaan telah membuat penyisihan atas penurunan nilai penyertaan saham pada Indoham.

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATE ENTITIES (continued)

Cost method

KPBN

Based on Minister of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia's Letter No. S-674/MBU/2009 dated September 30, 2009, approved the changes in joint cooperation representatives into limited liability company. The Company with PTPN I until XIV and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) establish KPBN. KPBN was established based on Notarial Deed No. 4 of N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. dated November 16, 2009. KPBN is a company which is transformation from joint cooperation representatives become legal entity of limited liability company.

RPN

In 2009, the Company have investment in share in RPN totalling to 50 shares with amounting to Rp50,000,000 and percentage of ownership 6.00%. RPN located at Bogor, West Java and engaged to research services, training, data processing, and consultation, to generate a business in agriculture and trading. The Company have paid a deposit for future stock subscription amounting to Rp6,256,600,380.

RNM

In 2012, the Company have investment in share in RNM totaling to 3,000 shares with amounting to Rp3,000,000,000 and percentage of ownership 9.11%. RNM located at Surabaya, East Java and engaged in downstream trading of coffee, tea and other products.

Indoham

Indoham is engaged in marketing and trading of plantation commodities and located at Hamburg, Germany. Regarding to Indoham's financial difficulties, the Company made allowance for impairment in value of investment in share in Indoham.

9. TANAMAN PERKEBUNAN / *PLANTATIONS*

Tanaman menghasilkan / *Mature plantations*

2016	Saldo awal 31 Des. 2015/ *Beginning balance Dec. 31, 2015*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir 31 Des. 2016/ *Ending Balance Dec. 31, 2016*	*2016*
Nilai perolehan						***Cost***
Sawit	688.979.170.760	-	-	50.523.609.485	739.502.780.245	*Palm Oil*
Karet	715.945.456.772	-	-	108.724.026.895	824.669.483.667	*Rubber*
Teh	372.169.880.014	-	-	76.345.056.445	448.514.936.459	*Tea*
Kina	7.943.325.732	-	-	-	7.943.325.732	*Quinine*
Kopi	-	-	-	1.187.595.021	1.187.595.021	*Coffee*
Holtikultura	71.632.791.142	-	-	11.243.293.504	82.876.084.646	*Holticulture*
Sub-total	1.856.670.624.420	-	-	248.023.581.350	2.104.694.205.770	*Sub-total*
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Sawit	157.547.918.852	29.044.584.541	-	-	186.592.503.393	*Palm Oil*
Karet	139.631.048.292	32.071.692.192	-	-	171.702.740.484	*Rubber*
Teh	71.821.474.801	18.580.465.787	-	-	90.401.940.588	*Tea*
Kina	5.784.641.416	2.158.684.316	-	-	7.943.325.732	*Quinine*
Kopi	-	118.759.502	-	-	118.759.502	*Coffee*
Holtikultura	12.653.925.958	16.279.462.249	-	-	28.933.388.207	*Holticulture*
	387.439.009.319	98.253.648.587	-	-	485.692.657.906	
Penyisihan penurunan nilai	-	49.836.648.181	-	-	49.836.648.181	*Allowance for impairment in value*
Sub-total	387.439.009.319	148.090.296.768	-	-	535.529.306.087	*Sub-total*
Nilai buku	**1.469.231.615.101**				**1.569.164.899.683**	***Net book value***

2015	Saldo awal 31 Des. 2014/ *Beginning balance Dec. 31, 2014*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir 31 Des. 2015/ *Ending Balance Dec. 31, 2015*	*2015*
Nilai perolehan						***Cost***
Sawit	607.856.796.759	-	696.526.440	81.818.900.441	688.979.170.760	*Palm Oil*
Karet	607.331.777.017	-	4.893.010.634	113.506.690.389	715.945.456.772	*Rubber*
Teh	309.599.131.381	-	19.585.535.843	82.156.284.476	372.169.880.014	*Tea*
Kina	7.943.325.732	-	-	-	7.943.325.732	*Quinine*
Holtikultura	29.061.444.288	-	9.992.673.302	52.564.020.156	71.632.791.142	*Holticulture*
Sub-total	1.561.792.475.177	-	35.167.746.219	330.045.895.462	1.856.670.624.420	*Sub-total*
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Sawit	125.267.287.517	32.838.524.394	557.893.059	-	157.547.918.852	*Palm Oil*
Karet	108.407.730.773	34.749.514.213	3.526.196.694	-	139.631.048.292	*Rubber*
Teh	69.933.224.897	9.896.100.900	8.007.850.996	-	71.821.474.801	*Tea*
Kina	5.412.970.376	371.671.040	-	-	5.784.641.416	*Quinine*
Holtikultura	5.463.344.008	12.601.987.888	5.411.405.938	-	12.653.925.958	*Holticulture*
Sub-total	314.484.557.571	90.457.798.435	17.503.346.687	-	387.439.009.319	*Sub-total*
Nilai buku	**1.247.307.917.606**				**1.469.231.615.101**	***Net book value***

9. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan)

Tanaman menghasilkan (lanjutan)

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penyisihan penurunan nilai atas tanaman menghasilkan dengan kondisi fisik yang rusak dan mati sebesar Rp49.836.648.181.

Pengurangan tanaman menghasilkan merupakan penghapusan dan pemindahan tanaman menghasilkan ke kelompok aset tidak produktif yang diamortisasikan sekaligus pada saat pemindahan. Beban amortisasi sekaligus tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban operasi lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

9. *PLANTATIONS (continued)*

***Mature plantations* (continued)**

In 2016, the Company provided an allowance for impairment in value for mature plantations which were damaged and deceased amounting to Rp49,836,648,181.

Deductions of mature plantations are a write-off and reclassification of mature plantations into unproductive assets which directly amortize at the time of reclassification. Amortization expense presented as part of "Other operating expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tanaman belum menghasilkan / ***Immature plantations***

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	990.203.443.531	1.163.188.370.015	*Beginning balance*
Kapitalisasi biaya pada tahun berjalan	143.775.504.952	157.060.968.978	*Capitalization of cost during the year*
Penyisihan penurunan nilai	(157.350.481.937)	-	*Allowance for impairment in value*
Reklasifikasi ke tanaman menghasilkan	(248.023.581.350)	(330.045.895.462)	*Reclassification to mature plantations*
Saldo akhir	**728.604.885.196**	**990.203.443.531**	***Ending balance***

Beban bunga pinjaman utang bank jangka panjang yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan pada tahun 2016 sebesar Rp114.135.651.090 (2015: Rp117.044.609.757).

Borrowing cost of long-term bank loans was capitalized into immature plantations in 2016 amounting to Rp114,135,651,090 (2015: Rp117,044,609,757).

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan penyisihan penurunan nilai atas tanaman belum menghasilkan dengan kondisi fisik yang rusak dan mati sebesar Rp157.350.481.937.

In 2016, the Company provided an allowance for impairment in value for immature plantations which were damaged and deceased amounting to Rp157,350,481,937.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, komposisi luas areal dalam hektar (ha) tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk setiap jenis tanaman adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

As of December 31, 2016 and 2015, composition of area in hectares of mature plantations (TM) and immature plantations (TBM) for each commodities are as follows (unaudited):

Tanaman	31 Des. 2016/ *Dec. 31, 2016* TM (Ha)	TBM (Ha)	31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015* TM (Ha)	TBM (Ha)	*Plantation*
Sawit	17.432	1.857	16.964	2.484	*Palm Oil*
Karet	17.880	5.079	17.605	6.024	*Rubber*
Teh	20.158	461	19.259	1.360	*Tea*
Kina	469	214	511	214	*Quinine*
Holtikultura	4.841	7.722	520	8.403	*Holticulture*
Total	**60.780**	**15.333**	**54.859**	**18.485**	***Total***

9. TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan)

Seluruh tanaman perkebunan tidak diasuransikan terhadap risiko kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, hama penyakit dan risiko lainnya.

9. PLANTATIONS (continued)

All plantations are not covered by insurance against risks of loss due to fire, plagues and other risks.

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSETS*

2016	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*2016*
	Mutasi selama Tahun Berjalan/*Movements During the Year*					
Biaya Perolehan						*Cost*
Tanah	5.519.642.015.000	-	-	-	5.519.642.015.000	*Land*
Bangunan	231.637.436.515	5.532.766.975		-	237.170.203.490	*Buildings*
Jalan, jembatan, dan saluran air	86.421.581.948	-	-	-	86.421.581.948	*Road, bridges and tunnels*
Mesin dan instalasi	522.722.108.986	25.392.694.618	-	-	548.114.803.604	*Machineries and installations*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	15.247.185.386	901.100.000	-	-	16.148.285.386	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian dan kantor	106.779.266.294	1.417.371.238	-	-	108.196.637.532	*Farming and office equipments*
Aset dalam penyelesaian	507.791.999	-	-	(507.791.999) *)	-	*Constructions in progress*
Total biaya perolehan	**6.482.957.386.128**	**33.243.932.831**	**-**	**(507.791.999)**	**6.515.693.526.960**	***Total cost***
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan	141.439.595.758	9.487.336.496	-	-	150.926.932.254	*Buildings*
Jalan, jembatan, dan saluran air	45.975.644.731	3.935.721.991	-	-	49.911.366.722	*Road, bridges and tunnels*
Mesin dan instalasi	322.849.593.893	732.456.587	-	-	323.582.050.480	*Machineries and installations*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	12.843.405.275	913.389.719	-	-	13.756.794.994	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian dan kantor	73.854.948.845	12.851.870.672	-	-	86.706.819.517	*Farming and office equipments*
	596.963.188.502	27.920.775.465	-	-	624.883.963.967	
Penyisihan penurunan nilai	-	14.438.148.432	-	-	14.438.148.432	***Allowance for impairment in value***
Total akumulasi penyusutan	**596.963.188.502**	**42.358.923.897**	-	**-**	**639.322.112.399**	***Total accumulated depreciation***
Nilai Buku Neto	**5.885.994.197.626**				**5.876.371.414.561**	***Net Book Value***

*) reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya/*reclassification to other non-current assets.*

2015	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*2015*
	Mutasi selama Tahun Berjalan/*Movements During the Year*					
Biaya Perolehan						*Cost*
Tanah	31.131.112.974	5.488.510.902.026	-	-	5.519.642.015.000	*Land*
Bangunan	230.177.546.515	-	-	1.459.890.000	231.637.436.515	*Buildings*
Jalan, jembatan, dan saluran air	84.143.591.948	2.277.990.000	-	-	86.421.581.948	*Road, bridges and tunnels*
Mesin dan instalasi	516.633.135.130	559.073.856	-	5.529.900.000	522.722.108.986	*Machineries and installations*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	15.247.185.386	-	-	-	15.247.185.386	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian dan kantor	96.081.056.976	9.694.909.318	-	1.003.300.000	106.779.266.294	*Farming and office equipments*
Aset dalam penyelesaian	1.746.714.739	6.754.167.260	-	(7.993.090.000)	507.791.999	*Constructions in progress*
Total biaya perolehan	**975.160.343.668**	**5.507.797.042.460**	**-**	**-**	**6.482.957.386.128**	***Total cost***

10. ASET TETAP (lanjutan) / *10. FIXED ASSETS (continued)*

2015	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	*2015*
	Mutasi selama Tahun Berjalan/*Movements During the Year*					
Akumulasi Penyusutan						*Accumulated Depreciation*
Bangunan	132.223.720.918	9.215.874.840	-	-	141.439.595.758	*Buildings*
Jalan, jembatan, dan saluran air	40.517.614.100	5.458.030.631	-	-	45.975.644.731	*Road, bridges and tunnels*
Mesin dan instalasi	305.742.362.912	17.107.230.981	-	-	322.849.593.893	*Machineries and installations*
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	12.354.421.891	488.983.384	-	-	12.843.405.275	*Vehicles and other transportation equipments*
Peralatan pertanian dan kantor	59.173.421.391	14.681.527.454	-	-	73.854.948.845	*Farming and office equipments*
Total akumulasi penyusutan	**550.011.541.212**	**46.951.647.290**	**-**	**-**	**596.963.188.502**	***Total accumulated depreciation***
Nilai Buku Neto	**425.148.802.456**				**5.885.994.197.626**	***Net Book Value***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, bangunan, mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.143 miliar dan Rp1.197 miliar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan tersebut.

As of December 31, 2016 and 2015, certain buildings, machinery and equipment and vehicles are insured against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp1,143 billion and Rp1,197 billion, respectively. The management is of the opinion that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

Beban penyusutan aset tetap dibebankan pada:

Depreciation expense is charged to the following accounts:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban pokok penjualan	27.253.184.426	46.086.336.384	*Cost of sales*
Beban umum dan administrasi	667.591.039	865.310.906	*General and administrative expenses*
Total	**27.920.775.465**	**46.951.647.290**	***Total***

Kelompok Usaha melakukan penilaian kembali hak atas tanah untuk tujuan akuntansi pada tanggal 31 Desember 2015. Penilaian kembali dilakukan oleh KJPP Nanang Rahayu dan Rekan selaku penilai independen dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*). Nilai hak atas tanah sebelum dilakukan penilaian kembali adalah Rp31.131.112.974. Keuntungan dari revaluasi aset tetap tanah Kelompok Usaha sebesar Rp5.488.510.788.068 dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain dan kepentingan non-pengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group revalued its land right for accounting purposes as of December 31, 2015. Revaluation was performed by KJPP Nanang Rahayu dan Rekan as an independent appraiser using income approach. Land rights's value before revaluation is Rp31,131,112,974. The Group's gain on revaluation of land is Rp5,488,510,788,068 recorded as other comprehensive income and non-controlling interest in the consolidated statement of financial position.

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap tanah digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 11) dan utang jangka panjang (Catatan 14).

10. FIXED ASSETS (continued)

Land is used as collateral for the short-term bank loan (Note 11) and long-term debt (Note 14).

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek merupakan pinjaman dari bank kepada Perusahaan untuk modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:

11. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans are obtained from banks for working capitals of the Company, with details as follows:

Nama Kreditur/*Name of Crediturs*	Jumlah Batas Pinjaman Maksimum/ *Maximum Credit Limit*	Batas Jangka Waktu Pinjaman/*End of Availability Period*	Total 31 Desember/*December 31,* 2016	2015
Entitas berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*				
Rupiah				
Bank Sindikasi/*Syndicated Bank*	200.000.000.000	September 2017/ *September 2017*	197.182.575.019	195.139.405.423

Pada bulan September 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Sindikasi, yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan batas maksimal pinjaman sebesar Rp200.000.000.000 dan *Forex Line* (FL) dengan batas maksimal pinjaman sebesar USD11.000.000 dan akan jatuh tempo pada bulan September 2017.

On September 2015, the Company obtained credit facilities for working capital (KMK) from Syndicated Bank, which consist of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with maximum credit limit amounting to Rp200,000,000,000 and Forex Line (FL) amounting to USD11,000,000 and will be mature on September 2017.

Pada bulan November 2016, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp2.043.169.596.

On November 2016, the Company made a drawdown amounting to Rp2.043.169.596.

Suku Bunga

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pinjaman dikenakan suku bunga tahunan sebesar 10,00% (2015: 10,50%).

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mengajukan permohonan penurunan suku bunga kredit dan telah disetujui oleh Bank Sindikasi pada bulan April 2016.

Interest Rate

For the year ended December 31, 2016, the loans denominated bear annual interest 10.00% (2015: 10.50%).

On February 2016, the Company applied the reduction of annual interest rate and approved by the Syndicated Bank on April 2016.

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan beberapa aset tetap tanah termasuk aset yang berada di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 14).

Collateral

As of December 31, 2016 and 2015, all credit facilities obtained by the Company are secured by trade receivables, inventories and certain land including Business Usage Right Certificate (Sertifikat Hak Guna Usaha or HGU). All collateral is also used as collateral for short-term debt (Note 14).

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) / *11. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)*

Pembatasan-pembatasan / ***Covenants***

Perjanjian pinjaman Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain, dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

Credit agreements covering the loans of the Company mentioned above provide several negative covenants, such as, change the article of association, granting of and obtaining new loans, made a new investment in other company, and engage as guarantor or pledge their assets and transfer the collaterals.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman / ***Compliance with Loan Covenants***

Sehubungan dengan kewajiban untuk memenuhi rasio keuangan, pada tanggal 30 Desember 2016, Bank Sindikasi memberi persetujuan kepada Perusahaan atas terlewatinya beberapa persyaratan rasio keuangan per tanggal 31 Desember 2016, seperti ditetapkan di dalam perjanjian kredit.

Concerning indebtedness to comply with financial ratios, on December 30, 2016, the Syndicated Bank approved the over threshold of certain financial ratios of the Company as of December 31, 2016, as required in the loan agreement.

12. UTANG USAHA / *12. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of trade payables are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Pihak Ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Sri Rejeki Fertilizerindo	40.134.953.525	30.184.739.950	*PT Sri Rejeki Fertilizerindo*
PT Betha Tri Adhi	11.793.230.000	17.813.370.000	*PT Betha Tri Adhi*
PT Darma Dwijaya	83.800.000	13.885.524.920	*PT Darma Dwijaya*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar)	198.322.045.447	179.968.297.171	*Others (each below Rp10 billion)*
Sub-total	250.334.028.972	241.851.932.041	*Sub-total*
Pihak Berelasi (Catatan 6)			*Related party (Note 6)*
Rupiah			*Rupiah*
PT Mega Eltra	32.092.093.976	19.720.988.160	*PT Mega Eltra*
Total	**282.426.122.948**	**261.572.920.201**	***Total***

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATIONS*

a. Pajak dibayar di muka / ***a. Prepaid tax***

Perusahaan / ***The Company***

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka pasal 21.

This account consists of prepaid tax article 21.

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATIONS (continued)*

b. Tagihan pajak penghasilan / *b. Claims for income tax refund*

Tagihan pajak penghasilan terdiri dari: / *Claims for income tax refund consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Tahun 2014	-	28.367.246.527	*Year 2014*

Pada bulan April 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan tagihan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2014. Berdasarkan surat tersebut, Kantor Pajak setuju untuk mengembalikan lebih bayar atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2014 sebesar Rp22.718.448.151 dari nilai tagihan sebesar Rp28.367.246.527 dan mencatatkan selisihnya sebesar Rp5.648.798.376 sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Penyesuaian atas Pajak Kini Tahun Lalu".

In April 2016, the Company received tax assessment letter from the Tax Office pertaining to claims for income tax refund for fiscal year 2014. Based on the said tax assessment letter, the Tax Office agreed to refund the overpayments of corporate income taxes for fiscal year 2014 amounting to Rp22,718,448,151 from the original claims of Rp28,367,246,527 and recorded the difference amounting to Rp5,648,798,376 as "Income Tax Expense-Adjustment in repect of Current Tax of the Previous Year".

c. Utang pajak / *c. Taxes payable*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Perusahaan			***The Company***
Pajak penghasilan			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	31.740.000	3.392.706.908	*Article 4 (2)*
Pasal 21	331.979.919	-	*Article 21*
Pasal 23	191.287.943	317.604.257	*Article 23*
PPN	19.862.613.729	27.031.068.811	*VAT*
Pajak Bumi dan Bangunan	65.315.558.176	43.974.878.038	*Land and building tax*
Lain-lain	3.474.435.194	9.915.229.048	*Others*
Sub-total	**89.207.614.961**	**84.631.487.062**	***Sub-total***
Entitas anak			***The Subsidiary***
Pajak penghasilan			*Income tax:*
Pasal 21	183.726.589	193.459.297	*Article 21*
Pasal 23	-	747.970	*Article 23*
Pasal 25	45.587.402	45.587.402	*Article 25*
Pasal 29	243.716.426	720.570.224	*Article 29*
PPN	632.305.669	418.307.235	*VAT*
Sub-total	**1.105.336.086**	**1.378.672.128**	***Sub-total***
Total	**90.312.951.047**	**86.010.159.190**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan) / *13. TAXATIONS (continued)*

c. Utang pajak (lanjutan) / *c. Taxes payable (continued)*

Perusahaan / ***The Company***

Pada tahun 2016, Perusahaan menerima sejumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat tagihan Pajak (STP) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun fiskal 2014 dan 2015 dengan total Rp3.474.435.194.

In 2016, the Company received several Tax Assessment Letter of Underpayment (SKPKB) and Tax Assessment Letter (STP) of Land and Building Tax (PBB) for fiscal year 2014 and 2015 totaling to Rp3,474,435,194.

Pada tahun 2015, Perusahaan menerima sejumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan pasal 4 (2), 21 dan 23 dan PPN untuk tahun fiskal 2011 dan 2012 dan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2011 dengan total Rp9.915.229.048.

In 2015, the Company received several Tax Assessments Letter of Underpayment (SKPKB) Income Tax article 4 (2), 21 and 23 and VAT for fiscal year 2011 and 2012 and Corporate Income Tax for fiscal year 2011 totalling to Rp9,915,229,048.

d. Manfaat/(beban) pajak penghasilan / *d. Income tax benefits/(expense)*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Perusahaan			***The Company***
Kini	-	-	*Current*
Penyesuaian atas pajak kini tahun lalu	(5.648.798.376)	(3.860.461.507)	*Adjustments in respect of Current Tax of the Previous Year*
Tangguhan	34.314.448.947	69.741.616.128	*Deferred*
Penyesuaian atas pajak tangguhan tahun lalu	-	(10.183.493.892)	*Adjustments in respect of Deferred Tax of the Previous Year*
Sub-total	**28.665.650.571**	**55.697.660.729**	***Sub-total***
Entitas anak			***The Subsidiary***
Kini	(790.765.250)	(1.263.554.000)	*Current*
Tangguhan	(33.750.318)	317.596.681	*Deferred*
Sub-total	**(824.515.568)**	**(945.957.319)**	***Sub-total***
Total	**27.841.135.003**	**54.751.703.410**	***Total***

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATIONS (continued)

e. Pajak kini

e. Current tax

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit/(loss) before tax with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2016 and 2015, is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(404.651.704.045)	(619.226.346.740)	*Loss before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(2.323.778.485)	(3.631.077.647)	*Profit before tax - Subsidiary*
Bagian laba dari entitas asosiasi	(4.784.481.442)	(3.167.627.808)	*Income from associate entities*
Rugi sebelum pajak – Perusahaan	**(411.759.963.972)**	**(626.025.052.195)**	***Loss before tax – the Company***
Ditambah/(dikurangi)			*Addition/(deduction):*
Beda temporer			***Temporary differences***
Penyusutan dan amortisasi	(55.932.002.874)	(85.408.175.979)	*Depreciations and amortizations*
Imbalan kerja	(25.273.923.014)	420.803.855.248	*Employee benefits*
Penyisihan penurunan nilai piutang	6.529.210.895	8.372.475.612	*Allowance for impairment in value trade receivables*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	195.775.769	613.413.746	*Allowance for impairment in value inventories*
Penyisihan penurunan nilai aset	230.881.531.595	-	*Allowance for impairment in value Assets*
Beban gaji yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan	(12.780.901.757)	(68.186.062.993)	*Salaries expense capitalized to immature plantations*
Aset tidak produktif		4.431.793.657	*Non-productive assets*
Beban tangguhan	(6.361.894.821)	(1.660.834.788)	*Deferred charges*
Beda tetap			***Permanent differences***
Beban yang tidak dapat dikurangkan	14.176.957.208	39.798.401.974	*Non-deductible expenses*
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final	(36.886.742.432)	(15.819.273.991)	*Income already subjected to final tax*
Lain-lain		-	*Others*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. TAXATIONS (continued)

e. Current tax (continued)

The reconciliation between profit/(loss) before tax with the estimated taxable income for the years ended December 31, 2016 and 2015, is as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rugi fiskal tahun berjalan - Perusahaan	(297.211.953.403)	(323.079.459.709)	*Tax loss carryforward – the Company*
Kerugian yang dapat dikompensasi – saldo awal tahun	(405.847.957.834)	(82.768.498.125)	*Tax loss carryforward – at beginning of year*
Kerugian yang sudah tidak dapat dikompensasi karena Pengampunan Pajak	405.847.957.834	-	*Tax loss carryforward which can not compensate due to Tax Amnesty*
Kerugian yang dapat dikompensasi – saldo akhir - Perusahaan	**(297.211.953.403)**	**(405.847.957.834)**	***Tax loss carryforward – at ending year - the Company***
Beban pajak penghasilan - Perusahaan	-	-	*Income tax expense - the Company*
Beban pajak penghasilan - Entitas Anak	790.765.250	1.263.554.000	*Income tax expense - the Subsidiary*
Beban pajak penghasilan - Kelompok Usaha	790.765.250	1.263.554.000	*Income tax expense - the Group*
Pajak dibayar dimuka - Entitas Anak			*Prepaid taxes - the Subsidiary*
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 23	-	82.684.800	*Article 23*
Pasal 25	547.048.824	460.298.976	*Article 25*
Sub-total	547.048.824	542.983.776	*Sub-total*
Kurang (Lebih) bayar Pajak penghasilan badan - Perusahaan	-	-	*Under (over) payment of Corporate Income Tax - the Company*
Pajak penghasilan badan - Entitas Anak	243.716.426	720.570.224	*Corporate income tax - the Subsidiary*

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak kini (lanjutan)

Pada tahun 2016, Perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Perusahaan menghapuskan kerugian pajak yang dapat dikompensasi pada awal tahun sebesar Rp405.847.957.834. Perusahaan juga menghapus utang denda pajak dan menyajikan penghapusan tersebut sebagai bagian dari penghasilan operasi lain dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Catatan 21).

f. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Mutasi aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

13. TAXATIONS (continued)

e. Current tax (continued)

In 2016, the Company decided to utilize tax amnesty facility based on the Tax Amnesty Law. In relation to that matter, the Company has written-off tax loss carryforward at beginning of year amounting to Rp405,847,957,834. The Company also written-off tax penalty liabilities and presented it as part of other operating income in the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Note 21).

f. Deferred tax assets/(liabilities)

Movements of deferred tax assets/(liabilities) are as follows:

	31 Desember 2015/ *December 31, 2015* (Disajikan kembali/ *As restated* – Catatan 28/ *Note 28*)	Dibebankan pada laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lainnya/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax Assets (Liabilities)*				
Perusahaan/				
The Company				
Liabilitas imbalan kerja/*Employee benefits liability*	375.380.062.661	(8.277.464.483)	31.035.273.083	398.137.871.261
Liabilitas jangka panjang lainnya/ *Other non-current liability*	-	1.958.983.729	-	1.958.983.729
Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment in value*				
Piutang/*Account receivables*	3.918.104.247	1.632.302.724	-	5.550.406.971
Persediaan/*Inventories*	325.711.734	48.943.942	-	374.655.676
Aset tidak produktif/*Non-productive asset*	1.107.948.414	-	-	1.107.948.414
Aset tanaman dan aset tetap/ *Plantation and fixed assets*	-	57.720.382.899	-	57.720.382.899
Beban tangguhan/*Deferred charges*	619.471.357	(1.590.473.705)	-	(971.002.348)
Aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Available for sale financial asset*	121.412.500	-	(257.537.500)	(136.125.000)
Tenaga kerja di TBM/*Labour in immature plantation*	(92.897.908.808)	(3.195.225.440)	-	(96.093.134.248)
Aset tanaman dan aset tetap/ *Plantation and fixed assets*	(83.443.784.911)	(13.983.000.719)	-	(97.426.785.630)
Total Perusahaan/ *Total the Company*	**205.131.017.194**	**34.314.448.947**	**30.777.735.583**	**270.223.201.724**
Entitas Anak/*The Subsidiary*				
Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment in value*				
Piutang/*Account receivables*	272.935.644	(42.475.462)	-	230.460.182
Persediaan/*Inventories*	34.204.186	5.680.374	-	39.884.560
Aset tetap/*Fixed assets*	10.456.851	3.044.770	-	13.501.621
Total Entitas Anak/ *Total the Subsidiary*	**317.596.681**	**(33.750.318)**	**-**	**283.846.363**
Total/*Total*	**205.448.613.875**	**34.280.698.629**	**30.777.735.583**	**270.507.048.087**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Mutasi aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

13. TAXATIONS (continued)

f. Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

Movements of deferred tax assets/(liabilities) are as follows: (continued)

	31 Desember 2014/ 1 Januari 2015/ *December 31, 2014/ January 1, 2015* (Disajikan kembali/ *As restated* - Catatan 28/	Penyesuaian atas pajak tangguhan tahun lalu/ *Adjustments in respect of Deferred Tax of the Previous Year*	Dibebankan pada laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lainnya/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015* (Disajikan kembali/ *As restated* - Catatan 28/ *Note 28*)
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan/*Deferred Tax Assets (Liabilities)*					
Perusahaan/ ***The Company***					
Liabilitas imbalan kerja/*Employee benefits liability*	235.891.395.373	-	105.200.963.814	34.287.703.474	375.380.062.661
Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment in value*					
Piutang/*Account receivables*	1.662.984.507	162.000.837	2.093.118.903	-	3.918.104.247
Persediaan/*Inventories*	172.358.297	-	153.353.437	-	325.711.734
Aset tidak produktif/ *Non-productive asset*	-	-	1.107.948.414	-	1.107.948.414
Beban tangguhan/ *Deferred charges*	251.677.830	783.002.224	(415.208.697)	-	619.471.357
Aset keuangan tersedia untuk dijual/*Available for sale financial asset*	352.001.489	(215.223.901)	-	(15.365.088)	121.412.500
Tenaga kerja di TBM/ *Labour in immature plantation*	(94.349.700.902)	18.498.307.842	(17.046.515.748)	-	(92.897.908.808)
Aset tanaman dan aset tetap/ *Plantation and fixed assets*	(32.680.160.022)	(29.411.580.894)	(21.352.043.995)	-	(83.443.784.911)
Total Perusahaan/ ***Total the Company***	**111.300.556.572**	**(10.183.493.892)**	**69.741.616.128**	**34.272.338.386**	**205.131.017.194**
Entitas Anak/*The Subsidiary*					
Penyisihan penurunan nilai/ *Allowance for impairment in value*					
Piutang/*Account receivables*	-	-	272.935.644	-	272.935.644
Persediaan/*Inventories*	-	-	34.204.186	-	34.204.186
Aset tetap/*Fixed assets*	-	-	10.456.851	-	10.456.851
Total Entitas Anak/ ***Total the Subsidiary***	**-**	**-**	**317.596.681**	**-**	**317.596.681**
Total/*Total*	**111.300.556.572**	**(10.183.493.892)**	**70.059.212.809**	**34.272.338.386**	**205.448.613.875**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATIONS (continued)

f. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba/(rugi) sebelum pajak dan beban pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense which is calculated at the tax rates from profit/(loss) before tax and income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2016 and 2015 is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(404.651.704.045)	(619.226.346.740)	*Loss before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak - Entitas Anak	(2.323.778.485)	(3.631.077.647)	*Profit before tax - Subsidiary*
Bagian laba dari entitas asosiasi	(4.784.481.442)	(3.167.627.808)	*Income from associate entities*
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	**(411.759.963.972)**	**(626.025.052.195)**	***Loss before tax - the Company***
Manfaat pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif pajak berlaku	102.939.990.992	156.506.263.049	*Income tax benefit calculated at the applicable tax rates*
Beda tetap	(3.544.239.302)	(9.949.600.493)	*Permanent differences*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	9.221.685.608	3.954.818.498	*Interest income already subjected to final tax*
Penyesuaian atas pajak kini tahun lalu	(5.648.798.376)	(3.860.461.507)	*Adjustment in respect of current tax of the previous year*
Penyesuaian atas pajak tangguhan tahun lalu	-	(10.183.493.892)	*Adjustment in respect of deferred tax of the previous year*
Kompensasi rugi fiskal yang tidak dapat direalisasikan	(74.302.988.351)	(80.769.864.928)	*Unrecoverable of tax loss carryforward*
Total manfaat pajak penghasilan - Perusahaan	28.665.650.571	55.697.660.727	*Total income tax benefits - the Company*
Total beban pajak penghasilan - Entitas Anak	(824.515.568)	(945.957.319)	*Total income tax expense - the Subsidiary*
Total manfaat pajak penghasilan Kelompok Usaha	**27.841.135.003**	**54.751.703.408**	***Total income tax benefits - the Group***

14. UTANG JANGKA PANJANG / *14. LONG TERM DEBTS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consist of:*

31 Desember 2016	Total	Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/*Current maturities of long-term debts*	Bagian jangka panjang/*Long-term portion*	*December 31, 2016*
Perusahaan				***The Company***
a) Utang bank	1.340.996.497.666	22.404.776.344	1.318.591.721.322	*a) Bank loans*
b) Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	21.838.981.779	2.588.253.376	19.250.728.403	*b) Loan to the Government of the Republic of Indonesia*
Total	**1.362.835.479.445**	**24.993.029.720**	**1.337.842.449.725**	***Total***

31 Desember 2015	Total	Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/*Current maturities of long-term debts*	Bagian jangka panjang/*Long-term portion*	*December 31, 2015*
Perusahaan				***The Company***
a) Utang bank	1.357.556.671.565	16.560.173.899	1.340.996.497.666	*a) Bank loans*
b) Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	81.322.211.217	2.588.253.376	78.733.957.841	*b) Loan to the Government of the Republic of Indonesia*
Total	**1.438.878.882.782**	**19.148.427.275**	**1.419.730.455.507**	***Total***

Utang Bank / *Bank loans*

Akun ini terdiri dari : / *This account consist of:*

Nama Kreditur/*Creditur Name*	Total Batas Pinjaman Maksimum/ *Maximum Credit Limit*	Batas Jangka Waktu Pinjaman/ *Payment Period*	Total/*Total* 31 Desember 2016/ *December 31,* 2016	Total/*Total* 31 Desember 2015/ *December 31,* 2015
Entitas berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/*Entity related to the Government of the Republic of Indonesia*				
Rupiah				
Bank Sindikasi/*Syndicated Bank*	1.287.916.000.000	September 2022/ *September 2022*	1.267.706.000.000	1.284.166.000.000
Bank Sindikasi/*Syndicated Bank*	83.924.000.000	September 2022/ *September 2022*	82.398.000.000	83.924.000.000
Sub-total			**1.350.104.000.000**	**1.368.090.000.000**
Dikurangi biaya perolehan utang yang belum diamortisasi/ *Less unamortized cost of debts*			(9.107.502.334)	(10.533.328.435)
			1.340.996.497.666	**1.357.556.671.565**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/ *Less current maturities*			(22.404.776.344)	(16.560.173.899)
Bagian Jangka Panjang/*Long-term portion*			**1.318.591.721.322**	**1.340.996.497.666**

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

Pada bulan September 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Sindikasi, yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri dan BNI, berupa fasilitas Kredit Investasi dengan total batas maksimum pinjaman sebesar Rp1.444.350.000.000, yang terdiri dari *Tranche A* (total batas maksimum pinjaman sebesar Rp1.287.916.000.000), *Tranche B* (total batas maksimum pinjaman sebesar Rp83.924.000.000). Fasilitas pinjaman akan jatuh tempo pada bulan September 2022

Suku Bunga

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pinjaman dikenakan suku bunga tahunan sebesar 10,00% (2015: 10,50%).

Pada bulan Februari 2016, Perusahaan mengajukan permohonan penurunan suku bunga kredit dan telah disetujui oleh Bank Sindikasi pada bulan April 2016

Jaminan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tanah termasuk aset yang berada di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Seluruh jaminan juga digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 11).

Pembatasan-pembatasan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian pinjaman memenuhi rasio-rasio tertentu, memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan.

Perjanjian pinjaman Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain, dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

14. LONG TERM DEBTS (continued)

Bank loans (continued)

In September 2015, the Company obtained credit facilities from the Syndicated Bank, which consist of BRI, Bank Mandiri and BNI, it is Investment Credit Facilities with maximum credit limits amounting to Rp1,444,350,000,000, consist of Tranche A (maximum credit limit amounting to Rp1,287,916,000,000), Tranche B (maximum credit limit amounting to Rp83,924,000,000). The credit facilities will be mature on September 2022.

Interest Rate

For the year ended December 31, 2016, the loans denominated bear annual interest 10.00% (2015: 10.50%).

On February 2016, the Company applied the reduction of annual interest rate and approved by the Syndicated Bank on April 2016.

Collateral

As of December 31, 2016 and 2015, all credit facilities obtained by the Company are secured by trade receivables, inventories and certain land including Business Usage Right Certificate (HGU). All collateral is also used as collateral for short-term debt (Note 11).

Covenants

All these agreements contain negative covenants, which among others, restrict the right of the Company to acquire credit facility or other loan facilities from third parties without the prior written approval of the Bank, meet certain financial ratios, transfer the collateral assets, act as a guarantor or pledge the Company's assets that have been pledged to the Bank.

Credit agreements covering the loans of the Company mentioned above provide several negative covenants, such as, change the article of association, granting of and obtaining new loans, made a new investment in other company, and engage as guarantor or pledge their assets and transfer the collaterals.

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Sehubungan dengan kewajiban untuk memenuhi rasio keuangan, pada tanggal 30 Desember 2016, Bank Sindikasi memberi persetujuan kepada Perusahaan atas terlewatinya beberapa persyaratan rasio keuangan per tanggal 31 Desember 2016, seperti ditetapkan di dalam perjanjian kredit.

Utang Pemerintah Republik Indonesia

14. LONG TERM DEBTS (continued)

Bank loans (continued)

Compliance with Loan Covenants

Concerning indebtedness to comply with financial ratios, on December 30, 2016, the Syndicated Bank approved the over threshold of certain financial ratios of the Company as of December 31, 2016, as required in the loan agreement.

Loan to the Government of the Republic of Indonesia

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Perusahaan			***The Company***
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")			*International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")*
Loan 1499 IND SLA 011	4.703.452.956	21.559.666.620	*Loan 1499 IND SLA 011*
Loan 1835 IND	-	1.854.953.474	*Loan 1835 IND*
Loan 1499 IND SLA 021	7.211.800.486	36.638.888.197	*Loan 1499 IND SLA 021*
Exim Bank of Japan			*Exim Bank of Japan*
SLA 254	2.320.140.127	13.559.527.143	*SLA 254*
SLA 401	-	105.587.573	*SLA 401*
Proyek PIR	7.603.588.210	7.603.588.210	*PIR Project*
Sub-total	21.838.981.779	81.322.211.217	*Sub-total*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.588.253.376)	(2.588.253.376)	*Less current maturities*
Bagian Jangka Panjang	**19.250.728.403**	**78.733.957.841**	***Long-term portion***

IBRD

Utang Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari IBRD dan Exim Bank of Japan merupakan utang yang digunakan untuk membiayai proyek Nucleus Estate and Small Holder (NES) I, IV, V dan V INTI yang realisasinya antara tahun 1977 sampai dengan tahun 1988. Utang ini merupakan utang Perusahaan yang berasal dari eks PT Perkebunan XI (PTP XI) dan PT Perkebunan XIII (PTP XIII).

IBRD

Loans from the Government of the Republic of Indonesia stemming from the IBRD and the Exim Bank of Japan were used to finance the Nucleus Estate and Small Holder (NES) I, IV, V and V INTI projects, which were realized from 1977 to 1988. These debts were the Company's debts coming from the former from PT Perkebunan XI (PTP XI) and PT Perkebunan XIII (PTP XIII).

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

Pada bulan Oktober 2015, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan perjanjian perubahan Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (IBRD dan Exim Bank of Japan), yaitu:

a. Kewajiban pokok pinjaman dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pembayaran kewajiban non pokok (bunga) dilakukan selama 8 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2022;
c. Pembayaran kewajiban pokok dilakukan dalam 16 kali angsuran yang dibayarkan pada tanggal 25 Mei dan 25 November setiap tahunnya;
d. Pembayaran kewajiban jatuh tempo tanggal 25 November 2014 dan 25 Mei 2015 dilakukan sekaligus bersamaan dengan pembayaran kewajiban jatuh tempo tanggal 25 November 2015.

Pada tahun 2016, Utang kepada Pemerintah Republik Indonesia dikonversi menjadi modal oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp32.774.927.000. Konversi utang kepada Pemerintah tersebut dicatat sebagai Uang Muka Penyetoran Modal di Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Akta Notaris terkait dengan perubahan ini masih dalam proses penyelesaian.

Proyek PIR

Utang ini berasal dari risiko pembiayaan yang ditanggung Perusahaan yang berasal dari eks PTP XI sebesar Rp5.701.927.201 atau 50% dari proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) NES V dan VI berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S-4/MK.013/1987 tanggal 8 Desember 1987. Pelaksanaan pembayaran utang ini belum ditentukan dan tidak dikenakan bunga sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S- 003/MK tanggal 9 Januari 2002 perihal Penyelesaian Risiko Pembiayaan Proyek PIR/UPP Perkebunan.

14. LONG TERM DEBTS (continued)

Loan to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

In October 2015, the Company and the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia entered into the agreement that changed the loan to the Government of the Republic of Indonesia (IBRD and Exim Bank of Japan), as follows:

a. Principal obligations changed into the State Capital Investment through the process in accordance with laws and regulations;
b. Non-principal payment obligations (interest) paid during 8 years since 2014 until 2022;
c. Installments of payment of principal are 16 times, paid on May 25 and November 25 every year;
d. Payment of obligations due on November 25, 2014 and May 25, 2015 which paid together with payment which due on November 25, 2015.

In 2016, Loan to the Government of the Republic of Indonesia was converted into share capital by the Government of the Republic of Indonesia based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 90 Year 2016 dated December 30, 2016 amounting to Rp32,774,927,000. The convertion of loan to the Government recorded as Deposits for Future Share Capital Subscription in the Consolidated Statement of Changes in Equity. Until the reporting date, the Notarial Deed still on progress to complete.

PIR Project

This loan derived from the financing risk shouldered by the Company from the former PTP XI amounting to Rp5,701,927,201 or 50% of the PIR NES V and VI project, based on the Decree of the Minister of Finance No. S-4/MK.013/1987 dated December 8, 1987. The payment schedule of this debt has not been determined and is not charged to interest in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. S-003/MK dated January 9, 2002 regarding the Completion of Project Financing Risk PIR/UPP Plantation.

14. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang Pemerintah Republik Indonesia (lanjutan)

Proyek PIR (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Pembahasan Usul Penyelesaian Beban Risiko Pembiayaan Proyek PIR/UPP Perkebunan pada tanggal 29 Desember 2005 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direksi PT Perkebunan Nusantara III sampai dengan XIII, telah disepakati bahwa pembebanan risiko pembiayaan dari PTP XIII yang menjadi beban Perusahaan adalah sebesar Rp1.902 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah utang ini adalah sebesar Rp7.603.588.210.

14. *LONG TERM DEBTS (continued)*

Loan to the Government of the Republic of Indonesia (continued)

PIR Project (continued)

Based on "Rapat Pembahasan Usul Penyelesaian Beban Risiko Pembiayaan Proyek PIR/UPP Perkebunan" on December 29, 2005 which attended by Directorate General of Management of Loan, Directorate of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III until XIII, agreed to record PTP XIII's risk cost as the Company's expense amounting to Rp1,902 million.

As of December 31, 2016 and 2015, this loan amounting to Rp7,603,588,210.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Dana Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999.

Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan sebesar 6,00% dan Perusahaan, masing-masing dari gaji dasar tahunan karyawan tahun tertentu, dan bila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan.

15. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Pension Fund

The Company provides defined benefit pensions plan for all permanent employees which is computed based on the latest salary and their respective years of service. This Pension plan is managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) based on the Letter of Ministry of Finance No. Kep-344/ KMK/17/1999.

The pension plan is funded by contribution from both its employees at 6.00% and the Company, respectively of the annual employee basic salary at certain year and if there is deficit between the asset and the employee benefit obligation, it will be covered by the Company.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Dana Pensiun (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas manfaat pensiun Perusahaan tertentu pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 didasarkan pada penilaian aktuaris independen PT Bestama Aktuaria dalam laporannya tanggal 6 Januari 2017 dan 15 Januari 2016 menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Pension Fund (continued)

The fair value of plan asset and actuarial liabilities of the Company as of December 31, 2016 and 2015 are based on valuation of an independent actuary, PT Bestama Aktuaria, as presented in their reports dated January 6, 2017 and January 15, 2016 using the "Projected Unit Credit" method with main assumptions as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto	7,90%	8,75%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	2,50%	2,50%	*Average salary increase rate*
Sisa rata-rata masa kerja	7,11	7,29	*Average remaining years of service*
Usia pensiun normal			*Normal pension age*
- Karyawan pimpinan	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*- Staff employee*
- Karyawan pelaksana	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*- Non staff employee*
Tingkat cacat	10,00% dari tingkat mortalitas/*10.00% from mortality rate*	10,00% dari tingkat mortalitas/*10.00% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	5,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/*5.00% to age 20 linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/*5.00% to age 20 linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Turnover rate*
Tingkat mortalita	TMI I - Tahun 2011	TMI I - Tahun 2011	*Mortality rate*

Imbalan jasa masa kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan hari tua, pemeliharaan kesehatan pensiunan, tunjangan masa persiapan pensiun, bantuan kematian, dan cuti panjang. Liabilitas imbalan jasa masa kerja lainnya Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dihitung oleh aktuaris independen PT Bestama Aktuaria pada tanggal 6 Januari 2017 dan 15 Januari 2016 menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

Other post-retirement obligations

The Company provides other post-retirement obligations including post-retirement benefits, long vacation, post-retirement health care benefits, and long service award. Other post-retirement obligations on December 31, 2016 and 2015 are calculated by an independent actuary, PT Bestama Aktuaria, as presented in their dated January 6, 2017 and January 15, 2016 using the "Projected Unit Credit" method with main assumptions as follows:

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)*

Imbalan jasa masa kerja lainnya (lanjutan) / *Other post-retirement obligations (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Tingkat diskonto	7,90%	8,30% - 8,70%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	6,00%	6,00%	*Average salary increase rate*
Sisa rata-rata masa kerja	7,01-7,11	7,50 - 7,66	*Average remaining years of service*
Usia pensiun normal			*Normal pension age*
- Karyawan pimpinan	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*- Staff employee*
- Karyawan pelaksana	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*- Non staff employee*
Tingkat cacat	10,00% dari tingkat mortalitas/*10.00% from mortality rate*	10,00% dari tingkat mortalitas/*10.00% from mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	5,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/*5.00% to age 20 linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/*5.00% to age 20 linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Turnover rate*
Tingkat mortalita	TMI I - Tahun 2011	TMI I - Tahun 2011	*Mortality rate*

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari: / *Employee benefits liability consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Dana pensiun	447.148.836.640	260.671.263.675	*Pension fund*
Imbalan jasa masa kerja lainnya	1.145.402.648.398	1.240.848.986.962	*Other post-retirement obligations*
Total	**1.592.551.485.038**	**1.501.520.250.637**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut: / *Movement of employee benefits liability are as follows:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	1.501.520.250.637	943.565.581.491	*Beginning balance*
Beban yang diakui dalam laba rugi (Catatan 20)	28.771.943.647	476.070.138.127	*Expenses recognized in profit or loss (Note 20)*
Pembayaran imbalan kerja	(54.045.866.661)	(55.266.282.879)	*Benefits payment*
Kurtailmen	(7.835.934.916)	-	*Curtailment*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan aset program yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	124.141.092.331	137.150.813.898	*Remeasurement of employee benefits liability and asset program recognized in other comprehensive income*
Saldo akhir	**1.592.551.485.038**	**1.501.520.250.637**	***Ending balance***

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

15. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Analisa sensitivitas

Sensitivity analysis

Asumsi Utama	Kenaikan/ (Penurunan)/ *Increase/(Decrease)*	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Neto (dalam jutaan Rupiah)/ *(Decrease)/Increase in the Net Employee Benefits Liability (in million Rupiah)*	*Key Assumptions*
31 Desember 2016			*December 31, 2016*
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(114.841)/132.000	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	45.693/42.507	*Future annual salary Increase*

Analisis sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above has been determined based on a method that extrapolates the impact on benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

Jadwal jatuh tempo imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The maturity profile of other long-term employee benefit as follows:

	2016	
Dalam 12 bulan	122.428.315.130	*Within in 12 months*
Antara 1 - 2 tahun	130.176.467.479	*Between 1 – 2 years*
Antara 2 - 5 tahun	367.504.584.263	*Between 2 – 5 years*
Di atas 5 tahun	1.442.615.489.614	*More than 5 years*
Total	**2.062.724.856.486**	***Total***

Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban umum dan administrasi.

Employee benefits expenses are charged to general and administrative expenses.

16. MODAL SAHAM

16. SHARE CAPITAL

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Detail of the Company's shareholders as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	807.774	90,00%	807.774.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Pemerintah Negara Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)	89.753	10,00%	89.753.000.000	*Pemerintah Negara Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)*
Total	**897.527**	**100,00%**	**897.527.000.000**	***Total***

16. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Kelompok Usaha dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20,00% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2016.

Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

16. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

In addition, the Group is also required by the Corporate Law effective on August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20.00% of the issued and fully paid share capital.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2016.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

17. PENDAPATAN

Rincian pendapatan berdasarkan komoditas adalah sebagai berikut:

17. REVENUES

Details of revenues based on commodity are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Penjualan barang			*Sales of goods*
Teh	477.962.787.365	541.991.790.310	*Tea*
Kelapa sawit	400.358.485.000	479.721.296.460	*Palm oil*
Karet	316.991.314.362	320.655.576.428	*Rubber*
Holtikultura	48.130.058.805	93.007.962.527	*Holticulture*
Kina	-	7.036.871.082	*Quinine*
Pendapatan jasa			*Services revenue*
Rumah sakit	52.530.630.688	48.151.301.995	*Hospital*
Agrowisata	24.439.403.638	24.932.138.669	*Agrotourism*
Total	**1.320.412.679.858**	**1.515.496.937.471**	***Total***

17. PENDAPATAN (lanjutan) / *17. REVENUES (continued)*

Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

Details of revenues based on geographic are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Dalam negeri	1.058.509.680.345	1.165.648.224.184	*Domestic*
Luar negeri	261.902.999.513	349.848.713.287	*Overseas*
Total	**1.320.412.679.858**	**1.515.496.937.471**	***Total***

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *18. COST OF REVENUES*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban pokok penjualan barang	1.021.418.158.683	1.074.595.433.498	*Cost of goods sold*
Beban pokok pendapatan jasa	49.245.100.785	65.809.648.489	*Cost of revenue*
Total	**1.070.663.259.468**	**1.140.405.081.987**	***Total***

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut ini:

Details of cost of revenues are as follows:

	2016					
	Teh/*Tea*	**Karet/*Rubber***	**Sawit/*Palm Oil***	**Lain-lain/*Others***	**Total/*Total***	
Pembelian bahan baku	9.143.201.742	15.238.626.303	80.080.442.910	794.774.943	105.257.045.898	*Purchase raw material*
Biaya langsung						***Direct cost***
Biaya tanaman						*Plantation cost*
Panen dan Pengangkutan	158.899.015.191	148.981.035.479	88.009.146.074	4.308.567.027	400.197.763.771	*Harvesting and transportation*
Pemeliharaan	63.879.907.536	13.863.807.872	22.892.616.579	8.980.105.465	109.616.437.452	*Maintenance*
Pemupukan	47.110.572.549	16.126.766.482	58.267.141.594	1.034.446.909	122.538.927.534	*Fertilizing*
Gaji dan tunjangan karyawan	9.066.581.371	5.930.802.063	2.850.180.875	327.150.744	18.174.715.053	*Salary and employees allowance*
Total biaya tanaman	278.956.076.647	184.902.411.896	172.019.085.122	14.650.270.145	650.527.843.810	*Total plantation cost*
Biaya pabrik						*Factory cost*
Biaya pengolahan	110.214.847.839	33.347.977.517	8.798.803.672	1.640.146.719	154.001.775.747	*Processing cost*
Biaya pemeliharaan	36.940.811.857	7.222.117.209	16.835.469.088	641.746.250	61.640.144.404	*Maintenance cost*
Biaya pengepakan	36.240.270.832	4.101.675.582		8.976.846.964	49.318.793.378	*Packaging cost*
Gaji dan tunjangan karyawan	2.595.342.244	519.537.984	535.230.534	-	3.650.110.762	*Salary and employees allowance*
Total biaya pabrik	185.991.272.772	45.191.308.292	26.169.503.294	11.258.739.933	268.610.824.291	*Total factory cost*
Penyusutan dan amortisasi	33.341.409.933	34.958.176.513	43.589.060.315	15.836.589.773	127.725.236.534	*Depreciations and amortizations*
Lain-lain	-	-	-	49.245.100.785	49.245.100.785	*Others*
Total biaya langsung	**498.288.759.352**	**265.051.896.701**	**241.777.648.731**	**90.990.700.636**	**1.096.109.005.420**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung						***Indirect cost***
Biaya asuransi	-	-	243.427.442	-	243.427.442	*Insurance expense*
Total biaya produksi	**507.431.961.094**	**280.290.523.004**	**322.101.519.083**	**91.785.475.579**	**1.201.609.478.760**	***Total production cost***
Persediaan barang jadi – awal (Catatan 7)	84.579.332.468	12.492.617.674	8.431.350.557	279.505.624	105.782.806.323	*Finished goods – beginning (Note7)*
Persediaan barang jadi – akhir (Catatan 7)	(170.558.016.674)	(30.872.986.564)	(31.654.047.735)	(3.643.974.642)	(236.729.025.615)	*Finished goods – ending (Note 7)*
Total beban pokok pendapatan	**421.453.276.888**	**261.910.154.114**	**298.878.821.905**	**88.421.006.561**	**1.070.663.259.468**	***Total cost of revenues***

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *18. COST OF REVENUES (continued)*

	2015					
	Teh/*Tea*	Karet/*Rubber*	Sawit/*Palm Oil*	Lain-lain/*Others*	Total/*Total*	
Pembelian bahan baku	10.926.456.853	26.280.115.677	76.181.961.520	2.105.404.085	115.493.938.135	*Purchase raw material*
Biaya langsung						***Direct cost***
Biaya tanaman						*Plantation cost*
Panen dan Pengangkutan	139.588.790.739	134.525.492.702	95.010.517.565	6.407.202.288	375.532.003.294	*Harvesting and transportation*
Pemeliharaan	60.370.100.373	12.684.467.615	24.648.974.752	12.772.798.590	110.476.341.330	*Maintenance*
Pemupukan	37.367.403.572	4.082.198.370	25.366.882.551	2.410.356.543	69.226.841.036	*Fertilizing*
Gaji dan tunjangan karyawan	8.401.242.799	5.152.958.716	2.663.692.664	413.922.572	16.631.816.751	*Salary and employees allowance*
Total biaya tanaman	245.727.537.483	156.445.117.403	147.690.067.532	22.004.279.993	571.867.002.411	*Total plantation cost*
Biaya pabrik						*Factory cost*
Biaya pengolahan	84.452.942.939	27.182.843.301	14.219.726.745	396.773.295	126.252.286.280	*Processing cost*
Biaya pemeliharaan	24.258.785.007	6.142.493.492	15.190.475.155	245.668.716	45.837.422.370	*Maintenance cost*
Biaya pengepakan	30.891.247.046	4.936.342.239	-	8.159.934.352	43.987.523.637	*Packaging cost*
Gaji dan tunjangan karyawan	2.558.764.478	935.831.772	753.404.509	41.283.300	4.289.284.059	*Salary and employees allowance*
Total biaya pabrik	142.161.739.470	39.197.510.804	30.163.606.409	8.843.659.663	220.366.516.346	*Total factory cost*
Penyusutan dan amortisasi	38.964.657.071	40.338.418.513	50.461.704.672	8.487.832.673	138.252.612.929	*Depreciations and amortizations*
Lain-lain	-	-	-	65.809.648.489	65.809.648.489	*Others*
Total biaya langsung	**426.853.934.024**	**235.981.046.720**	**228.315.378.613**	**105.145.420.818**	**996.295.780.175**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung						***Indirect cost***
Biaya asuransi	29.896.000	-	337.291.039	14.850.000	382.037.039	*Insurance expense*
Total biaya produksi	**437.810.286.877**	**262.261.162.397**	**304.834.631.172**	**107.265.674.903**	**1.112.171.755.349**	***Total production cost***
Persediaan barang jadi – awal (Catatan 7)	121.615.838.300	9.899.745.253	1.869.353.904	631.195.504	134.016.132.961	*Finished goods – beginning (Note7)*
Persediaan barang jadi – akhir (Catatan 7)	(84.579.332.468)	(12.492.617.674)	(8.431.350.557)	(279.505.624)	(105.782.806.323)	*Finished goods – ending (Note 7)*
Total beban pokok pendapatan	**474.846.792.709**	**259.668.289.976**	**298.272.634.519**	**107.617.364.783**	**1.140.405.081.987**	***Total cost of revenues***

19. BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN / *19. MARKETING AND SELLING EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consist of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Pengangkutan	28.688.662.081	26.181.770.412	*Transportation*
Beban pemasaran dan promosi	9.197.467.056	14.121.984.006	*Marketing and promotion expenses*
Biaya gudang/penyimpanan	3.982.994.347	1.990.513.248	*Warehouse costs*
Biaya pelabuhan dan asuransi	1.352.931.511	1.804.823.601	*Harbour and insurance cost*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,5 miliar)	4.292.559.572	4.360.180.993	*Others (each below Rp1.5 billion)*
Total	**47.514.614.567**	**48.459.272.260**	***Total***

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consist of:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Gaji dan tunjangan karyawan	158.286.783.381	178.133.102.197	*Salaries and employee allowance*
Pajak dan sewa tanah	55.063.312.923	65.334.291.507	*Tax and land rental*
Penginapan dan perjalanan	43.691.614.361	41.250.812.634	*Accomodation and travelling*
Beban imbalan kerja karyawan (Catatan 15)	28.771.943.647	476.070.138.127	*Employee benefits expense (Note 15)*
Keamanan	21.007.863.121	20.681.078.335	*Securities*
Pemeliharaan rumah, bangunan dan aset lainnya	16.768.020.850	14.328.828.451	*Building, housing and other asset maintenance*
Biaya listrik dan penerangan	14.349.169.360	14.123.415.516	*Electricity and lighting expense*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp14 miliar)	44.371.325.711	48.408.927.698	*Others (each below Rp14 billion)*
Total	**382.310.033.354**	**858.330.594.465**	***Total***

21. PENGHASILAN OPERASI LAIN / *21. OTHER OPERATING INCOME*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pendapatan sewa, neto setelah pajak final	26.277.090.965	14.271.205.740	*Rent income, net of final tax*
Pemulihan cadangan biaya bunga pinjaman	24.120.049.121	-	*Recovery of accrual on interest expenses*
Pendapatan atas penghapusan utang pajak dari pengampunan pajak (Catatan 13)	19.104.278.294	-	*Income from tax payable write-off due to tax amnesty (Note 13)*
Penjualan non-komoditi	11.373.443.300	7.333.602.357	*Non-commodity sales*
Pendapatan selisih kurs	1.156.902.559	9.440.107.554	*Gain on foreign exchange differences*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp7 miliar)	7.992.688.618	7.431.063.148	*Others (each below Rp7 billion)*
Total	**90.024.452.857**	**38.475.978.799**	***Total***

22. BEBAN OPERASI LAIN / *22. OTHER OPERATING EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Beban penghapusan bibitan dan aset tidak produktif lainnya	230.881.531.595	56.569.350.739	*Writte-off of nursery and non-productive asset expenses*
Beban pajak	10.672.811.374	15.942.965.693	*Tax expense*
Penyisihan piutang tak tertagih	6.529.210.895	9.464.218.188	*Allowance for doubtfull account*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp6 miliar)	14.019.453.861	14.310.922.099	*Others (each below Rp6 billion)*
Total	**262.103.007.725**	**96.287.456.719**	***Total***

23. PENGHASILAN DAN BEBAN KEUANGAN

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan terdiri dari pendapatan bunga dari entitas asosiasi dan pendapatan bunga deposito dan jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp18.750.000.000 (2015: nil) dan Rp2.513.663.316 (2015: Rp1.520.922.317).

Beban Keuangan

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	2015	
Beban bunga utang bank	71.838.660.778	30.605.827.986	*Interest expense of bank loan*
Biaya amortisasi biaya provisi utang bank	1.425.826.101	333.775.265	*Amortization expense of provision bank loan*
Total	**73.264.486.879**	**30.939.603.251**	***Total***

24. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG PENTING

a. Pada tanggal 18 November 2014, Koperasi Jasa Keahlian Teknosa, pihak ketiga, dan Perusahaan menandatangani perjanjian sewa lahan untuk pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kebun Rancabali sebesar Rp28 miliar (termasuk PPN) untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2019.

b. Pada tanggal 12 April 2016, PT Prakarsa Mulia, pihak ketiga, dan Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengembangan wisata Glamping di kebun Rancabali sebesar Rp16 miliar untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2021.

c. Pada tanggal 2 Mei 2016, PT PSA Agro Nusantara, pihak ketiga, dan Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama sewa lahan di kebun Ciater dengan untuk Budidaya Tanaman jahe sebesar Rp4 miliar (termasuk PPN) untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021.

23. FINANCE INCOME AND EXPENSES

Finance Income

Finance income consist of interest income from associate entity and interest income from cash in banks for the year ended December 31, 2016 amounting to Rp18,750,000,000 (2015: nil) dan Rp2,513,663,316 (2015: Rp1,520,922,317), respectively.

Finance Expenses

This account consists of:

24. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. On November 18, 2014, Koperasi Jasa Keahlian Teknosa, third party, and the Company entered into land leased agreement, regarding to geothermal power plant's construction and development at Rancabali estate amounting to Rp28 billion (include VAT) for 5 years starting November 18, 2014 until November 17, 2019.

b. On April 12, 2016, PT Prakasa Mulia, third party, and the Company entered into joint agreement regarding to tourism development Glamping site at Rancabali estate amounting to Rp16 billion for 5 years starting in April 12, 2016 until April 11, 2021.

c. On May 2, 2016, PT PSA Agro Nusantara, third party, and the Company entered into land leased agreement regarding ginger's cultivation at Ciater Estate amounting to Rp4 billion (include VAT) for 5 years starting in May 2, 2016 until May 1, 2021.

24. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Pada tanggal 11 Oktober 2016, PT Pertamina Geothermal Energy/Chevron Geothermal Salak, LTD dan Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama sewa lahan di kebun Cianten sebesar Rp5 miliar (termasuk PPN) untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021.

e. Pada tanggal 29 Agustus 2016, PT Arkora Hydro, pihak ketiga dan Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama sewa lahan di kebun Papandayan sebesar Rp3 miliar (termasuk PPN) untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

f. Pada tanggal 24 November 2016, PT Pertamina EP Asset 3 dan Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama sewa lahan di kebun Jalupang dan Wangunreja sebesar Rp5 miliar (termasuk PPN) untuk jangka 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021.

24. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. On October 11, 2016, PT Pertamina Geothermal Energy/Chevron Geothermal Salak, LTD *and the Company entered into land leased agreement at Cianten Estate amounting to Rp5 billion (include VAT) for 5 years starting in October 11, 2016 until October 10, 2021.*

e. On August 29, 2016, PT Arkora Hydro, third party, *and the Company entered into land leased agreement at Papandayan Estate amounting to Rp3 billion (include VAT) for 5 years starting in July 1, 2016 until June 30, 2021.*

f. On November 24, 2016, PT Pertamina EP Asset 3 and the Company entered into land leased agreement at Jalupang and Wangunreja Estates amounting to Rp5 billion (include VAT) for 3 years starting in January 1, 2016 until December 31, 2021.

25. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM PENTING

Beberapa areal Perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

a. Kasus Tanah Afdeling Tenjoresmi, Kebun Pasirbadak
Perkara No.66/G/2015/PTUN.BDG

Para Pihak	:	Saudara Budi Munawar, dkk sebagai Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukabumi sebagai Tergugat dan PTPN VIII sebagai Tergugat Intervensi.
Objek	:	Surat BPN kepada Penggugat perihal penolakan permohonan Hak Milik terhadap tanah seluas 75 Ha, di Afdeling Tenjoresmi, Kebun Pasirbadak, Kabupaten Sukabumi.
Status	:	Kasus dimenangkan Penggugat. Saat ini Tergugat dan Tergugat Intervensi sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS

The Company have a dispute for various areas with local community and still in process completion are as follows:

a. Land case of Afdeling Tenjoresmi, Pasirbadak Estate
Case No.66/G/2015/PTUN.BDG

Mr. Budi Munawar and others, as a Plaintiff and National Land Agency (BPN) Sukabumi as Defendant and PTPN VIII as Defendant Intervention.	:	*Parties*
BPN's letter to Plaintiff regarding to rejection the application of ownership of 75 Ha area at Afdeling Tenjoresmi, Pasirbadak Estate, Sukabumi District.	:	*Object*
Case won by Plaintiff. Defendant and Defendant Intervention appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	:	*Status*

25. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM PENTING (lanjutan)

Beberapa areal Perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

b. Kasus Tanah Afdeling Ubrug, Kebun Cibungur, Kabupaten Sukabumi
Perkara No. 09/Pdt.G/2015/PN.Cbd

Para Pihak	:	Ny. Sawi Johana, dkk sebagai Penggugat dan BPN Sukabumi dan PTPN VIII sebagai Tergugat.
Objek	:	Tanah seluas +/- 630 Ha di Afdeling Ubrug, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, termasuk dalam HGU Kebun Cibungur.
Status	:	Sudah diputus di Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan memenangkan PTPN VIII. Saat ini penggugat sedang mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Kasus Tanah Blok Cibening, Kebun Cikumpay, Kabupaten Purwakarta
Perkara No. 18/Pdt.G/PLW/2015/PN.PWK

Para Pihak	:	Kementrian BUMN sebagai Penggugat, Ny. Augustins, CS dan PTPN VIII sebagai Tergugat
Objek	:	Tanah seluas 53 Ha, blok Cibening, Kebun Cikumpay
Status	:	Sudah diputus melalui putusan sela dan dikuatkan oleh putusan banding dengan putusan mengalahkan Kementrian BUMN. Saat ini penggugat sedang mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

d. Kasus Tanah ex HGU Serpong PTPN XI yang telah dilepas kepada PT Supra Veritas
Perkara No. 772/Pdt.G/2016/PN.TNG

Para Pihak	:	Susanto Dharma Putra sebagai Penggugat, Ny. HJ. Mala Fatma, CS dan PTPN VIII sebagai Tergugat
Objek	:	Sebagian tanah ex lahan PTPN XI Serpong yang telah dilepas kepada PT Supra Veritas
Status	:	Masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

25. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)

The Company have a dispute for various areas with local community and still in process completion are as follows: (continued)

b. Land case of Afdeling Ubrug, Cibungur Estate, Sukabumi District
Case No. 09/Pdt.G/2015/PN.Cbd

Mrs. Sawi Johana and others as a Plaintiff and BPN Sukabumi and PTPN VIII as Defendant.	:	*Parties*
Area totalling to +/- 630 Ha at Afdeling Ubrug, Ubrug village, Warungkiara sub-districts, Sukabumi District	:	*Object*
Has been disconnected at the High Court with the decision PTPN VIII won. Curently the plaintiff is being appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	:	*Status*

c. Land case of Cibening Block, Cikumpay Estate, Purwakarta District
Case No. 18/Pdt.G/PLW/2015/PN.PWK

Ministry of State-owned Enterprise as a Plantiff, Mrs. Augustins, CS and PTPN VIII as a Defendant.	:	*Parties*
Area totalling to 53 Ha, Cibening Block, Cikumpay Estate.	:	*Object*
Has been disconnected by the interim decision and upheld by the decision of the appeal to the verdict on the Ministry of State-owned Enterprise. Currently the plaintiff was appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.	:	*Status*

d. Land Cases Serpong ex HGU PTPN XI who have been released to PT Supra Veritas
Case No. 772/Pdt.G/2016/PN.TNG

Susanto Dharma Putra as a Plantiff, Mrs. HJ. Mala Fatma, CS and PTPN VIII as a Defendant.	:	*Parties*
Most land ex PTPN XI Serpong that has been released to PT Supra Veritas	:	*Object*
Still in the process of examination at the Bandung District Court	:	*Status*

25. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM PENTING (lanjutan)

Beberapa areal Perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat dan masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Kasus Tanah Blok Cibening, Kebun Cikumpay, Kabupaten Purwakarta
Perkara No. 17/PDT.G/2016/PN.PWK

Para Pihak	:	Ny. Suzana Laloan Takapente sebagai Penggugat, Ny. Augustins, CS, Kementrian BUMN dan PTPN VIII sebagai Tergugat
Objek	:	Tanah seluas 53 Ha, blok Cibening, Kebun Cikumpay
Status	:	Masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

25. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS (continued)

The Company have a dispute for various areas with local community and still in process completion are as follows: (continued)

e. Land case of Cibening Block, Cikumpay Estate, Purwakarta District
Case No. 17/PDT.G/2016/PN.PWK

Mrs. Suzana Laloan Takapente as a Plantiff, Mrs. Augustins, CS , Ministry of State-owned Enterprise and PTPN VIII as a Defendant.	:	*Parties*
Area totalling to 53 Ha, Cibening Block, Cikumpay Estate.	:	*Object*
Still in the process of examination at the Bandung District Court	:	*Status*

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut:

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are stated at their fair values or presented at carrying values as either of these is reasonable approximation of fair values or their fair values can not reliably measured. Further explanation is stated in the following paragraphs.

	31 Desember 2016		31 Desember 2015		
	Nilai tercatat/ *Carrying values*	Nilai wajar/ *Fair values*	Nilai tercatat/ *Carrying values*	Nilai wajar/ *Fair values*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan bank	98.262.409.410	98.262.409.410	162.411.652.033	162.411.652.033	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	94.849.848.890	94.849.848.890	124.055.523.036	124.055.523.036	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	221.211.274.336	221.211.274.336	16.365.298.117	16.365.298.117	*Other receivables*
Aset lancar lainnya – aset keuangan tersedia untuk dijual	607.750.000	607.750.000	548.900.000	548.900.000	*Other current assets – available for sale financial asset*
Total	**414.931.282.636**	**414.931.282.636**	**303.381.373.186**	**303.381.373.186**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang bank jangka pendek	197.182.575.019	197.182.575.019	195.139.405.423	195.139.405.423	*Short-term bank loans*
Utang usaha	282.426.122.948	282.426.122.948	261.572.920.201	261.572.920.201	*Trade payables*
Utang lain-lain	462.315.315.171	462.315.315.171	32.182.105.477	32.182.105.477	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	142.019.135.710	142.019.135.710	126.570.042.372	126.570.042.372	*Accrued expenses*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.993.029.720	24.993.029.720	19.148.427.275	19.148.427.275	*Current maturities of long-term debts*
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.337.842.449.725	1.337.842.449.725	1.419.730.455.507	1.419.730.455.507	*Long-term debts, net of current maturities*
Total	**2.446.778.628.293**	**2.446.778.628.293**	**2.054.343.356.255**	**2.054.343.356.255**	***Total***

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, utang usaha dan lain-lain dan utang bank jangka pendek kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut sebagian besar berjangka pendek.

Nilai tercatat liabilitas jangka panjang dengan suku bunga tetap besarnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair value.

Management has determined that the carrying amounts of cash on hand and in banks, trade and other receivables, investment in associate entities, trade and other payables and short-term bank loans reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

The carrying amounts of long-term bank loans with floating interest are approximate its fair value as it is revalued frequently.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko kredit. Manajemen menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika tingkat suku bunga Kelompok Usaha sebesar 10,00% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, rugi sebelum pajak sebelum kapitalisasi beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp18.597.431.187 lebih tinggi/rendah.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk and credit risk. The management reviews and approves policies for managing each of these financial risk, which are described in more detail as follows:

Interest Rate Risks on Fair Values and Cash Flows

The Group's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment purposes. Loans at variable rates expose the Group to interest rate risk on fair value.

Currently, the Group does not have a formal hedging policies for the interest rate risk.

Sensitivity analysis of interest rate risk

As of December 31, 2016, if the interest rate of the Group amounted to 10.00% lower/higher, with all other variables remain constant, loss before tax before the capitalization of finance costs for the year then ended amounted to Rp18,597,431,187 higher/lower.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Harga Komoditas

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan teh, minyak kelapa sawit, inti sawit, karet dan produk lainnya di mana marjin laba atas penjualan barang tersebut dapat terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Pada saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan rekening koran pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Kelompok Usaha tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan Bank

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Kelompok Usaha. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh dewan direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang Usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Kelompok Usaha mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Commodity Price Risk

The Group is affected by the volatility of commodity price risk caused by several factors, such as weather, government's policy, market demand and supply and global economic environment. Such exposure mainly arises from sales of tea, crude palm oil, palm kernel, rubber and other products where the profit margin on sale of those products may be affected by international market prices fluctuations.

Curently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price exposures.

Credit Risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers, and placement of current accounts and time deposits in banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

Cash on Hand and in Banks

The Group has credit risk arising from placement of current accounts is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each banks and the policy is reviewed annually by the Directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade Receivables

The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. The Group applies prudent credit acceptance policies and performs ongoing credit portfolio monitoring. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For export sales, the Group requires cash against the presentation of documents of title. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer and receivable balances are monitored on an ongoing basis ro reduce the Group's exposure to bad debts.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Piutang Usaha (lanjutan)

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

27. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)*

Credit Risk (continued)

Trade Receivables (continued)

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on the overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within reasonable time, the Group will proceed with legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the receivable is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

28. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERIODE LALU

Kelompok Usaha menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sehubungan dengan koreksi atas kesalahan penyajian pada liabilitas imbalan kerja.

Sesuai dengan hal di atas, dengan memperhatikan ketentuan PSAK No. 25 (Revisi 2009), Kelompok Usaha menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian komparatif dan menyajikan tiga laporan posisi keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang berhubungan. Kelompok Usaha akan menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian tahun berjalan, tahun sebelumnya dan awal tahun sebelumnya.

Dampak penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, adalah sebagai berikut:

28. *RESTATEMENTS OF PRIOR PERIOD CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

The Group restated its consolidated financial statements as of December 31, 2015, and for the year ended December 31, 2015, due to the correction of misstatement of employee benefits liability.

According to the matter above, with regard to PSAK No. 25 (Revised 2009), the Group restated the consolidated financial statements comparative and presented three consolidated statement of financial position and related notes to consolidated financial statements. The Group will be present consolidated statement of financial position current, prior and the beginning of prior years.

The effects of the above-mentioned restatement to the financial statements of the Group as of December 31, 2015 and for the year ended December 31, 2015, are as follows:

28. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERIODE LALU (lanjutan)

28. RESTATEMENTS OF PRIOR PERIOD CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

	31 Desember 2015/ *December 31, 2015* (dilaporkan sebelumnya/ *previously reported*)	Penyesuaian untuk penyajian kembali/ *Restatements adjustment*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*(disajikan kembali/*as restated*)	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				***Consolidated statement of financial position***
Aset pajak tangguhan	140.181.203.208	65.267.410.667	205.448.613.875	*Deferred tax assets*
Total aset tidak lancar	8.614.901.670.180	65.267.410.667	8.680.169.080.847	*Total non-current assets*
Total aset	9.219.587.568.403	65.267.410.667	9.284.854.979.070	*Total assets*
Liabilitas imbalan kerja	1.240.450.607.975	261.069.642.662	1.501.520.250.637	*Employee benefits liability*
Total liabilitias jangka panjang	2.660.181.063.482	261.069.642.662	2.921.250.706.144	*Total non-current liabilities*
Total liabilitas	3.451.137.760.303	261.069.642.662	3.712.207.402.965	*Total liabilities*
Saldo laba - belum ditentukan penggunaanya	(959.044.343.531)	(195.802.231.995)	(1.154.846.575.526)	*Retained earnings - unappropriated*
Total ekuitas	5.768.449.808.100	(195.802.231.995)	5.572.647.576.105	*Total equity*
Total liabilitas dan ekuitas	9.219.587.568.403	65.267.410.667	9.284.854.979.070	*Total equity and liabilities*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ *For the year ended December 31, 2015* (dilaporkan sebelumnya/ *previously reported*)	Penyesuaian untuk penyajian kembali/ *Restatements adjustment*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ *For the year ended December 31, 2015* (disajikan kembali/*as restated*)	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				***Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income***
Beban umum dan administrasi	(495.061.080.620)	(363.269.513.845)	(858.330.594.465)	*General and administrative expenses*
Rugi usaha	(226.239.975.316)	(363.269.513.845)	(589.509.489.161)	*Operating loss*
Rugi sebelum pajak	(255.956.832.895)	(363.269.513.845)	(619.226.346.740)	*Loss before tax*
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(36.065.675.053)	90.817.378.463	54.751.703.410	*Income tax benefits (expense)*
Rugi tahun berjalan	(292.022.507.948)	(272.452.135.382)	(564.474.643.330)	*Loss for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya				*Other comprehensive income*
Rugi pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(179.513.013.812)	76.649.903.387	(102.863.110.425)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Penghasilan komprehensif lain, neto	5.308.920.948.816	76.649.903.387	5.385.570.852.203	*Other comprehensive income, net*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	5.016.898.440.868	(195.802.231.995)	4.821.096.208.873	*Total comprehensive income for the year*

29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perusahaan pada tanggal 24 Februari 2017. Pemegang saham Perusahaan menetapkan dan menyetujui perubahan susunan Direksi Perusahaan menjadi demikian:

29. SUBSEQUENT EVENTS

Based on Letter of Minister of State-owned Enterprises and President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholder on February 24, 2017. The Company's shareholders determined and approved the changes in the Company's Board of Directors become:

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Bambang Murtioso	*President Director*
Direktur	Ryanto Wisnuardhy	*Director*
Direktur	Gunara	*Director*
Direktur	Jhoni Halintar Tarigan	*Director*

30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

a) PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

Revisi terhadap PSAK 1 memperkenalkan, antara lain, definisi materialitas, pos spesifik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan dapat dipisahkan, dan entitas diberikan fleksibilitas terkait urutan sistematis catatan atas laporan keuangan.

Revisi terhadap PSAK 1 ini akan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan.

b) PSAK 69: Agrikultur dan PSAK 16: Aset Tetap - Amandemen atas Tanaman Produktif (*Bearer Plants*)

Amandemen ini memperkenalkan akuntansi atas aset biologis, termasuk yang memenuhi kriteria sebagai tanaman produktif. Dalam amandemen tersebut, aset biologis yang memenuhi definisi sebagai tanaman produktif tidak diatur oleh PSAK 69, namun oleh PSAK 16.

30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for December 31, 2016 financial statements are disclosed below. The Group intend to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

a) PSAK 1: Presentation of Financial Statements

Revisions to PSAK 1 introduce, among others, the materiality definition, the specific line items in the statement of profit or loss and OCI and the statement of financial position may be disaggregated, and that entities have flexibility as to the order in which they present the notes to financial statements.

Revisions to PSAK 1 is effective January 1, 2017 and early adoption is allowed.

b) PSAK 69: Agriculture and PSAK 16: Fixed Asets - Bearer Plants amendment

The amendments introduce the accounting requirements for biological assets, including those that meet the definition of bearer plants. Under the amendments, biological assets that meet the definition of bearer plants are not within the scope of PSAK 69, but instead within the scope of PSAK 16.

30. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

b) PSAK 69: Agrikultur dan PSAK 16: Aset Tetap - Amandemen atas Tanaman Produktif (*Bearer Plants*) (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, tanaman produktif diukur sesuai PSAK 16 pada akumulasi biaya sebelum menghasilkan, dan menggunakan antara model biaya atau model revaluasi setelah menghasilkan. Amandemen tersebut juga mensyaratkan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif tetap diatur oleh PSAK 69 dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dan penerapan awal diperkenankan.

Amandemen tersebut diperkirakan akan mempengaruhi pengukuran Kelompok Usaha atas produk agrikultur, HTI dan benih, yang tetap memenuhi syarat sebagai aset biologis dan karenanya harus diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

Namun amandemen tersebut tidak akan mempengaruhi akuntansi bagi tanaman perkebunan lainnya, termasuk tanaman kelapa sawit, karet dan tebu, karena akuntansinya telah sesuai dengan persyaratan PSAK 16 terhadap tanaman produktif.

30. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

b) PSAK 69: Agriculture and PSAK 16: Fixed Asets - Bearer Plants amendment (continued)

After initial recognition, bearer plants will be measured under PSAK 16 at accumulated cost before maturity, and using either the cost model or revaluation model after maturity. The amendments also require that produce that grows on bearer plants will remain in the scope of PSAK 69 measured at fair value less costs to sell at the point of harvest.

The amendments are retrospectively effective for annual periods beginning on or after January 1, 2018, with early adoption permitted.

These amendments are expected to have impact to the Group's measurement on its agriculture produce, HTI and seeds, as they are still considered as biological assets and therefore shall be measured at fair value less costs to sell at the point of harvest.

However the amendments will not have impact to the accounting for all other plantations, including oil palm, rubber and sugar cane plantations, as the accounting is already in accordance with the requirements of PSAK 16 for bearer plants.

Informasi berikut adalah Informasi keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII, yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

The following information is the financial statements of PT Perkebunan Nusantara VIII, which is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara VIII and its Subsidiary as of December 31, 2016 and for the year then ended.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015 (Disajikan kembali/ *As restated*)	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	96.728.069.397	160.209.685.372	137.342.505.553	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha	90.399.219.974	121.808.170.761	96.219.822.233	*Trade receivables*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak ketiga	5.500.409.835	7.418.630.253	16.281.716.981	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi	225.609.413.362	17.245.712.587	15.555.440.293	*Related parties*
Persediaan	359.975.434.412	289.357.977.569	322.616.476.845	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	-	210.030.972	-	*Prepaid tax*
Aset lancar lainnya	16.433.628.392	8.018.517.500	5.661.783.184	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**794.646.175.372**	**604.268.725.014**	**593.677.745.089**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas asosiasi	54.144.583.517	54.144.583.516	53.019.583.516	*Investments in associate entities*
Aset pajak tangguhan	270.223.201.724	205.131.017.193	111.300.556.573	*Deferred tax assets*
Tagihan pajak penghasilan	-	28.367.246.527	47.813.569.025	*Claims for income tax refund*
Tanaman perkebunan				*Plantations*
Tanaman menghasilkan	1.569.164.899.683	1.469.231.615.101	1.247.307.917.606	*Mature plantation*
Tanaman belum menghasilkan	728.604.885.196	990.203.443.531	1.163.188.370.014	*Immature plantation*
Aset tetap	5.827.131.838.151	5.836.839.570.031	394.527.708.285	*Fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya – neto	62.314.882.907	50.787.580.035	60.625.244.528	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**8.511.584.291.178**	**8.634.705.055.934**	**3.077.782.949.547**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**9.306.230.466.550**	**9.238.973.780.948**	**3.671.460.694.636**	***TOTAL ASSETS***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT ENTITY
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2016	2015 (Disajikan kembali/ *As Restated*)	
PENDAPATAN	1.267.882.049.170	1.467.345.635.476	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.032.593.240.644)	(1.101.317.441.879)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**235.288.808.526**	**366.028.193.597**	***GROSS PROFIT***
Beban pemasaran dan penjualan	(47.514.614.567)	(48.459.272.260)	*Marketing and selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(370.037.406.958)	(853.703.960.664)	*General and administrative expenses*
Penghasilan operasi lain	85.109.629.802	34.811.490.148	*Other operating income*
Beban operasi lain	(262.080.286.227)	(94.954.606.346)	*Other operating expenses*
RUGI USAHA	**(359.233.869.424)**	**(596.278.155.525)**	***OPERATIONS LOSS***
Penghasilan keuangan	21.235.490.414	1.490.883.226	*Finance income*
Pajak atas penghasilan keuangan	(497.098.083)	(298.176.645)	*Final tax on finance income*
Beban keuangan	(73.264.486.879)	(30.939.603.251)	*Finance expense*
RUGI SEBELUM PAJAK	**(411.759.963.972)**	**(626.025.052.195)**	***LOSS BEFORE TAX***
Manfaat pajak penghasilan	28.665.650.571	55.697.660.729	*Income tax benefits*
RUGI TAHUN BERJALAN	**(383.094.313.401)**	**(570.327.391.466)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak	(198.687.500)	(76.825.440)	*Unrealized loss financial asset available for sale, net of tax*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(93.105.819.246)	(102.863.110.427)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan dari/(penurunan nilai atas) revaluasi aset	(2.654.459.546)	5.469.974.488.068	*Gain/(impairment in value) on revaluation of asset*
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, neto	**(95.958.966.292)**	**5.367.034.552.201**	***Other comprehensive income/(loss), net***
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(479.053.279.693)**	**4.796.707.160.735**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT ENTITY
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2016	2015 (Disajikan kembali/ *As Restated*)	
PENDAPATAN	1.267.882.049.170	1.467.345.635.476	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.032.593.240.644)	(1.101.317.441.879)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**235.288.808.526**	**366.028.193.597**	***GROSS PROFIT***
Beban pemasaran dan penjualan	(47.514.614.567)	(48.459.272.260)	*Marketing and selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(370.037.406.958)	(853.703.960.664)	*General and administrative expenses*
Penghasilan operasi lain	85.109.629.802	34.811.490.148	*Other operating income*
Beban operasi lain	(262.080.286.227)	(94.954.606.346)	*Other operating expenses*
RUGI USAHA	**(359.233.869.424)**	**(596.278.155.525)**	***OPERATIONS LOSS***
Penghasilan keuangan	21.235.490.414	1.490.883.226	*Finance income*
Pajak atas penghasilan keuangan	(497.098.083)	(298.176.645)	*Final tax on finance income*
Beban keuangan	(73.264.486.879)	(30.939.603.251)	*Finance expense*
RUGI SEBELUM PAJAK	**(411.759.963.972)**	**(626.025.052.195)**	***LOSS BEFORE TAX***
Manfaat pajak penghasilan	28.665.650.571	55.697.660.729	*Income tax benefits*
RUGI TAHUN BERJALAN	**(383.094.313.401)**	**(570.327.391.466)**	***LOSS FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that may be reclassified to profit or loss:*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak	(198.687.500)	(76.825.440)	*Unrealized loss financial asset available for sale, net of tax*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	(93.105.819.246)	(102.863.110.427)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan dari/(penurunan nilai atas) revaluasi aset	(2.654.459.546)	5.469.974.488.068	*Gain/(impairment in value) on revaluation of asset*
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain, neto	**(95.958.966.292)**	**5.367.034.552.201**	***Other comprehensive income/(loss), net***
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(479.053.279.693)**	**4.796.707.160.735**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
PARENT ENTITY
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Uang Muka Penyetoran Modal/*Deposits for future share capital subscription*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014	**897.527.000.000**	-	-	**339.169.559.587**	**(503.795.053.204)**	**732.901.506.383**	***Balance as of January 1, 2015/ December 31, 2014***
Rugi tahun berjalan (disajikan kembali)	-	-	-	-	(570.327.391.466)	(570.327.391.466)	*Loss for the year (as restated)*
Cadangan umum	-	-	-	6.770.348.248	(6.770.348.248)	-	*General reserve*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	-	-	(76.825.440)	(76.825.440)	*Unrealized loss of available for sale financial asset, net of tax*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		-	-		(102.863.110.427)	(102.863.110.427)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Keuntungan dari revaluasi tanah	-	-	5.469.974.488.068	-	-	5.469.974.488.068	*Gain on revaluation of land*
Saldo 31 Desember 2015 (disajikan kembali)	**897.527.000.000**	**-**	**5.469.974.488.068**	**345.939.907.835**	**(1.183.832.728.785)**	**5.529.608.667.118**	***Balance as of December 31, 2015 (as restated)***
Uang muka penyetoran modal	-	32.774.926.942	-	-	-	32.774.926.942	*Deposits for future share capital subscription*
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(383.094.313.401)	(383.094.313.401)	*Loss for the year*
Rugi yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, setelah pajak	-	-	-	-	(198.687.500)	(198.687.500)	*Unrealized loss of available for sale financial asset, net of tax*
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	-	-	-	-	(93.105.819.246)	(93.105.819.246)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net of tax*
Penurunan nilai atas revaluasi tanah	-	-	(2.654.459.546)	-	-	(2.654.459.546)	*Impairment in value on revaluation of land*
Saldo 31 Desember 2016	**897.527.000.000**	**32.774.926.942**	**5.467.320.028.522**	**345.939.907.835**	**(1.660.231.548.932)**	**5.083.330.314.367**	***Balance as of December 31, 2016***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
STATEMENT OF CASH FLOWS
PARENT ENTITY
For the Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.203.380.686.912	1.484.604.075.931	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(1.160.627.055.014)	(1.153.409.084.456)	*Payments to suppliers and employees*
Kas yang diperoleh dari operasi	42.753.631.898	331.194.991.475	*Cash generated from operations*
Pembayaran bunga	(160.563.080.152)	(147.984.213.008)	*Payments for interest*
Pembayaran kas lainnya	(24.383.841.289)	(30.102.462.333)	*Cash payment for others*
Penerimaan modal kerja	2.043.169.596	-	*Receipts of working capital*
Penerimaan penghasilan bunga	1.988.392.331	1.192.706.581	*Receipts of interest income*
Kas neto yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(138.161.727.616)**	**154.301.022.715**	***Net cash provided by/(used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen	-	327.933.722	*Receipts of dividends*
Penambahan tanaman perkebunan	(29.639.854.441)	(82.919.492.385)	*Additions to plantations*
Perolehan aset tetap	(59.365.076.464)	(9.148.053.418)	*Acquisitions of fixed assets*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(89.004.930.905)**	**(91.739.612.081)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran utang bank	(17.986.000.000)	(125.550.000.000)	*Payments for bank loans*
Pembayaran utang kepada Pemerintah Republik Indonesia	-	(3.925.059.415)	*Payment for loan to the Government of the Republik of Indonesia*
Penerimaan dari pinjaman bank	-	83.924.000.000	*Proceed from bank loans*
Pembayaran pinjaman kepada entitas asosiasi	(187.500.000.000)	-	*Payment of loan to associate company*
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	368.014.139.987	-	*Proceed from shareholder loan*
Kas neto yang diterima dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**162.528.139.987**	**(45.551.059.415)**	***Net cash provided by/(used in) financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	**(64.638.518.534)**	**17.010.351.219**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
DAMPAK NETO SELISIH KURS ATAS KAS DAN BANK	1.156.902.559	5.856.828.600	***NET EFFECTS OF EXCHANGE RATES CHANGES ON CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	160.209.685.372	137.342.505.553	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**96.728.069.397**	**160.209.685.372**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR***

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), Entitas Induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Entitas induk juga mengakui dividen dari Entitas Anak dan Entitas Asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

Mata uang fungsional Entitas Induk adalah Rupiah. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tersendiri adalah mata uang Rupiah.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the PSAK 4 (Revised 2009): Consolidated and Separate Financial Statements.

PSAK 4 (Revised 2009) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries and Associates.

In accordance with PSAK 4 (Revised 2009), the Parent Entity recorded the investments in subsidiaries and associates using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from Subsidiaries and Associates in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

The Parent Entity's functional currency is Indonesian Rupiah. Presentation currency used in the preparation of separate financial statements is the Indonesian Rupiah.

PT Perkebunan Nusantara VIII

Laporan akuntan independen
atas penerapan prosedur yang disepakati
sehubungan laporan hasil evaluasi kinerja
pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA DAN
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

DAFTAR ISI

Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Uraian Hasil Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Hasil Evaluasi Kinerja

I. RINGKASAN KINERJA 1

II. URAIAN KINERJA 4

1. Kinerja Perusahaan 4
2. Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 5
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 6
   - 3.1 Kuantum Penjualan 6
   - 3.2 Nilai Penjualan 8
   - 3.3 Produksi 12
   - 3.4 Beban Produksi 15
   - 3.5 Beban Usaha 19
   - 3.6 Beban Pokok Penjualan FOB 19
   - 3.7 Investasi 20
   - 3.8 Laba/(Rugi) Komoditas 21
4. Perkembangan Usaha Perusahaan 24
5. *Key Performance Indicators* (KPI) 27

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Laporan No. RPC-3812/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara VIII

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara VIII ("Perusahaan"), semata-mata untuk membantu pemakai tertentu dalam mengevaluasi asersi manajemen terhadap Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah dibuat oleh manajemen Perusahaan. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama dan temuan yang bersangkutan disajikan berikut ini:

a. Mencocokkan saldo akun-akun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada kolom anggaran dalam LHEK dengan saldo yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) tahun 2016.

   Kami tidak menemukan perbedaan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

b. Mencocokkan saldo akun-akun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada kolom realisasi dalam LHEK dengan saldo yang terdapat dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2016 dan 2015 yang telah diaudit.

   Kami tidak menemukan perbedaan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

c. Melakukan perhitungan ulang atas perbedaan antara saldo realisasi tahun 2016 dengan RKAP-P tahun 2016 dan meminta penjelasan kepada manajemen Perusahaan atas perbedaan signifikan yang terjadi.

   Kami tidak menemukan kesalahan perhitungan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut. Penjelasan Perusahaan atas perbedaan signifikan yang terjadi telah disampaikan dalam LHEK terlampir.

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (lanjutan)

Laporan No. RPC-3812/PSS/2017 (lanjutan)

d. Melakukan perhitungan ulang atas kenaikan atau penurunan saldo realisasi tahun 2016 dengan realisasi pada tahun 2015 dan meminta penjelasan kepada manajemen Perusahaan atas kenaikan atau penurunan signifikan yang terjadi.

   Kami tidak menemukan kesalahan perhitungan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut. Penjelasan Perusahaan atas kenaikan atau penurunan signifikan yang terjadi telah disampaikan dalam LHEK terlampir.

e. Melakukan perhitungan ulang atas rasio-rasio aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi, dan membandingkannya dengan indikator yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang "Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara" (SK100).

   Kami tidak menemukan perbedaan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

f. Menjumlahkan hasil perhitungan ulang atas rasio-rasio aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi, dan membandingkannya dengan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan SK 100.

   Kami tidak menemukan perbedaan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

g. Mencocokan target dan bobot yang terdapat dalam Laporan *Key Performance Indicators* ("KPI") tahun 2016 dengan target dan bobot yang disepakati dalam Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan Kuasa Pemegang Saham Perusahaan tanggal 28 Desember 2015.

   Target dan bobot yang terdapat dalam Laporan KPI tahun 2016 telah sesuai dengan target dan bobot yang disepakati dalam kontrak tersebut kecuali untuk skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul ("KPKU") dan *Good Corporate Governance* ("GCG") dikarenakan kami belum menerima hasil penilaian atas KPKU dan GCG tersebut dari Perusahaan sampai cengan tanggal laporan ini.

h. Melakukan perhitungan ulang atas persentase capaian terhadap target dan pencapaian bobot yang terdapat dalam Laporan KPI tahun 2016.

   Kami tidak menemukan kesalahan perhitungan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati (lanjutan)

Laporan No. RPC-3812/PSS/2017 (lanjutan)

Kami tidak membuat perikatan dan kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Perkebunan Nusantara VIII untuk tahun 2016, oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada manajemen Perusahaan.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan seperti yang disebutkan di atas dan tidak dapat digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur di atas dan kami tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Ratnawati Setiadi
Partner
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0698

28 Februari 2017

I. RINGKASAN KINERJA

Berikut ini adalah ringkasan kinerja PT Perkebunan Nusantara VIII, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016:

1. Tingkat kesehatan Perusahaan

Keterangan	Nilai
Aspek keuangan	22,00
Aspek operasional	13,70
Aspek administrasi	9,00
Jumlah nilai	**44,70**
Tingkat kesehatan Perusahaan	**Kurang Sehat /BB**

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan ("RKAP-P")

   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ("RKAP 2016"), dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

   Permohonan RKAP Perubahan (RKAP-P) disahkan berdasarkan Risalah RUPS PT Perkebunan Nusantara VIII No. S-638/MBU/11/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional perusahaan Tahun 2016;

3. Penjualan

   Secara keseluruhan realisasi volume penjualan teh tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 5.064 ton atau 17%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 2.972 ton atau 11%. Hal ini disebabkan realisasi produksi tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 dan realisasi tahun 2015. Realisasi nilai penjualan teh tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp147.195 juta atau 24%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp64.029 juta atau 12%. Hal ini disebabkan over supply di negara produsen teh dan dan kualitas yang dihasilkan di negara-negara produsen lainnya yang lebih kompetitif.

   Realisasi volume penjualan karet tahun 2016 berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar 495 ton atau 3%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 393 ton atau 3%. Hal ini dapat tercapai sebab produksi karet yang mencapai RKAP-P dan adanya upaya memaksimalkan penjualan karet. Realisasi nilai penjualan karet tahun 2016 berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp32.496 juta atau 11%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp3.665 juta atau 1%. Hal ini disebabkan tingginya permintaan karet yang mendorong naiknya harga jual karet, terutama pada akhir tahun 2016.

   Secara keseluruhan realisasi volume penjualan kelapa sawit tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 17.670 ton atau 24%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 17.395 ton atau 24%. Volume penjualan komoditi kelapa sawit tidak tercapai dikarenakan rendahnya volume produksi. Realisasi nilai penjualan kelapa sawit tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp125.776 juta atau 24%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp79.363 juta atau 17%. Hal tersebut disebabkan tidak tercapainya volume penjualan akibat rendahnya volume produksi meskipun realisasi harga jual tahun 2016 mendekati RKAP-P dan meningkat dibandingkan tahun lalu.

I. RINGKASAN KINERJA (lanjutan)

3. Penjualan (lanjutan)

Realisasi kuantitas penjualan IHT tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 483 ton atau 29%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 27 ton atau 2%. Realisasi nilai penjualan IHT tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp34.149 juta atau 58%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp28.362 juta atau 54%. Penurunan volume dan nilai penjualan merupakan dampak dari rencana perpindahan pemasaran IHT dari PTPN VIII kepada PT KPBN sehingga manajemen mengambil kebijakan pemasaran atas produk hilir dengan pengurangan produksi dan penjualan untuk menghabiskan stok barang jadi dan barang kemasan dengan design lama, sehingga terjadi penurunan penjualan pada bulan Oktober dan November 2016.

Realisasi volume penjualan aneka tanaman tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 4.285 ton atau 60%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 673 ton atau 19%. Realisasi nilai penjualan aneka tanaman tahun berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp45.040 juta atau 68%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp511 juta atau 2%.

Secara keseluruhan, realisasi nilai penjualan tahun 2016 lebih rendah dibandingkan RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp286.359 juta atau 18%. Dan jika bandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp199.463 juta atau 14%. Nilai Penjualan di bawah RKAP-P tahun 2016 disebabkan oleh penurunan penjualan seluruh komoditas kecuali karet.

4. Produksi

Kuantitas produksi teh tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 3.382 ton atau 10%, dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5.508 ton atau 22%. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi kurangnya kecukupan nutrisi untuk tanaman dan adanya defisit air disebabkan tidak adanya hujan selama bulan Juni – Oktober 2016. Selain itu kondisi serangan hama dan penyakit di setiap kebun masih dapat dikendalikan.

Kuantitas produksi karet tahun 2016 berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar 129 ton atau 1% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.551 ton atau 10%. Kenaikan kuantitas produksi ini dapat tercapai karena adanya reposisi hanca panen (penambahan jumlah pohon yang disadap) sehingga meningkatkan produksi karet.

Kuantitas produksi TBS tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 38.740 ton atau 12% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 36.230 ton atau 12%. Volume produksi minyak sawit dan inti sawit tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 13.781 ton atau 19% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15.514 ton atau 20%. Tidak tercapainya produksi TBS kelapa sawit dari RKAP-P tahun 2016 disebabkan karena pemupukan tahun ini dan tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terealisasi yang menyebabkan produksi sawit tidak optimal serta adanya stagnasi buah akibat kecenderungan munculnya bunga jantan.

Kuantitas produksi IHT tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 982 ton atau 44%, dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 241 ton atau 24%. Hal ini dikarenakan penyesuaian kebijakan pemasaran untuk menurunkan volume produksi.

Kuantitas produksi aneka tanaman tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 3.700 ton atau 49%, dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 476 ton atau 11%.

I. RINGKASAN KINERJA (lanjutan)

5. Beban Produksi

   Secara keseluruhan beban produksi tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp198.730 juta atau 15% dan diatas realisasi tahun 2015 sebesar Rp93.665 juta atau 9%. Hal ini disebabkan kuantitas produksi tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan RKAP-P tahun 2016 dan adanya upaya efisiensi dan efektivitas pembiayaan.

6. Beban Usaha

   Realisasi beban usaha tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp231.445 juta atau 36%. Adapun jika dibandingkan dengan tahun 2015 menurun sebesar Rp484.611 juta atau 54%. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran dimana kegiatan belanja dilakukan dengan lebih selektif.

7. Investasi

   Investasi pada tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp436.619 juta atau 71% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp775 juta. Investasi tahun 2016 tersebut terdiri dari investasi tanaman sebesar Rp143.776 juta atau 39% dari RKAP-P tahun 2016 dan 92% dari realisasi tahun 2015, serta investasi non tanaman tahun 2016 sebesar Rp33.035 juta atau 13% dari RKAP-P tahun 2016 dan 161% dari realisasi tahun 2015. Rendahnya investasi karena keterbatasan ketersediaan dana eksternal baik dari perbankan yang berupa kredit investasi maupun dari investor.

8. Perkembangan Usaha Perusahaan

   Pada tahun 2016 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp376.860 juta, atau dapat menekan kerugian dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp495.061 juta dan dari tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp564.563 juta. Hal ini disebabkan pendapatan perusahaan yang masih di bawah RKAP-P tahun 2016, adanya impairment aset tanaman dan non tanaman, dan adanya koreksi perhitungan beban imbalan kerja (PSAK-24).

   Jumlah aset pada tahun 2016 sebesar Rp9.353.046 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp9.887.754 juta dan meningkat dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2015 sebesar Rp9.280.436 juta. Kenaikan aset dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2015 ini disebabkan adanya kenaikan nilai persediaan barang produksi sebesar Rp70.617 juta atau sebesar 24%.

   Jumlah liabilitas pada tahun 2016 sebesar Rp4.222.228 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp4.583.167 juta dan meningkat dibandingkan dengan jumlah liabilitas tahun 2015 sebesar Rp3.709.365 juta. Kenaikan liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi terkait dengan Perusahaan menerima pinjaman modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (induk Perusahaan).

   Jumlah ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp5.130.818 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp5.304.587 juta dan dari jumlah ekuitas tahun 2015 sebesar Rp5.571.071 juta. Penurunan ekuitas ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang masih mengalami kerugian dan ditambah dengan adanya impairment untuk aset tanaman dan non tanaman.

   Arus Kas tahun 2016 dari aktifitas operasi mengalami defisit Rp138.162 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan tingginya pembayaran bunga dan pendapatan penjualan mengalami penurunan yang signifikan. Adapun kas yang digunakan untuk investasi tahun 2016 juga mengalami defisit sebesar Rp89.005 juta lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 hal ini dikarenakan adanya penambahan investasi di tahun 2016. Kas bersih yang diperoleh dari aktifitas pendanaan sebesar Rp162.528 juta lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 kenaikan pendanaan dikarenakan adanya penerimaan pinjaman modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

II. URAIAN KINERJA

1. Kinerja Perusahaan

Perusahaan pada tahun 2016 mengalami kerugian sebesar Rp376.860 juta atau dapat menekan kerugian dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp495.061 juta dan dari tahun 2015 rugi sebesar Rp564.563 juta. Realisasi nilai pendapatan tahun 2016 sebesar Rp1.267.882 juta lebih rendah dibandingkan RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp286.360 juta atau 18%. Dibandingkan realisasi tahun 2015 pedapatan mengalami penurunan sebesar Rp199.464 juta atau 14%. Realisasi Pendapatan di bawah RKAP-P tahun 2016 terutama disebabkan oleh penurunan penjualan seluruh komoditas terkecuali karet. Secara keseluruhan beban produksi tahun 2016 di bawah RKAP-P tahun 2016. Hal ini disebabkan target volume produksi tahun 2016 yang ditetapkan dalam RKAP-P tidak tercapai serta adanya upaya efisiensi dan efektivitas pembiayaan.

Kinerja PT Perkebunan Nusantara VIII pada tahun 2016 yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Bobot	Nilai	Skor
1.	Aspek Keuangan			
	Return On Equity (ROE)	20,00	(7,89) %	0,00
	Return On Investment (ROI)	15,00	0,31 %	2,00
	Cash Ratio	5,00	7,58 %	1,00
	Current Ratio	5,00	61,89 %	0,00
	Collection Period	5,00	26,02 hari	5,00
	Inventory Turn Over	5,00	103,63 hari	4,00
	Total Assets Turn Over	5,00	14,76 %	1,50
	Equity to Total Assets	10,00	59,16 %	8,50
	Jumlah Aspek Keuangan	70,00		22,00
2.	Aspek Operasional			
	Produktivitas (Kg/Ha)			
	Teh	2,00	100,00 %	2,00
	Karet	2,00	100,00 %	2,00
	Sawit (TBS)	2,00	80,00 %	1,60
	Rendemen (%)			
	Sawit (CPO)	1,50	100,00 %	1,50
	Biaya pemupukan (Rp/Ha)			
	Teh	1,50	50,00 %	0,80
	Karet	1,50	100,00 %	1,50
	Sawit	1,50	100,00 %	1,50
	Produktivitas Tenaga Kerja (Kg/orang)			
	Teh	1,00	100,00 %	1,00
	Karet	1,00	80,00 %	0,80
	Sawit	1,00	100,00 %	1,00
	Jumlah Aspek Operasional	15,00		13,70
3.	Aspek Administrasi			
	Laporan Tahunan	3,00	Feb-2017	3,00
	Rancangan RKAP	3,00	Okt-2016	3,00
	Laporan Periodik	3,00	Triwulan I Terlambat	2,00
	Kinerja PKBL			
	Efektivitas Penyaluran	3,00	71,00%	0,00
	Tingkat Kolektibilitas	3,00	38,00%	1,00
	Jumlah Aspek Administrasi	15,00		9,00
	Total Skor	100,00		44,70
	Tingkat Kesehatan		KURANG SEHAT	BB

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

2. Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 (RKAP tahun 2016) dilakukan berdasarkan:

- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) No KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 08/MBU/2013.

- Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VIII berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yuliani Idawati, SH, Sp.N di Bandung Nomor 7 tanggal 14 September 2016.

Penyusunan RKAP tahun 2016 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyampaian draft RKAP Tahun 2016 kepada Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Selaku Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VIII dengan Surat No. SB/V.2/3434/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

- Penyampaian draft RKAP Tahun 2016 kepada Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII untuk permohonan tanggapan melalui Surat No.SB/V.2/3434/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

- Penyampaian Tanggapan Dewan Komisaris terhadap RKAP 2016 melalui Surat No.45/Dekom/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;

- Undangan RUPS Pengesahan RKAP 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII kepada Menteri BUMN dan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No.SB/I.1/4069/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP Tahun 2016 akan dilaksanakan pada Tanggal 28 Desember 2015;

- RKAP Tahun 2016 disahkan berdasarkan risalah RUPS PT Perkebunan Nusantara VIII No. RIS/I.1/1000/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan Dan Bina Limgkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan operasional perusahaan Tahun 2016;

- Permohonan RKAP Perubahan (RKAP-P) disahkan berdasarkan Risalah RUPS PT Perkebunan Nusantara VIII No. S-638/MBU/11/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional perusahaan Tahun 2016;

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015

Perbandingan realisasi penjualan, produksi, beban usaha, dan investasi Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan RKAP-P tahun 2016 yang telah telah disetujui Dewan Komisaris dan pemegang saham dan realisasi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

3.1. Kuantum Penjualan

Rincian kuantum penjualan ekspor dan lokal untuk masing-masing komoditi yang dihasilkan Perusahaan pada tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

a. Teh

Perkembangan penjualan komoditi teh pada tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kuantum penjualan komoditi teh tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Volume Penjualan								
Main grade	Ton	20.609	26.447	24.013	(3.404)	(14)	(5.838)	(22)
Off grade	Ton	4.238	3.464	3.806	432	11	774	22
Jumlah	Ton	24.847	29.911	27.819	(2.972)	(11)	(5.064)	(17)

Realisasi volume penjualan teh tahun 2016 sebesar 24.847 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 5.064 ton atau 17%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 2.972 ton atau 11%. Hal ini disebabkan pencapaian produksi masih belum optimal sehingga potensi volume penjualan terbatas dan kualitas yang dihasilkan di negara-negara produsen lainnya yang lebih kompetitif.

b. Karet

Perkembangan penjualan komoditi karet pada tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kuantum penjualan komoditi karet tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Volume Penjualan	Ton	16.081	15.586	15.688	393	3	495	3

Realisasi volume penjualan karet tahun 2016 sebesar 16.081 ton berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar 495 ton atau 3%, dan meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 393 ton atau 3%. Hal ini dapat tercapai sebab produksi karet yang mencapai RKAP-P dan adanya usaha untuk meningkatkan penjualan karet.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.1. Kuantum Penjualan (lanjutan)

c. Kelapa Sawit

Perkembangan penjualan komoditi kelapa sawit pada tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kuantum penjualan komoditi kelapa sawit tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Volume Penjualan								
Minyak Sawit	Ton	49.750	66.235	63.875	(14.125)	(22)	(16.485)	(25)
Inti Sawit	Ton	6.830	8.015	10.100	(3.270)	(32)	(1.185)	(15)
Jumlah	Ton	56.580	74.250	73.975	(17.395)	(24)	(17.670)	(24)

Realisasi volume penjualan kelapa sawit tahun 2016 sebesar 56.580 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 17.670 ton atau 24%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 17.395 ton atau 24%.

Pencapaian volume penjualan minyak sawit (CPO) tahun 2016 sebesar 49.750 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 16.485 ton atau 25%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 14.125 ton atau 22%. Volume penjualan inti sawit (Kernel) tahun 2016 sebesar 6.830 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 1.185 ton atau 15%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 3.270 ton atau 32%. Volume penjualan komoditi kelapa sawit tidak tercapai dikarenakan rendahnya volume produksi.

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Perkembangan penjualan komoditi industri hilir teh pada tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kuantum penjualan industri hilir tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Volume Penjualan	Ton	1.208	1.691	1.235	(27)	(2)	(483)	(29)

Realisasi volume penjualan IHT tahun 2016 sebesar 1.208 ton lebih rendah dibandingkan RKAP-P tahun 2016 sebesar 483 ton atau 29%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 27 ton atau 2%. Hal ini dikarenakan penyesuaian kebijakan pemasaran untuk menurunkan volume produksi.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.1. Kuantum Penjualan (lanjutan)

e. Aneka Tanaman

Perkembangan penjualan aneka tanaman pada tahun 2016 dan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Kuantum penjualan aneka tanaman sawit tahun 2016 dan 2015

Uralan	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Volume Penjualan	Ton	2.810	7.095	3.483	(673)	(19)	(4.285)	(60)

Realisasi volume penjualan aneka tanaman tahun 2016 sebesar 2.810 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 4.285 ton atau 60%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 673 ton atau 19%.

3.2. Nilai Penjualan

Perkembangan nilai penjualan teh, karet, kelapa sawit, industri hilir teh, dan aneka tanaman untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Nilai penjualan komoditi teh yang dihasilkan Perusahaan selama tahun 2016 dan 2015, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai penjualan teh tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uralan	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Nilai Penjualan							
Main grade	435.124	591.219	508.387	(73.263)	(14)	(156.095)	(26)
Off grade	42.839	33.939	33.605	9.234	27	8.900	26
Jumlah	477.963	625.158	541.992	(64.029)	(12)	(147.195)	(24)
Harga Jual							
Main grade	21.114	22.355	21.172	(58)	(0)	(1.241)	(6)
Off grade	10.109	9.797	8.830	1.279	14	312	3
Rata-rata	19.237	20.901	19.483	(246)	(1)	(1.664)	(8)

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.2. Nilai Penjualan (lanjutan)

a. Teh (lanjutan)

Realisasi nilai penjualan teh tahun 2016 sebesar Rp477.963 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp147.195 juta atau 24%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan Rp64.029 juta atau 12%. Hal ini disebabkan baik volume penjualan maupun harga jual masih di bawah RKAP-P dan realisasi tahun 2015.

Harga jual rata-rata teh tahun 2016 sebesar Rp19.237/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.664/kg atau 8% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp246/kg atau 1%. Hal ini disebabkan *over supply* di negara produsen teh dan kualitas di negara penghasil teh lainnya yang lebih terjaga dan konsisten.

b. Karet

Nilai penjualan komoditi karet yang dihasilkan Perusahaan selama tahun 2016 dan 2015, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. Nilai penjualan karet tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Nilai Penjualan	316.991	284.495	320.656	(3.665)	(1)	32.496	11
Harga Rata-Rata	19.712	18.254	20.440	(728)	(4)	1.458	8

Realisasi nilai penjualan karet tahun 2016 sebesar Rp316.991 juta berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp32.496 juta atau 11%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp3.665 juta atau 1%. Hal ini dapat disebabkan harga jual dan volume penjualan di atas RKAP-P tahun 2016.

Harga jual rata-rata karet tahun 2016 sebesar Rp19.712/kg berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.458/kg atau 8% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp728/kg atau 4%. Hal ini disebabkan tingginya permintaan karet yang mendorong naiknya harga jual karet, terutama pada akhir tahun 2016.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.2. Nilai Penjualan (lanjutan)

c. Kelapa Sawit

Nilai penjualan komoditi kelapa sawit yang dihasilkan Perusahaan selama tahun 2016 dan 2015, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai penjualan kelapa sawit tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Nilai Penjualan							
Minyak Sawit	369.734	493.536	439.701	(69.967)	(16)	(123.802)	(25)
Inti Sawit	30.624	32.598	40.020	(9.396)	(23)	(1.974)	(6)
Jumlah	400.358	526.134	479.721	(79.363)	(17)	(125.776)	(24)
Harga Jual							
Minyak Sawit	7.432	7.451	6.884	548	8	(19)	(0)
Inti Sawit	4.484	4.067	3.962	522	13	417	10
Rata-rata	7.076	7.086	6.485	591	9	(10)	(0)

Realisasi jumlah nilai penjualan kelapa sawit tahun 2016 sebesar Rp400.358 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp125.776 juta atau 24%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan Rp79.363 juta atau 17%.

Nilai penjualan minyak sawit (CPO) tahun 2016 sebesar Rp369.734 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp123.802 juta atau 25%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp69.967 juta atau 16%.

Nilai penjualan inti sawit (Palm Kernel) tahun 2016 sebesar Rp30.624 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.974 juta atau 6%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp9.396 juta atau 23%. Hal tersebut disebabkan lebih rendahnya volume produksi dibandingkan dengan RKAP-P meskipun disisi lain harga jual meningkat.

Harga jual rata-rata kelapa sawit tahun 2016 sebesar Rp7.076/kg mendekati RKAP-P tahun 2016 dan apabila dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp591/kg atau 9%.

Harga jual rata-rata minyak sawit (CPO) tahun 2016 sebesar Rp7.432/kg mendekati RKAP-P tahun 2016 dan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp548/kg atau 8%. Sedangkan harga jual rata-rata inti sawit (Kernel) tahun 2016 sebesar Rp4.484/kg berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp417/kg atau 10% dan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp522/kg atau 13%. Meningkatnya harga jual rata-rata komoditi kelapa sawit disebabkan tingginya permintaan produk kelapa sawit di Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.2. Nilai Penjualan (lanjutan)

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Nilai penjualan industri hilir teh yang dihasilkan Perusahaan selama tahun 2016 dan 2015, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai penjualan industri hilir teh tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Nilai Penjualan	24.415	58.564	52.777	(28.362)	(54)	(34.149)	(58)
Harga Rata-Rata	20.214	34.630	42.720	(22.506)	(53)	(14.416)	(42)

Realisasi nilai penjualan IHT tahun 2016 sebesar Rp24.415 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp34.419 juta atau 58%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan Rp28.362 juta atau 54%. Hal ini dikarenakan volume penjualan dan harga jual di bawah RKAP-P.

Penurunan nilai penjualan tersebut merupakan dampak dari rencana perpindahan pemasaran dan marketing IHT dari PTPN VIII kepada PT. KPBN sehingga manajemen mengambil kebijakan pemasaran produk hilir dengan pengurangan produksi dan penjualan untuk menghabiskan stok barang jadi dan barang kemasan dengan design lama, sehingga terjadi penurunan penjualan pada bulan Oktober dan November 2016.

e. Aneka Tanaman

Nilai penjualan aneka tanaman yang dihasilkan Perusahaan selama tahun 2016 dan 2015, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai penjualan aneka tanaman tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Nilai Penjualan	21.409	66.449	20.898	511	2	(45.040)	(68)
Harga Rata-Rata	7.618	9.365	6.000	1.618	27	(1.747)	(19)

Realisasi nilai penjualan aneka tanaman tahun 2016 sebesar Rp21.409 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp45.040 juta atau 68%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp511 juta atau 2%.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.2. Nilai Penjualan (lanjutan)

e. Aneka Tanaman (lanjutan)

Harga jual rata-rata untuk aneka tanaman tahun 2016 sebesar Rp7.618/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.747/kg atau 19%, namun dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp1.618/kg atau 27%.

f. Agrowisata

Realisasi pendapatan agrowisata tahun 2016 sebesar Rp24.439 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp875 juta atau 3%, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp493 juta atau 2%.

3.3. Produksi

Perkembangan produksi kebun sendiri dan pembelian teh, karet, kelapa sawit, indutri hilir teh, dan aneka tanaman tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Tabel 11. Produksi Teh tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Hasil Kebun Sendiri	Ton	29.978	33.498	24.287	5.691	23	(3.520)	(11)
Lancuran dan Pihak III	Ton	1.302	1.518	1.308	(6)	(0)	(216)	(14)
Pemakaian untuk Industri Hilir	Ton	(1.107)	(1.461)	(930)	(177)	19	354	(24)
Jumlah Produksi	Ton	30.173	33.555	24.665	5.508	22	(3.382)	(10)
Produktifitas Teh	Kg/Ha	1.487	1.662	1.261	226	18	(175)	(11)
Rendemen Teh	%	22,41	22,23	22,95	(0,53)	(2)	0,19	1

Volume produksi teh tahun 2016 sebesar 30.173 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 3.382 ton atau 10%, dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5.508 ton atau 22%.

Produktifitas teh tahun 2016 sebesar 1.487 kg/ha berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 175 kg/ha atau 11%, dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 226 kg/ha atau 18%.

Ketidaktercapaian produksi dan produktifitas dibandingkan RKAP-P tahun 2016 disebabkan kondisi kurangnya kecukupan nutrisi untuk tanaman dan adanya defisit air disebabkan tidak adanya hujan selama bulan Juni – Oktober 2016. Selain itu kondisi serangan hama dan penyakit rata-rata di setiap kebun masih dapat dikendalikan.

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.3. Produksi (lanjutan)

b. Karet

Tabel 12. Produksi Karet tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Hasil Kebun Sendiri	Ton	15.431	15.267	13.301	2.130	16	164	1
Lancuran dan Pihak III	Ton	1.913	1.948	2.492	(579)	(23)	(35)	(2)
Jumlah Produksi	Ton	17.344	17.215	15.793	1.551	10	129	1
Produktifitas Karet	Kg/Ha	863	854	756	107	14	9	1
Rendemen Karet	%	26,80	26,91	27,07	(0,27)	(1)	(0,11)	(0)

Volume produksi karet tahun 2016 sebesar 17.344 ton berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar 129 ton atau 1% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.551 ton atau 10%. Kenaikan volume produksi ini dapat tercapai karena adanya reposisi hanca panen (penambahan jumlah pohon yang disadap) sehingga meningkatkan produksi karet.

Produktifitas komoditi karet tahun 2016 sebesar 863 kg/ha berada diatas RKAP-P tahun 2016 sebesar 9 kg/ha atau 1%, dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 107 kg/ha atau 14%.

c. Kelapa Sawit

Tabel 13. Produksi Kelapa Sawit tahun 2016 dan 2015

Uraian	Sat	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
		Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Ton	%	Ton	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Hasil Kebun Sendiri								
- TBS	Ton	201.154	231.867	237.938	(36.784)	(15)	(30.713)	(13)
- Minyak Sawit	Ton	42.053	50.342	52.999	(10.946)	(21)	(8.289)	(16)
- Inti Sawit	Ton	5.273	8.043	8.079	(2.806)	(35)	(2.770)	(34)
Jumlah (MS+IS)	Ton	47.326	58.385	61.078	(13.752)	(23)	(11.059)	(19)
Lancuran dan Pihak III								
- TBS	Ton	70.434	78.461	69.880	554	1	(8.027)	(10)
- Minyak Sawit	Ton	11.353	13.443	12.223	(870)	(7)	(2.090)	(16)
- Inti Sawit	Ton	1.516	2.148	2.408	(892)	(37)	(632)	(29)
Jumlah (MS+IS)	Ton	12.869	15.591	14.631	(1.762)	(12)	(2.722)	(17)
Jumlah Produksi Kelapa Sawit								
- TBS	Ton	271.588	310.328	307.818	(36.230)	(12)	(38.740)	(12)
- Minyak Sawit	Ton	53.406	63.785	65.222	(11.816)	(18)	(10.379)	(16)
- Inti Sawit	Ton	6.789	10.191	10.487	(3.698)	(35)	(3.402)	(33)
Jumlah (MS+IS)	Ton	60.195	73.976	75.709	(15.514)	(20)	(13.781)	(19)
Produktifitas TBS	Kg/Ha	11.539	13.301	14.026	(2.487)	(18)	(1.762)	(13)
Rendemen CPO	%	19,86	20,55	21,19	(1,53)	(7)	(0,89)	(4)
Rendemen Kernel	%	2,50	3,28	3,41	(0,91)	(27)	(0,78)	(24)

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.3. Produksi (lanjutan)

c. Kelapa Sawit (lanjutan)

Volume produksi TBS tahun 2016 sebesar 271.588 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 38.740 ton atau 12% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 36.230 ton atau 12%. Volume produksi minyak sawit dan inti sawit tahun 2016 sebesar 60.195 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 13.781 ton atau 19% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15.514 ton atau 20%.

Volume produksi minyak sawit (CPO) tahun 2016 sebesar 53.406 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 10.379 ton atau 16% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11.816 ton atau 18%.

Volume produksi inti sawit (Kernel) tahun 2016 sebesar 6.789 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 3.402 ton atau 33% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3.698 ton atau 35%.

Produktifitas TBS kelapa sawit tahun 2016 sebesar 11.539 kg/ha berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 1.762 kg/ha atau 13%, dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2.487 kg/ha atau 18%.

Tidak tercapainya produksi TBS kelapa sawit dari RKAP-P tahun 2016 disebabkan karena pemupukan tahun ini dan tahun sebelumnya belum terealisasi sepenuhnya sehingga menyebabkan produksi sawit tidak optimal serta adanya stagnasi buah akibat kecenderungan munculnya bunga jantan.

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Volume produksi IHT tahun 2016 sebesar 1.251 ton berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 982 ton atau 44%, dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 241 ton atau 24%. Hal ini dikarenakan penyesuaian kebijakan pemasaran untuk menurunkan volume produksi.

e. Aneka Tanaman

Volume produksi aneka tanaman tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar 3.700 ton atau 49%, dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 476 ton atau 11%.

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.4. Beban Produksi

Perkembangan beban produksi teh, karet, kelapa sawit, industri hilir teh, dan aneka tanaman untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Tabel 14. Beban Produksi Teh tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Beban Produksi teh							
Gaji & Tunjangan Pegawai	8.820	11.070	8.401	419	5	(2.250)	(20)
Pemel.Tan Menghasilkan	63.880	55.531	60.370	3.510	6	8.349	15
Pemupukan	47.111	67.524	37.367	9.744	26	(20.413)	(30)
Panen	137.827	167.875	119.688	18.139	15	(30.048)	(18)
Pengangkutan ke Pabrik	21.072	30.692	19.901	1.171	6	(9.620)	(31)
Jumlah Biaya Tanaman	278.710	332.692	245.727	32.983	13	(53.982)	(16)
Hasil Lancuran	9.143	7.649	10.926	(1.783)	(16)	1.494	20
Biaya Pengolahan	112.810	105.351	78.807	34.003	43	7.459	7
Biaya Pemel. Bangunan & Mesin Pabrik	36.596	61.620	23.872	12.724	53	(25.024)	(41)
Biaya Pengepakan	14.183	19.080	17.353	(3.170)	(18)	(4.897)	(26)
Jumlah Biaya Produksi	451.442	526.392	376.685	74.757	20	(74.950)	(14)
Biaya Penyusutan	32.033	33.474	38.288	(6.255)	(16)	(1.441)	(4)
Jumlah B. Prod + Penyusutan	**483.475**	**559.866**	**414.973**	**68.502**	**17**	**(76.391)**	**(14)**
Beban Produksi Rp/Kg							
B. Prod Excl Penyusutan	14.962	15.688	15.272	(310)	(2)	(726)	(5)
B. Prod Incl Penyusutan	16.023	16.685	16.824	(801)	(5)	(662)	(4)

Jumlah realisasi beban produksi teh tahun 2016 sebesar Rp483.475 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp76.391 juta atau 14% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp68.502 juta atau 17%.

Realisasi beban produksi per kg teh tahun 2016 sebesar Rp16.023/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp662/kg atau 4% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp801/kg atau 5%.

Lebih rendahnya realisasi beban produksi tahun 2016 dibandingkan dengan RKAP-P dikarenakan realisasi volume produksi di bawah RKAP-P serta adanya upaya efisiensi biaya.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.4. Beban Produksi (lanjutan)

b. Karet

Tabel 15. Beban Produksi Karet tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Beban Produksi Karet							
Gaji & Tunjangan Pegawai	5.931	6.724	5.153	778	15	(793)	(12)
Pemel.Tan Menghasilkan	13.864	24.084	12.684	1.180	9	(10.220)	(42)
Pemupukan	16.127	13.539	4.082	12.045	295	2.588	19
Panen	137.578	140.770	123.769	13.809	11	(3.192)	(2)
Pengangkutan ke Pabrik	11.403	10.999	10.756	647	6	404	4
Jumlah Biaya Tanaman	184.903	196.116	156.444	28.459	18	(11.213)	(6)
Hasil Lancuran	15.239	16.500	26.280	(11.041)	(42)	(1.261)	(8)
Biaya Pengolahan	33.868	34.958	28.119	5.749	20	(1.090)	(3)
Biaya Pemel. Bangunan & Mesin Pabrik	7.222	13.729	6.142	1.080	18	(6.507)	(47)
Biaya Pengepakan	4.102	3.563	4.936	(834)	(17)	539	15
Jumlah Biaya Produksi	245.334	264.866	221.921	23.413	11	(19.532)	(7)
Biaya Penyusutan	34.958	36.245	40.338	(5.380)	(13)	(1.287)	(4)
Jumlah B. Prod + Penyusutan	**280.292**	**301.111**	**262.259**	**18.033**	**7**	**(20.819)**	**(7)**
Beban Produksi Rp/Kg							
B. Prod Excl Penyusutan	14.145	15.386	14.051	93	1	(1.241)	(8)
B. Prod Incl Penyusutan	16.160	17.491	16.605	(445)	(3)	(1.331)	(8)

Jumlah beban produksi karet tahun 2016 sebesar Rp280.292 juta berada di bawah RKAP- P tahun 2016 sebesar Rp20.819 juta atau 7% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp18.033 juta atau 7%.

Realisasi beban produksi per kg karet tahun 2016 sebesar Rp16.160/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.331/kg atau 8% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp445/kg atau 3%.

Lebih rendahnya beban produksi dibandingkan RKAP-P karena adanya upaya efisiensi biaya panen dan pengolahan.

PT Perkebunan Nusantara VIII
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
31 Desember 2016

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.4. Beban Produksi (lanjutan)

c. Kelapa Sawit

Tabel 16. Beban Produksi Kelapa Sawit tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Beban Produksi Kelapa Sawit							
Gaji & Tunjangan Pegawai	2.850	3.115	2.664	186	7	(265)	(9)
Pemel.Tan Menghasilkan	22.893	48.605	24.649	(1.756)	(7)	(25.712)	(53)
Pemupukan	58.267	62.082	25.367	32.900	130	(3.815)	(6)
Panen	37.996	42.772	37.521	475	1	(4.776)	(11)
Pengangkutan ke Pabrik	50.013	63.124	57.489	(7.476)	(13)	(13.111)	(21)
Jumlah Biaya Tanaman	172.019	219.698	147.690	24.329	16	(47.679)	(22)
Pembelian dari pihak ketiga	80.080	83.973	76.182	3.898	5	(3.893)	(5)
Biaya Pengolahan	9.578	18.347	15.310	(5.732)	(37)	(8.769)	(48)
Biaya Pemel. Bangunan & Mesin Pabrik	16.835	27.268	15.190	1.645	11	(10.433)	(38)
Jumlah Biaya Produksi	278.512	349.286	254.372	24.140	9	(70.774)	(20)
Biaya Penyusutan	43.589	47.064	50.462	(6.873)	(14)	(3.475)	(7)
Jumlah B. Prod + Penyusutan	**322.101**	**396.350**	**304.834**	**17.267**	**6**	**(74.249)**	**(19)**
Beban Produksi Rp/Kg							
B. Prod Excl Penyusutan	4.827	4.722	3.360	1.267	38	(95)	(2)
B. Prod Incl Penyusutan	5.351	5.358	4.026	1.325	33	(7)	(0)

Jumlah beban produksi kelapa sawit tahun 2016 sebesar Rp322.101 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp74.249 juta atau 19% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp17.267 juta atau 6%.

Realisasi beban produksi per kg kelapa sawit tahun 2016 sebesar Rp5.351/kg relatif sama dengan RKAP-P tahun 2016 dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.325/kg atau 33%.

Lebih rendahnya beban produksi terhadap RKAP-P dikarenakan pencapaian produksi di bawah RKAP-P serta adanya upaya efisiensi biaya.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.4. Beban Produksi (lanjutan)

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Tabel 17. Beban Produksi Industri Hilir Teh tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Gaji & Tunjangan Pegawai	246	-	-	246	100	246	100
Biaya Pengolahan	22.402	45.563	22.160	242	1	(23.161)	(51)
Jumlah Biaya Produksi	22.648	45.563	22.160	488	2	(22.915)	(50)
Biaya Penyusutan	1.308	1.193	676	632	93	115	10
Jumlah B. Prod + Penyusutan	**23.956**	**46.756**	**22.836**	**1.120**	**5**	**(22.800)**	**(49)**
Beban Produksi Rp/Kg							
B. Prod Excl Penyusutan	18.105	20.400	21.944	(3.839)	(17)	(2.295)	(11)
B. Prod Incl Penyusutan	19.150	20.934	22.614	(3.464)	(15)	(1.784)	(9)

Beban produksi IHT tahun 2016 sebesar Rp23.956 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp22.800 juta atau 49% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.120 juta atau 5%.

Lebih rendahnya realisasi beban produksi terhadap RKAP-P dikarenakan pencapaian produksi di bawah RKAP-P serta adanya upaya efisiensi biaya.

e. Aneka Tanaman

Tabel 18. Beban Produksi Aneka Tanaman tahun 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Gaji & Tunjangan Pegawai	327	-	455	(128)	(28)	327	100
Pemel.Tan Menghasilkan	10.015	14.905	14.790	(4.775)	(32)	(4.890)	(33)
Panen	2.286	1.919	2.827	(541)	(19)	367	19
Pengangkutan	2.022	6.338	2.854	(832)	(29)	(4.316)	(68)
Jumlah Biaya Tanaman	14.650	23.162	20.926	(6.276)	(30)	(8.512)	(37)
Biaya Pengepakan	13.104	11.396	26.021	(12.917)	(50)	1.708	15
Jumlah Biaya Produksi	27.754	34.558	46.947	(19.193)	(41)	(6.804)	(20)
Biaya Penyusutan	15.837	13.504	7.901	7.936	100	2.333	17
Jumlah B. Prod + Penyusutan	**43.591**	**48.062**	**54.848**	**(11.257)**	**(21)**	**(4.471)**	**(9)**
Beban Produksi Rp/Kg							
B. Prod Excl Penyusutan	7.267	4.596	10.931	(3.664)	(34)	2.671	58
B. Prod Incl Penyusutan	11.414	6.392	12.771	(1.357)	(11)	5.022	79

Beban produksi aneka tanaman tahun 2016 sebesar Rp43.591 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp4.471 juta atau 9% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp11.257 juta atau 21%. Lebih rendahnya realisasi beban produksi terhadap RKAP-P dikarenakan adanya kebijakan penurunan produksi serta adanya upaya efisiensi biaya.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.5. Beban Usaha

Realisasi beban usaha tahun 2016 berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp231.445 juta atau 36%. Adapun jika dibandingkan dengan tahun 2015 menurun sebesar Rp484.611 juta atau 54%. Hal ini disebabkan efisiensi anggaran dimana kegiatan belanja dilakukan dengan lebih selektif.

3.6. Beban Pokok Penjualan FOB

Perkembangan beban produksi teh, karet, dan kelapa sawit untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Beban pokok penjualan FOB per kg teh tahun 2016 sebesar Rp23.025/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp2.402/kg atau 9% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.846/kg atau 23%.

b. Karet

Beban pokok penjualan FOB per kg karet tahun 2016 sebesar Rp29.358/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp5.476/kg atau 16% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.380/kg atau 18%.

c. Kelapa Sawit

Beban pokok penjualan FOB kelapa sawit (minyak sawit dan inti sawit) tahun 2016 sebesar Rp6.896/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp635/kg atau 8% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp586/kg atau 8%.

Beban pokok penjualan FOB minyak sawit (CPO) tahun 2016 sebesar Rp7.266/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp664/kg atau 8% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp678/kg atau 9%.

Beban pokok penjualan FOB inti sawit (Kernel) tahun 2016 sebesar Rp4.197/kg berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp39/kg atau 1% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp367/kg atau 8%.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.7. Investasi

Tabel 19. Investasi Perusahaan Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
A. Tanaman							
Teh	9.314	11.204	20.414	(11.100)	(54)	(1.890)	(17)
Karet	79.885	120.091	79.493	392	(0)	(40.206)	(33)
Kelapa Sawit	47.110	150.910	35.492	11.618	33	(103.800)	(69)
Aneka Tanaman	7.467	85.753	21.662	(14.195)	(66)	(78.286)	(91)
Jumlah Tanaman	143.776	367.958	157.061	(13.285)	(8)	(224.182)	(61)
B. Non Tanaman							
Sertifikat	-	14.100	-	-	-	(14.100)	(100)
Bangunan Perusahaan	5.533	15.054	1.460	4.073	279	(9.521)	(63)
Mesin & Instalasi	25.393	139.230	6.089	19.304	317	(113.837)	(82)
Jalan, Jembatan & Sal, Air	-	21.920	2.278	(2.278)	(100)	(21.920)	(100)
Alat Pengangkutan	727	-	-	727	100	727	100
Alat Pertanian & Inv. Kecil	1.382	2.195	10.698	(9.316)	(87)	(813)	(37)
HGU	-	6.608	-	-	-	(6.608)	(100)
Proyek Dalam Penyelesaian	-	46.365	-	-	-	(46.365)	(100)
Jumlah Non Tanaman	33.035	245.472	20.525	12.510	61	(212.437)	(87)
Jumlah Investasi	**176.811**	**613.430**	**177.586**	**(775)**	**(0)**	**(436.619)**	**(71)**

Investasi pada tahun 2016 sebesar Rp176.811 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp436.619 juta atau 71% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp775 juta. Investasi tahun 2016 tersebut terdiri dari investasi tanaman sebesar Rp143.776 juta atau 39% dari RKAP-P tahun 2016 dan 92% dari realisasi tahun 2015, serta investasi non tanaman tahun 2016 sebesar Rp33.035 juta atau 13% dari RKAP-P tahun 2016 dan 161% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya penghematan pengeluaran biaya/belanja investasi yang dilakukan secara lebih selektif mengingat kesulitan keuangan Perusahaan tahun 2016. Penjelasan investasi sebagai berikut:

a. Investasi Teh
   Investasi tanaman teh tahun 2016 sebesar Rp9.314 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp1.890 juta atau 17% dan dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp11.100 juta atau 54%.
b. Investasi Karet
   Investasi karet tahun 2016 sebesar Rp79.885 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp40.206 juta atau 33% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp392 juta.
c. Investasi Kelapa Sawit
   Investasi kelapa sawit tahun 2016 sebesar Rp47.110 juta berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp103.800 juta atau 69% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp11.618 juta atau 33%.
d. Investasi Aneka Tanaman
   Investasi aneka tanaman tahun 2016 sebesar Rp7.467 juta berada di bawah RKAP tahun 2016 sebesar Rp78.286 juta atau 91% dan jika dibandingkan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp14.195 juta atau 66%.

Rendahnya investasi karena keterbatasan ketersediaan dana eksternal baik dari perbankan yang berupa kredit investasi maupun dari investor.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.8. Laba/(Rugi) Komoditas

Perkembangan beban produksi teh, karet, dan kelapa sawit untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Tabel 20. Laba/(Rugi) Teh Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	477.963	625.157	541.992	(64.029)	(12)	(147.194)	(24)
Harga Pokok Penjualan	(397.430)	(492.674)	(448.449)	51.019	(11)	95.244	(19)
Laba Kotor	80.533	132.483	93.543	(13.010)	(14)	(51.950)	(39)
Biaya Usaha	(177.451)	(267.564)	(351.538)	174.087	(50)	90.113	(34)
Laba Usaha	(96.918)	(135.081)	(257.995)	161.077	(62)	38.163	(28)
Pend/(Biaya) Non Usaha	2.809	(307)	(30.982)	33.791	(109)	3.116	(1.015)
Laba Seb Pajak	(94.109)	(135.388)	(288.977)	194.868	(67)	41.279	(30)

Pada tahun 2016 komoditas teh mengalami kerugian sebesar Rp94.109 juta, dengan RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp135.388 juta dan dari tahun 2015 rugi sebesar Rp288.977 juta

b. Karet

Tabel 21. Laba/(Rugi) Karet Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	316.991	284.495	320.656	(3.665)	(1)	32.496	11
Harga Pokok Penjualan	(261.910)	(273.921)	(259.668)	(2.242)	1	12.011	(4)
Laba Kotor	55.081	10.574	60.988	(5.907)	(10)	44.507	421
Biaya Usaha	(104.666)	(189.075)	(271.297)	166.631	(61)	84.409	(45)
Laba Usaha	(49.585)	(178.501)	(210.309)	160.724	(76)	128.916	(72)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(105.536)	(79.910)	(29.689)	(75.847)	255	(25.626)	32
Laba Seb Pajak	(155.121)	(258.411)	(239.998)	84.877	(35)	103.290	(40)

Pada tahun 2016 karet mengalami kerugian sebesar Rp155.121 juta, atau dapat menekan kerugian dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp258.411 juta dan dari tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp239.998 juta.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.8. Laba/(Rugi) Komoditas

Perkembangan beban produksi teh, karet, dan kelapa sawit untuk tahun 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

a. Teh

Tabel 20. Laba/(Rugi) Teh Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	477.963	625.157	541.992	(64.029)	(12)	(147.194)	(24)
Harga Pokok Penjualan	(397.430)	(492.674)	(448.449)	51.019	(11)	95.244	(19)
Laba Kotor	80.533	132.483	93.543	(13.010)	(14)	(51.950)	(39)
Biaya Usaha	(177.451)	(267.564)	(351.538)	174.087	(50)	90.113	(34)
Laba Usaha	(96.918)	(135.081)	(257.995)	161.077	(62)	38.163	(28)
Pend/(Biaya) Non Usaha	2.809	(307)	(30.982)	33.791	(109)	3.116	(1.015)
Laba Seb Pajak	(94.109)	(135.388)	(288.977)	194.868	(67)	41.279	(30)

Pada tahun 2016 komoditas teh mengalami kerugian sebesar Rp94.109 juta, dengan RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp135.388 juta dan dari tahun 2015 rugi sebesar Rp288.977 juta

b. Karet

Tabel 21. Laba/(Rugi) Karet Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	316.991	284.495	320.656	(3.665)	(1)	32.496	11
Harga Pokok Penjualan	(261.910)	(273.921)	(259.668)	(2.242)	1	12.011	(4)
Laba Kotor	55.081	10.574	60.988	(5.907)	(10)	44.507	421
Biaya Usaha	(104.666)	(189.075)	(271.297)	166.631	(61)	84.409	(45)
Laba Usaha	(49.585)	(178.501)	(210.309)	160.724	(76)	128.916	(72)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(105.536)	(79.910)	(29.689)	(75.847)	255	(25.626)	32
Laba Seb Pajak	(155.121)	(258.411)	(239.998)	84.877	(35)	103.290	(40)

Pada tahun 2016 karet mengalami kerugian sebesar Rp155.121 juta, atau dapat menekan kerugian dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp258.411 juta dan dari tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp239.998 juta.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.8. Laba/(Rugi) Komoditas (lanjutan)

c. Kelapa Sawit

Tabel 22. Laba/(Rugi) Kelapa Sawit Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	400.358	526.134	479.721	(79.363)	(17)	(125.776)	(24)
Harga Pokok Penjualan	(298.879)	(394.751)	(298.273)	(606)	0	95.872	(24)
Laba Kotor	101.479	131.383	181.448	(79.969)	(44)	(29.904)	(23)
Biaya Usaha	(85.454)	(159.575)	(232.026)	146.572	(63)	74.121	(46)
Laba Usaha	16.025	(28.192)	(50.578)	66.603	(132)	44.217	(157)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(5.826)	(4.852)	(23.207)	17.381	(75)	(974)	20
Laba Seb Pajak	10.199	(33.044)	(73.785)	83.984	(114)	43.243	(131)

Pada tahun 2016 kelapa sawit membukukan laba sebesar Rp10.199 juta, dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp33.044 juta dan dari tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp73.785 juta.

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Tabel 23. Laba/(Rugi) Industri Hilir Teh (IHT) Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	24.415	58.564	52.777	(28.362)	(54)	(34.149)	(58)
Harga Pokok Penjualan	(24.023)	(33.289)	(26.398)	2.375	(9)	9.266	(28)
Laba Kotor	392	25.275	26.379	(25.987)	(99)	(24.883)	(98)
Biaya Usaha	(23.645)	(23.252)	(23.752)	107	(0)	(393)	2
Laba Usaha	(23.253)	2.023	2.627	(25.880)	(985)	(25.276)	(1.249)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(1.031)	283	(1.019)	(12)	1	(1.314)	(464)
Laba Seb Pajak	(24.284)	2.306	1.608	(25.892)	(1.610)	(26.590)	(1.153)

Pada tahun 2016 IHT mengalami kerugian sebesar Rp24.284 juta, dengan RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan memperoleh laba sebesar Rp2.306 juta dan tahun 2015 laba sebesar Rp1.608 juta.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.8. Laba/(Rugi) Komoditas (lanjutan)

c. Kelapa Sawit

Tabel 22. Laba/(Rugi) Kelapa Sawit Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	400.358	526.134	479.721	(79.363)	(17)	(125.776)	(24)
Harga Pokok Penjualan	(298.879)	(394.751)	(298.273)	(606)	0	95.872	(24)
Laba Kotor	101.479	131.383	181.448	(79.969)	(44)	(29.904)	(23)
Biaya Usaha	(85.454)	(159.575)	(232.026)	146.572	(63)	74.121	(46)
Laba Usaha	16.025	(28.192)	(50.578)	66.603	(132)	44.217	(157)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(5.826)	(4.852)	(23.207)	17.381	(75)	(974)	20
Laba Seb Pajak	10.199	(33.044)	(73.785)	83.984	(114)	43.243	(131)

Pada tahun 2016 kelapa sawit membukukan laba sebesar Rp10.199 juta, dari RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp33.044 juta dan dari tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp73.785 juta.

d. Industri Hilir Teh (IHT)

Tabel 23. Laba/(Rugi) Industri Hilir Teh (IHT) Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	24.415	58.564	52.777	(28.362)	(54)	(34.149)	(58)
Harga Pokok Penjualan	(24.023)	(33.289)	(26.398)	2.375	(9)	9.266	(28)
Laba Kotor	392	25.275	26.379	(25.987)	(99)	(24.883)	(98)
Biaya Usaha	(23.645)	(23.252)	(23.752)	107	(0)	(393)	2
Laba Usaha	(23.253)	2.023	2.627	(25.880)	(985)	(25.276)	(1.249)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(1.031)	283	(1.019)	(12)	1	(1.314)	(464)
Laba Seb Pajak	(24.284)	2.306	1.608	(25.892)	(1.610)	(26.590)	(1.153)

Pada tahun 2016 IHT mengalami kerugian sebesar Rp24.284 juta, dengan RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan memperoleh laba sebesar Rp2.306 juta dan tahun 2015 laba sebesar Rp1.608 juta.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dengan RKAP-P Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015 (lanjutan)

3.8. Laba/(Rugi) Komoditas (lanjutan)

e. Aneka Tanaman

Tabel 24. Laba/(Rugi) Aneka Tanaman Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Penjualan	23.715	31.568	47.268	(23.553)	(50)	(7.853)	(25)
Harga Pokok Penjualan	(39.200)	(48.062)	(56.430)	17.230	(31)	8.862	(18)
Laba Kotor	(15.485)	(16.494)	(9.162)	(6.323)	69	1.009	(6)
Biaya Usaha	(16.738)	(92.294)	(16.224)	(514)	3	75.556	(82)
Laba Usaha	(32.223)	(108.788)	(25.386)	(6.837)	27	76.565	(70)
Pend/(Biaya) Non Usaha	(113.359)	-	774	(114.133)	(14.746)	(113.359)	100
Laba Seb Pajak	(145.582)	(108.788)	(24.612)	(120.970)	492	(36.794)	34

Pada tahun 2016 aneka tanaman membukukan kerugian sebesar Rp145.582juta, dengan RKAP-P tahun 2016 yang dianggarkan rugi sebesar Rp108.788 juta dan tahun 2015 yang mengalami rugi sebesar Rp24.612 juta.

f. Agrowisata

Tabel 25. Laba/(Rugi) Agrowisata Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap Realisasi 2015		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Pendapatan	24.439	25.314	24.932	(493)	(2)	(875)	(3)
Biaya	(21.068)	(20.197)	(19.429)	(1.639)	8	(871)	4
Laba Sebelum Pajak	3.371	5.117	5.503	(2.132)	(39)	(1.746)	(34)

Pada tahun 2016 agrowisata membukukan laba sebesar Rp3.371 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp5.117 juta dan dari tahun 2015 laba sebesar Rp5.503 juta.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

4. Perkembangan Usaha Perusahaan (lanjutan)

Tabel 27. Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Aset							
Aset Lancar	794.646	783.006	604.269	190.377	32	11.640	1
Aset Tidak Lancar	8.558.400	9.104.748	8.676.168	(117.768)	(1)	(546.348)	(6)
Jumlah Aset	**9.353.046**	**9.887.754**	**9.280.437**	**72.609**	1	**(534.708)**	(5)
Liabilitas							
Liabilitas Jangka Pendek	1.283.998	1.501.472	788.114	495.884	63	(217.474)	(14)
Liabilitas Jangka Panjang	2.938.230	3.081.695	2.921.251	16.979	1	(143.465)	(5)
Jumlah Liabilitas	4.222.228	4.583.167	3.709.365	512.863	14	(360.939)	(8)
Ekuitas							
Jumlah Ekuitas	5.130.818	5.304.587	5.571.071	(440.253)	(8)	(173.769)	(3)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**9.353.046**	**9.887.754**	**9.280.436**	**72.610**	1	**(534.708)**	(5)

Jumlah aset pada tahun 2016 sebesar Rp9.353.046 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp9.887.754 juta dan meningkat dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2015 sebesar Rp9.280.436 juta. Kenaikan aset dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2015 ini disebabkan adanya kenaikan nilai persediaan barang produksi sebesar Rp70.617 juta atau sebesar 24%.

Jumlah liabilitas pada tahun 2016 sebesar Rp4.222.228 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp4.583.167 juta dan meningkat dibandingkan dengan jumlah liabilitas tahun 2015 sebesar Rp3.709.365 juta. Kenaikan liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi terkait dengan Perusahaan menerima pinjaman modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (induk Perusahaan).

Jumlah ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp5.130.818 juta, berada di bawah RKAP-P tahun 2016 sebesar Rp5.304.587 juta dan dari jumlah ekuitas tahun 2015 sebesar Rp5.571.071 juta. Penurunan ekuitas ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang masih mengalami kerugian dan ditambah dengan adanya impairment untuk aset tanaman dan non tanaman.

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

4. Perkembangan Usaha Perusahaan (lanjutan)

Tabel 28. Laporan Arus Kas Perusahaan Tahun 2016

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016		2015	Kenaikan/ (Penurunan) terhadap		Diatas/(dibawah) RKAP-P	
	Realisasi	RKAP-P	Realisasi	Rp	%	Rp	%
	(2)	(3)	(4)	(5=2-4)	(6=5:4)	(7=2-3)	(8=7:3)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(138.162)	(138.265)	154.301	(292.463)	(190)	103	(0)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(89.005)	(754.564)	(91.740)	2.735	(3)	665.559	(88)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	162.528	895.470	(45.551)	208.079	(457)	(732.942)	(82)
Dampak Perubahan Kurs - Bersih	1.157	-	5.857	(4.700)	(80)	1.157	100
Penurunan Kas dan Setara Kas	(63.482)	2.641	22.867	(86.349)	(378)	(66.123)	(2.504)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	160.210	160.210	137.343	22.867	17	(0)	(0)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	96.728	162.851	160.210	(63.482)	(40)	(66.123)	(41)

Arus Kas tahun 2016 dari aktifitas operasi mengalami defisit Rp138.162 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan tingginya pembayaran bunga dan pendapatan penjualan mengalami penurunan yang signifikan. Adapun kas yang digunakan untuk investasi tahun 2016 juga mengalami defisit sebesar Rp89.005 juta lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 hal ini dikarenakan adanya penambahan investasi di tahun 2016. Kas bersih yang diperoleh dari aktifitas pendanaan sebesar Rp162.528 juta lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 kenaikan pendanaan dikarenakan adanya penerimaan pinjaman modal kerja dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

II. URAIAN KINERJA (lanjutan)

5. *Key Performance Indicators* (KPI)

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2015 dan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris dengan Kuasa Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VIII yang ditandatangani tertanggal 28 Desember 2015 telah disepakai target KPI tahun 2016 dengan target skor sebesar 100, seperti tabel berikut ini:

Tabel 29. Pencapaian KPI Perusahaan Tahun 2016

No	Perspektif	KPI	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian	Bobot	Skor
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(6/5)*100: Max 7=5-(6-5)/5*100: Min*	*8*	*9*
1	**Keuangan dan Pasar**	*Return on Asset*	%	(5,16)	(3,47)	-	5,00	-
		Debt Equity Ratio (Solvabilitas)	%	86,40	82,29	104,76	5,00	5,24
		Current Ratio (Likuiditas)	%	52,15	61,89	118,68	5,00	5,93
		Net Profit Margin (Rentabilitas)	%	(31,85)	(29,72)	-	5,00	-
		Market Share (Nasional)	%					
		Teh =		36,00	29,90	83,07	1,40	1,16
		CPO =		0,33	0,25	75,11	1,30	0,98
		Karet =		0,48	0,47	97,58	1,30	1,27
						Jumlah	24,00	14,58
2	**Fokus Pelanggan**	Tingkat Kepuasan Pelanggan	Skor	79,80	71,84	90,02	10,00	9,00
		Customer Loyalty Index	Skor	80,00	85,26	106,58	12,00	12,79
						Jumlah	22,00	21,79
3	**Efektivitas Produk dan Proses**	**Produksi**						
		1 Teh	Ton	33.554	30 173	89,92	1,80	1,62
		2 Karet	Ton	17.215	17 345	100,76	1,60	1,61
		3. Sawit (CPO)	Ton	63.785	53.406	83,73	1,60	1,34
		Produktivitas						
		1. Teh	Kg/Ha	1.662	1.487	89,49	1,80	1,61
		2 Karet	Kg/Ha	854	863	101,08	1,60	1,62
		3 Sawit (CPO)	Kg/Ha	2 888	2 412	83,53	1,60	1,34
		Mutu						
		1 Teh *(Main Grade)*	%	91,07	86,32	94,78	1,80	1,71
		2. Karet *(Main Grade)*	%	98,11	74,98	76,42	1,60	1,22
		3 CPO (ALB≤5%)	%	100,00	70,81	70,81	1,60	1,13
		Harga Pokok						
		1 Teh (Bulk)	Rp/Kg	16.685	16 023	103,97	1,80	1,87
		2 Karet	Rp/Kg	17.491	16 160	107,61	1,60	1,72
		3. Sawit (CPO & Kernel)	Rp/Kg	5.358	5.351	100,13	1,60	1,60
						Jumlah	20,00	18,39
4	**Fokus Tenaga Kerja**	*Competency Level Index*	Poin	6,50	6,90	106,15	6,00	6,37
		Employee Engagement Index	%	80,00	77,71	97,14	6,00	5,83
		Rasio Kecukupan Tenaga Kerja	%	100,00	100,00	100,00	5,00	5,00
						Jumlah	17,00	17,20
5	**Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan**	Skor KPKU	Poin	365	346*	94,79	3,50	3,32
		Reviu GCG	Poin	84,65	85,35*	100,82	3,50	3,53
		Skor PKBL	Poin	5	1	20,00	3,00	0,60
		Shareholder Aspiration						
		- Optimalisasi Aset	%	100,00	-	-	2,00	-
		- Penyelesaian Piutang Negara	Rp (Juta)	2 588	2 588	100,00	1,50	1,50
		Tingkat Penyerapan Capex	Rp (Juta)	613.429	176.811	28,82	3,50	1,01
						Jumlah	17,00	9,96
						Total	100,00	81,92

* Realisasi KPKU dan GCG tahun 2016 diambil dari realisasi KPKU dan GCG tahun 2015 karena sampai dengan tanggal laporan ini data untuk tahun 2016 belum tersedia

PT Perkebunan Nusantara VIII

Management letter
31 Desember 2016

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

28 Februari 2017

Ref.: 01313/PSS-AS/2017

Kepada Yang Terhormat

Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII
Jl. Sindangsirna No. 4
Bandung

Dengan hormat,

Kami telah menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Sebagai bagian audit tersebut, kami telah mempelajari serta melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern Perusahaan sejauh yang kami pandang perlu menurut standar auditing. Perlu kami jelaskan bahwa studi dan penilaian ini bukan ditujukan untuk membentuk saran-saran menyeluruh dan bukan untuk mengungkapkan seluruh kelemahan sistem pengendalian intern Perusahaan.

Uraian, komentar dan saran-saran terlampir yang kami catat selama audit, dimaksudkan untuk membantu memperbaiki sistem pengendalian intern dan meningkatkan kinerja Perusahaan. Kami juga memuat tanggapan dari Manajemen Perusahaan.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dari seluruh staf dan karyawan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Tia Adityasih
Partner
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0029

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants RMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

1. Proses Pengeluaran Barang

- **Kondisi**

  Kebun Miramare
  Terdapat AU58 dengan No. 16/IX/2016 tidak ditandatangani oleh Petugas Tabin.

  Kebun Pasirmalang
  Terdapat AU58 nomor 52 tanggal 6 September 2016 yang tidak ditandatangani oleh Penerima Barang dan Petugas Gudang.

  Kebun Sedep
  Terdapat barang persediaan yang keluar dari gudang tanpa melalui/menggunakan AU58 terlebih dahulu. AU58 sudah dibuat namun belum ditandatangani oleh semua pihak yang berotorisasi

- **Kriteria**

  AU58 wajib ditandatangani oleh Petugas Gudang, Penerima Barang, Kepala Bagian yang Meminta, Petugas Tabin dan Administratur.

- **Sebab**

  Terdapat kelalaian pihak yang melakukan otorisasi, verifikasi dan pengawasan pada dokumen AU58.

- **Akibat**

  Kemungkinan adanya barang yang keluar dari gudang tidak diketahui Perusahaan, dan pencatatan persediaan menjadi tidak akurat.

- **Saran**

  Agar lebih diperhatikan kembali prosedur yang harus dilakukan dalam permintaan/pengeluaran barang.

- **Tanggapan Manajemen**

  Atas kelalaian pihak yang tidak melaksanakan pedoman pengeluaran barang akan diberikan sanksi administratif. Untuk mencegah terulangnya kelalaian tersebut, akan dilakukan sosialisasi kembali atas prosedur pengeluaran barang yang ditegaskan dalam surat edaran.

2. Proses Pencatatan pada Kartu Gudang

- **Kondisi**

  Kebun Pasirmalang
  Terdapat satu kartu gudang yang digunakan untuk Van Belt dengan jenis ukuran yang berbeda-beda.

  Kebun Malabar
  Terdapat satu jenis barang dengan dua kartu gudang, jenis barang tersebut adalah Coil dan Tali Stater, dan juga terdapat ketidakurutan dalam pencatatan pengadaan (atas dasar AU53) pada kartu gudang untuk kedua jenis barang ini.

  Kebun Rancabali
  Jumlah barang keluar yang tercatat pada sistem dan AU58 nomor 246/2 0259 tanggal 22 Februari 2016 berbeda dengan jumlah yang tercatat pada kartu gudang. Menurut sistem dan AU58, terdapat barang New Top yang keluar sejumlah 34 liter, sedangkan pada kartu gudang, jumlah New Top yang keluar adalah sejumlah 36 liter.

2. Proses Pencatatan pada Kartu Gudang (lanjutan)

- **Kriteria**

  Kartu gudang merupakan alat kontrol perusahaan untuk mengetahui mutasi serta jumlah persediaan barang di gudang setiap harinya. Jumlah mutasi barang (keluar dan masuk) dan pencatatan dalam kartu gudang harus sesuai dan sama antara pencatatan pada AU58, kartu gudang dan sistem.

- **Sebab**

  Petugas gudang lalai/kurang teliti dalam melakukan administrasi kartu gudang sesuai dengan SOP.

- **Akibat**

  Pencatatan jumlah persediaan di gudang menjadi tidak akurat.

- **Saran**

  Agar bagian gudang lebih teliti dalam melakukan pencatatan pada kartu gudang.

- **Tanggapan manajemen**

  Atas kelalaian/ketidaktelitian petugas gudang dalam tertib administrasi kartu gudang akan diberikan sanksi administratif. Untuk mencegah terulangnya kelalaian tersebut, akan dilakukan sosialisasi kembali perihal tertib administrasi kartu gudang.

3. Proses dan Perhitungan Penggajian

Kebun Miramare

- **Kondisi**

  Terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan gaji pada Daftar Upah Karyawan Lepas untuk Afdeling Pengolahan pada bulan Februari 2016.

- **Kriteria**

  Perhitungan gaji dalam Daftar Upah harus sesuai dengan metode yang digunakan oleh seluruh unit dalam Perusahaan, termasuk formula yang digunakan.

- **Sebab**

  Dalam daftar upah terdapat satu kolom premi/lembur yang tidak tercetak.

- **Akibat**

  Kesalahan perhitungan, berpotensi merugikan Perusahaan dan ketidaktertiban administrasi.

- **Saran**

  Diharapkan ada keselarasan dalam metode perhitungan yang digunakan untuk setiap kebun/unit.

- **Tanggapan manajemen**

  Kolom yang di-*hide* pada daftar upah telah di-*unhide* dan dicetak ulang, sehingga perhitungan gaji hasil cetakan sesuai dengan program SPDK-net.

3. Proses dan Perhitungan Penggajian (lanjutan)

Kebun Pasirmalang

- **Kondisi**

  Terdapat Laporan Hasil Kinerja Harian (LHKH) bulan Agustus 2016 untuk Afdeling 02 - Kantor Induk dengan Mandor Heri Suherman yang tidak ditandatangani oleh Mandor dan Petugas Tabin.

- **Kriteria**

  Setiap LHKH harus ditandatangani oleh Petugas Tabin dan Mandor sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan tersebut untuk setiap afdeling di kebun tersebut.

- **Sebab**

  Kontrol dan SOP Perusahaan tidak berjalan dengan baik, keakuratan atas hasil perhitungan dan pencatatan diragukan.

- **Akibat**

  Perusahaan tidak mengetahui hasil kinerja harian secara akurat yang dapat berakibat ketidaktepatan dalam perhitungan dan pembayaran gaji.

- **Saran**

  Agar lebih diperhatikan kembali prosedur yang harus dilakukan dalam proses ini.

- **Tanggapan manajemen**

  Akan diberikan sanksi administratif kepada pihak yang lalai. Untuk mencegah terulangnya kelalaian tersebut, akan dilakukan sosialisasi kembali.

4. Kondisi Gudang

- **Kondisi**

  Kebun Cikasungka
  Atap gudang penyimpanan pupuk bocor dan terdapat penyimpanan pupuk yang tidak dialasi dengan palet.

  Kebun Panglejar
  Terdapat atap gudang yang bocor yang lokasinya berada di atas tumpukan pupuk di gudang Rajamanggala. Selain itu terdapat penyusunan pupuk yang tidak rata serta terdapat karung penyimpanan pupuk yang sudah lapuk.

  Kebun Sedep
  Terdapat gudang pupuk dengan atap yang bocor dan lantai yang tergenang air.

- **Kriteria**

  Gudang sebagai tempat menyimpan persediaan harus memenuhi syarat untuk melindungi barang yang disimpan dari kemungkinan kerusakan, kebocoran dan hal lain yang dapat merusak barang/kondisi barang di dalam gudang tersebut.

- **Sebab**

  Kelalaian manajemen kebun untuk menjaga aset Perusahaan dengan cara menyediakan alas/palet untuk penyimpanan pupuk.

4. Kondisi Gudang (lanjutan)

- **Akibat**

  Perlindungan dan pengamanan terhadap fisik persediaan Perusahaan yang lemah dan kurang baik untuk menyimpan persediaan dapat mengakibatkan kerugian perusahaan akibat kerusakan fisik.

- **Saran**

  Agar manajemen dapat lebih memperhatikan kondisi gudang/tempat penyimpanan persediaan dalam gudang, serta mendisiplinkan petugas gudang dalam menyimpan persediaan.

- **Tanggapan manajemen**

  Gudang yang bocor telah diperbaiki dan penyimpanan pupuk telah menggunakan alas palet.

5. Alat Ukur yang Tidak Memadai

- **Kondisi**

  Kebun Panglejar
  Persediaan solar yang tersimpan dalam tangki induk gudang Pangheotan tidak dilengkapi dengan alat ukur yang memadai.

- **Kriteria**

  Alat ukur yang memadai sangat dibutuhkan dalam pengukuran persediaan, terutama untuk persediaan dalam bentuk cair.

- **Sebab**

  Tangki di gudang Pangheotan tidak dilengkapi dengan alat ukur karena manajemen gudang mengganggap label barang di tangki cukup sebagai alat pemantau.

- **Akibat**

  Ketidakakuratan perhitungan fisik jumlah persediaan, yang berdampak pada ketidakakuratan pencatatan persediaan dalam laporan keuangan.

- **Saran**

  Disarankan agar gudang memiliki alat ukur, karena alat ukur merupakan salah satu bagian terpenting untuk jenis persediaan (terutama persediaan cair), untuk memastikan jumlah fisik ketika melakukan perhitungan fisik.

- **Tanggapan manajemen**

  Tangki tersebut merupakan tangki pembantu yang sifatnya sementara untuk keperluan kendaraan dan mesin diesel di Afdeling Pangheotan. Pengukuran persediaan solar di tangki tidak menggunakan alat ukur khusus, tetapi dimonitor melalui label barang di tangki. Selanjutnya akan dibuat alat ukur untuk tangki solar di Pangheotan.

6. Persediaan Barang

Kebun Sedep

- **Kondisi**

  Bokashi merupakan pupuk yang diolah sendiri oleh karyawan kebun. Karyawan tidak melakukan penimbangan ulang untuk masing-masing karung penyimpanan bokashi sehingga berat masing-masing karung berbeda. Karyawan mengukur berat karung hanya menggunakan ember sebagai estimasi/perkiraan berat pupuk. Selain itu, persediaan bokashi disimpan di ruang terbuka tanpa pintu dan pengamanan yang memadai.

- **Kriteria**

  Persediaan harus dapat diukur dengan akurat menggunakan alat ukur yang memadai dan tempat menyimpan persediaan harus memenuhi syarat untuk melindungi barang yang disimpan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian.

- **Sebab**

  Kebun belum mempunyai gudang khusus untuk penyimpanan bokashi, dan juga belum mempunyai alat ukur yang memadai.

- **Akibat**

  Adanya kemungkinan ketidakakuratan pencatatan persediaan pada Laporan Keuangan.

- **Saran**

  Agar Perusahaan dapat mempertimbangkan gudang penyimpanan khusus untuk bokashi dan memberikan alat ukur yang memadai.

- **Tanggapan manajemen**

  Penimbangan bokashi akan dilakukan pada masing-masing karung (dengan penyeragaman jenis dan ukuran karung) dan dicatat pada buku timbangan petugas gudang sebagai dasar pembuatan berita acara penerimaan bokashi. Tempat penyimpanan bokashi akan disesuaikan dengan kebijakan Direksi.

Kebun Panglejar

- **Kondisi**

  Terdapat persediaan produk non-grade/RBO di gudang BBP yang tidak dialasi dengan palet, namun dialasi dengan karung yang berisi limbah teh yang sudah membusuk.

- **Kriteria**

  Persediaan produksi seharusnya dialasi dengan palet.

- **Sebab**

  Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan persediaan yang memadai.

- **Akibat**

  Penyimpanan barang hasil produksi yang tidak memadai dapat menyebabkan barang hasil produksi tersebut rusak dan akan berdampak pada kualitas barang hasil produksi.

6. Persediaan Barang (lanjutan)

Kebun Panglejar (lanjutan)

- **Saran**

  Agar Perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyimpanan persediaan.

- **Tanggapan manajemen**

  Untuk mengatasi kekurangan palet, kebun berupaya untuk menyimpan RBO dengan dialasi karung berisi limbah teh untuk menjaga kualitas RBO. Selanjutnya akan disediakan alas kayu/palet sesuai dengan persediaan yang ada di gudang.

Kebun Sedep

- **Kondisi**

  Terdapat satu ruangan penyimpanan hasil produksi teh CTC yang aksesnya tertutup atau terhalang tumpukan-tumpukan teh. Selain itu, terdapat hasil produksi teh yang disimpan di teras pabrik dan hanya dialasi palet dan ditutupi terpal.

- **Kriteria**

  Persediaan hasil produksi harus disimpan di tempat yang aksesnya mudah untuk dilalui. Gudang sebagai tempat menyimpan persediaan harus memenuhi syarat untuk melindungi barang yang disimpan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian.

- **Sebab**

  Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan persediaan yang memadai.

- **Akibat**

  Barang hasil produksi tidak dapat dihitung dengan benar, menyebabkan ketidakakuratan jumlah barang hasil produksi tersebut yang dicatatkan pada laporan keuangan. Selain itu, hal tersebut akan menimbulkan potensi hilang dan/atau rusaknya barang hasil produksi apabila disimpan tidak pada tempat yang seharusnya dan semestinya.

- **Saran**

  Agar dapat ditingkatkan pengawasan terhadap penyimpanan persediaan.

- **Tanggapan manajemen**

  Manajemen kebun berupaya mengoptimalkan tempat penyimpanan persediaan produksi dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan persediaan produksi. Selanjutnya atas persediaan terikat kontrak yang ada di kebun telah diangkut secara bertahap ke gudang transit (PT BGR).

Kebun Talunsantosa (penyusunan penyimpanan hasil produksi)

- **Kondisi**

  Hasil Produksi teh tidak tersusun rapih, terdapat palet-palet dengan nomor chop yang sama disimpan berjauhan atau tidak berdampingan. Sebagian besar persediaan di pabrik Talun dan Santosa tidak dilindungi/ditutupi oleh plastik sungkup.

- **Kriteria**

  Hasil produksi teh disusun berdasarkan palet - palet dengan nomor chop yang berdampingan sehingga memudahkan dalam pengaturan, pengecekan dan pengambilan chop ketika akan dikirim. Selain itu, hasil produksi seharusnya ditutupi plastik sungkup supaya kondisi teh tetap terjaga kualitasnya.

6. Persediaan Barang (lanjutan)

Kebun Talunsantosa (penyusunan penyimpanan hasil produksi) (lanjutan)

- **Sebab**

  Kurangnya pengawasan terhadap penyimpanan persediaan yang memadai.

- **Akibat**

  Penyusunan hasil produksi teh yang tidak beraturan, menyebabkan tingginya tingkat kesalahan dalam pengambilan teh ketika akan dikirimkan. Selain itu, hal tersebut akan menimbulkan potensi kerusakan yang tinggi apabila penempatan hasil produksi teh tidak semestinya.

- **Saran**

  Agar dapat ditingkatkan pengawasan terhadap penyimpanan persediaan.

- **Tanggapan manajemen**

  Manajemen kebun berupaya mengoptimalkan tempat penyimpanan persediaan produksi dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan persediaan produksi. Selanjutnya atas persediaan terikat kontrak yang ada di kebun telah diangkut secara bertahap ke gudang transit (PT BGR).

Kebun Talunsantosa (ketidakakuratan perhitungan persediaan dalam peti miring)

- **Kondisi**

  Hasil produksi dalam peti miring untuk jenis teh BP memiliki berat berbeda-beda tiap karungnya dan tidak sesuai antara jumlah fisik karung dengan catatan dalam label. Selain itu terdapat persediaan dalam karung yang diletakkan tidak teratur sehingga menyulitkan dalam perhitungan teh per jenis.

- **Kriteria**

  Persediaan barang produksi harus ditimbang masing-masing karungnya dengan alat ukur yang memadai, dan diberikan identifikasi jumlah berat untuk masing-masing karung sesuai dengan perhitungan timbangan yang sudah dilakukan.

- **Sebab**

  Kondisi gudang sudah melebihi kapasitas dan ketidaktelitian petugas persediaan produksi dalam mencatat persediaan dalam label.

- **Akibat**

  Ketidakakuratan dalam pencatatan nilai persediaan pada Laporan Keuangan.

- **Saran**

  Agar Perusahaan dapat memperhatikan dan melakukan prosedur yang telah ditetapkan terkait dengan persediaan.

- **Tanggapan manajemen**

  Produksi dalam peti miring yang ditimbang menggunakan karung dengan berat yang berbeda-beda untuk kebutuhan *stock opname*. Setelah ditimbang akan dimasukan kembali ke dalam peti miring. Perbedaan antara label dengan jumlah fisik karung telah dikoreksi dalam arus persediaan produksi. Selanjutnya ketelitian dalam pencatatan persediaan produksi akan lebih ditingkatkan.

7. Pencatatan piutang dalam mata uang selain Rupiah

- **Kondisi**

  Terkait dengan transaksi dengan menggunakan mata uang selain Rupiah (mata uang asing), Perusahaan tidak mencatat saldo piutang dalam mata uang asing dengan cara yang tepat. Setiap akhir tahun, perusahaan membagi total piutang per pelanggan (dalam Rupiah) dengan kurs tengah akhir tahun tersebut untuk memperoleh nilai saldo akhir piutang dalam mata uang asing, sehingga apabila ada koreksi, koreksi tersebut langsung dilakukan pada nilai setara Rupiah, dan tidak pada mata uang asing tersebut.

- **Kriteria**

  Perusahaan seharusnya menjaga mutasi atas transaksi yang menggunakan mata uang asing.

- **Sebab**

  Penyusunan laporan belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga masih menggunakan arus dalam mata uang rupiah.

- **Akibat**

  Ketidakakuratan dalam pencatatan selisih kurs dalam Laporan Keuangan.

- **Saran**

  Perusahaan harus memantau pergerakan/mutasi piutang dalam mata uang asli (*original currency*).

- **Tanggapan manajemen**

  Manajemen telah mengkoreksi kertas kerja piutang dan membuat usulan koreksinya, selanjutnya kertas kerja piutang dalam mata uang asing didasarkan pada mata uang asalnya.

8. Kontrol atas pencatatan Aset Tetap Non-Tanaman

- **Kondisi**

  Terdapat aset tetap non-tanaman yang sudah ada dan tercatat laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2015, dan atas aset-aset tetap non-tanaman yang sama tersebut mengalami perubahan tanggal perolehan pada laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016.

- **Kriteria**

  Tanggal perolehan tidak boleh berubah sejak dicatatkan pertama kali sebagai perolehan aset tersebut, sampai aset tersebut dijual dan/atau dihapuskan.

- **Sebab**

  Adanya migrasi basis program *cliper* ke SQL dimana terdapat perbedaan format tanggal dari dd/mm/yy ke mm/dd/yy.

- **Akibat**

  Pencatatan pembebanan biaya depresiasi yang tidak akurat dan dipercaya, serta tidak adanya kontrol atas pencatatan aset tetap non-tanaman.

8. Kontrol atas pencatatan Aset Tetap Non-Tanaman (lanjutan)

- **Saran**

  Perusahaan harus memastikan dan melakukan pengecekan secara menyeluruh ketika terjadi perubahan sistem pencatatan.

- **Tanggapan manajemen**

  Atas kesalahan tersebut akan dilakukan koreksi.

9. Pencatatan Ganda

- **Kondisi**

  Perusahaan memiliki pinjaman kepada pemegang saham, pinjaman ini dikenakan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Kami menemukan bahwa Bagian Akuntansi melakukan pencatatan akrual atas 2 bulan (November dan Desember) di tahun 2016. Akan tetapi, kami mendapatkan bahwa atas biaya bunga untuk 2 bulan di tahun 2016 tersebut sudah terbayarkan lunas.

- **Kriteria**

  Bagian yang bertanggungjawab atas pencatatan dan pemuthakhiran data terkait pinjaman ini harus dipegang oleh satu bagian.

- **Sebab**

  Tidak ada koordinasi antar bagian.

- **Akibat**

  Pencatatan dan pembayaran ganda dapat terjadi.

- **Saran**

  Untuk menghindari pencatatan ganda, Perusahaan harus meningkatkan koordinasi antar bagian dan melakukan pembagian yang jelas dalam pemutakhiran suatu transaksi.

- **Tanggapan manajemen**

  Atas kesalahan tersebut telah diajukan usulan koreksi pembukuan atas beban bunga dimaksud.

10. Ketidakcocokan antara *General Ledger*, *Trial Balance* dan Laporan Manajemen/Laporan Keuangan

- **Kondisi**

  Adanya ketidakcocokan antara *General Ledger* (GL) yang diberikan kepada kami dengan Laporan Keuangan *unaudited* 31 Desember 2016.

- **Kriteria**

  GL, *Trial Balance* dan Laporan Manajemen/Laporan Keuangan sesuai satu sama lain.

- **Sebab**

  Belum stabilnya sistem dalam penarikan data transaksi.

10. Ketidakcocokan antara *General Ledger*, *Trial Balance* dan Laporan Manajemen/Laporan Keuangan (lanjutan)

- **Akibat**

  Ketidakakuratan dan tidak dapat diyakini akan kebenaran Laporan Keuangan.

- **Saran**

  Ketika ada perubahan sistem pencatatan, Perusahaan harus melakukan pengecekan secara detail dan menyeluruh pada tahap awal implementasi sistem baru tersebut, untuk meyakinkan tidak ada perubahan yang telah tercatat dalam sistem lama.

- **Tanggapan manajemen**

  Manajemen telah melakukan penyempurnaan sistem informasi.

11. Proses Pengadaan dan Kelengkapan Dokumen

Kami menemukan adanya ketidaksesuaian proses pengadaan dan ketidaklengkapan dokumen pengadaan di kebun-kebun berikut:

- **Kondisi**

  Kebun Miramare
  Adanya pembelian Amoniak cair pada tanggal 2 Februari 2016, namun dokumen pemesanan barang dengan nomor Order Pembelian Lokal 09/MIRA/II/2016 dibuat menyusul pada tanggal 4 Februari 2016.

  Kebun Malabar
  Adanya dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) bulan Februari 2016 yang tidak ditandatangani manajer kebun, Surat Pesanan Barang Jasa nomor 46/SPBJ/MAL/II/2016 dan Berita Acara Negosiasi nomor BA/109/MAL/V/2016 tidak diberi materai, dan dokumen Daftar Hasil Check Price Barang dan Jasa nomor 112/PPH/MAL/V/2016 tidak ditandatangani oleh Asisten Administrasi.

  Kebun Pasirmalang
  Adanya dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) bulan Februari 2016 yang tidak ditandatangani manajer kebun, Berita Acara Negosiasi Harga nomor BA/PAM/37/I/2016 tidak diberi materai dan tidak ditandatangani oleh rekanan, adanya dokumen Daftar *Chekprice* Barang dan Jasa nomor 10/PPh/XI/2016 yang digunakan untuk membandingkan harga yang ditawarkan rekanan namun hanya didukung oleh 1 dokumen Permintaan Penawaraan Harga.

  Kebun Rancabali
  Adanya penerimaan barang dari rekanan tanggal 27 Agustus 2016, namun Surat Pesanan Barang atau jasa baru dibuat pada tanggal 28 September 2016.

- **Kriteria**

  Setiap pengadaan barang dan jasa, harus didukung oleh dokumen-dokumen valid dan yang sudah disetujui pihak yang berwenang dan seharusnya sesuai dengan Standar Operasi Perusahaan (SOP).

- **Sebab**

  Kelalaian manajemen kebun dalam melakukan verifikasi dokumen pengadaan sehingga terjadi kekeliruan pencatatan tanggal dalam surat pengantar oleh vendor.

11. Proses Pengadaan dan Kelengkapan Dokumen (lanjutan)

- **Akibat**

  Pemesanan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan SOP, dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan, dan Perusahaan tidak mematuhi SOP yang sudah dibuat.

- **Saran**

  Agar Perusahaan dapat memperhatikan kelengkapan dokumen dan prosedur yang tercantum di dalam SOP yang sudah ditentukan.

- **Tanggapan manajemen**

  Barang secara fisik diterima kebun dari vendor pada tanggal 6 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan AU53 setelah proses pengadaan tanggal 4 Februari 2016, namun terdapat kekeliruan tanggal dalam surat pengantar barang yang dibuat vendor, seharusnya tanggal 6 Februari 2016, namun tercatat tanggal 2 Februari 2016. Kebun akan meminta vendor untuk mengoreksi surat pengantar tersebut.

  Atas kelalaian tersebut akan diberikan sanksi administratif, dan dilakukan sosialisasi kembali atas prosedur pengadaan.

12. Piutang usaha dari Unit Industri Hilir Aneka Tanaman (IH Antan) yang tidak dipantau keberadaan dan detailnya

- **Kondisi**

  Kami menemukan piutang usaha yang berasal dari pencatatan IH Antan, yang tidak memiliki detail kurang lebih sejumlah Rp 1 miliar.

- **Kriteria**

  Atas saldo piutang yang tercatat seharusnya dilakukan rekonsiliasi dan pengecekan kepemilikan, pembayaran dan penagihan piutang.

- **Sebab**

  Fungsi monitoring atas saldo piutang tidak efektif.

- **Akibat**

  Potensi kerugian Perusahaan atas piutang yang tidak teridentifikasi sebesar Rp 1 miliar.

- **Saran**

  Dalam hal pencatatan pada laporan keuangan, untuk dapat ditingkatkan pemantauan dan pembuatan rincian piutang.

- **Tanggapan manajemen**

  Piutang tersebut akan ditelusuri lebih lanjut antara pencatatan di Bagian Akuntansi dan IH Antan.

13. Utang atas Fee Pelayanan Kesehatan tidak dicatat setiap bulannya

- **Kondisi**

  Perusahaan tidak mencatat utang fee kesehatan kepada AMN sebesar Rp192.632.000 per bulan (sudah termasuk PPN).

- **Kriteria**

  Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara VIII dengan PT AMN Nomor SP/III.3/1004/XII/2015, PTPN VIII harus membayar imbalan jasa kepada PT AMN sebesar Rp192.632.000 (termasuk PPN) setiap bulannya selama 12 bulan (1 Januari 2015-31 Desember 2016).

- **Sebab**

  Lemahnya monitoring atas utang fee kesehatan.

- **Akibat**

  Potensi Perusahaan kurang saji utang dan beban sebesar Rp2.311.584.000.

- **Saran**

  Untuk dapat ditingkatkan monitoring terhadap transaksi atas perjanjian yang sudah dibuat.

- **Tanggapan manajemen**

  Utang fee kesehatan akan kami koreksi sesuai perhitungan Kantor Akuntan Publik.

14. Pengurusan perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") yang terlambat

- **Kondisi**

  Terdapat beberapa HGU yang sudah habis masa berlakunya namun belum ada perpanjangannya, diantaranya :

  1. Cisaruni (30,7698 Hektar), habis pada tahun 1997.
  2. Papandayan (96,3654 Hektar), habis pada tahun 1997.
  3. Bunisarilendra (34,0491 Hektar), habis pada tahun 1997
  4. Gedeh (0,9985 Hektar), habis pada tahun 2002"

- **Kriteria**

  "Berdasarkan PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah disebutkan bahwa:

  - Pasal 7: HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh pejabat yang ditunjuk dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang HGU diberikan sertifikat;
  - Pasal 10: Permohonan perpanjangan HGU atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU."

- **Sebab**

  Permohonan HGU dilakukan secara bersamaan baik yang sudah maupun belum bersertifikat. Sedangkan menurut BPN, pengajuan areal yang belum bersertifikat harus diajukan tersendiri.

14. Pengurusan perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") yang terlambat (lanjutan)

- **Akibat**

  Perusahaan tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah dan dapat kehilangan hak atas tanah tersebut.

- **Saran**

  Agar Perusahaan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan instansi terkait untuk mengurus perpanjangan dan penerbitan sertifikat HGU.

- **Tanggapan manajemen**

  Pada prinsipnya semua lahan tersebut pada awalnya sudah diajukan permohonan HGU-nya. Akan tetapi pada saat proses di BPN, dilakukan penelitian data fisik dan yuridis serta didapatkan hasil areal yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, sehingga diprioritaskan terhadap areal yang sudah bersertifikat. Areal yang bersertifikat telah terbit HGU-nya, sedangkan areal yang belum bersertifkat telah diprogramkan pada RJP Pengurusan HGU Tahun 2017-2021.

15. Kurangnya monitoring atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

- **Kondisi**

  Kami menemukan adanya lahan HGU milik Perusahaan yang digunakan oleh PT Pertamina EP Asset 3 sejak tahun 1999 dan PT Arkora Hydro sejak tahun 2012 namun nota kesepahaman baru dibuat di tahun 2016.

- **Kriteria**

  Aset milik perusahaan harus dilindungi dan diusahakan dengan optimal. Kerjasama optimalisasi aset seharusnya dilandasi dengan dokumen legal.

- **Sebab**

  Tidak cermatnya monitoring bagian pencatatan terhadap aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain.

- **Akibat**

  Hilangnya potensi pendapatan bagi Perusahaan atas lahan yang dikerjasamakan.

- **Saran**

  Mengingat jumlah aset dalam jumlah besar dan letak yang strategis atas aset tersebut, Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kontrol atas aset-aset tersebut. Atas aset yang dikerjasamakan, untuk dapat diperhatikan aspek legal yang mengikat, yang menunjukkan kepemilikan Perusahaan atas aset tersebut.

- **Tanggapan manajemen**

  Pembuatan Nota kesepahaman kerjasama penggunaan lahan tahun 2016 untuk PT Pertamina EP Asset 3 dan PT Arkora sebagai upaya manajemen memperoleh kompensasi lahan yang sudah digunakan. Nilai kompensasi sudah diperhitungkan sejak lahan digunakan.

16. Rekonsiliasi dan ekualisasi perpajakan

- **Kondisi**

  Kami mendapati adanya selisih antara Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan pencatatan utang pajak di laporan keuangan, atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2, 21 dan 23.

- **Kriteria**

  Untuk meningkatkan pengawasan pencatatan dan pelaporan PPN dan PPh sebaiknya pada setiap akhir bulan dibuatkan rekonsiliasi antara pencatatan di laporan keuangan dengan SPT Masa PPN dan PPh, agar setiap perbedaan yang ada dapat ditelusuri dengan cepat.

- **Sebab**

  Lemahnya monitoring di bidang perpajakan.

- **Akibat**

  Tingginya tingkat kesalahan pencatatan perpajakan di laporan keuangan dapat berakibat kesalahan dalam pelaporan perpajakan, yang menimbulkan potensi kerugian dan denda/sanksi dari Kantor Pajak.

- **Saran**

  Agar Perusahaan dapat meningkatkan monitoring atas perpajakan dan membuat rekonsiliasi serta ekualisasi atas perpajakan ini.

- **Tanggapan manajemen**

  Perbedaan antara SPT masa dan pencatatan utang pajak dalam laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarbagian yang menangani. Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi secara periodik.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Perkebunan Nusantara VIII

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 - Indonesia, Kotak Pos 1176, Tlp. (62-22) 2038966
Fax. (62-22) 2031 455, E-mail:ptpn8@pn.8co.id; Website:http://www.pn8.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Bambang Murtioso
   Alamat kantor : Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153, Jawa Barat
   Alamat Domisili: : Komp.GBI Blok B-2 No.29 Bandung, Jawa Barat
   Nomor telepon : (022) 2038966
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Gunara
   Alamat kantor : Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung 40153, Jawa Barat
   Alamat Domisili : Komp Permata Arcamanik, Blok G No.9 : Bandung, Jawa Barat
   Nomor telepon : (022) 2038966
   Jabatan : Direktur Manajemen Aset

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII;

2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/Wk//2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL;

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 28 Februari 2017

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi

Bambang Murtioso
Direktur Utama

Gunara
Direktur Manajemen Aset

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 - 13

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3136/PSS/2017

Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT Perkebunan Nusantara VIII

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara VIII terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab pengelola PKBL atas laporan keuangan

Pengelola PKBL bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengelola PKBL untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola PKBL, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3136/PSS/2017 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Tia Adityasih
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0029

28 Februari 2017

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2,3	6.990.367.000	9.346.623.015
Piutang pinjaman mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp7.202.616.561 (2015: Rp7.871.265.534)	2,4	6.832.246.634	3.728.087.152
TOTAL ASET LANCAR		**13.822.613.634**	**13.074.710.167**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang bermasalah, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp9.985.944.578 (2015: Rp10.423.644.578)	2,5	-	-
TOTAL ASET		**13.822.613.634**	**13.074.710.167**
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Angsuran yang belum teridentifikasi	2	28.523.614	48.193.614
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	2,6	13.794.090.020	13.026.516.553
Aset neto terikat	2,6	-	-
TOTAL ASET NETO		**13.794.090.020**	**13.026.516.553**
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		**13.822.613.634**	**13.074.710.167**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	4d,4e,7	668.648.973	-
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah	5c,7	437.700.000	-
Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina	2,7	138.170.364	-
Pendapatan jasa giro	2,7	134.666.022	171.408.925
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	2,7	99.364.988	102.927.238
Pelimpahan dana dari unit PKBL lain	2,7	62.843.120	2.382.356.085
TOTAL PENDAPATAN		**1.541.393.467**	**2.656.692.248**
BEBAN			
Dana pembinaan kemitraan	2,8	87.990.000	38.062.054
Penyaluran bina lingkungan dan program BUMN Peduli	2,9	685.830.000	184.000.000
Beban pembina dan administrasi umum	2,10	-	59.445.183
Pengembalian Sisa Dana ke BUMN Donatur	2	-	7.100.571.495
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	4d,4e	-	677.446.680
Beban penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah	5c	-	1.112.847.791
TOTAL BEBAN		**773.820.000**	**9.172.373.203**
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		**767.573.467**	**(6.515.680.955)**
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT			
Aset neto terikat - terbebaskan		-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT		**-**	**-**
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO		**767.573.467**	**(6.515.680.955)**
ASET NETO AWAL TAHUN		**13.026.516.553**	**19.542.197.508**
ASET NETO AKHIR TAHUN		**13.794.090.020**	**13.026.516.553**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penyaluran piutang pinjaman		(1.879.310.146)	(525.798.322)
Penurunan setoran yang belum teridentifikasi		-	(165.330.057)
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7	99.364.988	102.927.238
Pendapatan jasa giro	7	134.666.022	171.408.925
Pengembalian sisa dana BUMN Peduli		-	(7.100.571.495)
Dana pembinaan kemitraan	8	(87.990.000)	(38.062.054)
Penyaluran bina lingkungan	9	(685.830.000)	(184.000.000)
Beban pembinaan dan administrasi umum	10	-	(59.445.183)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi		**(2.419.099.136)**	**(7.798.870.948)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pelimpahan dana dari Unit PKBL lain		62.843.121	2.382.356.085
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		**62.843.121**	**2.382.356.085**
PENURUNAN NETO KAS DAN BANK		**(2.356.256.015)**	**(5.416.514.863)**
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		**9.346.623.015**	**14.763.137.878**
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		**6.990.367.000**	**9.346.623.015**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

Pendirian dan informasi umum

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan salah satu kegiatan PTPN VIII sebagai anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpartisipasi untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Pembentukan PKBL berdasarkan:

i. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
ii. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (PERMEN BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagai pengganti PERMEN BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
iii. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan revisi tahun 2012 sebagai pengganti Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007;
iv. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan tanggung jawab sosial di lingkungan BUMN;
v. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
vi. Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI No.SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL 2007.

Mitra binaan PKBL PTPN VIII yang telah disalurkan berjumlah 379 mitra (tidak diaudit) sampai dengan tahun 2016 yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten.

PKBL PTPN VIII beralamat di Jl. Sindangsirna No. 4, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan utama

PKBL PTPN VIII berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah diubah terakhir kali dengan PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 yang kegiatannya meliputi:

i. Program Kemitraan

Menyalurkan dana program kemitraan dalam bentuk:
- Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- Dana pembinaan kemitraan yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

1. UMUM (lanjutan)

Kegiatan utama (lanjutan)

ii. Program Bina Lingkungan

Memberikan bantuan untuk korban bencana alam, untuk pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Sumber dana

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN RI No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, terhitung mulai tahun 2013 sumber dana PKBL berasal dari:

Program Kemitraan

Dana program kemitraan berasal dari:
i. Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba neto tahun sebelumnya (bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba neto);
ii. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba Perusahaan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
iii. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
iv. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program Bina Lingkungan

Dana program bina lingkungan berasal dari :
i. Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba neto tahun sebelumnya (bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba neto);
ii. Saldo dana Program Bina Lingkungan (BL) yang berasal dari penyisihan sebagian laba Perusahaan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
iii. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada.

Susunan pengelola

Pelaksanaan kegiatan operasional PKBL berada di bawah Sekretaris Perusahaan, melekat fungsinya pada Urusan Humas dengan pertanggungjawaban di bawah koordinasi Direktur Sumber Daya Manusia. Pada tanggal 31 Desember 2016, susunan pengelola PKBL PTPN VIII adalah sebagai berikut:

Direktur Manajemen Aset	:	Gunara
Kepala Bagian Hukum dan PKBL	:	Naning Diah Trisnowati
Kepala Urusan	:	Mustaqim
Staf	:	Deni Rohman
		Aos Subandi
		Imaduddin Hakim
		Junis Reinaldy
		Asep

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan konsep akrual dan biaya historis.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan metode langsung (*direct method*).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, serta tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Piutang kepada BUMN Pembina Lain

Piutang kepada BUMN Pembina Lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Piutang kepada BUMN Pembina Lain diakui pada saat terjadi penyerahan dana kepada BUMN penyalur serta dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan kepada BUMN Pembina Lain, setelah dikurangi pengembalian yang telah diterima.

Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman merupakan pinjaman yang disalurkan oleh unit PKBL kepada mitra binaan dan dicatat sebesar nilai neto atau nilai yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

Penyisihan penurunan nilai piutang mitra binaan merupakan penyisihan atas penurunan piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang dihitung berdasarkan evaluasi pengelola PKBL terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Dengan mempertimbangkan karakteristik PKBL, maka penyisihan penurunan nilai piutang dilakukan secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

i. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

ii. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut: (lanjutan)

iii. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

iv. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Penggolongan kualitas pinjaman di atas memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Akuntansi.

Piutang bermasalah

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya *(rescheduling and reconditioning)*, namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman setelah dikurangi alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Angsuran yang belum teridentifikasi

Angsuran yang belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran pinjaman dari mitra binaan yang belum dapat teridentifikasi nama mitra binaannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran yang belum diidentifikasi disajikan sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan.

Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk program BUMN Peduli yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas PKBL, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual, termasuk pendapatan jasa administrasi pinjaman dan pendapatan jasa giro. Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina diakui pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan besarnya alokasi laba untuk PKBL.

Beban diakui dalam laporan aktivitas PKBL, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual, maka beban akan dicatat/diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kas	33.470.214	68.048.128
Bank		
Program Kemitraan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	827.964.523	2.516.229.147
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	441.671.600	913.342.806
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.183.757	5.228.996
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.051.540	2.347.126
PT Bank Syariah Mandiri	581.043	4.126.613
Total Program Kemitraan	1.274.452.463	3.441.274.688
Program Bina Lingkungan		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.666.245.901	5.822.304.594
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.198.422	14.995.605
Total Bina Lingkungan	5.682.444.323	5.837.300.199
Total kas dan bank	**6.990.367.000**	**9.346.623.015**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Total piutang pinjaman mitra binaan	14.034.863.195	11.599.352.686
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(7.202.616.561)	(7.871.265.534)
Piutang pinjaman mitra binaan, neto	**6.832.246.634**	**3.728.087.152**

a. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jawa Barat	14.006.261.395	11.565.471.293
Banten	28.601.800	33.881.393
Sub-total	14.034.863.195	11.599.352.686
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(7.202.616.561)	(7.871.265.534)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	**6.832.246.634**	**3.728.087.152**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor usaha:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Sektor Peternakan	6.653.454.852	4.807.664.298
Sektor Perdagangan	2.780.946.256	2.800.703.858
Sektor Industri	1.540.982.453	1.540.360.870
Sektor Pertanian	1.357.692.000	694.192.000
Sektor Jasa	884.585.050	878.556.850
Sektor Perikanan	579.961.634	640.633.860
Sektor Perkebunan	237.240.950	237.240.950
Sub-total	14.034.863.195	11.599.352.686
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(7.202.616.561)	(7.871.265.534)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	**6.832.246.634**	**3.728.087.152**

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kualitas pinjaman:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Lancar	4.020.880.429	862.883.616
Kurang Lancar	1.208.485.812	1.687.342.545
Diragukan	2.183.631.608	1.582.500.687
Macet	6.621.865.346	7.466.625.838
Sub-total	14.034.863.195	11.599.352.686
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(7.202.616.561)	(7.871.265.534)
Total piutang pinjaman mitra binaan, neto	**6.832.246.634**	**3.728.087.152**

d. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dan beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2016:

Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	Persentase penyisihan	Alokasi Penyisihan		Beban penyisihan
				2016	2015	
Lancar	s.d 30 hari	4.020.880.429	6,82%	274.071.699	75.950.395	198.121.304
Kurang lancar	30 - 180 hari	1.208.485.812	7,64%	92.316.690	168.792.760	(76.476.070)
Diragukan	180 - 270 hari	2.183.631.608	9,82%	214.362.826	159.896.541	54.466.285
Macet	> 270 hari	6.621.865.346	100,00%	6.621.865.346	7.466.625.838	(844.760.492)
Jumlah		**14.034.863.195**		**7.202.616.561**	**7.871.265.534**	**(668.648.973)**

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang dan beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2015:

Kualitas pinjaman	Umur piutang	Saldo piutang	Persentase penyisihan	Alokasi Penyisihan		Beban penyisihan
				2015	2014	
Lancar	s.d 30 hari	862.883.616	8,80%	75.950.395	122.090.877	(46.140.482)
Kurang lancar	30 - 180 hari	1.687.342.545	10,00%	168.792.760	197.710.388	(28.917.628)
Diragukan	180 - 270 hari	1.582.500.687	10,10%	159.896.541	367.815.829	(207.919.288)
Macet	> 270 hari	7.466.625.838	100,00%	7.466.625.838	6.506.201.760	960.424.078
Jumlah		**11.599.352.686**		**7.871.265.534**	**7.193.818.854**	**677.446.680**

e. Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo awal	7.871.265.534	7.193.818.854
Penambahan/(Pengurangan)	(668.648.973)	677.446.680
Saldo akhir	**7.202.616.561**	**7.871.265.534**

5. PIUTANG BERMASALAH

a. Rincian piutang bermasalah berdasarkan wilayah:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jawa Barat	9.717.528.388	9.121.493.578
Banten	268.416.190	1.302.151.000
Sub-total	**9.985.944.578**	10.423.644.578
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah	(9.985.944.578)	(10.423.644.578)
Total piutang bermasalah, neto	-	-

5. PIUTANG BERMASALAH (lanjutan)

b. Rincian piutang bermasalah berdasarkan sektor usaha:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Sektor perdagangan	5.239.247.663	5.299.255.163
Sektor peternakan	1.725.158.146	909.718.336
Sektor jasa	1.136.355.964	1.456.919.964
Sektor industri	1.036.254.686	1.144.425.996
Sektor pertanian	410.732.653	1.034.157.653
Sektor perkebunan	206.555.173	295.474.173
Sektor perikanan	186.511.944	238.564.944
Lain-lain (masing-masing < Rp. 100 juta)	45.128.349	45.128.349
Sub-total	9.985.944.578	10.423.644.578
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah	(9.985.944.578)	(10.423.644.578)
Total piutang bermasalah, neto	**-**	**-**

c. Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo awal	10.423.644.578	9.310.796.787
Penambahan/(Pengurangan)	(437.700.000)	1.112.847.791
Saldo akhir	**9.985.944.578**	**10.423.644.578**

6. ASET NETO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	13.026.516.553	19.542.197.508
Kenaikan/(Penurunan)	767.573.467	(6.515.680.955)
Saldo akhir	13.794.090.020	13.026.516.553
Aset neto terikat		
Saldo awal	-	-
Kenaikan/(Penurunan)	-	-
Saldo akhir	-	-
Total aset neto	**13.794.090.020**	**13.026.516.553**

7. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Total
Alokasi laba dari BUMN Pembina	69.085.182	69.085.182	138.170.364
Pelimpahan dana dari Unit PKBL lain	-	62.843.120	62.843.120
Jasa administrasi pinjaman	99.364.988	-	99.364.988
Jasa giro	37.630.201	97.035.821	134.666.022
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	668.648.973	-	668.648.973
Pemulihan penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah	437.700.000	-	437.700.000
Total	**1.312.429.344**	**228.964.123**	**1.541.393.467**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015		
	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Total
Pelimpahan dana dari Unit PKBL lain	-	2.382.356.085	2.382.356.085
Jasa administrasi pinjaman	102.927.238	-	102.927.238
Jasa giro	64.412.983	106.995.942	171.408.925
Total	**167.340.221**	**2.489.352.027**	**2.656.692.248**

8. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

Dana pembinaan kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah pameran sebesar Rp87.990.000 (2015: Rp38.062.054).

9. PENYALURAN BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana untuk Program Bina Lingkungan dapat dirinci sebagai berikut:

	2016	2015
Pengembangan sarana dan prasarana	250.000.000	63.000.000
Bantuan sosial kemasyarakatan	170.000.000	
Bantuan sarana pendidikan	142.330.000	-
Bantuan bencana alam	85.000.000	10.000.000
Bantuan sarana ibadah	35.000.000	111.000.000
Bantuan sarana kesehatan	3.000.000	
Bantuan pelestarian lingkungan	500.000	-
Total	**685.830.000**	**184.000.000**

10. BEBAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI UMUM

	2016	2015
Beban administrasi umum	-	35.855.183
Beban pembinaan untuk Program Kemitraan	-	23.590.000
Total	**-**	**59.445.183**

11. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola PKBL PTPN VIII pada tanggal 28 Februari 2017.

PT Perkebunan Nusantara VIII

Laporan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian intern 31 Desember 2016

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Daftar Isi

Halaman

Laporan Auditor Independen

Lampiran A

1. Temuan tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti
   Keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak..... 1-2
2. Temuan tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti
   Perusahaan belum melakukan pembayaran atas investasi penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi..... 3

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3142/PSS/2017

Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara VIII

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII (Perusahaan) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami No. RPC-3141/PSS/2017 pada tanggal 28 Februari 2017.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi Perusahaan merupakan tanggung jawab Manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan terhadap pasal-pasal tertentu, hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Perusahaan mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Perusahaan tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan disertai saran perbaikannya yang kami uraikan pada lampiran berikut ini. Kami juga memuat tanggapan dari Manajemen Perusahaan. Kami juga melaporkan temuan tahun lalu yang telah dan belum ditindaklanjuti oleh Manajemen Perusahaan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Manajemen dan Dewan Komisaris.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Tia Adityasih
Partner
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0029

28 Februari 2017

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

1. Temuan tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

Keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak

- **Kondisi**

Terdapat keterlambatan pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan 23. Keterlambatan pelaporan atas PPh 21 dan 23 terjadi pada kebun dan/atau unit berikut ini (dengan catatan pemeriksaan atas kebun dan/atau unit pada tahun ini dilakukan secara sampel acak):

Nama Kebun	Keterlambatan atas PPh	
Kantor Pusat	-	Pasal 23
Wangunreja	Pasal 21	Pasal 23
Batulawang	Pasal 21	Pasal 23
Pasirnangka	-	Pasal 23
Kertamanah	Pasal 21	Pasal 23
Miramare	Pasal 21	Pasal 23
Malabar	Pasal 21	Pasal 23
Rancabali	-	Pasal 23
Purbasari	Pasal 21	-

Selain itu, terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengurusan penyetoran dan pelaporan atas PPN dilakukan seluruhnya oleh Kantor Pusat. Keterlambatan penyetoran dan pelaporan atas PPN adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
Januari	27-May-16	14-Jun-16
Februari	26-Jul-16	4-Aug-16
Maret	31-Aug-16	8-Sep-16
April	31-Oct-16	31-Oct-16
Mei	25-Jan-17	25-Jan-17
Juni	14-Sep-16	14-Sep-16
Juli	15-Nov-16	15-Nov-16
Agustus	10-Oct-16	12-Oct-16
September	15-Nov-16	15-Nov-16
Oktober	27-Dec-16	27-Dec-16
November	12-Jan-17	12-Jan-17

- **Kriteria**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014, penyetoran PPh 21 dan 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sedangkan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pasal 2A, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN disampaikan.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Pasal 1 (25) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

1. Temuan tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti (lanjutan)

Keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak (lanjutan)

- **Kriteria (lanjutan)**

  Pasal 3A (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecuali pengusaha kecil yang batasannnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

  Pasal 15A (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

- **Sebab**

  Kurangnya pemantauan terhadap penyetoran dan pelaporan atas PPh dan PPN, agar dapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

- **Akibat**

  Ketidaktaatan pada peraturan perpajakan yang berlaku dapat berakibat adanya sanksi berupa bunga dan denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan.

- **Saran**

  Kami menyarankan agar Manajemen melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyetoran dan pelaporan tepat waktu agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk menghindari timbulnya masalah sanksi perpajakan, berupa bunga dan denda atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan.

- **Tanggapan Manajemen**

  Pelaporan masih terdapat keterlambatan karena adanya kelalaian petugas pajak di kebun. Untuk mengatasi keterlambatan pelaporan mulai masa November 2016 pelaporan PPh telah disentralisasi di Kantor Pusat.

2. Temuan tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti

Perusahaan belum melakukan pembayaran atas investasi penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi

Temuan ini sudah ditindaklanjuti oleh Manajemen Perusahaan.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
LAPORAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

Daftar Isi

Halaman

Laporan Auditor Independen

Lampiran B

1. Pembayaran ganda atas utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kebun Cianten tahun 2015 1

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3143/PSS/2017

Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara VIII

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara VIII (Perusahaan) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami No. RPC-3141/PSS/2017 pada tanggal 28 Februari 2017.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standard Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Dalam perencanaan dar pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak Manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada Manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi Manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektifitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini:

- Lingkungan Pengendalian
- Penaksiran Risiko
- Aktivitas Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3143/PSS/2017(lanjutan)

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dergan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun, kami mencata: masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami uraikan pada lampiran berikut ini. Kami juga memuat tanggapan dari Manajemen Perusahaan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Manajemen dan Dewan Komisaris.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Tia Adityasih
Partner
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0029

28 Februari 2017

1. Pembayaran ganda atas utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kebun Cianten tahun 2015

- **Kondisi**

  Atas utang PBB Kebun Cianten tahun 2015 senilai Rp296.062.196, pelunasan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari lebih bayar PPh Badan tahun 2014, namun Perusahaan juga melakukan pembayaran dengan cara tunai atas utang PBB tersebut.

- **Kriteria**

  Berdasarkan Surat Edaran No. SE/I.1/1414/XI/2011, tanggal 3 November 2011, perihal Prosedur Pembuatan dan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), ketentuan umum butir nomor:
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat dan diterbitkan oleh Bagian Teknis Pemakai (*user*) meliputi Bagian-bagian di Kantor Pusat, Grup dan Unit Usaha Non Kebun.
  5. SPP beserta dokumen pendukung disampaikan terlebih dahulu ke Bagian Akuntansi cq Urusan Verifikasi dan Aktiva Tetap untuk dilakukan verifikasi, baik dari segi kelengkapan dokumen, keakuratan perhitungan, pencantuman kode rekening dan kesesuaian lainnya sesuai denga ketentuan yang berlaku.

- **Sebab**

  Kurangnya pemahaman dan koordinasi bidang perpajakan ketika terjadi lebih bayar, disatu sisi atas kelebihan pajak penghasilan telah diajukan dan dimohonkan untuk dapat dikompensasikan ke utang PBB tahun 2015, tapi dilain pihak utang PBB tersebut langsung dibayar tunai tanpa melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu.

- **Akibat**

  Perusahaan dirugikan secara arus kas, dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

- **Saran**

  Kami menyarankan agar Manajemen dapat meningkatkan pengendalian internal dalam hal pembayaran-pambayaran pajak yang akan dilakukan.

- **Tanggapan Manajemen**

  Atas terjadinya pembayaran ganda tersebut akan diusulkan untuk diperhitungkan dengan kewajiban pajak yang lainnya.